

ANALISA NOTIFIKASI DALAM KERANGKA MODALITAS PERJANJIAN PERTANIAN WTO

Budiman Hutabarat
Saktyanu K. Dermoredjo
Helena J. Purba
Erna Maria Lokollo
Wahida

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>



PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2007



Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Analisa notifikasi dalam kerangka modalitas
perjanjian pertanian WTO / Budimanta Hutabarat
... [et al.]. -- Bogor : Pusat Analisis
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2008.
..... hlm. ; 24 cm.

ISBN : 978-979-3566-61-0

1. Ekonomi pertanian. I. Budiman
Hutabarat

338.1

Dewan Editor :

Pantjar Simatupang
Bonar Sinaga
Kedi Suradisastra
Yusmichad Yusdja
Felix Sitorus
Mahyudin Syam

Desain dan Tata Letak :

Agus Suwito

Diterbitkan oleh :

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor
Telp. : (0251) – 333964
Fax. : (0251) – 314496
E-mail : caser@indosat.net.id, publikasi_psekp@yahoo.co.id
Website : <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>

ISBN : No. 978-979-3566-61-0

Hak Cipta pada penulis. Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT

Sejak tahun 2005, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), telah menerbitkan Buku Tematik yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Terbaik Tahun Anggaran sebelumnya. Buku Tematik diharapkan dapat dibaca oleh khalayak yang lebih luas, sehingga dari sisi format dan sistematika penulisan telah disesuaikan dengan keragaman pembacanya agar lebih mudah dipahami. Untuk maksud tersebut, dibentuk Dewan Editor yang terdiri atas beberapa orang pakar yang kompeten dalam bidang keredaksian dan publikasi ilmiah dari Badan Litbang Pertanian maupun Institut Pertanian Bogor.

Buku “Analisa Notifikasi Dalam Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO” merupakan hasil Laporan Penelitian Terbaik peringkat 1 tahun 2006. Buku ini berisi kajian kritis tentang pokok-pokok perundingan pertanian yang berlangsung dan kemudian mengembangkan analisis skenario arah usulan-usulan perundingan yang ada serta melihat dampaknya terhadap pertanian nasional. Agar mampu menilai dan menjustifikasi jalannya perundingan, jenis keputusan dan kesepakatan yang akan diambil bahkan diusulkan, Indonesia memerlukan adanya pengkajian dan analisis secara komprehensif tentang berbagai isu yang dikemukakan di atas. Selain itu, Indonesia sebagai koordinator Kelompok Negara/G-33 sangat berkepentingan pada terwujudnya modalitas-modalitas agar tujuan pembangunan pertanian di masing-masing anggota sesuai dengan harapan masyarakat.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Editor, penulis, dan semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Diharapkan penerbitan buku ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah maupun untuk menambah kekayaan wawasan tentang topik yang terkait dengan perdagangan internasional.

Bogor, Agustus 2007

Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto

NIP. 080 035 289

KATA PENGANTAR EDITOR

Upaya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) untuk mendokumentasikan hasil penelitian terbaiknya dalam wujud buku tematik patut mendapat apresiasi dan dukungan. Sebagai lembaga yang menggeluti bidang penelitian, penerbitan buku ini diharapkan dapat memacu semangat para peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil karyanya, membangkitkan gairah kompetisi yang sehat, sekaligus sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP kepada para pengguna.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, tugas utama Dewan Editor adalah membantu dalam memperbaiki format, tampilan, dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh beragam kalangan pembaca. Dewan Editor tidak terlalu memberi penekanan pada perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, tetapi hanya memberikan saran dan masukan yang konstruktif agar tulisan lebih terarah dan berbobot. Diakui bahwa tidak semua saran mampu diakomodasi oleh Tim Penulis, akibat kendala yang bersifat teknis maupun non teknis. Walaupun demikian, upaya untuk mewujudkan sebuah karya buku tematik yang terbaik telah secara maksimal dilakukan.

Dewan Editor mengucapkan terima kasih kepada kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Dewan Editor untuk mengedit buku ini. Dewan Editor mengakui bahwa hasil akhir buku ini masih jauh dari sempurna. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk perbaikan buku tematik di masa mendatang. Kepada Tim Penulis, Dewan Editor juga menyampaikan apresiasi atas jerih payah dan kerja keras untuk memperbaiki tulisannya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi para pengambil kebijakan dan juru runding kesepakatan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia dalam merumuskan posisi dan strategi negosiasi yang efektif untuk mewujudkan kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan/kesejahteraan petani maupun masyarakat umum, menjaga martabat negara Indonesia, serta memelihara ketertiban perdagangan dunia

Editor

EXTENDED ABSTRACT

Negotiation in agriculture evolves around three main issues, namely domestic support (DS), export promotion or subsidy (EP or ES), and market access (MA). The three aspects become the pillars of multilateral trade negotiations on agriculture that are being discussed intensively in various sessions of World Trade Organization/WTO. Until today Special Session of Committee on Agriculture has not come up with agreement on modalities for Agreement on Agriculture/AoA) that would be used as reference for further agricultural negotiations.

For each negotiation pillar, there have been many modalities proposed by country, group or coalition of country members of WTO, from either high-industrialized countries/DDC or developing world/DGC, but all modalities have not been satisfactory, especially to DGC. As a consequence of being DGC member and G-33 Coordinator, Indonesia initiates to undertake a study on the development dynamic of the WTO agricultural negotiation in order to evaluate its characteristics and contributions to Indonesia. Chapter II contains a critical review on the Uruguay agreement implementation and followed by Chapter III which describes specifically on the development of the Doha Round. Ex-ante analysis on various modalities proposals submitted to the agricultural negotiation until the end of 2006 is investigated in Chapter IV. The subsequent chapter, Chapter V presents the concluding remarks of the book.

As far as negotiation issue is concerned, in many ways DGC position is in unequal balance with DDC as shown by the level of DS and ES. Until today DGC have not received benefits from their engagement in AoA, due to unbalanced level of playing field. Through the implementation of existing agreements, DGC have been expecting that DDC would reduce their domestic protection in the forms of DS, ES and tariff escalation to enable DGC to reap the more open market in DDC but in reality this does not materialize.

Some modalities related to DS that have been introduced are Total Aggregate Measurement of Support/AMS, Blue Box/BB, Green Box/GB and Export Competition or Export Subsidy. AMS is the annual level of support to an agricultural product given to its farmers. BB is a type of DS provided by a government to limit production of a particular crop, GB is a type of subsidy that is not trade-distorting or less trade-distorting. ES is provided by a government to enhance the competitiveness of export product. It can either be in direct (trade-distorting) form or institutional relationships such as food aid, export credit and state trading exporting enterprises. Export tax, export promotion and other activities related to expansion of export can also be classified as ES.

For DGC, particularly Indonesia all scenarios of DS reduction in DDC lead to the improvement in the trade balance, meaning that the

export values are in excess of the import values. The same is true for G-33. The scenarios also show that the DS reduction in DDC bring about declining on GDP in DGC, albeit in trivial percentages, 0.0033 for Indonesia and 0.0186 percent for G-33. The impact of DS cut in DDC on the welfare of countries is mixed. For Japanese and Korean, their welfares are declining but for US, EU and the Other DDC theirs are improving. Meanwhile in DGC, especially Indonesia and G-33, their welfares are worsening amounting to 18 million to 28 million US dollars in Indonesia and 460 million to 646 million US dollars in G-33 countries.

Based on scenarios implemented, it is found that the impact of ES reduction in DDC on balance of trades among countries is also mixed. For EU, the ES reduction leads to the improvement on balance of trade, even though commodity production and prices are declining. The same is true in DGC, in particular Indonesia. On GDP, the impact of ES reduction varies. For EU, GDP improves while for the Other DDC GDPs and DGC GDPs, Indonesia and G-33 included, GDP worsenis. However its impact on Indonesia's GDP is trivial, only around 0.0097 percent.

In line with the consequences on GDP above, the reduction on ES in DDC results in significance improvement in the welfare of EU citizens, between 13 billion to 25 billion US dollars, but it leads to the worsening in the welfare of those of Other DDC such as US, Japan and Korea. Those of DGC, Indonesia and G-33 citizens are also deteriorating around 135 million US dollars in Indonesia and 1,748 million US dollars in G-33. It means for Indonesia, it amounts to Rap. 1,2 trillions (at US\$ 1.00 = Rp. 9,000) or only Rp. 5,100 or less than US\$ 1.00 per capita, while prices, domestic production, the use of production factors, balance of trade and household demand for domestic agricultural production are increasing in the short run. It would be able to give a signal that Indonesian agricultural economy could run to a process of accelerating multiplier effect, particularly in rural areas.

Under market access pillar, up to this moment several modalities for cutting bound tariff have been proposed as required by the agreement. Until July 2004 as stipulated under July 2004 Framework, three proposals have been documented, namely: 1) Harbinson Method/Uruguay Formula, 2) Swiss Formula, and 3) Tiered Formula. These formulas then have been implemented to come up with modalities that have been proposed by countries, group or coalition of countries, upon which the name is known: (1) G-20 proposal, (2) Australia proposal, (3) US proposal, (4) UE proposal, (5) ACP country proposal and (6) New Zealand proposal, submitted in Vevey, Switzerland in November 2006. If all proposals compared, ACP proposal is among the best for Indonesia and also G-33 to agree upon.

All scenarios of tariff reduction show that household incomes in Indonesia and the Other DDC would improve, while those of in other regions, including G-33 would decline. The rate of growth of household income in Indonesia is less than those of household in the Other DDC. The improvement in income is accompanied by the improvement in GDPs in

Indonesia and the Other DDC with almost the same rate. But, the scenarios show that if tariffs are cut at the same time in all regions, the welfare of citizens in all countries and regions would increase, except those of the US.

All scenarios implemented in the analysis lead to the conclusion that production of commodities that are currently lagging behind, such as soybeans and milk and its processed products would accelerate, while production of commodities that are currently growing would be more responsive to the reduction of ES than of DS. It means that the government, private sector and members of the society have to exert their efforts to bring Indonesia to have strong, competitive and efficient production system of soybeans and milk. For that system materialize research and upper and down stream agricultural infrastructure support for these commodities should be developed.

Many local governments have not followed closely to the development of international trade policies. Rudimentary terms in the international trade negotiations are still unfamiliar to them. Considering that local government administrators are the implementing officers of national policies in their regions it is imperative to diffuse of the international trade policies to them in a workshop. By so doing, their awareness to the national policies and its impact to their people in the region could be thoroughly considered. In addition, local administrators at district and provincial level could be involved in delivering advocacy of the people involved in agriculture in their areas.

RINGKASAN

Perundingan di bidang pertanian meliputi tiga isu utama, yaitu bantuan atau subsidi domestik (*domestic support/DS*), promosi atau subsidi ekspor (*export promotion or subsidy/EP or ES*), dan akses pasar (*market access/MA*). Ketiga aspek tersebut menjadi pilar perundingan bidang pertanian yang secara intensif dibahas berbagai sidang Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Sampai saat ini Sidang Khusus Komisi Pertanian WTO belum berhasil merumuskan kesepakatan modalitas bagi Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*) sebagai acuan perundingan pertanian ke depan.

Sampai saat ini modalitas bagi setiap pilar perundingan pertanian telah banyak yang diusulkan negara, kelompok atau koalisi negara-negara anggota WTO, dari negara maju atau negara berkembang. Namun, semua modalitas ini belum memuaskan terutama bagi negara berkembang. Untuk itu Indonesia sebagai anggota negara berkembang dan Koordinator G-33 perlu melakukan kajian tentang dinamika perkembangan perundingan pertanian WTO untuk menilai sifat dan daya guna mereka bagi Indonesia. Pada Bab II dilakukan kaji ulang tentang pelaksanaan kesepakatan Uruguay dan dilanjutkan oleh Bab III yang memuat perkembangan Putaran Doha. Analisis *ex-ante* skenario berbagai usulan yang disampaikan dalam perundingan pertanian sampai menjelang akhir tahun 2006 dibahas dalam Bab IV, yang kemudian ditutup dalam rangkuman di Bab V.

Dalam banyak hal, posisi negara berkembang tidak seimbang dengan negara maju dilihat dari tingkat nominal bantuan domestik maupun subsidi ekspor dan sampai sejauh ini negara berkembang belum memperoleh manfaat yang berarti dari keikutsertaannya dalam perjanjian pertanian, karena *playing field* yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Sebenarnya dengan implementasi Perjanjian Pertanian-WTO diharapkan bahwa negara maju dapat mengurangi proteksi domestiknya yang sangat tinggi dalam berbagai mekanisme bantuan domestik, subsidi ekspor dan eskalasi tarif, sehingga dengan demikian negara berkembang dapat memanfaatkan peluang akses pasar yang tercipta. Namun kenyataannya tidaklah demikian yang terjadi.

Modalitas-modalitas yang telah diperkenalkan antara lain berkaitan dengan *Total Aggregate Measurement of Support/AMS*, Kotak Biru (*Blue Box/BB*), Kotak Hijau (*Green Box/GB*) dan Persaingan atau Subsidi Ekspor (*Export Competition* atau *Export Subsidy*). *AMS* adalah tingkat bantuan per tahun yang diberikan pada suatu produk pertanian yang menguntungkan atau berpihak kepada petani secara umum. Kotak biru adalah bantuan domestik yang diberikan pemerintah untuk produk-produk yang terkait dengan program pembatasan jumlah produksi. Kotak hijau merupakan subsidi yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada,

sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi ekspor adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk ekspor atau suatu produk agar dapat diekspor yang tidak saja bersifat langsung (mendistorsi perdagangan), tetapi juga berupa hubungan kelembagaan, seperti *food aid* (bantuan pangan), kredit ekspor dan *state trading exporting enterprises*. Selain itu pajak ekspor, kegiatan promosi ekspor dan kegiatan lainnya dapat pula dikategorikan sebagai subsidi ekspor.

Bagi negara berkembang, terutama Indonesia seluruh skenario pemotongan bantuan domestik di negara maju memberikan neraca perdagangan positif. Artinya, nilai ekspornya masih jauh lebih besar dibanding nilai impornya. Demikian pula negara berkembang lainnya seperti G-33 juga menghasilkan neraca perdagangan positif. Skenario juga menunjukkan bahwa pemotongan bantuan domestik di negara maju menyebabkan Produk Domestik Bruto/PDB di negara berkembang mengalami penurunan, tetapi dengan persentase yang kecil sekali. Untuk Indonesia dan G-33 masing-masing sebesar 0,0033 dan 0,0186 persen.

Dampak pemotongan bantuan domestik di negara maju terhadap kesejahteraan negara-negara yang terlibat perdagangan menunjukkan hasil yang seiring dengan indikator PDB, dimana tingkat kesejahteraan di Jepang dan Korea menurun, tetapi di negara maju lain seperti AS, UE dan negara maju lainnya tetap meningkat. Sementara itu di negara berkembang, terutama Indonesia dan G-33, pemotongan bantuan domestik di negara maju ini justru menyebabkan penurunan kesejahteraan, yaitu sebesar 18-28 juta dolar AS di Indonesia dan 460-646 juta dolar AS di G-33.

Dampak pemotongan subsidi ekspor di negara maju terhadap neraca perdagangan di berbagai negara atau kelompok negara tidaklah searah. Bagi UE, pemotongan ini menyebabkan neraca perdagangannya meningkat, meskipun produksi dan harga beberapa komoditas menurun. Hal yang sama dirasakan negara berkembang, terutama Indonesia. Terhadap PDB, dampak pemotongan subsidi ekspor di negara maju di berbagai negara atau kelompok negara memberi dampak yang juga tidak seragam. Bagi UE pemotongan subsidi ekspor (dengan ke tiga skenario) menyebabkan peningkatan PDB, sementara bagi negara maju lainnya serta negara berkembang seperti Indonesia dan G-33, pemotongan ini menyebabkan penurunan PDB, walaupun tingkat penurunan PDB Indonesia relatif sangat kecil, sekitar 0,0097%.

Sejalan dengan dampak terhadap PDB di atas, pemotongan subsidi ekspor di negara maju menyebabkan kesejahteraan negara-negara UE meningkat sangat menyolok, antara 13 milyar dan 25 milyar dolar AS, sedangkan negara maju lainnya seperti AS, Jepang dan Korea mengalami penurunan kesejahteraan. Hal yang sama terlihat bagi negara berkembang, terutama Indonesia dan G-33, dimana penghapusan subsidi ekspor di negara maju menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing menurun sebesar 135 juta dolar AS dan 1,748 juta dolar

AS. Untuk Indonesia sendiri penghapusan (pemotongan 100%) subsidi ekspor di negara maju menurunkan tingkat kesejahteraan sebesar 135 juta dolar AS atau setara Rp 1,2 triliun (pada nilai tukar Rp 9,000 per satu dolar AS). Ini berarti, kesejahteraan rata-rata penduduk Indonesia menurun sekitar hanya Rp 5,100 per orang atau kurang dari satu dolar AS, sementara harga, produksi domestik, penggunaan sumber daya alam dan neraca perdagangan serta permintaan rumah tangga atas produk pertanian domestik meningkat dalam jangka pendek. Ini menandakan bahwa ekonomi pertanian Indonesia mengalami proses yang dapat meningkatkan pengaruh berganda (*multiplier effect*), terutama di pedesaan.

Dalam pilar akses pasar, sampai kini telah banyak usulan modalitas penurunan tarif terikat (*bound tariff*) yang menjadi implementasi kesepakatan dan sampai saat tercapainya kesepakatan di bulan Juli 2004 yang tertuang dalam paket Juli 2004 tercatat ada tiga macam usulan, yaitu: 1) Metoda Harbinson/Rumus Uruguay, 2) Rumus Swiss (*Swiss Formula*), dan 3) Rumus Berjenjang (*Tiered Formula*). Sementara itu sejak Juli 2004 rumus-rumus tersebut mulai diimplementasikan melalui usulan-usulan yang dikenal dengan: (1) Usulan G-20, (2) Usulan Australia, (3) Usulan Amerika Serikat, (4) Usulan Uni Eropa/UE, (5) Usulan negara-negara ACP dan (6) Usulan Selandia Baru yang disampaikan di Vevey, Swiss bulan November 2006. Apabila usulan-usulan ini diperbandingkan, maka usulan Kelompok ACP adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga G-33 untuk disetujui.

Semua skenario pemotongan tarif menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di Indonesia dan negara maju lain akan meningkat, sementara di wilayah yang lain, termasuk kelompok G-33 akan menurun. Laju peningkatan pendapatan rumah tangga di Indonesia lebih rendah daripada di kelompok negara maju lain. Peningkatan pendapatan rumah tangga di Indonesia dan negara maju Lain ini juga diikuti oleh peningkatan PDB di Indonesia dan negara maju lain tersebut dan laju persentase peningkatan pendapatan dan PDB hampir sama. Namun, analisis menunjukkan bahwa pemotongan tarif secara bersamaan menyebabkan kesejahteraan di semua negara atau wilayah yang dianalisis meningkat, kecuali bagi AS.

Seluruh skenario yang dianalisis bermuara pada kesimpulan bahwa produksi komoditas-komoditas yang saat ini masih lambat perkembangannya akan mengalami peningkatan, yakni antara lain Kedelai dan Susu dan Olahannya, sementara cakupan/spektrum komoditas yang produksinya meningkat lebih banyak ditawarkan oleh kebijakan pemotongan subsidi ekspor daripada pemotongan bantuan domestik. Artinya, fihak pemerintah, swasta dan masyarakat harus berupaya sedemikian rupa agar Indonesia dapat memiliki sistem pertanian Kedelai dan Susu yang kuat, kompetitif dan efisien. Untuk itu diperlukan antara lain dukungan penelitian, pembangunan sarana dan prasarana pertanian di sektor hulu dan hilir komoditas ini.

Berbagai Pemerintah Daerah masih belum memahami perkembangan kebijakan perdagangan internasional. Istilah-istilah yang paling mendasar sekalipun belum mereka fahami. Mengingat aparat pemerintah di daerahlah pelaksana kebijakan nasional di wilayahnya, sehingga diperlukan upaya sosialisasi kebijakan perdagangan internasional agar pemahaman mereka semakin meningkat dan mereka juga dapat berperan dalam memberikan advokasi kepada pelaku sektor pertanian di daerah.

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT	i
KATA PENGANTAR EDITOR	ii
EXTENDED ABSTRACT	iii
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISTILAH	xvi
I. PENDAHULUAN	1
II. KAJI ULANG PELAKSANAAN KESEPAKATAN PUTARAN URUGUAY	5
2.1. Bantuan Domestik	5
2.1.1. Perbandingan Antar Negara	5
2.1.2. Pelaksanaan di Beberapa Daerah di Indonesia ...	8
2.2. Persaingan Ekspor	15
2.3. Tarif	18
2.3.1. Profil Tarif Batas (<i>Bound Tariff</i>) di Negara-negara G-33	18
2.3.2. Penjenjangan Tarif Batas (<i>Bound Tariff</i>)	21
III. PERKEMBANGAN MUTAKHIR PERUNDINGAN PUTARAN DOHA	34
3.1. Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong	34
3.2. Modalitas	36
3.2.1. Total Bantuan Agregat (<i>Total Agregate Measurement of Support</i>)	36
3.2.2. Kotak Biru (<i>Blue Box</i>)	40
3.2.3. Kotak Hijau (<i>Green Box</i>)	44
3.2.4. Kebijakan Penentuan dan Pendisiplinan Modalitas Persaingan Ekspor (<i>Export Competition</i>) Atau Subsidi Eskpor (<i>Export Subsidy</i>)	53
3.3. Tindak Lanjut Pasar Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong	59
IV. ANALISIS SKENARIO PROPOSAL PERUNDINGAN	61
4.1. Metode Analisis	61

4.2. Basis Data Matriks Aliran Perdagangan	66
4.3. Bantuan Domestik	71
4.3.1. Dampak terhadap Harga Komoditas Pertanian	72
4.3.2. Dampak terhadap Impor	78
4.3.3. Dampak terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia	84
4.3.4. Dampak terhadap Keluaran/Produksi	88
4.3.5. Dampak terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia	88
4.3.6. Dampak terhadap Neraca Perdagangan dan PDB	94
4.3.7. Dampak terhadap Kesejahteraan	97
4.4. Persamaan Ekspor	98
4.4.1. Dampak terhadap Harga Komoditas Pertanian ...	99
4.4.2. Dampak terhadap Impor	103
4.4.3. Dampak terhadap Permintaan Rumah Tangga di Indonesia	103
4.4.4. Dampak terhadap Keluaran/Produksi	109
4.4.5. Dampak terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia	113
4.4.6. Dampak terhadap Neraca Perdagangan	115
4.4.7. Dampak terhadap Kesejahteraan	117
4.5. Penurunan Tarif	118
4.5.1. Usulan Penurunan Tarif	118
4.5.2. Konfigurasi Tarif Baru Menurut Skenario	121
4.5.3. Dampak Beberapa Usulan Skema Pemotongan Tarif Berlaku (<i>Applied Tariff</i>) Bagi Indonesia dan dan G-33	130
V. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	138
5.1. Rangkuman	138
5.2. Implikasi Kebijakan	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN	148

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Tingkat Bantuan Domestik (Subsidi Keluaran), Awal Sebelum Simulasi Tiap Komoditas di Setiap Negara	6
2.2. Perkembangan Bantuan Domestik Uni Eropa dari tahun 1995 – 1999.....	7
2.3. Perkembangan Bantuan Domestik Amerika Serikat dari tahun 1995 – 1999.....	7
2.4. Perkembangan Bantuan Domestik Jepang dari tahun 1995 – 1999.....	7
2.5. Subsidi Ekspor Beberapa Negara Maju tahun 1995–2000	16
2.6. Tingkat Subsidi Ekspor, Awal Sebelum Simulasi Tiap Komoditas di Setiap Negara.....	17
2.7. Rataan Pos Tarif Batas / <i>Bound</i> pada G-33	19
2.8. Lima Negara dengan Jumlah Pos Tarif Batas Terbanyak pada G-33.....	19
2.9. Lima Kelompok Komoditas (<i>Chapter</i>) dengan Jumlah Pos Tarif Batas Terbanyak pada G-33	20
2.10. Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan G-20	22
2.11. Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terikat Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan G-20	22
2.12. Kelompok Komoditas di Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan G-20.....	23
2.13. Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS	25
2.14. Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS	26
2.15. Kelompok Komoditas di Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS.....	27

2.16.	Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan Negara-negara ACP	28
2.17.	Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Negara-negara ACP	29
2.18.	Kelompok Komoditas Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan Negara-negara ACP	30
2.19.	Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan Selandia Baru	31
2.20.	Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Selandia Baru	32
2.21.	Kelompok Komoditas Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan Selandia Baru	33
3.1.	Tingkat Pemotongan Negosiasi dan Perhitungan AMS	37
3.2.	Perkembangan Kotak Hijau Uni Eropa, Amerika Serikat dan Indonesia, 1995-2001	48
3.3.	Penggunaan Subsidi Ekspor	57
3.4.	Notifikasi Subsidi Ekspor per Komoditas	58
4.1.	Skenario Pemotongan Bantuan Domestik	63
4.2.	Provinsi Tujuan Penelitian dan Komoditas	65
4.3.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Beras	66
4.4.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Biji-bijian Mengandung Minyak (Kedelai)	67
4.5.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan (Sayuran dan Kelapa (segar/kering))	68
4.6.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Ternak Hidup dan Dagingnya (dari Sapi, Kambing, Domba dan Kuda atau Ruminansia/sapi)	69
4.7.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Pertanian lainnya (Pala dan Vanili)	70

4.8.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Minyak Nabati (kelapa (kopra), dan kedelai (minyak)).....	70
4.9.	Peta Aliran Perdagangan Komoditas Makanan Olahan (kakao).....	71
4.10.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik Negara Maju terhadap Harga Pasar Komoditas	73
4.11.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik Negara Maju terhadap Impor.....	79
4.12.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia	85
4.13.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia untuk Produk Pertanian Domestik.....	86
4.14.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia untuk Produk Pertanian Impor	87
4.15.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Produksi Komoditas.....	89
4.16.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia.....	95
4.17.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Neraca Perdagangan	96
4.18.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap PDB di Masing-masing Negara/Agregasi Negara	97
4.19.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Tingkat Kesejahteraan di Masing-masing Negara/ Agregasi Negara	98
4.20.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Harga Pasar Komoditas.....	100
4.21.	Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Impor	104
4.22.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia.....	105

4.23.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Permintaan Rumah Tangga Atas Barang Domestik	108
4.24.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Permintaan Rumah Tangga Atas Barang Impor	109
4.25.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Produksi Menurut Agregat Komoditas	110
4.26.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Domestik terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia	114
4.27.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Neraca Perdagangan Negara/Agregasi Negara	116
4.28.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Domestik Ekspor terhadap PDB di Masing-Masing Negara/Agregasi Negara	116
4.29.	Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Masing-masing Negara/Agregasi Negara	117
4.30.	Perbandingan Hasil Skenario Penurunan Tarif menurut Beberapa Usulan Penjenjangan Tarif, Desember 2006	123
4.31.	Dampak Pemotongan Tarif terhadap Produksi Komoditas Pertanian dari Beberapa Usulan	131
4.32.	Dampak Pemotongan Tarif terhadap Permintaan Masukan Produksi Komoditas Pertanian Indonesia	134
4.33.	Dampak Pemotongan Tarif dari Beberapa Usulan terhadap Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia dan G-33	136
4.34.	Dampak Pemotongan Tarif dari Beberapa Usulan terhadap Pendapatan dan Tingkat Kejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara/Kelompok Negara dan Wilayah	136

DAFTAR ISTILAH

ACP	= African, Caribbean, and Pacific Countries
ABARE	= Australian Bureau of Ariculture and Resource Economics
AMS	= Aggregate Measurement Support
AoA	= Agreement on Agriculture
AS	= Amerika Serikat
CAP	= Common Agricultural Policy
CoA	= Committe on Agriculture
DELRI	= Delegasi Republik Indonesia
GDP	= Gross Domestic Product
GTAP	= Global Trade Analysis
G – 10	= Kelompok 10
G – 20	= Kelompok 20
G – 33	= Kelompok 33
KTM	= Konferensi Tingkat Menteri
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
LoI	= Letter of Intent
Pemda	= Pemerintah Daerah
SP	= Special Product
SSM	= Special Safeguard Mechanism
UE	= Uni Eropa
UR – F	= Uruguay Round – Formula
WTO	= World Trade Organization

I. PENDAHULUAN

Perundingan di bidang pertanian meliputi tiga aspek isu, yaitu bantuan atau subsidi domestik atau *domestic support*, promosi atau subsidi ekspor atau *export promotion or subsidy*, dan akses pasar (*market access*). Ketiga aspek tersebut menjadi pilar perundingan bidang pertanian yang secara intensif dibahas berbagai sidang Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization (WTO)*. Guna mencapai keseimbangan di antara ketiga pilar tersebut terdapat juga pasal tentang *special and differential treatment* (perlakuan khusus dan berbeda) yang memang disyaratkan bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, wajarlah apabila negara berkembang mengkonsolidasikan dirinya dalam berbagai kelompok, seperti Kelompok Negara/G-20 dan Kelompok Negara/KN-33 (G-33) agar lebih berdaya dalam bernegosiasi dengan negara-negara maju/NM. Sebagai koordinator G-33, Indonesia telah menyampaikan dua proposal, yaitu tentang Produk Khusus (*Special Product*) dan Mekanisme Perlindungan Khusus (*Special Safe-guard Mechanism/SSM*), sebagai suatu sumbangan dalam menciptakan perundingan secara lebih berimbang. Pembahasan modalitas tentang produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus terus berlanjut sampai saat ini (produk khusus termasuk dalam pilar akses pasar) dan mungkin akan terus berlanjut sampai Putaran Doha berakhir.

Kegagalan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V Cancun di Meksiko pada tahun 2003 lalu telah menyadarkan semua anggota WTO. Selama sepuluh tahun terakhir sejak Putaran Uruguay, belum banyak terjadi perubahan dalam Perjanjian Pertanian atau *Agreement on Agriculture/AoA*, padahal usulan dan upaya telah dilakukan upaya WTO membuat koreksi terhadap berbagai hal, guna memberikan kesamaan *playing field* antarnegara anggota. Berbagai usaha dilakukan negara-negara "yang dikalahkan" untuk memperoleh perlakuan yang adil, demikian juga negara "yang berkuasa" berusaha mempertahankan idealisme untuk mendominasi semua hasil kesepakatan. Kesepakatan pasca-Cancun ditempuh dengan perundingan yang demikian sulit dan berlangsung secara maraton (Bustami, 2005). Salah satu hasilnya adalah Paket Juli 2004 yang dikenal dengan Kerangka Kerja Juli (*July Framework*). Paket Juli inilah menjadi dasar untuk melakukan perundingan selanjutnya dalam membuat modalitas perjanjian yang dirundingkan pada KTM VI di Hongkong, China pada tanggal 13-18 Desember 2005.

KTM di Hongkong ini bertujuan untuk membahas isu-isu lanjutan yang terkait dengan liberalisasi perdagangan internasional. Di bidang pertanian, perundingan ditujukan untuk melaksanakan Deklarasi Doha dalam bidang modalitas penghapusan bantuan domestik, penghapusan subsidi ekspor dan peningkatan akses pasar. KTM tersebut telah berhasil mengeluarkan suatu deklarasi umum agar semua anggota kembali memahami pentingnya dimensi pembangunan terkait dengan Mandat

Doha (*Doha Development Agenda/DDA*) dan negara anggota WTO kembali menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan hasil negosiasi baik dalam akses pasar dan aturan-aturan yang telah disepakati serta isu-isu, khususnya yang terkait dengan pembangunan. Namun, KTM ini ternyata belum mampu mengeluarkan suatu kesepakatan menyangkut ketiga pilar tersebut di atas. Tampaknya, masih diperlukan waktu untuk merumuskannya dalam beberapa perundingan yang akan datang. Misalnya dalam pilar bantuan domestik, sebetulnya penurunan *Final Bound Total Agregat Measurement Support/AMS* telah disepakati dalam tiga jenjang atau *bands* dengan pemotongan linier yang lebih besar untuk jenjang yang lebih besar, tetapi besarnya belum disepakati dan negara berkembang yang tidak memiliki komitmen AMS akan dikecualikan dari penurunan *de minimis* serta pemotongan keseluruhan bantuan domestik yang mendis-torsi perdagangan.

Di pilar akses pasar, masih diperlukan penentuan jenjang atau *band* dan batas atau *threshold* dalam struktur penurunan tarif, termasuk yang dapat diterapkan oleh negara berkembang. Demikian juga dengan isu Produk Khusus dan Mekanisme Pengamanan Khusus yang menjadi perjuangan negara berkembang telah mendapat perhatian yang serius dalam perundingan tersebut, tetapi masih harus terus diperjuangkan terutama menyangkut komoditas yang masuk dalam produk khusus dan mekanisme pengamanan khusus tersebut, meskipun tersirat negara berkembang dapat memilih sendiri sejumlah produk sebagai produk khusus, dan mekanisme pengamanan khusus dapat menggunakan dua macam indikator picu atau *triggers*, yakni harga dan volume. Dalam pilar subsidi ekspor, telah disepakati batas waktu penentuan modalitas penurunan sampai akhir tahun 2013. Menjadi pertanyaan: “Apabila modalitas ini diberlakukan, bagaimana dampaknya terhadap kinerja perdagangan Indonesia?”

Poonyth *et al.* (2003) melakukan simulasi penurunan tarif menurut proposal Harbinson dalam tiga jenjang untuk negara maju dan empat jenjang untuk negara berkembang dan pemotongan bantuan domestik khususnya yang termasuk dalam Kotak Jingga/KJ (*Amber Box/AB*) 60% untuk negara maju dan 40% untuk negara berkembang. Hasil simulasi ini menyimpulkan, bahwa harga dunia produk pertanian akan meningkat, dan dampaknya lebih banyak berpihak kepada negara maju yang diindikasikan oleh peningkatan surplus produsen dan konsumennya. Hal sebaliknya terjadi bagi negara berkembang.

Pemberlakuan pemotongan tarif, bantuan domestik dan subsidi ekspor baik untuk negara maju dan negara berkembang menurut proposal Harbinson seperti yang telah dilakukan oleh Poonyth *et al.* (2003), juga telah disimulasi oleh Hutabarat *et al.* (2006) untuk melihat dampaknya secara khusus kepada Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan kebijakan tersebut memang dapat memperbaiki kinerja produksi pertanian Indonesia, tetapi di pihak lain memberi dampak negatif bagi konsumen dalam negeri dengan adanya peningkatan harga atas produk pertanian,

terutama produk impor. Hutabarat, *et al.* (2006) lebih lanjut juga telah melakukan simulasi penerapan liberalisasi penurunan bantuan domestik sesuai dengan usulan G-20, Amerika Serikat/AS dan Uni Eropa/UE dengan tiga jenjang hasil perundingan sampai dengan Oktober 2005. Namun, ketiga usulan tersebut tidak memberi manfaat yang berarti bagi Indonesia, terutama terhadap konsumen dalam negeri. Hasil simulasi dengan menggunakan ATPSM (*Agriculture Trade Policy Simulation Model*) ini hanya memberikan keuntungan kepada negara maju. Perlindungan yang diberikan oleh negara maju kepada produsennya dalam bentuk bantuan domestik memang sungguh sangat besar, contohnya pada tahun 1999-2000 bantuan domestik di UE mencapai 87,89 milyar dolar AS. Inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan pasar dan antar pelaku ekonomi di pasar internasional. Selanjutnya di pilar akses pasar, Hutabarat *et al.* (2006) juga melakukan simulasi penurunan tarif sesuai usulan G-20 yang disertai juga dengan penurunan bantuan domestik dan subsidi ekspor baik oleh negara maju dan negara berkembang secara serentak. Simulasi ini justru berdampak positif bagi kinerja sektor pertanian karena meningkatkan produksi pertanian, ekspor pertanian, dan mengurangi volume impor Indonesia. Namun, pihak konsumen dalam negeri menderita kerugian karena harga produk menjadi lebih mahal.

Dari beberapa studi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan negara maju dibanding negara berkembang. Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi negara maju dan negara berkembang, maka semua anggota WTO harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya.

Perundingan multilateral di bidang pertanian dalam WTO melalui Komisi Pertaniannya berlangsung secara perlahan-lahan dan terjadwal mengingat beragamnya latar belakang dan tingkat ekonomi dan tahap pembangunan pertanian negara-negara anggota. Untuk membantu kelancaran perundingan ini, beberapa negara melakukan inisiatif melalui pendekatan-pendekatan atau koalisi dengan negara atau anggota lain terhadap isu dan perihal suatu pokok tertentu yang terkait. Dari pengalaman dalam perundingan AoA terdahulu pada tahun 1994, negara berkembang termasuk Indonesia tampaknya hanya bertindak sebagai pendengar dan peserta sidang yang baik, mendengarkan dan menyetujui setiap usulan yang didraft oleh Tim Juru Runding yang dimotori oleh anggota-anggota dari negara maju. Namun, dalam perkembangan berikutnya terutama dalam Deklarasi Doha dan pengalaman kegagalan perundingan Cancun, dan yang terakhir dari KTM VI Hongkong dengan keragu-raguan Ketua Sidang dalam catatannya, tampaknya negara berkembang tidak ingin lagi hanya sebagai pendengar dan peserta yang baik, tetapi ingin menentukan jalannya perundingan dan jenis keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan. Memang, negara berkembang semakin menyadari bahwa keikutsertaan dalam WTO mungkin suatu keniscayaan dan merupakan titik awal modernisasi pertanian dan bukan titik balik, tetapi keikutsertaan ini harus memberi manfaat bagi mereka dan

masyarakat mereka sebagaimana dicita-citakan dalam pembentukan WTO.

Agar mampu menilai dan menjustifikasi jalannya perundingan dan jenis keputusan dan kesepakatan yang akan diambil dan bahkan diusulkan, Indonesia memerlukan adanya pengkajian dan analisis secara komprehensif tentang berbagai isu-isu yang dikemukakan di atas. Selain itu, Indonesia sebagai koordinator G-33 sangat berkepentingan pada terwujudnya modalitas-modalitas agar tujuan pembangunan pertanian masing-masing anggota sesuai dengan harapan masyarakat. Agar fasilitas ini memperoleh dukungan dalam perundingan pertanian multilateral, tentunya rumusan kerangka dan unsur-unsur pendukungnya haruslah terlebih dahulu mendapat dukungan dari para anggota G-33 yang lain. Oleh karena itu, pengkajian tentang unsur-unsur penetapan, cara penetapan, dan perumusan modalitas yang transparan dan dapat diterima G-33 amatlah diperlukan agar mereka tidak terjebak dalam kotak yang diatur oleh kelompok negara yang lain.

II. KAJI ULANG PELAKSANAAN KESEPAKATAN PUTARAN URUGUAY

2.1. Bantuan Domestik

2.1.1. Perbandingan Antar-Negara

Dari perkembangan nilai bantuan domestik, negara maju memiliki tingkat lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1, yang memuat tingkat bantuan yang diberlakukan menurut basis data GTAP versi 6.0. Dari tabel ini terlihat UE, AS dan Jepang mendominasi bantuan domestik. Komoditas yang banyak disubsidi oleh tiga negara tersebut adalah biji-bijian mengandung minyak (kedelai), sedangkan padi dan olahannya banyak disubsidi AS, tanaman serat (kapas) disubsidi UE. Indonesia dan G-33 cenderung tidak menunjukkan tingkat subsidi yang tinggi dan hanya pada komoditas padi, gandum, biji-bijian mengandung minyak, tanaman serat dan pertanian lainnya.

Dalam banyak hal, posisi negara berkembang yang tidak seimbang dengan negara maju menyebabkan banyak kritik yang ditujukan kepada penerapan pilar ini oleh negara-negara maju, diantaranya Joseph Stiglitz yang dalam artikelnya *Two Principles for the Next Round* dan *How to Bring Developing Countries in from the Cold* mengakui bahwa sampai sejauh ini negara berkembang belum memperoleh manfaat yang berarti dari keikutsertaannya dalam Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*), karena *playing field* yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, hanya dengan pola perdagangan yang benar-benar adil, negara berkembang dapat merasakan manfaat dari perjanjian pertanian.

Data pada Tabel 2.2 sampai Tabel 2.4 berturut-turut menunjukkan besaran bantuan domestik (AMS, Kotak Biru dan Kotak Hijau) yang diterapkan oleh negara-negara maju seperti UE, AS dan Jepang.

Data pada Tabel 2.2 menunjukkan bantuan domestik total yang diberikan UE terhadap petaninya cenderung stabil dari waktu ke waktu, bantuan terbesar dialokasikan dalam bentuk *Aggregate Measurement Support/AMS*. Di sisi lain bantuan jenis ini berpeluang menditorsi pasar. Berkenaan dengan tingginya besaran AMS ini, negara berkembang menuntut UE mengurangi besaran subsidi. Kondisi ini menggambarkan betapa besarnya bantuan domestik yang diberikan oleh negara maju, dan dapat dibayangkan kondisi negara berkembang dalam menghadapi negara maju sebagai sesama anggota WTO.

Jika negara yang tergabung dalam UE mengalokasikan bantuan domestiknya untuk AMS, Amerika Serikat mengalokasikan bantuan domestik untuk kotak hijau. Data pada Tabel 2.3 menunjukkan besarnya bantuan domestik untuk masing-masing jenis. Nilai total bantuan domestik AS cukup stabil dari tahun 1995 hingga 1997, namun tahun 1998 hingga 1999 jumlahnya mengalami peningkatan yang menyolok.

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

Tabel 2.2. Perkembangan Bantuan Domestik Uni Eropa dari tahun 1995 – 1999 (Juta Euro)

Jenis Bantuan Domestik	1995	1996	1997	1998	1999
Kotak Biru	20.846	21.521	20.443	20.504	19.792
Kotak Hijau	18.779	22.130	18.167	19.168	19.931
Total AMS	50.030	51.009	50.194	46.683	47.886
<i>De minimis</i>	825	747	544	379	308
Total	90.480	95.407	89.347	86.733	87.916

Sumber: UNCTAD/DITC/COM/2003/6.

Tabel 2.3. Perkembangan Bantuan Domestik Amerika Serikat dari tahun 1995 – 1999 (Juta Dolar AS)

Jenis Bantuan Domestik	1995	1996	1997	1998	1999
Kotak Biru	7.030	0	0	0	0
Kotak Hijau	46.033	51.815	51.252	49.820	49.749
Total AMS	6.214	5.898	6.238	10.392	16.862
<i>De minimis</i>	1.641	1.153	812	4750	7.405
Total	60.918	58.865	58.302	64.962	74.016

Sumber: UNCTAD/DITC/COM/2003/6.

Tabel 2.4. Perkembangan Bantuan Domestik Jepang dari tahun 1995 – 1999 (Triliun Yen)

Jenis Bantuan Domestik	1995	1996	1997	1998	1999
Kotak Biru	0	0	0	50	93
Kotak Hijau	3.169	2.818	2.652	3.002	2.686
Total AMS	3.508	3.330	3.171	767	748
<i>De minimis</i>	37	37	36	76	33
Total	6.713	6.185	5.858	3.894	3.559

Sumber: UNCTAD/DITC/COM/2003/6

Protes yang diajukan negara berkembang terhadap UE dan AS berkaitan dengan pemberian bantuan domestiknya menyebabkan kedua kelompok negara ini melakukan kebijakan pertanian dalam negeri yang dikenal dengan konsep *common agricultural policy/CAP* yang mengacu

sepenuhnya pada kebijakan program pembatasan produksi (*production – limiting programs*). Di dalam perkembangannya saat ini kebijakan perdagangan yang dilakukan AS sudah mulai menghapuskan program-program yang terkait dengan kotak biru. Negara pengguna kotak biru terbesar saat ini adalah negara-negara UE, Jepang, Swiss, Norwegia, dan beberapa negara kecil lainnya.

Dibandingkan negara UE dan AS, bantuan domestik yang dialokasikan Jepang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Jika tahun 1995 nilai bantuan domestik Jepang mencapai 6.713 triliun yen atau setara dengan 57.871 juta dolar AS, maka pada tahun 1999 hanya menjadi 3.559 triliun yen atau setara dengan 30.681 juta dolar AS. Besaran bantuan domestik ini cenderung menurun dari waktu ke waktu sejalan dengan melemahnya perekonomian Jepang.

2.1.2. Pelaksanaan di Beberapa Daerah di Indonesia

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bentuk-bentuk bantuan domestik yang diberikan umumnya dalam bentuk bantuan pendanaan untuk kegiatan peremajaan tanaman di sektor perkebunan, pengadaan pasar lelang, kegiatan pemasaran, penyuluhan, pembuatan *trading house*, dan lain-lain sebagainya. Dana yang dialokasikan untuk kotak hijau ini umumnya bersumber dari dana dekonsentrasi, dana APBD tingkat I, dan APBD tingkat II. Dari masing-masing lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan anggaran daerahnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kotak hijau ini masih sangat terbatas. Mereka masih mengandalkan bantuan dana dari pusat yang diterjemahkan lewat dana dekonsentrasi dan DAU (dana alokasi umum). Bentuk-bentuk bantuan kotak hijau di masing-masing lokasi penelitian sangat beragam. Uraian berikut akan memudahkan pembaca untuk memahami masing-masing bentuk bantuan domestik di tingkat lokal.

Bentuk-bentuk bantuan domestik yang digolongkan sebagai kotak hijau antardaerah sangat beragam tergantung dari komoditas yang diamati. Hasil pengamatan di lapangan di 6 lokasi penelitian yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Jawa Timur disampaikan dalam bentuk kotak-kotak khusus untuk memudahkan pembaca dalam memahami jenis bantuan domestik yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah daerah. Untuk komoditas perkebunan, bentuk bantuan domestik sebagian besar berupa bantuan dana untuk peremajaan tanaman guna meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan yang umumnya sudah sangat tua, seperti yang terjadi ditemukan pada pengembangan komoditas kelapa di Sulawesi Utara (lihat kotak Sulawesi Utara), pengembangan kawasan perkebunan (Kimbun) untuk komoditas perkebunan utama di Sulawesi Selatan (lihat kotak Sulawesi Selatan), serta pemberian bibit bagi komoditas perke-

bunan yang sebelumnya memiliki harga jual cukup tinggi seperti vanili di Bali (lihat kotak Bali).

Sulawesi Utara

Komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Sulawesi Utara adalah kelapa dengan komoditas penunjang vanili, pala, cengkeh, dan aren. Hasil wawancara yang dilakukan dengan seksi perencanaan Dinas Perkebunan menyebutkan untuk menjaga produktivitas tanaman perkebunan, yang dapat dilakukan oleh pihak dinas perkebunan adalah peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman merupakan salah satu bentuk bantuan domestik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan dana yang bersumber dari APBD dan APBN. Peremajaan tanaman sangat penting dilakukan mengingat sebagian besar usia tanaman kelapa di provinsi ini berusia diatas 75 tahun. Tanaman kelapa yang sudah tua umumnya tidak mampu menghasilkan kelapa bulat dalam jumlah yang potensial, sehingga diperlukan upaya peremajaannya. Nilai jual kelapa dalam bentuk bulat lebih tinggi dibandingkan kopra dengan adanya permintaan produk akhir seperti tepung kelapa (desco) dan *virgin coconut oil* (VCO) yang sekarang berkembang pesat. Ini menyebabkan permintaan kelapa bulat cukup tinggi.

Kegiatan lain yang diusahakan dengan memanfaatkan dana dekonsentrasi dan digolongkan sebagai bantuan domestik kotak hijau/KH di provinsi ini adalah kegiatan pasar lelang komoditas agro. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini mencapai Rp. 400 juta setahun. Dari kegiatan pasar lelang komoditas agro (PLKA) terlihat bahwa kegiatan ini dapat menjadi wadah yang sangat efektif untuk bertemunya petani (produsen) dengan pembeli (pengekspor). Bagi pihak Depdag, ajang PLKA merupakan media untuk membantu petani mendapat kepastian harga dan pasar serta membantu pembeli mendapatkan kepastian mutu dan pasokan.

Sulawesi Selatan

Komoditas unggulan perkebunan di Sulawesi Selatan adalah kakao, kelapa, jambu mete, dan kopi, masing-masing mencapai luas 217.399, 122.921, 68.644, dan 67.787 ha. Sedangkan komoditas kapas hanya memiliki luas 4.195 ha, dimana komoditas ini tidak menjadi komoditas unggulan karena saat ini sudah terdesak oleh kakao di lahan kering dan tanaman pangan (jagung) di lahan kering. Bentuk bantuan domestik yang dilakukan oleh Pemda adalah bantuan pendanaan untuk proyek pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun) untuk beberapa komoditas perkebunan utama. Bentuk bantuan yang diberikan pada tahun 2004 di antaranya bantuan usaha ekonomi produktif (Rp 205 juta), penanaman/pemeliharaan tanaman (Rp 645,8 juta), pengadaan sarana produksi (Rp 20 juta), penanggulangan hama/penyakit tanaman (Rp 733,8 juta), pendidikan dan pelatihan teknis (Rp 302 juta), pengembangan usaha ekonomi (Rp 412,5 juta), penyuluhan dan penyebaran informasi yang mencapai Rp 96,6 juta. Di tingkat kabupaten, pengembangan proyek Kimbun dilakukan per jenis komoditas unggulan, untuk komoditas kakao proyek Kimbun dilaksanakan di Kabupaten Polmas dan Luwu.

Bali

Terdapat enam komoditas perkebunan utama yang sedang dikembangkan di Bali, yaitu: kopi (arabika dan robusta), kakao, jambu mete, vanili, cengkeh, dan kelapa (varietas dalam, hibrida, genjah, deres, arabika, dan robusta). Tiga komoditas pertama berada dalam program kemitraan dengan petani, sedangkan untuk komoditas vanili sedang diusahakan dalam SK Gubernur. Dari data Statistik Perkebunan tahun 2005, terdapat potensi areal komoditas perkebunan di Bali yang sangat besar, yaitu sebesar 225.302 ha, sementara yang sudah dimanfaatkan sampai tahun 2005 baru sebesar 154.850 ha.

Pada umumnya perkembangan pengusahaan tanaman perkebunan oleh Dinas Perkebunan meningkat dari tahun ke tahun, khususnya tanaman kopi, kakao, cengkeh, dan jambu mete. Hasil wawancara yang dilakukan dengan seksi program Dinas Perkebunan menyebutkan khusus untuk tanaman vanili baru mulai lagi tahun 2002 yang diwujudkan dalam program pemberian bantuan domestik dalam bentuk pemberian bibit vanili. Dana bantuan ini bersumber dari APBD. Pada akhir tahun 2005 Pemda melalui Dinas Perkebunan Provinsi memberikan bantuan bibit vanili sebesar 96.000 pohon yang dialokasikan dalam bentuk demplot-demplot. Di lapangan, baik petani maupun pedagang pengeksport yang selalu berhubungan dengan petani mengatakan bahwa bibit yang diberikan tersebut sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia. Memang kemampuan pemerintah daerah membiayai pengadaan bibit ini sangat terbatas, ditambah lagi selama lima tahun terakhir dana APBD untuk perkebunan lebih banyak dialokasikan kepada tanaman kopi yang menjadi unggulan pertama Bali.

Pada tahun anggaran 2005, diversifikasi vanili Bio-Fob dan frontir dilaksanakan pada lahan seluas 5.800 ha, sebanyak 94.500 pohon dengan jumlah petani penerima sebesar 112 orang. Apabila dilakukan penghapusan bantuan domestik akan turut berdampak terhadap kesejahteraan petani vanili, karena mereka harus membeli bibit sendiri seharga Rp 10.000/kg. Di mata pengeksport, bantuan bibit yang diberikan oleh Dinas Perkebunan masih sangat sedikit, tampaknya hanya diperuntuk-kan bagi kebutuhan demplot saja. Ke depan diharapkan bantuan bibit lebih besar lagi mengingat vanili Bali sudah mulai bangkit lagi. Di samping itu juga diperlukan bantuan teknis dari Pemda seperti penyuluhan dan perbaikan infrastruktur.

Bentuk bantuan kotak hijau untuk subsektor peternakan seperti yang diamati di Nusa Tenggara Barat adalah pengembangan ternak sapi potong dan bibit dengan pemberian bantuan bibit secara bergulir, memfasilitasi pemasaran hasil ternak berupa pendirian pasar hewan, dan bantuan kandang kolektif kepada kelompok peternak yang bertujuan untuk menghasilkan bibit sapi potong berkualitas ekspor (lihat kotak NTB).

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah produsen dan pemasok utama ternak potong dan bibit, khususnya sapi, untuk kebutuhan berbagai daerah di Indonesia. Daya dukung pengembangan agribisnis berbasis peternakan di daerah ini antara lain: potensi ketersediaan bibit ternak dari segi mutu dan jumlah, sumberdaya lahan dan pakan ternak, dukungan sentra produksi, pola pemeliharaan secara kelompok, bebas beberapa penyakit menular, serta masih terbukanya peluang pasar domestik dan ekspor. Bentuk-bentuk dukungan yang diberikan Pemda untuk pengembangan ternak sapi, antara lain: (i) memberikan ternak/bibitnya secara bergulir, (ii) pemasaran hasil ternaknya yang difasilitasi, seperti fasilitas pasar hewan.

Dukungan BD sangat berperan dalam pengembangan ternak sapi. Seperti yang telah disinggung di atas adanya pengembangan kawasan ternak sapi merupakan upaya untuk meningkatkan produk di daerah sentra agar menghasilkan produksi sapi potong bermutu untuk kebutuhan lokal maupun perdagangan antardaerah. Bantuan kandang kolektif diberikan kepada kelompok yang terdiri atas 20-40 anggota, dimana masing-masing anggota diberikan 2 ekor sapi dan diharapkan pengelolaannya dapat ditingkatkan sesuai dengan tata ruang yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Tujuan yang ingin dicapai : (a) memproduksi bibit sapi potong mutu ekspor dari segi jumlah dan keberlanjutan 2.000 – 3.000 ekor per tahun; (b) memenuhi kebutuhan bibit bermutu untuk kebutuhan lokal, pasar domestik, dan pasar ekspor; (c) memberdayakan potensi peternak dan sarana kandang kolektif; (d) mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang lebih integratif dan maju berbasis usaha sapi potong; dan (e) meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di bidang peternakan.

Selain itu dengan adanya kawasan pengelompokan kandang kolektif ini diharapkan pembeli bisa langsung membeli kepada peternak, tidak harus melalui calo seperti yang terjadi di pasar hewan. Fasilitasi inilah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan agar dapat menunjukkan kepada pengusaha dimana keberadaan kelompok tani yang memiliki sapi yang siap dijual. Bentuk dukungan Pemda lainnya adalah adanya kesepakatan Bupati se-Lombok untuk membagikan hasil retribusi peti kemas yang melewati jembatan timbang di pulau Lombok ke masing-masing kabupaten.

Bantuan domestik lain seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan langsung yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat peternak, dimana tidak diperlukan agunan atau penjaminan seperti kredit-kredit lainnya. Bentuk bantuan ini adalah pola perguliran satu kembali satu dalam jangka waktu 4 tahun. Artinya, seorang peternak yang diberi satu sapi siap bunting dan harus mengembalikan sapi siap bunting dalam 4 tahun.

Untuk subsektor hortikultura bantuan domestik yang diberikan Pemda Riau (termasuk provinsi dengan pendapatan asli daerah terbesar di Indonesia) adalah anggaran proyek pengembangan komoditas sayuran

ekspor, seperti sayuran berdaun lebar yang menjadi permintaan utama penduduk Singapura, di dalam kerangka kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapore-Growth Triangle/IMS-GT dan Singapore-Johor-Riau/SIJORI Lihat Kotak Riau). Dalam konteks ini memang peluang pasar untuk komoditas sayuran berdaun lebar ini menjadi sangat prospektif untuk dikembangkan.

Riau

Adanya kerja sama ekonomi subregional dengan membentuk kawasan segitiga pertumbuhan khususnya Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) merupakan peluang pasar yang baik bagi sayuran Indonesia, khususnya Riau, untuk menjadi pemasok utama ke negara/kota tetangga tersebut, karena kedekatan geografis di antara mereka.

Meningkatnya permintaan sayur untuk ekspor dari Indonesia ke Singapura yang dipacu oleh adanya kerja sama ekonomi Sub Regional Indonesia-Malaysia-Singapore-Growth Triangle/IMS-GT membuka peluang pasar yang baik bagi sayuran dataran rendah, terutama yang berdaun lebar untuk bersaing di pasar singapura terutama bagi Riau yang merupakan provinsi yang terdekat. Menyikapi kenyataan ini, maka sejak tahun 2001 Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tanaman Pangan telah mengambil suatu kebijakan untuk membantu perbaikan ekonomi masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan dalam bentuk pinjaman modal melalui sistim perbankan dengan bunga rendah 3% per tahun dan mekanisme sangat sederhana. Pada tahun 2001 dan tahun 2002 Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau mengambil sasaran pengembangan sayuran dataran rendah berdaun lebar (*leafy vegetables*). Pada tahun 2001 telah dilaksanakan penanaman seluas 10 ha dan tahun 2002 dikembangkan lagi seluas 100 ha dengan produksi sebesar 1,7 juta ton pada tahun 2005.

Dengan menyediakan peluang pasar yang sudah ada, Pemda dan pemerintah Singapura menyepakati kerja sama ini dalam bentuk penandatanganan MOU pada tahun 2002. Pada MOU itu telah disepakati bahwa Pemprov Riau menyediakan fasilitas budidaya, sarana, dan prasarana untuk kepentingan ini dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 2 milyar yang bersumber dari APBD Provinsi. Sementara itu, pemerintah Singapura akan membangun pusat pengolahan hasil hortikultura (*processing center*) secara bertahap sampai tahun 2004. Dana yang disumbangkan oleh pihak pemerintah Singapura mencapai Rp. 2,5 milyar yang merupakan dana bantuan hibah, dana bantuan selanjutnya bersumber dari APBD.

Selain pengembangan komoditas, kotak hijau terwujud dalam alokasi pengembangan institusi atau kelembagaan penunjang seperti pengembangan lembaga pemasaran. Sebagai contoh adalah Pasar Lelang Komoditas Agro di Sulawesi Utara. Kondisi yang menarik ditemukan di lapangan di antaranya adalah di Jawa Timur, di mana provinsi ini sedikit

lebih maju dalam program pemberian bantuan domestiknya (lihat kotak Jawa Timur). Jika di provinsi-provinsi lain bantuan domestik masih ditujukan untuk kegiatan di sektor produksi, di provinsi ini bantuan domestik diwujudkan dalam kegiatan yang langsung berhubungan dengan upaya pemerintah daerah dalam peningkatan volume ekspor komoditas unggulan di wilayahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya sosialisasi kegiatan WTO, kemudahan fasilitas bagi pengeksport dan pembentukan Pusat Pelatihan Promosi Daerah. Pemerintah Daerah sangat memahami betapa kegiatan promosi sangat menentukan dalam membentuk permintaan masyarakat internasional akan komoditas pertanian unggulan yang dihasilkan di Jawa Timur.

Jawa Timur

Dukungan Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Timur terhadap pengembangan ekspor komoditas kedelai banyak sekali bentuknya, terutama dalam bidang pembinaan usaha kecil dan pengawasan terhadap kesesuaian data ekspor yang dikeluarkan dan kapasitas pabrik. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyatu di Jawa Timur, karena dirasakan keterkaitan yang erat diantara keduanya (tidak dapat dipisahkan seperti pada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia). Dukungan tersebut, antara lain berupa: (i) sosialisasi kesepakatan WTO merujuk pada arahan pemerintah pusat, (ii) kemudahan bagi pengeksport untuk mengurus SKA-surat keterangan asal, *form A*, dan lain-lain, (iii) PPPED-Pusat Pelatihan Promosi Ekspor Daerah dengan *EDI-Electronic Data Interchange*, (iv) bantuan sarana peralatan pengolahan hasil dari Bina Usaha Industri. Untuk mempermudah para pengeksport dalam kegiatannya, Dinas Perindag menerbitkan SKA, *form A* dan *D*. Di Jawa Timur ada empat lokasi penerbit yang berwenang mengeluarkan SKA melalui Dinas Perindag, yaitu: di Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, dan di Kabupaten Gresik.

Untuk meningkatkan volume dan mutu ekspor dari Jawa Timur, diadakan pula program pelatihan dan promosi secara teratur, yang diikuti oleh para pengusaha. Topik/tema yang dibahas beragam, dan tingkatnya juga beragam. Ada yang dikhususkan untuk pengusaha pemula, ada yang diikuti oleh pengusaha yang telah sampai pada tahap melakukan konsultasi bisnis dengan pembeli dari negara tujuan dan melakukan "*virtual exhibition*". Di Surabaya (di Gedung Doro) dibentuklah Pusat Pelatihan Promosi Ekspor Daerah (PPPED). PPPED ini hanya ada di 4 kota di Indonesia, yaitu Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Medan (Sumatera Utara).

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bantuan domestik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat langsung seperti peremajaan tanaman, pengembangan sayuran dataran rendah, pusat pengolahan

hortikultura atau *processing center*, atau dapat juga bersifat tidak langsung seperti pendirian Pusat Pelatihan Promosi Daerah, Pasar Lelang Komoditas Agro yang lebih banyak bersifat pendayagunaan unsur kelembagaan atau institusi dalam meningkatkan keragaan sektor pertanian di daerah.

Upaya untuk melihat bantuan domestik secara agregat di tingkat nasional dapat dilakukan melalui perhitungan besar anggaran negara yang dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung sektor pertanian, baik yang tercantum dalam data satuan-3 di Departemen Pertanian maupun di departemen lain seperti dana pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum, kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan yang menjadi ruang lingkup Departemen Perdagangan dan data pelayanan umum (*general services*). Analisis mengenai besaran bantuan domestik yang diukur dari data dan informasi mengenai pelayanan umum telah dilakukan sampai dengan tahun 2004 (lihat Hutabarat *et al.*, 2006). Untuk tahun ini analisis ini belum dapat dilakukan karena kesulitan tim peneliti dalam mengakses data di departemen-departemen teknis.

Sementara itu bantuan domestik Indonesia hanya dalam bentuk kotak hijau dan jumlahnya sangat kecil sejak dinotifikasi ke WTO, dibanding dengan negara maju di atas. Pada tahun 1995 nilai bantuan domestik secara total yang diberikan pemerintah kepada masyarakat hanya sebesar 178 juta dolar AS, dan menurun pada tahun 1998 menjadi 133 juta dolar AS, sejalan dengan krisis multidimensi yang dialami oleh Indonesia. Pada tahun 1999, bantuan domestik Indonesia meningkat tajam menjadi 207 juta dolar AS, namun tahun-tahun berikutnya cenderung bergejolak.

Dalam banyak hal, negara berkembang masih memiliki banyak kekurangan diantaranya terbatasnya jumlah petugas penyuluh di tingkat desa, lembaga penelitian, saluran pemasaran, dan bentuk-bentuk kelembagaan lain yang sangat dibutuhkan dalam upaya mengantisipasi manfaat yang akan diterima akibat diberlakukannya pola perdagangan bebas dalam sistem perdagangan internasional. Fakta-fakta ini menggambarkan betapa negara maju dan negara berkembang di dalam kerangka WTO berada dalam *"playing field"* yang sangat timpang. Preposisi ini diperkuat oleh Joseph Stiglitz dengan tesisnya :

"The ability of country and particularly of the more isolated communities within a country, to participate in trade depends importantly upon the quality of the transport and communications infrastructure that allows them to access the world trading system. The new, broader trader agenda involves many issues that are much more difficult to implement than trade liberalization, which can be implemented at the stroke of a pen" (Stiglitz, 2001 dalam Mogens Buch-Hansen. 2001).

Konsep bantuan domestik umumnya belum dapat dipahami dengan baik oleh aparat pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sejauh ini, mereka belum menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bantuan dana untuk peremajaan tanaman, pemasaran, penyuluhan, perbaikan saluran irigasi, merupakan bentuk-bentuk bantuan domestik. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dapat juga disimpulkan bahwa dari tiga jenis bantuan domestik yang dikenal dalam kesepakatan WTO, bantuan domestik yang tergolong dalam kotak hijau adalah yang banyak dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kinerja sektor pertanian.

Dana bantuan domestik yang dimaksud adalah perhitungan AMS yang didalamnya sudah tercakup kotak hijau. Seharusnya perhitungan bantuan domestik mencakup dana APBN, APBD I, dan APBD II. Berdasarkan kasus yang ditemui di provinsi yang dikunjungi, instansi teknis di daerah hanya mengandalkan dana-dana dekonsentrasi yang berasal dari pusat dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam bantuan domestik. Hingga saat ini pemanfaatan dana APBD I dan APBD II masih sangat terbatas. Posisi Indonesia yang dapat diusulkan dalam menyikapi notifikasi bantuan domestik yang berkaitan dengan AMS dan KH adalah: 1) mengacu kepada *de minimis* yang telah disepakati, dan 2) tetap meningkatkan bantuan domestik yang termasuk dalam kotak hijau di dalam APBN yang diberikan ke daerah melalui dana dekonsentrasi.

2.2. Persaingan Ekspor

Pilar persaingan ekspor merupakan satu dari tiga pilar dalam perjanjian pertanian WTO. Pilar ini tidak saja mencakup subsidi ekspor secara langsung (yang bersifat mendistorsi perdagangan), tetapi juga hubungan kelembagaan yang merujuk kepada pemberian subsidi ekspor secara implisit, seperti *food aid* (bantuan pangan), kredit ekspor dan *state trading exporting enterprises*. Pajak ekspor, kegiatan promosi ekspor dan kegiatan lainnya dapat pula dikategorikan sebagai subsidi ekspor. Menurut Kesepakatan Paket Juli 2004, semua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan bersama-sama dengan penghapusan unsur subsidi program (persaingan ekspor) seperti kredit ekspor, jaminan kredit ekspor atau program asuransi, dan *food aid* yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari. negara maju telah setuju, tetapi batas waktu penghapusan subsidi tersebut ditetapkan sampai tahun 2013. Namun, modalitas penghapusannya masih harus ditetapkan melalui perundingan yang sulit dan sangat panjang. Untuk itu Indonesia perlu sebaiknya mencermati perkembangan kebijakan persaingan ekspor dan usulan modalitas yang akan diterapkan negara maju tersebut.

Data pada Tabel 2.5 menggambarkan besarnya subsidi ekspor yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota WTO. Pada tahun 1997, UE memberikan subsidi ekspor sebesar 4,9 juta dolar AS, dan tahun 1998

sebesar 5,9 juta dolar AS. Sedangkan AS memberikan subsidi ekspor sebesar 112 juta dolar AS pada tahun 1997, menjadi 147 juta dolar AS pada tahun 1998. Pada awalnya, yaitu tahun 1998, hanya 21 negara WTO yang mendaftarkan subsidi ekspornya, sembilan negara diantaranya yang sampai saat ini masih menggunakan subsidi tersebut adalah UE, Swiss, Norwegia, AS, Turki, Israel, Venezuela, Romania, dan Meksiko. Sebelumnya, terdapat delapan negara yang juga menggunakan subsidi ekspor, yaitu Afrika Selatan, Kolumbia, Kanada, Eslandia, Australia, Selandia Baru, Kosta Rika, dan Panama. Namun, negara-negara dalam kelompok UE yang mendominasi notifikasi subsidi ekspor di dalam WTO dan nilainya mencapai 90% nilai subsidi ekspor total selama periode 1995-2001, diikuti oleh Swiss sebesar 5,3%, sementara AS dan Norwegia hanya sebesar 1,4%. Indonesia dan Brazil juga pernah mendaftarkan subsidi ekspor untuk beberapa komoditas, tetapi saat ini subsidi ekspor tersebut sudah tidak ada lagi.

Tabel 2.5. Subsidi Ekspor Beberapa Negara Maju tahun 1995–2000 (Juta dolar AS)

Negara	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Uni Eropa (25)	6.587	7.157	4.928	6.072	5.968	2.598
Swiss	455	392	295	293	269	188
Amerika Serikat	26	121	112	147	80	15
Norwegia	84	78	100	77	126	44
Turki	30	17	39	29	28	27
Lainnya	122	107	65	38	22	22

Sumber: FAO,2004. (www.fao.org/trade).

UE mendominasi besarnya subsidi ekspor, subsidi ini diperuntukkan bagi komoditas padi dan olahannya, gandum, sereal lainya (jagung), gula, serta ternak besar dan produknya. Sedangkan Indonesia dan G-33 cenderung tidak menunjukkan tingkat subsidi yang tinggi, dan ini dilakukan terutama hanya pada komoditas gula, produk minyak nabati, dan makanan olahan. Gambaran ini berbeda dengan basis data tentang subsidi ekspor yang ada pada GTAP Versi 6.0. Indonesia sendiri belum banyak memanfaatkan fasilitas persaingan ekspor/subsidi ekspor. Dari kasus yang ditemui di provinsi yang dikunjungi, pemerintah daerah belum banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas persaingan ekspor/subsidi ekspor.

Dari perkembangan nilai subsidi ekspor, negara maju memiliki tingkat lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.6, yang merangkum tingkat subsidi yang diberlakukan menurut basis data GTAP versi 6.0. Dari tabel ini terlihat UE mendominasi subsidi ekspor. Komoditas-komoditas yang banyak di subsidi oleh UE adalah padi dan olahannya, gandum, sereal lainya (jagung), gula, serta ternak besar dan produknya. Indonesia dan G-33 cenderung tidak menunjukkan tingkat subsidi yang tinggi dan hanya pada komoditas gula, produk minyak nabati dan makanan olahan.

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

2.3. Tarif

Kelompok negara 33 terdiri atas negara-negara terbelakang dan negara berkembang yang saat ini masih dililit oleh persoalan kemiskinan, dan kekurangan pangan yang sangat akut serta infrastruktur ekonomi yang belum berkembang dengan penduduk sebagian besar berusaha di sektor pertanian. Oleh karena itu, negara-negara ini masih mengandalkan kebijakan tarif sebagai instrumen penangkal dari derasnya arus komoditas impor pertanian yang masuk dan dikhawatirkan mengancam pengembangan sektor atau industri yang sama di dalam negeri mereka. Pada mulanya jumlah negara anggota yang bergabung di kelompok ini berjumlah 33 negara, akan tetapi saat ini telah berkembang menjadi sekitar 44 negara yang umumnya berkepentingan dalam penetapan Produk Khusus atau *Special Product* dan Mekanisme Perlindungan Khusus atau *Special Safeguard Mechanism*.

Di dalam pertemuan Komisi Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia atau *Committee of Agriculture/CoA World Trade Organization/WTO* bulan Juli 2004 yang lalu, fasilitas produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus ini telah berhasil diperjuangkan oleh negara-negara terbelakang dan negara berkembang. Namun, pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan berupa suatu kerangka penurunan tarif yang dilakukan melalui metode atau rumus berjenjang atau *Tiered Formula/TF*, meskipun bentuk rincinya belum disepakati dan sampai saat ini masih terus diangkat dalam setiap pertemuan CoA WTO. Kelompok G-33 sendiri berkepentingan dalam penentuan modalitas penurunan tarif ini dan ingin mengajukan usul modalitas yang dapat disetujui anggotanya, sehingga dalam forum perundingan yang lebih besar nantinya di CoA, dapat diterima oleh negara-negara lain atau kelompok negara yang lain. Mencari suatu penetapan modalitas yang dapat diterima oleh semua anggota G-33 sama sulitnya dengan penetapan modalitas yang dapat diterima semua anggota WTO. Oleh karena itu, latar belakang dan perhitungan teknis dari suatu usul penetapan modalitas sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesepakatan bersama oleh kelompok G-33. Mengandalkan mekanisme seperti ini diserahkan kepada pihak lain yang pada akhirnya akan dilakukan oleh pihak negara maju, sementara negara-negara terbelakang dan negara berkembang hanya bersifat pasif sebagai penerima, seperti yang umumnya terjadi selama ini niscaya kurangnya bijaksana. Dalam hal ini, Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengkaji dan merumuskan berbagai alternatif modalitas yang memungkinkan dan dapat diterima oleh negara anggota.

2.3.1 Profil Tarif Batas (*Bound Tariff*) di Negara-negara G-33

Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah negara-negara berkembang yang sangat peduli pada fasilitas Produk Khusus atau *Special*

Products dan Mekanisme Pengamanan Khusus atau *Special Safeguard Mechanism/SSM* terhimpun dalam suatu kelompok informal G-33 yang diharapkan dapat mendesakannya di dalam forum negosiasi. Namun, untuk merumuskan suatu atau beberapa usulan tentang modalitas penurunan tarif yang dapat diterima semua anggota, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar bagaimana struktur wajah tarif tersebut.

Sampai pada akhir bulan Agustus 2005, jumlah anggota kelompok G-33 telah mencapai 44 negara yang tersebar di tiga benua-benua: Asia, Afrika, dan Amerika. Dari ke 44 negara tersebut tercatat ada sejumlah 16.526 pos tarif untuk komoditas pertanian dengan rata-rata 64,01% dan berkisar dari 0% sampai dengan 887,4% (Tabel 2.7). Komoditas pertanian yang dimaksud adalah sesuai dengan Lampiran Tabel 1 (Cakupan Pertanian), Perjanjian Pertanian atau *Annex 1 (Product Coverage) Agreement on Agriculture/AoA*.

Tabel 2.7. Rataan Pos Tarif Batas/*Bound* pada KN-33

Statistik	Nilai
Banyak pos tarif	16.526
Nilai terkecil (%)	0
Nilai terbesar (%)	887,4
Rataan (%)	64,01

Lima negara dengan jumlah pos tarif terbesar adalah Indonesia (1.341 pos tarif), Korea Selatan (1.239) China (976 pos tarif), Guatemala (812), dan El Salvador (764) [Tabel 2.8], sebaliknya dua negara dengan jumlah pos tarif terkecil adalah Nikaragua (35 pos tarif) dan Mongolia (94) dan sebanyak dua belas negara memiliki pos tarif yang jumlahnya sama sebanyak 217: yaitu Kongo, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, Sri Langka, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Senegal, dan Tanzania.

Tabel 2.8. Lima Negara dengan Jumlah Pos Tarif Batas Terbanyak pada KN-33

Negara	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
Indonesia	1.341	0,00-210,0	48,02
Korea Selatan	1.239	1,80-887,4	58,40
China	976	0,00-74,0	19,28
Guatemala	812	10,0-257,0	49,14
El Salvador	764	20,0-164,4	40,83

Di lima negara dengan jumlah pos tarif terbesar dan kisaran besarnya tarif adalah: 0 – 210% dengan rata-rata 48,02% untuk Indonesia; 1,8 – 887% dengan rata-rata 58,40% untuk Korea Selatan; 0 – 74% dengan rata-rata 19,28% untuk China; 10 – 257% dengan rata-rata 49,19% untuk Guatemala; dan 20 – 164,4%, dengan rata-rata 40,83% untuk El Salvador. Pada dua negara dengan jumlah pos tarif terkecil, kisaran besarnya tarif adalah 60 – 200%, dengan rata-rata 73,43% untuk Nikaragua, 5 – 75%, dengan rata-rata 19,15% untuk Mongolia. Selanjutnya dari 12 negara yang memiliki jumlah pos tarif yang sama (251 pos tarif), semuanya mempunyai tarif yang sama untuk ke 217 pos tarif tersebut, hanya saja besarnya berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Kalau diurut dari tarif yang terkecil sampai terbesar adalah Kongo, Senegal, dan Madagaskar sebesar 30%; Honduras, sebesar 35%; Republik Dominika, 40%; Sri Lanka, 50%; Jamaika, Kenya, dan Guyana, 100%; Tanzania, 120% dan Nigeria, 150%.

Kelompok komoditas (pada 2 digit atau *chapter*, lihat Lampiran Tabel 1), jumlah pos tarif terbesar adalah kelompok 15 (lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; lemak hewani atau lemak nabati) dengan jumlah pos tarif sebanyak 1.426 atau sekitar 8,63%, dan jumlah total pos tarif, diikuti kelompok 7 (sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan) dengan 1.188 jumlah pos tarif (7,19%); kelompok 12 (biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak) yang memiliki 1.096 pos tarif (6,63%); kelompok 8 (buah dan biji/kacang yang dapat dimakan; kulit dan buah jeruk dan melon) dengan 1.077 pos tarif (6,64%); dan kelompok-20 (olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman) dengan 1.010 pos tarif (6,11%) [Tabel 2.9]. Dengan kata lain ke 5 kelompok ini memiliki 5.798 pos tarif, atau 35,08% dari jumlah total pos tarif.

Tabel 2.9. Lima Kelompok Komoditas (*Chapter*) dengan Jumlah Pos Tarif Batas Terbanyak pada KN-33

Negara	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
Kelompok 15	1.426	0,0-300,0	69,32
Kelompok 7	1.188	0,0-887,4	67,88
Kelompok 12	1.097	0,0-754,3	58,80
Kelompok 8	1.077	0,0-250,0	63,64
Kelompok 20	1.010	0,0-150,0	56,76

Kelompok komoditas dengan jumlah pos tarif terkecil adalah kelompok 38 (aneka produk kimia) dengan hanya 80 pos tarif, atau 0,48%; kelompok 29 (bahan kimia organik) dengan 81 pos tarif, atau 0,49%;

kelompok 43 dengan 103 pos tarif, 0,62%; kelompok 53 dengan 117 pos tarif, 0,71%; dan kelompok 52 dengan 139 pos tarif 0,84%. Kelima kelompok ini hanya memiliki 520 pos tarif, atau 3,15 dari total seluruh pos tarif.

Tiga negara yang memiliki jumlah pos tarif terbesar di kelompok 15 adalah Turki (108 pos tarif), Korea (106 pos tarif), Indonesia (97 pos tarif). Tiga negara dengan jumlah pos tarif terbesar di kelompok 7 masing-masing adalah China (90 pos tarif), Indonesia (81 pos tarif), Korea (78 pos tarif). Di kelompok 12, tiga negara dengan pos tarif terbanyak adalah China (103 pos), Indonesia (78 pos) dan Turki (72 pos); dan di kelompok 8 adalah Indonesia (82 pos), China (78 pos), El Salvador (61 pos); di kelompok 20 empat negara dengan jumlah terbesar adalah Indonesia (116 pos), Korea (90 pos), China, dan Panama (masing-masing 75 pos).

Selanjutnya dari Tabel 2.9 terlihat bahwa dari lima kelompok komoditas dengan jumlah pos tarif terbanyak, besarnya tarif adalah: 0 – 300%, dengan rata-rata 69,32% untuk kelompok 15; 0 – 887,4%, dengan rata-rata 67,88% untuk kelompok 7; 0 – 754,3%, rata-rata 58,80% untuk kelompok 8; dan 0 – 150%, rata-rata 56,76% untuk kelompok 20. Selanjutnya, lima kelompok komoditas dengan jumlah pos tarif terkecil mempunyai besaran tarif 8,5 – 150%, dengan rata-rata 69,31% untuk kelompok 38; 8 – 150%, rata-rata 69,26% untuk kelompok 29; 0 – 150%, rata-rata 57,04% untuk kelompok 43; 0 – 150%, rata-rata 56,07% untuk kelompok 53; dan 2 – 150%, rata-rata 64,99% untuk kelompok 52.

2.3.2. Penjenjangan Tarif Batas (Bound Tariff)

Usulan G-20

Untuk mengkaji lebih lanjut profil tarif ini, ada baiknya juga apabila pos-pos tarif ini dikelompokkan dalam selang nilai tertentu, sesuai dengan apa yang dibahas dalam sidang-sidang komisi pertanian yang diusulkan sebelumnya, khususnya tentang pengelompokan yang berdasarkan jenjang (*tier*) dan atau *threshold* atau *band*. Sampai saat ini telah banyak usulan tentang banyaknya jenjang dan batas nilai tarif pada suatu jenjang tertentu. Setiap usulan ini tentu akan memberikan konfigurasi jumlah dan rata-rata tarif yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai bahan acuan, tulisan ini membandingkan empat usulan yang saat ini telah disampaikan oleh kelompoknya masing-masing, yakni: (1) usulan G-20, yang mirip dengan usulan Uni Eropa, (2) usulan Australia dan Amerika Serikat, (3) usulan ACP (*Afrika, Caribbean, and Pacific countries*), dan (4) usulan Selandia Baru dalam pertemuan kelompok baru, Kelompok Negara-6 atau *New G-6* di Vevey, Swiss pada 27-30 November 2006 yang lalu. Dalam kaitan ini, yang menjadi sorotan adalah analisis jumlah pos tarif yang masuk dalam setiap jenjang, selang dan rata-rata tarif dan negara mana serta kelompok komoditas (*chapter*) apa saja yang memiliki pos tarif

terbanyak di setiap jenjang tersebut. G-20 dan Uni Eropa untuk negara berkembang mengusulkan pengelompokan tarif sebanyak 4 jenjang, yaitu: Jenjang 1, $T \leq 30$; Jenjang 2, $30 < T \leq 80$; Jenjang 3, $80 < T \leq 130$; dan Jenjang 4, $T > 130$.

Usulan G-20 ini menyebabkan pos tarif hampir menyebar merata di lapis satu, dua, dan tiga. Banyaknya pos tarif yang termasuk pada Jenjang 1 adalah 4.875 pos, atau 29,50% dari seluruh tarif di G-33, dengan kisaran dari 0 – 30%, dan rata-rata 18,99%. Ke dalam kelompok 2 terdapat sejumlah 5.745 pos tarif (34,76%) yang berkisar dari 30,8 – 80% dan rata-rata 45,16%. Pada kelompok 3 terdapat 4.797 pos tarif (29,03%) dengan kisaran dari 81 – 130% dan rata-rata 103,92%. Kelompok 4 mempunyai pos tarif sejumlah 1.109 pos tarif (6,71%) dengan selang dari 130,4 – 887,4% dan rata-rata 186,91% (Tabel 2.10).

Lima negara dengan pos tarif terbanyak di Jenjang 1 adalah China dengan 854 pos tarif (17,52%); Korea Selatan 826 pos (16,94%); Turki, 341 pos (6,99%); Panama, 297 pos (6,09%); dan Filipina, 250 pos (5,13%) [Tabel 2.11]. Sedangkan beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benia, Belize, Barbados, Kuba, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, Saint Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Nikaragua, Trinidad dan Tobago, Tanzania, Nganda, Saint Vincent, dan Zambia.

Tabel 2.10. Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan G-20

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
$T < 30$	4.875 (29,50)	0,0-30,0	18,99
$30 < T < 80$	5.745 (34,76)	30,8-80,0	45,16
$80 < T < 130$	4.797 (29,03)	81,0-130,0	103,92
$T > 130$	1.109 (6,71)	130,4-887,4	186,91

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh pos tarif.

Tabel 2.11. Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terikat Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan G-20

Kelompok/ Chapter	Negara	Jumlah pos tariff	Selang tariff (%)	Rataan tariff (%)
$T < 30$	China	854 (17.52)	0,0-30,0	15,30
$30 < T < 80$	Indonesia	1250 (21.76)	35,0-70,0	42,78
$80 < T < 130$	Pakistan	671 (13.99)	100,0-100,0	100,00
$T > 130$	India	249 (22.45)	150,0-300,0	165,66

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.

Di Jenjang 2, enam negara dengan pos tarif terbanyak adalah Indonesia dengan 1250 pos tarif (21,75%); Guatemala, 694 pos tarif (12,08%); El Salvador, 504 pos (8,77%); Filipina, 503 pos (8,76%); Korea Selatan dan Turki masing-masing dengan 305 pos tarif (5,31%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Barbadas, Congo, Guyana, Jamaika, Kenya, Saint Lucia, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Pakistan, Senegal, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, Saint Vincent, dan Zimbabwe.

Di Jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Pakistan, dengan 671 pos tarif (13,99%); India, 323 pos (6,73%); St Lucia, 278 (5,80%); St Vincent, 273 pos (5,69%); dan Belize, 262 pos (5,46%). Sedangkan negara-negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Nigeria, Peru, Filipina, Senegal, Suriname, Uganda, Zimbabwe, China, dan Mongolia.

Pada Jenjang 4, dengan kisaran tarif lebih besar dari 130%, lima negara dengan jumlah pos arif terbanyak adalah India dengan 249 pos tarif (22,45%); Nigeria, 217 pos (19,57%); Zimbabwe, 215 pos (19,39%); Korea Selatan, 91 pos (8,21%); dan Indonesia, 55 pos tarif (4,96%).

Untuk Indonesia sendiri, sebagian besar (lebih dari 90% dari jumlah seluruh tarifnya) berada di Jenjang 2, hanya sedikit (< 5%) yang berada di Jenjang 4 dan sedikit sekali (< 1%) berada di Jenjang 1 dan Jenjang 3. Rataan tarif di Jenjang 1 adalah 24.14%; di Jenjang 2, 42,78%; di Jenjang 3, 95,0%; dan di Jenjang 4, 164,55%.

Khusus di Indonesia, persebaran pos tarif dan kelompok komoditas yang memiliki tarif tertinggi pada setiap jenjang tarif dapat pula ditelusuri seperti diperlihatkan Table 2.12.

Tabel 2.12. Kelompok Komoditas di Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan G-20

Jenjang Tarif	Kelompok/ <i>Chapter</i>	Jumlah Pos Tarif	Rataan Tarif (%)
T<30	Kelompok 13 dan 23	Masing-masing 1	30.00
30<T<80	Kelompok 22	16	55.63
80<T<130	Kelompok 17	14	95.00
T>130	Kelompok 4	12	210.00

Lima komoditas pertanian Indonesia dengan rata-rata tarif tertinggi di Jenjang 1 adalah komoditas 13 (lak; getah, damar dan sap, serta ekstrak nabati lainnya) dan 23 (residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan) dengan rata-rata sebesar 30% dan masing-masing

hanya 1 pos tarif; komoditas 10 (sereal), 35 (zat albumina; pati dimodifikasi; enzim) dan 52 (kapas) dengan rata-rata sebesar 27% dan jumlah pos tarif berturut-turut 5,3 dan 1. Selanjutnya beberapa komoditas yang tidak memiliki pos tarif sama sekali di kelompok ini adalah komoditas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51, dan 53.

Di Jenjang 2, semua komoditas memiliki pos tarif. Lima komoditas dengan rata-rata tarif tertinggi di Indonesia adalah komoditas 22 (minuman, alkohol dan cuka) dengan rata-rata 55,63% dan sejumlah 16 pos dan kisaran dari 40 - 70%; komoditas 20 (Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman) dengan rata-rata 48,45% dan sejumlah 116 pos dan kisaran 40 - 60%; komoditas 8 (Buah dan biji/kacang yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk dan melon) dengan rata-rata 47,20% dan sejumlah 82 pos dan kisaran 40 - 60%; komoditas 7 (Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan) dengan rata-rata 46,42% dan sebanyak 81 pos dan kisaran 40 - 60% komoditas 2 (daging dan sisa daging yang dapat dimakan) yang mempunyai rata-rata 45,94% dan sebanyak 64 pos tarif dengan kisaran 40 - 50%. Nilai rata-rata tarif terkecil adalah 40% yang dimiliki oleh beberapa komoditas antara lain 1, 4, 5, 10-19, 16-18, 23-25, 33, 35, 38, 41, 43, dan 50-53.

Pada Jenjang 3, hanya komoditas 17 (gula dan kembang gula) yang memiliki pos tarif, yaitu sebanyak 14, yang semuanya bernilai 95%. Di luar itu, tidak memiliki pos tarif sama sekali. Sedangkan pada Jenjang 4 hanya 3 komoditas yang memiliki pos tarif, yaitu kelompok 4 (Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan nilai 210% untuk semua pos tarif yang berjumlah 12; kelompok 10 (sereal) dengan nilai 160 persen untuk pos tarif yang berjumlah 8; dan kelompok 22 (minuman alkohol dan cuka) dengan nilai 150% untuk semua pos tarif yang berjumlah 35. Sisanya, tidak memiliki pos tarif sama sekali.

Dalam perspektif ini jelaslah bahwa ada beberapa komoditas yang memang sebaiknya dipertahankan dengan tarif yang tinggi dan sebagian lagi memang dapat disarankan untuk masuk dalam kelompok penurunan tarif yang lebih cepat. Namun, pertimbangannya haruslah jelas dan dampak dan manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung, jangka pendek atau jangka panjang harus dikaji dan diprakirakan, karena memang pertimbangan untuk masing-masing komoditas akan berbeda-beda. Hambatan tarif merupakan instrumen kebijakan yang paling tersedia saat ini bagi Indonesia. Kebijakan tarif ini dapat menangkalkan semakin derasnya arus dan konsumsi barang impor dan pada saat yang sama memberi pendapatan bagi pemerintah, tetapi sisi negatifnya adalah munculnya perdagangan yang menyimpang dari hukum, penyelundupan, dan korupsi. Dalam kaitan ini, pengenaan tarif yang tinggi bagi kelompok 22 misalnya, tidak akan menimbulkan masalah karena secara etika kita

tidak menginginkan konsumsi komoditas ini semakin meningkat, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Untuk komoditas 4 pertimbangannya mungkin berbeda, yaitu justru kita menginginkan masyarakat semakin mudah memperoleh komoditas ini, sehingga barangkali penge-naan tarif tinggi mungkin kurang tepat.

Usulan Australia dan Amerika Serikat

Usulan yang disampaikan oleh Australia dan Amerika Serikat tentang penjenjangan pos tarif adalah sebagai berikut: Jenjang 1, $T < 20$; Jenjang 2, $20 < T \leq 40$; Jenjang 3, $40 < T \leq 60$; dan Jenjang 4, $T > 60$. Dengan pengelompokan seperti ini, sebagian besar pos tarif akan mengelompok di lapis dua dan empat dan paling banyak di lapis empat. Apabila penurunan tarif disepakati secara linear dan progresif di mana pos tarif dengan tarif tinggi akan mengalami penurunan tarif yang lebih tinggi, maka rata-rata tingkat tarif akan menurun dengan cepat sekali, lebih cepat daripada usulan G-20, karena sebagian besar pos tarif ada di jenjang ini.

Banyaknya pos tarif yang termasuk dalam Jenjang 1 adalah 2.868 atau sekitar 17,35% dari jumlah pos tarif total di G-33 yang berkisar dari 0 – 20% dan rata-rata 12,54%. Di Jenjang 2 banyaknya pos tarif adalah 5.940 atau sekitar 35,94% dari jumlah pos tarif total yang berkisar dari 20,2 – 40% dan rata-rata 35,43%; di Jenjang 3 terdapat 1.340 pos tarif atau 8,11% dari jumlah pos tarif dengan kisaran 40,5 – 60% dan rata-rata 52,62%; di Jenjang 4 terdapat sebanyak 6.378 pos tarif atau 38,59% dari jumlah pos tarif total yang mempunyai kisaran dari 60,3 – 887,4% dan rata-rata 116,17% (Tabel 2.13).

Tabel 2.13. Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
$T < 20$	2.868 (17.65)	0,0-20,0	12,54
$20 < T \leq 40$	5.940 (35.94)	20,2-40,0	35,43
$40 < T \leq 60$	1.340 (8.11)	40,5-60,0	52,62
$T > 60$	6.378 (38.59)	60,3-887,4	116,17

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh pos tarif .

Lima negara yang mempunyai pos tarif terbanyak di Jenjang 1 adalah China dengan 585 pos tarif (20,40%); Korea Selatan, 571 pos (19,91%); Turki dan Panama masing-masing 281 pos tarif (9,80%); dan Pantai Gading, 238 pos (8,30%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Sri Lanka,

Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Peru, Senegal, Tanzania, Uganda, St Vincent, Zambia, dan Zimbabwe (Tabel 2.14).

Tabel 2.14. Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS

Kelompok/ Chapter	Negara	Jumlah pos tariff	Selang tariff (%)	Rataan tariff (%)
T<20	China	585 (20,40)	0,0-20,0	10,81
20<T<40	Indonesia	1037 (17,46)	27,0-40,0	39,76
40<T<60	Indonesia	224 (16,72)	45,0-60,0	54,71
T>60	Pakistan	685 (10,74)	100,0-200,0	101,09

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.

Untuk Jenjang 2, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia dengan 1.037 pos tarif atau 17,46% dari pos tarif di kelompok ini; El Salvador, 603 pos (10,15%); Filipina, 517 pos (8,70%); Korea Selatan 343 pos (5,77%); dan China, 329 pos (5,54%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Barbados, Guyana, Jamaika, Kenya, St Kitts dan Nevis, St Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent, dan Zambia.

Pada Jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Indonesia yang mempunyai 224 pos tarif (16,72%); Benin, 201 pos (15,0%); Korea Selatan, 183 pos (13,66%); Turki, 149 pos (11,12%); dan Filipina, 91 pos (6,79%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Antigua, Belize, Barbados, Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Peru, Senegal, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent, dan Zimbabwe.

Di jenjang 4, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Pakistan yang memiliki 685 pos (10,74%); India, 574 pos (9,00%); St Lucia, 309 pos (4,84%); St Vincent, 302 pos (4,74%); St Kitts dan Nevis, 279 pos (4,37%). Sedangkan yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Filipina, Senegal, Suriname.

Mengikuti usulan Australia dan AS ini, sebagian besar (77,33%) dari jumlah seluruh pos tarif komoditas pertanian Indonesia berada di Jenjang 2, hanya sedikit (< 6%) yang berada di Jenjang 4 dan sedikit sekali (< 1%) berada di Jenjang 1 dan sekitar 17% berada di Jenjang 3.

Rataan tarif di Jenjang 1 adalah 9,00%; di Jenjang 2, 39,76%; di Jenjang 3, 54,71%; dan di Jenjang 4, 143,03% (Tabel 2.15).

Tabel 2.15. Kelompok Komoditas di Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS

Jenjang Tarif	Kelompok/ <i>Chapter</i>	Jumlah Pos Tarif	Rataan Tarif (%)
T=<20	Kelompok 11	4	9.00
20<T=<40	Kelompok 1, 4 sampai 9, 14, 16 sampai 22, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51 dan 53	1037	39.76
40<T=<60	Kelompok 6, 15,19, 20, 22	73	54.70
T>60	Kelompok 4	12	143.03

Di Indonesia, hanya terdapat satu komoditas (*chapter*), yaitu kelompok 11 dengan empat pos tarif di Jenjang 1 menurut usulan Australia dan AS, dengan nilai tarif yang sama 9,00%. Sedangkan di Jenjang 2, rataan tarif tertinggi 40,00% dan ini terdapat pada 24 *chapter* dari 33 *chapter* yang ada, yakni *chapter* 1, 4 sampai 9, 14, 16 sampai 22, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51 dan 53. Tidak ada *chapter* yang tidak memiliki tarif di kelompok ini. Dari 9 *chapter* yang tersisa rataannya juga berkisar antara 30,00 - 40,00%.

Di Jenjang 3, Indonesia memiliki lima komoditas dengan rataannya tarif tertinggi yang kebetulan bernilai sama yakni 60,00%, yaitu kelompok 6 dengan 13 pos, kelompok 15 dengan 4 pos, kelompok 19 dengan 5 pos, kelompok 20 dengan 49 pos, dan kelompok 22 dengan 2 pos. Kelompok 4, 5, 10 sampai 14, 16 sampai 19, 23, 24, 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50 sampai 53 tidak memiliki pos tarif sama sekali.

Di Jenjang 4 Indonesia hanya memiliki 4 kelompok (digit 2) yang memiliki pos tarif, dengan urutan rataannya tarif sebagai berikut dari yang tertinggi ke yang terendah; kelompok 4 (produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan 12 pos dengan nilai tarif yang sama 210%; kelompok 10 (sereal) yang memiliki 8 pos tarif dengan nilai yang sama, 160%; kelompok 22 (minuman, alkohol, dan cuka) dengan sebanyak 42 pos dalam selang 70 - 150% dengan rataannya 136,67%; kelompok 17 (gula dan kembang gula) dengan jumlah 14 pos dengan nilai tarif yang sama 95%.

Dengan pengelompokan ini juga terlihat bahwa tampaknya tarif yang tinggi dimaksudkan sebagai penangkal masuknya produk pangan impor yang sarat dengan subsidi di suatu negara, di mana subsidi ini diberikan dalam kerangka pengembangan produk pangan di dalam negeri.

Pertimbangan lain menerapkan tarif terikat yang tinggi bagi produk pangan ini oleh Indonesia adalah untuk mengamankan ketahanan pangannya agar tidak menggantungkan kebutuhan pangannya sepenuhnya pada pasokan dari pasar dunia yang selalu bergejolak. Ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Usulan Negara-negara ACP (*Africa-Caribbean and Pacific Countries*)

Alternatif lain yakni, usulan yang disampaikan oleh Kelompok ACP adalah penjenjangan pos tarif sebagai berikut: Jenjang 1, $T < 50$; Jenjang 2, $50 < T < 100$; Jenjang 3, $100 < T \leq 150$; dan Jenjang 4, $T > 150$. Usulan ini akan menyebabkan pengelompokan pos tarif seperti piramida, dimana pada titik terendah jumlah pos tarif sangat besar dan semakin mengerucut ke atas pada posisi nilai tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu penurunan tarif tidak secepat usulan Australia dan Amerika Serikat dan bahkan usulan G-20, karena sebagian besar pos tarif ada di lapis terbawah. Banyaknya pos tarif yang termasuk dalam Jenjang 1 adalah 9.577 atau sekitar 57,95% dari jumlah pos tarif total di G-33 yang berkisar dari 0 – 50% dan rata-rata 29,62%. Di Jenjang 2 banyaknya pos tarif adalah 4.842 atau sekitar 29,30% dari jumlah pos tarif total yang berkisar dari 50,6 – 100% dan rata-rata 92,15%; di Jenjang 3 terdapat 1.784 pos tarif atau 10,80% dari jumlah pos tarif dengan kisaran 100,5 – 150% dan rata-rata 133,15%; di Jenjang 4 terdapat sebanyak 323 pos tarif atau 1,95% dari jumlah pos tarif total yang mempunyai kisaran dari 156,0 – 887,4% dan rata-rata 280,08% (Tabel 2.16).

Tabel 2.16. Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan Negara-negara ACP

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
$T < 50$	9.577 (57,95)	0,0-50,0	29,62
$50 < T < 100$	4.842 (29,30)	50,6-100,0	92,15
$100 < T < 150$	1.784 (10,80)	100,5-150,0	133,15
$T > 150$	323 (1,95)	156,0-887,4	280,08

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh pos tarif .

Lima negara yang mempunyai pos tarif terbanyak di Jenjang 1 adalah Indonesia dengan 1.159 pos tarif (12,10%); Korea Selatan, 997 pos (10,41%); China, 939 pos tarif (9,80%); Filipina, 750 pos (7,83%) dan Guatemala, 721 pos (7,53%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Barbados, Guyana, Jamaika, Kenya, St Lucia, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent (Tabel 2.17).

Tabel 2.17. Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Negara-negara ACP

Kelompok/ Chapter	Negara	Jumlah pos tariff	Selang tariff (%)	Rataan tariff (%)
T=<50	Indonesia	1159 (17,52)	9,0-50,0	40,69
50<T=<100	Pakistan	671 (21,76)	100,0-100,0	100,00
100<T=<150	India	223 (13,99)	150,0-150,0	150,00
T>150	Korea	88 (22,45)	167,0-887,4	474,10

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.

Untuk Jenjang 2, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Pakistan dengan 671 pos tarif atau 13,86% dari pos tarif di kelompok ini; India, 351 pos (7,25%); St Kitts dan Nevis, 234 pos (4,38%); Uganda 228 pos (4,71%); dan Benin 219 pos (4,52%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Nigeria, Senegal, Suriname, Tanzania, dan Zimbabwe.

Pada Jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah India yang mempunyai 223 pos tarif (12,50%); kemudian sekelompok negara yang memiliki jumlah pos tarif sama 217 pos (12,16%), yakni Nigeria, Tanzania dan Zambia; Mauritius, 216 pos (12,11%); Zimbabwe, 215 pos (11,05%); dan St Lucia, 80 pos (4,48%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Kongo, Kuba, Republik Dominika, Grenada, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Kenya, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Peru, Filipina, Senegal, Suriname, China, Mongolia, dan El Salvador.

Di jenjang 4, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Korea Selatan yang memiliki 88 pos (27,24%); Barbados, 39 pos (12,07%); Turki, 27 pos (8,36%); India, 26 pos (8,05%); dan Guatemala, 25 pos (7,74%). Sedangkan yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Benin, Belize, Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Jamaika, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Peru, Filipina, Senegal, Suriname, Tanzania, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabwe, China, dan Mongolia. Dari ketiga usulan yang disampaikan ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia tampaknya memiliki kepentingan yang relatif sama dengan beberapa negara dalam G-33 dalam hal pemberian perlindungan kepada komoditas pertaniannya. Negara-negara ini adalah Guatemala, El Salvador, Filipina, Korea Selatan, Turki, India, Pakistan, Nigeria, Zimbabwe, China. Kalau diperluas sedikit lagi termasuk Tanzania dan Zambia. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan mengajukan usulan ke setiap tahap forum, tampaknya Indonesia perlu

melakukan pendekatan yang intensif dengan negara-negara ini sebelum disampaikan ke forum G-33 yang lebih luas.

Untuk Indonesia sendiri, dengan memakai usulan negara-negara ACP, hampir 90% dari pos tarifnya berada di Jenjang 1, semakin menurun persentasenya ke jenjang berikutnya; 26,2% di Jenjang 2, 2,6% di Jenjang 3 dan hanya 1,5% di Jenjang 4.

Komoditas pertanian Indonesia dengan rata-rata tarif tertinggi di Jenjang 1 adalah kelompok 2, yang memiliki 64 pos tarif, yang nilai tarifnya berkisar antara 35-50% dan rata-rata 45,94%; diikuti kelompok 7 dengan 77 pos tarif dan tarif berkisar dari 40-50% serta rata-rata 45,71%; kelompok 8 dengan 65 pos tarif dan tarif berkisar antara 40-50% serta rata-rata 43,85%; kelompok 9 dengan 65 pos tarif dan tarif berkisar dari 40-50% serta rata-rata 41,23%; dan kelompok 21 dengan 35 pos tarif dan tarif berkisar dari 40-50% serta rata-rata 40,43% (Tabel 2.18).

Tabel 2.18. Kelompok Komoditas Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada setiap Jenjang Tarif Usulan Negara-negara ACP

Jenjang Tarif	Kelompok/ <i>Chapter</i>	Jumlah Pos Tarif	Rataan Tarif (%)
T=<50	Kelompok 2	64	45,94
50<T=<100	Kelompok 17	14	95,00
100<T=<150	Kelompok 3	35	150,00
T>150	Kelompok 4	12	210,00

Di Jenjang 2, rata-rata tarif tertinggi dimiliki oleh kelompok 17 dengan sebanyak 14 pos tarif dengan nilai tarif yang sama sebesar 95%; diikuti oleh kelompok 22 dengan 9 pos tarifnya dan tarif yang berkisar dari 60-70% serta rata-rata tarif 67,78%; kemudian rata-rata tarif 60% yang terdapat pada pos-pos tarif yang ada di Jenjang 2 ini yang memiliki tarif yang sama 60%, yakni *chapter* 6 sampai 9, 15, 19 sampai 22. Kelompok/*chapter* lain tidak memiliki tarif sama sekali.

Pada Jenjang 3, hanya 1 kelompok yang memiliki pos tarif atau tarif, yakni kelompok 22 (minuman, alkohol, dan cuka) dengan sebanyak 35 pos tarif dan nilai tarif yang sama 150%. Di luar kelompok ini, tidak memiliki pos tarif sama sekali. Sedangkan pada Jenjang 4 hanya 2 *chapter* yang memiliki pos tarif, yaitu kelompok 4 (produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan nilai 210% untuk semua pos tarif yang berjumlah 12; kelompok 10 (sereal) dengan nilai 160% untuk pos tarif yang berjumlah 8. Sisanya, tidak memiliki pos tarif sama sekali.

Usulan Selandia Baru

Dalam pertemuan belum lama ini, pada tanggal 27-30 November 2006 di Vevey, Swiss, Selandia Baru mengajukan satu alternatif modalitas penurunan tarif dengan penjenjangan pos tarif sebagai berikut: Jenjang 1, $T \leq 20$; Jenjang 2, $20 < T \leq 50$; Jenjang 3, $50 < T \leq 75$; dan Jenjang 4, $T > 75$. Usulan ini tidak berbeda jauh dari usulan Australia dan AS dimana sebagian besar tarif berada di lapis dua dan empat, tetapi paling banyak berada di lapis dua, sementara di lapis tiga hanya sebagian kecil.

Banyaknya pos tarif yang termasuk dalam Jenjang 1 adalah 2.868 atau sekitar 17,35% dari jumlah pos tarif total di G-33 yang berkisar dari 0–20% dan rata-rata 12,54%. Di Jenjang 2 banyaknya pos tarif adalah 6.709 atau sekitar 40,60% dari jumlah pos tarif total yang berkisar dari 20,2–50% dan rata-rata 36,92%; di Jenjang 3 terdapat 825 pos tarif atau 4,99% dari jumlah pos tarif dengan kisaran 50,6–75% dan rata-rata 61,77%; di Jenjang 4 terdapat sebanyak 6.124 pos tarif atau 37,06% dari jumlah pos tarif total yang mempunyai kisaran dari 76,5–887,4% dan rata-rata 118,10% (Tabel 2.19).

Tabel 2.19. Persebaran Tarif Terikat menurut Jenjang Tarif Usulan Selandia Baru

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
$T \leq 20$	2.868 (17,35)	0,0-20,0	12,54
$20 < T \leq 50$	6.709 (40,60)	20,2-50,0	36,92
$50 < T \leq 75$	825 (4,99)	50,6-75,0	61,77
$T > 75$	6.124 (37,06)	76,5-887,4	118,10

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh pos tarif.

Lima negara yang mempunyai pos tarif terbanyak di Jenjang 1 adalah China dengan 585 pos tarif (20,40%); Korea Selatan, 571 pos (19,91%); Turki, 281 pos tarif (9,80%); Panama, 276 pos (9,62%) dan Pantai Gading, 238 pos (8,30%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Barbados, Kongo, Kuba, Guyana, Republik Dominika, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Peru, Senegal, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent, Zambia, dan Zimbabwe (Tabel 2.20).

Untuk Jenjang 2, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia dengan 1.155 pos tarif atau 17,22% dari pos tarif di kelompok ini; Guatemala, 690 pos (10,28%); El Salvador, 657 pos (9,79%); Filipina 605 pos (9,02%); dan Korea Selatan 426 pos (6,35%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua,

Benin, Belize, Barbados, Guyana, Jamaika, Kenya, St Lucia, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Suriname, Trinidad dan Tobago dan Tanzania.

Tabel 2.20. Negara-negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Selandia Baru

Kelompok/ Chapter	Negara	Jumlah pos tariff	Selang tariff (%)	Rataan tariff (%)
T=<20	China	585 (20,40)	0,0-20,0	10,81
20<T=<50	Indonesia	1155 (17,22)	27,5-50,0	40,80
50<T=<75	Benin	201 (24,36)	60,0-60,0	60,00
T>75	Pakistan	685 (11,19)	100,0-200,0	101,09

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.

Pada Jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Benin yang mempunyai 201 pos tarif (24,36%); kemudian disusul Korea Selatan yang memiliki jumlah pos tarif 134 pos (16,24%); Indonesia dengan jumlah pos tarif 113 (13,70%); Turki dengan 112 pos (13,58%); dan Botswana dengan 46 pos (5,58%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Antigua, Barbados, Kongo, Kuba, Grenada, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Kenya, St Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Senegal, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent, dan Zimbabwe.

Di jenjang 4, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Pakistan yang memiliki 685 pos (11,19%); India, 573 pos (9,36%); St. Lucia, 309 pos (5,05%); St. Vincent, 302 pos (4,93%); dan St. Kitts and Nevis, 279 pos (4,56%). Sedangkan yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Peru, Filipina, Senegal, Suriname, China, dan Mongolia.

Untuk Indonesia sendiri, dengan memakai usulan Selandia Baru, di Jenjang 1 persentasenya tidak sampai 1,0%; meningkat tajam di Jenjang 2, mencapai hampir 87% dari pos tarifnya, kemudian mengerucut kembali ke tingkat tarif yang lebih tinggi di Jenjang 3 menjadi 8,43% dan hanya 5,15% di Jenjang 4.

Lima komoditas pertanian Indonesia dengan rata-rata tarif tertinggi di Jenjang 1 adalah kelompok 11, dengan hanya 4 pos tarif, yang nilai tarifnya adalah sama 9% (Tabel 2.21).

Di Jenjang 2, rata-rata tarif tertinggi dimiliki oleh kelompok 2 dengan sebanyak 64 pos tarif dengan nilai tarif yang berkisar dari 35,00-50% dan

rataan sebesar 45,94%; diikuti oleh kelompok 7 dengan 77 pos tarifnya dan tarif yang berkisar dari 40-50% serta rataan tarif 45,71%.

Tabel 2.21. Kelompok Komoditas Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada Setiap Jenjang Tarif Usulan Selandia Baru

Jenjang Tarif	Kelompok/ <i>Chapter</i>	Jumlah Pos Tarif	Rataan Tarif (%)
T=<20	Kelompok 11	4	9,00
20<T=<50	Kelompok 2	64	45,94
50<T=<75	Kelompok 22	9	67,78
T>75	Kelompok 4	12	210,00

Pada Jenjang 3, kelompok yang memiliki nilai tarif tertinggi adalah kelompok 22, yakni kelompok minuman, alkohol, dan cuka sebanyak 9 pos tarif dan nilai tarif berkisar dari 60-70% dan rataan 67,78%. Adapun kelompok HS lain yang memiliki tarif dijenjang ini semuanya bernilai tarif 60%. Selain dari ini, tidak ditemukan pos tarif yang dikenai tarif di jenjang ini. Sedangkan pada Jenjang 4 terdapat 4 *chapter* yang memiliki pos tarif, yang tertinggi nilai tarifnya adalah kelompok 4 (produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan nilai 210% untuk semua pos tarif yang berjumlah 12; diikuti kelompok 10 (sereal) dengan nilai 160% untuk pos tarif yang berjumlah 8; kelompok 22 dengan nilai tarif 150% untuk pos tarif yang berjumlah 35 dan kelompok 17 dengan nilai tarif 95% untuk semua tarif yang berjumlah 14. Sisanya, tidak memiliki pos tarif sama sekali.

Tabel 2.1. Tingkat Bantuan Domestik (Subsidi Keluaran), Awal Sebelum Simulasi Tiap Komoditas di Setiap Negara (%)

Nama Sektor Agregat	Peubah	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara Maju Lainnya	Indonesia	KN-33	Sisa Negara Lainnya	Total
1. Padi dan olahannya	Padi_Olah	2,1	0	24,7	-0,1	0	-0,6	0,2	0	26,4
2. Gandum	Gandum	0	0	3,6	0,3	0,7	-1,3	5	0,6	8,9
3. Serealia lainnya	Jagung	1,5	0	6,7	0,2	3,5	-1,3	-1,2	0,5	10
4. Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,1	0	4,3	0,4	0,3	-0,9	-0,9	-2,3	1
5. Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	45,9	0	28,8	35,7	0,5	-0,9	1,6	-0,9	110,7
6. Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0	0	0,2	0	0	-6,6	-0,6	-0,8	-7,7
7. Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,1	0,1	4,3	29,7	0,1	-0,8	1,2	0	34,7
8. Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	0,8	0	0	0,2	0,3	-1,2	-1,1	-1,9	-2,8
9. Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,1	0	0	-0,1	0,3	-1	-1,5	-1,3	-3,3
10. Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,8	0	0,6	0,1	1,3	-1,2	-0,4	-0,6	0,6
11. Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1	0	4,3	1,8	0,7	-0,9	1,1	-0,2	7
12. Produk minyak nabati	MinyakNabati	0	0	0	0	0	-1,2	-2,2	-0,7	-4,1
13. Produk makanan olahan	OlahMakanan	-16,4	-13,8	0	-3,4	-0,4	-6,6	-8,9	-2,6	-52,1
14. Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-6,7	1,3	0	1,3	-1,6	-1,6	-3,1	-3,7	-14,1
15. Produk industri	Industri	-4,1	-1,3	0	0,2	-0,9	-2,3	-4,6	-2	-14,9
16. Produk jasa	Jasa	-5	-3,7	0	-1,8	-2,8	-2,3	-3,2	-3,4	-22,2
	Total	19,3	-17,4	77,5	64,5	2	-30,7	-18,6	-19,3	78,1

Sumber: GTAP versi 6 (diolah).

Tabel 2.6. Tingkat Subsidi Ekspor, Awal Sebelum Simulasi Tiap Komoditas di Setiap Negara (%)

Nama Sektor Agregat	Peubah(<i>rTX</i>)	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara Maju Lainnya	Indonesia	KN-33	Sisa Negara Lainnya	Total
1. Padi dan olahannya	Padi_Olah	0	0	0	291,6	0	0	0	0	292
2. Gandum	Gandum	0	0	0	60,4	0	0	0	0	60,4
3. Serealia lainnya	Jagung	0	0	0	233,7	0	0	0	0	234
4. Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0	51,8	0	16,2	5,6	0	0,5	0,4	74,4
5. Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0	0	0	415,2	0	0	1,3	0,5	417
7. Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0	0	0	0	0	0	0	4,4	4,4
8. Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	0	0	0	399,2	0,6	0	0	0	400
9. Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0	1,2	0	28	1,4	0	0,1	0,6	31,3
10. Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0	0	54,8	214,2	23,1	0	-0,5	6,7	298
11. Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1
12. Produk minyak nabati	MinyakNabati	0	0	0	0	0	0	2	0	2
13. Produk makanan olahan	OlahMakanan	0	0	0	15,2	2,9	0	0,6	0,1	18,8
14. Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0	0	0	0	0,1	0,5	-1,8	-9,7	-11
15. Produk industri	Industri	0	-1,4	0	0	-2,6	-4,9	-6,1	-4	-19
16. Produk jasa	Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	51,6	54,8	1673,8	31,2	-4,3	-3,8	-0,8	1802

Sumber: GTAP versi 6 (diolah).

III. PERKEMBANGAN MUTAKHIR PERUNDINGAN PUTARAN DOHA

3.1. Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong

Konferensi Tingkat Menteri ke VI di Hongkong pada tanggal 13-18 Desember 2005 lalu ternyata belum mampu memberikan hasil nyata yang dapat disetujui bersama oleh para negara anggota. Hal ini tersirat dari Laporan Ketua Sidang Khusus Komisi Pertanian yang ditujukan ke *Trade Negotiation Committee (TNC)* di mana menurutnya ia seharusnya melaporkan sebuah *draft text* modalitas, tetapi kenyataannya ia hanya mampu melaporkan cerminan dari perkembangan aspirasi dan keinginan negara-negara anggota yang dilaporkan kepadanya. Menurut Ketua Sidang, para anggota WTO menugaskannya untuk mendaftarkan pada posisi mana perjalanan WTO saat ini dan bukan untuk memberi resep apa yang harus dikerjakan dalam program-program lanjutan nanti. Untuk itu beliau berusaha memperjelas di mana terdapat titik temu atau di mana perbedaan-perbedaan masih terjadi (WTO, 2005).

Pada butir (1) "*Draft Ministerial Declaration: Revision* (WTO 2005) para peserta sidang masih tetap sepakat untuk mendukung Deklarasi dan Keputusan Doha dan juga keputusan Majelis Umum pada 1 Agustus 2004 (*Framework*). Para peserta juga berusaha menyelesaikan sepenuhnya Program Kerja Doha dan menuntaskannya mulai pada tahun ini (2006) di Doha. Mereka juga menekankan betapa pentingnya dimensi pembangunan dalam setiap aspek Program Kerja Doha dan semuanya bertekad kembali untuk membuatnya menjadi kenyataan yang bermakna, melalui hasil-hasilnya dalam perundingan tentang akses pasar dan penyusunan aturan dan dan isu-isu khusus yang berkaitan dengan pembangunan.

Beberapa isu yang mengarah ke suatu titik temu antara lain dalam: (i) bantuan domestik yang akan dikelompokkan dalam 3 jenjang penurunan di dalam *Final Bound Total AMS*, (ii) jenjang tertinggi mengalami pemotongan lebih besar, (iii) pemotongan bantuan domestik yang mendistorsi perdagangan dan yang khas dan yang tidak khas (*de minimis*) komoditas secara keseluruhan. Namun, modalitas pemotongan ini belum berhasil diperoleh, meskipun kerangkanya sudah disepakati dalam Paket Juli 2004. Seperti dinyatakan oleh Ketua Sidang dalam laporannya, "*The overall reduction in trade-distorting domestic support will still need to be made even if the sum of the reductions in Final Bound Total AMS, de minimis and Blue Box payments would otherwise be less than that overall reduction,*". Sementara itu, draft ini juga menyatakan bahwa anggota-anggota dari negara berkembang yang tidak mempunyai komitmen AMS dikecualikan dari pemotongan dalam *de minimis* dan pemotongan bantuan domestik yang mendistorsi perdagangan secara keseluruhan.

Dalam pilar subsidi ekspor, para peserta sidang setuju untuk menjamin penghapusan semua bentuk subsidi dan jenis-jenisnya secara bersama-sama untuk semua tindakan ekspor yang berdampak setimpal dan akan diselesaikan pada akhir tahun 2013. Sementara pendisiplinan kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan program asuransi, perusahaan perdagangan ekspor milik negara, dan bantuan pangan akan dituntaskan pada 30 April 2006 (WTO 2005). Namun, lagi-lagi modalitas untuk mencapai keinginan ini belum ada apalagi disepakati, sebagaimana dilaporkan Ketua Sidang, “....., *to be specified in modalities, so that a substantial part is realized by the end of the first half of the implementation period.*

Dalam pilar akses pasar, Ketua Sidang mencatat adanya kemajuan dalam penerapan kesetaraan *ad valorem (ad valorem equivalent)*, yakni bagi komoditas-komoditas yang sebelumnya memiliki hambatan bukan-tarif. Selanjutnya telah diterima adanya 4 jenjang pemotongan tarif. Namun, rentang tarif (*threshold*) di setiap jenjang ini belum disepakati termasuk rentang tarif yang berlaku bagi anggota-anggota negara berkembang. Khusus untuk komoditas kapas, para peserta sidang menyatakan dukungan dan tekadnya untuk menjamin diperolehnya suatu keputusan yang jelas dalam perundingan pertanian dan melalui Subkomisi Kapas secara sungguh-sungguh, cepat dan khas, yakni:

- (i) Semua bentuk subsidi ekspor kapas akan dihapus negara maju tahun 2006.
- (ii) Dalam akses pasar, negara maju akan memberikan akses bebas bea masuk dan kuota bagi ekspor kapas dari negara-negara terbelakang atau *least-developed countries* (LDCs) sejak dimulainya waktu pelaksanaan.
- (iii) Para peserta sidang bertekad untuk memberikan prioritas dalam perundingan agar bantuan domestik dalam produksi kapas yang mendistorsi pasar harus dikurangi lebih besar dari rumus penurunan apapun dan harus dilaksanakan dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang umum berlaku.

Bagi Indonesia, ada dua hal pokok yang penting dikaji, yakni apa dampak usulan-usulan modalitas di tiga pilar di atas terhadap kepentingan sektor pertanian Indonesia dan adakah usulan yang berasal dari Indonesia untuk melindungi kepentingannya secara khusus atau G-33 secara umum? Dalam forum perundingan WTO, perundingan bidang pertanian adalah perundingan yang paling kompleks dan sulit mencapai kesepakatan karena merupakan lokomotif dari perundingan yang lain. Selain itu, muatan isu pertanian tidak saja masalah ekonomi tetapi juga muatan politik dan sosial karena pertanian melibatkan sebagian besar anggota WTO yang masih menghadapi masalah sosial dan kemiskinan.

Oleh karena itu, apabila perundingan di bidang pertanian berhasil, maka perundingan di bidang lain akan berjalan lancar.

3.2. Modalitas

Berikut ini adalah ulasan tentang berbagai modalitas yang telah dihasilkan dari berbagai perundingan di forum WTO yang menyangkut kebijakan dan usulan pendisiplinan dan modalitas negara atau kelompok-kelompok negara anggota, kritikan dan posisi dari negara atau kelompok-kelompok negara anggota di WTO atas kebijakan dan modalitas tersebut. Modalitas-modalitas yang diulas antara lain adalah *Total Aggregate Measurement of Support/AMS*, Kotak Biru (*Blue Box*), Kotak Hijau (*Green Box*) dan Persaingan atau Subsidi Ekspor atau (*Export Competition* atau *Export Subsidy*).

3.2.1. Total Bantuan Agregat (*Total Agregate Measurement of Support*)

Meskipun secara umum sudah disepakati dan berlaku di bidang pertanian, hasil perundingan WTO dalam pelaksanaannya ke tingkat lebih rinci lama kelamaan menimbulkan banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan negara maju untuk menekan kepentingannya tanpa mengindahkan akibatnya pada negara-negara yang belum maju/berkembang. Contoh yang paling nyata adalah penggunaan *non-tariff measures*, seperti kuota impor dan subsidi. Perdagangan di bidang pertanian menjadi sangat terganggu dan ketidakseimbangan sering terjadi, terutama dengan adanya subsidi ekspor yang awalnya tidak diperkenankan untuk produk-produk industri.

Putaran Uruguay menghasilkan perjanjian multilateral yang pertama, khusus untuk sektor pertanian. Inilah yang menjadi langkah awal yang cukup berarti menuju tata perdagangan yang "*fair*" dan tidak terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Perjanjian ini berlaku lebih dari enam tahun berikutnya, bahkan untuk negara berkembang berlaku sepuluh tahun ke depan, sejak tahun 1995. Putaran Uruguay juga mencakup komitmen untuk terus memperbaharui dan mengubah (*reform*) kesepakatan melalui jalur negosiasi. Perjanjian/komitmen di bidang pertanian ini mulai dilakukan pada tahun 2000.

Tujuan perjanjian di bidang pertanian adalah mereformasi perdagangan bidang pertanian dan membuat kebijakan yang lebih berorientasi pasar (*market-oriented*). Ini akan sangat membantu baik negara pengimpor maupun pengekspor, dalam hal peramalan kebutuhan maupun tingkat keamanan pangan. Aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan baru berlaku pada ke tiga pilar, yaitu: (i) akses pasar (*market access*) – *trade restrictions* terhadap impor, (ii) bantuan domestik (*domestic support*) –

subsidi dan program pemerintah lainnya, seperti jaminan harga dasar produk, peningkatan pendapatan petani secara tidak langsung, (iii) subsidi ekspor (*export subsidy*) – atau cara lain untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

Aggregate measurement of support/AMS adalah perhitungan yang masuk dalam kategori pilar bantuan domestik. Perdebatan/silang pendapat yang utama dalam pilar ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang menjamin harga domestik nantinya akan menimbulkan situasi kelebihan produksi (*over-production*). Hal ini diduga akan menekan impor dan pada gilirannya nanti akan menimbulkan kebijakan lainnya yaitu subsidi ekspor dan *low-priced dumping* di pasar dunia. Perjanjian di bidang pertanian membedakan antara (a) program bantuan yang langsung menggairahkan dan meningkatkan produksi dalam negeri, dan (b) program bantuan yang tidak mempunyai kaitan langsung ke produksi (*no direct effect*).

Kebijakan domestik yang langsung meningkatkan produksi dalam negeri dan perdagangan menurut perundingan perjanjian harus dikurangi. Negara-negara anggota WTO menghitung sendiri kebijakan domestiknya yang masuk dalam pilar bantuan domestik untuk bidang/sector pertanian per tahun. Perhitungan inilah yang disebut sebagai *total aggregate measurement of support* atau Total AMS, dengan menggunakan tahun dasar 1986-1988.

Defenisi *Aggregate Measurement of Support/AMS* di dalam *Part I*, Artikel I Perjanjian Pertanian adalah tingkat bantuan per tahun yang diberikan pada suatu produk pertanian yang mempertimbangkan atau berpihak kepada petani secara umum, dengan pengecualian program bantuan seperti tercantum pada *Annex 2* Perjanjian ini, yaitu:

- (i) bantuan yang diberikan pada tahun dasar, seperti tercantum dalam tabel di dokumen penunjang, yang juga ada di bagian IV dari jadwal negara anggota,
- (ii) bantuan yang diberikan pada tahun-tahun implementasi dan sesudahnya, yang dihitung sesuai dengan *Annex 3* Perjanjian ini dengan data dari negara-negara yang bersangkutan sesuai dengan Part IV dari skedul negara-negara anggota.

Tabel 3.1. Tingkat Pemotongan Negosiasi dan Perhitungan AMS

Jenjang	Rentang (milyar dolar AS)	Pemotongan (%)
1	0-12/15	37-60
2	12/15-25	60-70
3	> 25	70-83

Sebenarnya dengan implementasi Perjanjian Pertanian WTO diharapkan bahwa negara maju dapat mengurangi proteksi domestiknya yang sangat tinggi, sehingga dengan demikian negara berkembang dapat memanfaatkan peluang akses pasar yang tercipta. Namun kenyataannya tidaklah demikian yang terjadi. Seperti yang tertera dalam beberapa argumentasi berikut ini:

- (1) Tarif tinggi tetap berlaku di negara maju: tahun pertama berlakunya perjanjian pertanian, di AS masih berlaku tarif tinggi untuk gula, sebesar 244%; kacang tanah 174%; di MEE masih berlaku tarif daging sapi 213%, gandum 168%; di Jepang masih berlaku tarif gandum 353%; dan di Kanada masih berlaku tarif mentega 360%, telur 236% (Khor 2003 dan Das 1998). Karena menurut perjanjian, negara maju tersebut hanya dihimbau untuk menurunkan tarifnya sebesar 36% rata-rata sampai tahun 2000, maka tarif-tarif tersebut masih tergolong tetap tinggi walaupun sudah diturunkan.
- (2) Bantuan domestik semakin bertambah bukannya menurun. Walaupun dalam perjanjian pertanian diharapkan adanya penurunan bantuan domestik pertanian, kenyataannya seluruh bantuan domestik semakin bertambah. Walaupun negara maju diharapkan menurunkan tingkat AMS, tetapi hanya sebagian subsidi saja yang masuk dalam kategori AMS, sedangkan sebagian bentuk subsidi yang seharusnya masuk dalam kategori AMS dikeluarkan dari kategori ini dan dimasukkan di dalam kategori lain. Hal ini menyebabkan AMS menurun tetapi *Total Domestic Support* bertambah. Dengan kata lain, yang terjadi hanyalah pemindahan kategori subsidi, sehingga terlihat AMS menurun sesuai ketentuan, tetapi *Total Support* bertambah (seperti contohnya: *Total Support Estimate* dari 24 negara OECD naik dari 275,6 milyar dolar AS pada 1986-1988 menjadi 326 milyar dolar AS pada 1999) (OECD, 2000). Hal inipun memerlukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan angka-angka subsidi terbaru sesuai data yang terbaru. Melalui kajian seperti ini, kita dapat melihat bagaimana negara maju berupaya memanfaatkan peluang-peluang dalam perjanjian perjanjian pertanian untuk tetap dapat memberikan subsidi atau bantuan domestiknya atau memperjuangkan kepentingan negaranya, dan tetap dalam kerangka perjanjian pertanian tersebut; sementara negara berkembang yang memang masih sangat minimal/terbatas dalam subsidi/bantuan domestiknya tidaklah dapat menaikkan batas subsidi/bantuan domestiknya melampaui batas *de minimis* yang telah ada. Dengan kata lain, negara berkembang tidak dapat memberikan dan memberlakukan subsidi domestik melampaui tingkat *de minimis* yang telah disepakati. Apakah dasar penetapan tingkat *de minimis* tersebut dan bagaimana-kah dengan Indonesia? Tingkat *de minimis* yang disepakati adalah 10% dari total nilai pertanian. Apakah penetapan angka 10% ini sudah tepat dan sesuai?

- (3) Tingkat subsidi ekspor yang tinggi masih terjadi. Negara maju sepakat untuk mengurangi anggaran subsidi ekspor sebesar 36% dan total sebesar 21%. Tingkat awalnya (*base-level*) adalah rata-rata tahun 1986-1990 dan pengurangan haruslah sudah dilakukan pada periode 1995-2000. Walaupun demikian karena diawali dengan tingkat subsidi ekspor yang cukup tinggi, maka pada tahun 2000-an pun masih akan terdapat tingkat subsidi ekspor yang tinggi.

Mengutip pemikiran beberapa ahli filsafat Indonesia, globalisasi seharusnya difahami bukan hanya soal perdagangan bebas saja tetapi hendaknya dipahami sebagai interaksi intensif pada skala dunia atau sebagai penerapan kinerja pasar bebas ke seluruh dunia, bukan hanya suatu atau beberapa negara. Hal ini dikarenakan *basic instinct* globalisasi adalah perentangan bisnis lintas negara (Herry-Priyono. 2006). Akses Indonesia dan negara berkembang lainnya yang memiliki daya beli rendah sangatlah terbatas (kalau tidak dapat dikatakan sangat kecil) pada pasar bebas dibanding dengan negara maju yang memiliki “daya beli politik” yang tinggi dalam tatanan global. Seperti dikemukakan oleh seorang ekonom Jerman abad ke-19, Frederich List, yang punya satu istilah bagus untuk menggambarkan apa yang terjadi, yaitu “*menendang tangga*”. Penjelasannya sebagai berikut: ketika negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris masih berupa negara berkembang, mereka menggunakan berbagai macam taktik proteksi “industri bayi”. Mereka menolak perdagangan bebas, seperti tercermin dalam 40% tarif masuk yang diterapkan Amerika ketika negara itu sedang membangun ekonominya tahun 1820-1925. Namun ketika mereka sampai di puncak kekuatan ekonomi, mereka melarang negara-negara lain memakai taktik itu. Lalu mereka mengharuskan perdagangan bebas karena lebih menguntungkan bagi pasar industri mereka yang sudah menjadi raksasa global. Jadi seperti orang naik atap dengan tangga, ketika sudah sampai di atap, ia menendang tangga itu agar orang lain tidak dapat mengejanya. Sebenarnya secara filosofi, sederhana dan pragmatis saja alasan mengapa negara maju sangat mendukung globalisasi, yaitu karena beberapa negara maju (*collapse revenue*-nya) membutuhkan pasar-pasar baru dan mulai mendesakkan semacam deregulasi dari batas-batas negara, baik itu perdagangan, tarif, pajak, dan lain sebagainya yang sebelumnya ada untuk tiap-tiap negara. Sejak tahun 1980-an diinginkan batas-batas itu ditiadakan. Deregulasi itu bukan hanya persoalan negara yang ditiadakan batas-batasnya, tetapi juga badan-badan usaha seperti bisnis mengalami deregulasi. Hal ini dibarengi dengan revolusi teknologi informasi.

Jadi negara berkembang, terutama Indonesia, haruslah mencermati filosofi terciptanya globalisasi ini dan untuk itulah perlu digunakan strategi “globalisasi selektif” dimana pemerintah bersama-sama non-pemerintah, bisnis dan nonbisnis bersama-sama bertemu dan mencari manfaat dari globalisasi ini. Selektif berarti menanggapi globalisasi sesuai dengan kondisi Indonesia dan mengambil kebijakan publik yang

menguntungkan dan membantu Indonesia, dan tidak lagi menganggap kekuatan penentu hanya berada di tangan pemerintah saja.

3.2.2. Kotak Biru (*Blue Box*)

Bantuan domestik untuk komoditas pertanian merupakan isu yang sangat sensitif bagi negara-negara produsen produk pertanian. Beberapa negara maju memberikan subsidi yang besar bagi petaninya, sedangkan di pihak lain banyak negara lain yang tidak dapat menerapkan kebijakan biaya tinggi tersebut. John Kenneth Galbraith (1987) dalam tesisnya mengemukakan:

“The reality is that no industrial country not the United States, not Canada, not the countries of the EEC, not the other European states, not we all know, Japan leaves its farmers to the free market. None those who affirm the beneficence of the free market for agriculture are, as regards the industrially developed countries, speaking of something that does not exist. Perhaps it will in the next world; theology has its claim on that. Not in this world. It does not exist because left to market forces, agriculture has a relentless, wholly normal tendency to overproduce.”

Perundingan Putaran Uruguay untuk pertanian merupakan langkah awal menuju perbaikan pola persaingan antarnegara-negara produsen untuk menciptakan pola perdagangan yang lebih adil. Agenda ini dilanjutkan dengan Konferensi Tingkat Menteri di Doha, yang memberikan peluang kepada para perunding untuk berunding mengenai 3 pilar yakni akses pasar, subsidi ekspor, dan bantuan domestik.

Definisi bantuan domestik kotak biru merupakan penjelasan umum dari Pasal 6.5 Perjanjian Putaran Uruguay untuk Pertanian yang digunakan di dalam perundingan perdagangan dalam forum WTO. Awal lahirnya bantuan domestik yang termasuk dalam kategori kotak biru ditujukan untuk memecah kebuntuan negosiasi di bidang pertanian dalam perundingan Uruguay. Pada waktu itu AS dan negara-negara Eropa mengingkari kesepakatan *Blair House Accord* yang disusun pada tahun 1992. Kesepakatan itu menyebutkan bahwa pengecualian terhadap pengurangan bantuan domestik dapat dilakukan untuk produk-produk yang terkait dengan program pembatasan jumlah produksi. Dengan kata lain, untuk produk pertanian yang diusahakan pada luasan lahan dan tingkat produksi yang tetap, atau untuk jumlah ternak yang tetap bantuan domestik masih boleh diberikan. Di sisi lain, untuk berbagai bentuk program yang sifatnya ditujukan untuk peningkatan produksi, bantuan domestik tidak dapat diberikan (*prohibited*).

Dengan mengacu kepada klausul tersebut, kebijakan pertanian dalam negeri yang dilakukan oleh AS dan negara-negara ekonomi Uni Eropa dengan *common agricultural policy*/CAP mengacu sepenuhnya pada kebijakan “program pembatasan produksi” (*production – limiting programs*). Di dalam perkembangannya saat ini kebijakan perdagangan yang dilaku-

kan AS sudah mulai terlihat upaya pemotongan dana yang terkait dengan kotak biru bagi pertanian. Negara pengguna kotak biru terbesar saat ini adalah negara-negara UE, Jepang, Swiss, Norwegia, dan beberapa negara kecil lainnya. Jumlah negara berkembang yang memanfaatkan bantuan domestik kotak biru sedikit sekali.

Kotak biru sebagai salah satu bagian dari modalitas sumber daya dalam arti luas merupakan kebijakan yang anomali di dalam Perjanjian Pertanian (*Agreements on Agriculture*), dan banyak dimanfaatkan oleh negara maju untuk dapat menghindari reformasi program bantuan domestik yang dilakukannya. Di sisi lain kebijakan bantuan domestik kotak biru merefleksikan kepedulian sebagian besar pengambil keputusan untuk memikirkan bagaimana cara mengelola kecenderungan kelebihan produksi dalam pasar bebas (*open/unregulated markets*). Kondisi kelebihan produksi yang tidak terkontrol akan memberikan dampak negatif, baik dari sisi produsen maupun dari sisi kepentingan pemerintah, terutama bagi negara-negara yang menggantungkan sumber devisanya dari ekspor produk pertanian (seperti yang banyak dialami oleh negara-negara berkembang). Sedangkan pelaku ekonomi yang mendapatkan keuntungan dari kondisi kelebihan produksi yang tidak terkontrol ini antara lain industri pengolahan pangan, restoran, pewartalaba produk pangan seperti Mc. Donald dan lain-lain.

Perundingan Putaran Uruguay untuk produk pertanian (URAA) yang ditandatangani tahun 1994, merupakan awal disepakatinya perjanjian perdagangan oleh komunitas internasional dalam bentuk pengurangan berbagai kebijakan yang menghambat perdagangan, seperti subsidi ekspor dan restriksi, bantuan domestik dan membuka peluang pasar lebih besar untuk produk pertanian. Bentuk bantuan domestik yang disepakati pada saat itu adalah :

- (1) Bantuan domestik yang bersifat menghambat perdagangan (*trade distorting support*) dikategorikan sebagai Kotak Jingga (*Amber Box*). Bantuan ini terkait dengan pengurangan AMS Total (*Total Aggregate Measurement of Support*) yang disepakati pada tahun dasar (1986-1988) hingga 20% selama 6 tahun (1995 - 2000) untuk produk pertanian. Saat ini perhitungan AMS dilakukan setiap tahun oleh setiap negara dengan berkomitmen terhadap penurunannya. Berkaitan dengan hal tersebut semua bentuk subsidi mendapat pengecualian dalam komitmen penurunan tarif dengan memanfaatkan pasal *de minimis* selama subsidi yang diberikan nilainya tidak lebih dari lima persen (dari nilai produksi) untuk negara maju dan 10% untuk negara berkembang. Negara-negara yang tidak memanfaatkan *trade distorting support* pada tahun dasarnya tidak dapat melanjutkan kebijakan bantuan domestiknya jika besarnya melebihi ketentuan pasar *de minimis*, kecuali subsidi itu dikategorikan sebagai kotak biru atau kotak hijau (*Green Box*).

- (2) Bantuan domestik yang sifatnya tidak berdampak atau berdampak sangat kecil terhadap peluang terjadinya perdagangan, dikategorikan sebagai bentuk bantuan kotak hijau. Subsidi ini mendapat pengecualian dalam komitmen pengurangan tarif.
- (3) Kotak biru merupakan kotak jingga yang bersifat mengurangi distorsi perdagangan. Subsidi yang pada kondisi normal ditempatkan dalam kotak jingga akan berada pada kotak biru jika subsidi yang diberikan bertujuan untuk membatasi jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani. Bentuk bantuan langsung (*direct payments*) seperti ini juga dapat memperoleh pengecualian dalam komitmen penurunan tarif. Kriteria bantuan langsung yang diberikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Diperuntukkan bagi petani yang membatasi luas lahan dan tingkat produksi dari komoditas yang diusahakan (usahatani yang diusahakan pada luas lahan dan tingkat produksi yang tetap);
 - b. Bantuan yang diberikan kurang lebih sebesar 85% dari nilai tingkat produksi yang tetap atau;
 - c. Bantuan yang didasarkan pada jumlah kepemilikan hewan ternak pada jumlah yang terbatas.

Seperti diuraikan sebelumnya, bantuan langsung dalam kategori KB tidak akan diberikan kepada petani atau peternak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi komoditas yang diusahakan.

Perkembangan Kriteria dan Disiplin Pelaksanaan

Dalam perkembangannya, kriteria bantuan domestik yang termasuk dalam kotak biru terus menerus diperbaiki. Setiap negara maju mengajukan berbagai macam proposal untuk meratifikasi kebijakan bantuan domestik yang terkait dalam disiplin kotak biru. Salah satu contohnya adalah hasil adopsi perundingan di tahun 2004 yang dikenal dengan Paket Juli (*July framework*), di mana AS melalui proposalnya menekankan perlunya perbaikan kriteria kotak biru, yakni dengan kriteria yang mengizinkan penambahan bentuk pembayaran langsung yang ditujukan kepada produser yang tidak hanya terkait dengan kegiatan produksi semata (nonpetani). Pada prakteknya pengembangan dari definisi ini mengizinkan diberikannya *countercyclical payments* dalam kerangka kotak biru. Bentuk bantuan ini telah disepakati untuk dikategorikan dalam disiplin kotak jingga saat WTO melakukan *dispute panel ruling* untuk AS dalam mengimplementasikan kebijakan subsidi untuk kapas. AS mengajukan proposal ini sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan kebijakan *Farm Bill* di tahun 1996 dan 2002. *Farm Bill* di tahun 1996 menghapuskan kebijakan penggunaan lahan yang awalnya dirancang untuk mengurangi pemanfaatan lahan untuk produksi, tetapi

kondisi yang terjadi berlawanan dengan rancangan awal ini. Produksi mengalami lonjakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kemudian berdampak kepada jatuhnya harga produk, sehingga pengeluaran pemerintah untuk menutupi kerugian petani sangat besar. Akibat lain yang terjadi adalah bangkrutnya lembaga perbankan pedesaan karena harus menanggung biaya kompensasi yang sangat tinggi. Menghadapi kegagalan tersebut, kongres AS memutuskan untuk memperbaiki bentuk subsidi yang diberikan kepada petani dengan mengeluarkan kebijakan *countercyclical payments*. *Counter cyclical payments* diterjemahkan dalam bentuk pemberian kompensasi (*cushion*) jika harga produk jatuh. Kompensasi yang dibayarkan merupakan selisih antara *target price* yang dirancang Kongres AS dengan harga rata-rata domestik atau *loan rate prices* (salah satu yang lebih tinggi). Harga sasaran yang dirancang Kongres AS ini umumnya dibawah biaya produksi, tetapi lebih tinggi dibandingkan harga produk sejenis di pasar dunia (*world prices*). Besarnya pengeluaran untuk jenis subsidi ini beragam dari waktu ke waktu. Pada tahun 2003 jumlahnya mencapai 1,7 milyar dolar AS sedangkan tahun berikutnya hanya sebesar 0,8 milyar dolar AS.

Proposal yang diajukan oleh AS ini tentu saja mendapat tantangan dari banyak negara maju lainnya karena tidak sejalan dengan komitmen yang disepakati dalam Agenda Doha. Berbagai macam protes dalam pengembangan disiplin kotak biru juga diajukan oleh negara berkembang yang termasuk dalam G-20. Mereka menilai pengembangan disiplin kotak biru yang diajukan dalam Paket Juli lebih banyak bersifat menghambat perdagangan dan sangat menguntungkan negara maju. Negara berkembang menginginkan bahwa Paket Juli mengendalikan kotak biru dan diberikan hanya bagi program-program yang bersifat lebih tidak menghambat perdagangan dibanding sumber daya yang termasuk dalam kategori kotak jingga. Disamping itu negara berkembang juga mengajukan usulan agar batas (*cap*) untuk pengeluaran domestik yang terkait dengan disiplin kotak biru maksimum hanya sebesar 5% dari total nilai pertanian di negaranya. Menanggapi usulan ini, AS bahkan mengusulkan batas maksimum bantuan domestik untuk kotak biru adalah sebesar 2,5%, tetapi usulan AS ini tidak disetujui oleh negara-negara UE, Jepang dan Korea sebagai pengguna terbesar disiplin kotak biru.

Negara-negara yang mengajukan proposal untuk mengembangkan definisi kotak biru dengan menambah klausul-klausul baru umumnya dilakukan oleh negara-negara yang kalah dalam *dispute settlement* yang dilakukan oleh WTO. AS, seperti diuraikan sebelumnya mengajukan perbaikan definisi kotak biru, karena kasus *countercyclical payments* untuk petani kapas yang diusulkannya masuk dalam kategori kotak hijau ditolak pada tingkat sidang panel *dispute settlement*. Negara-negara yang mengajukan keberatan atas usul AS ini adalah sesama negara pengeksport kapas, antara lain Brazil yang membawanya ke tingkat sidang pane.

Upaya AS untuk membawa dan memenangkan masalah ini di tingkat *dispute settlement* mengalami kegagalan.

Analisis yang dilakukan oleh *Australian Bureau of Agriculture and Resource Ecoomics/ABARE* menegaskan proposal yang diajukan AS akan memberikan hambatan terhadap pasar dan melemahkan disiplin sumber daya yang telah disusun oleh WTO. Kapasitas subsidi yang diberikan oleh WTO terhadap AS sudah cukup besar dan dengan menerapkan proposal *countercyclical payments* subsidi yang diberikan akan lebih besar lagi dan akan sangat menguntungkan bagi petani mereka dan memberikan pengaruh negatif yang cukup besar untuk negara berkembang.

Proposal perluasan kriteria kotak biru yang diajukan negara maju, oleh negara berkembang dinilai cenderung merugikan. Menghadapi perluasan asumsi dalam proposal kotak biru, negara berkembang yang termasuk dalam G-30 dan G-20 menyusun proposal yang berisikan usulan agar produk-produk yang menerima bantuan domestik melalui program-program yang bersifat menghambat perdagangan (*trade distorting*) seperti yang dilakukan negara maju, dapat dimasukkan dalam kriteria *special products* di negara berkembang. Usulan ini bertujuan melindungi produksi dari produk sejenis di dalam negeri serta melindungi diri dari terjadinya serbuan impor (*import surge*) dari negara maju. Usulan ini sejalan dengan proses yang dilakukan Indonesia dalam forum WTO dengan mengajukan usulan daftar produk-produk yang termasuk dalam kategori *special product*. Beberapa produk yang diusulkan tersebut diantaranya: (1) beras dan olahannya; (2) jagung dan olahannya; (3) kedelai dan olahannya; (4) gula dan olahannya; (5) sapi dan domba berikut produk olahannya; (6) unggas dan hasil-hasilnya; (7) jeruk dan olahannya; (8) pisang dan olahannya; (9) bawang merah dan olahannya; serta (10) susu dan produk susu. Ke sepuluh komoditas ini termasuk dalam prioritas pertama usulan PK yang diajukan oleh Indonesia. Upaya yang lebih proaktif didalam perundingan WTO merupakan langkah positif yang dapat dilakukan pemerintah untuk “mengestimasi” dampak pemberian sumber daya kotak biru seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju.

3.2.3. Kotak Hijau (Green Box)

Definisi dan Cakupan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di dalam kerangka WTO terdapat tiga pilar yang menjadi topik perundingan, yaitu: (1) akses pasar; (2) Bantuan domestik; dan (3) Subsidi ekspor/kompetisi ekspor. Pilar bantuan domestik dibagi atas dua kategori, pertama adalah bantuan domestik yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil terhadap perdagangan. Kedua, adalah bantuan domestik yang mendistorsi perdagangan, sehingga harus dikurangi sesuai dengan komitmen.

Kategori pertama disebut dengan kotak hijau, sedangkan kategori kedua disebut dengan kotak jingga.

Provisi bantuan domestik diatur dalam Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*) pada bagian IV Artikel 6 dan 7 dan Annex 2. Kebijakan ini dikeluarkan dari komitmen pengurangan subsidi dan dapat ditingkatkan tanpa ada batasan finansial. Kotak hijau berlaku bagi semua negara anggota baik negara maju maupun negara berkembang, tetapi perlakuan khusus diberikan untuk negara berkembang dalam program pengadaan stok pemerintah untuk ketahanan pangan dan program bahan pangan bersubsidi bagi penduduk miskin di kota dan di desa.

Menurut Perjanjian Pertanian, kotak hijau adalah subsidi yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi harga (*Annex 2 AoA*). Di dalam *Annex 2* diatur dasar-dasar pengecualian dari komitmen pengurangan. Disebutkan bahwa kebijakan-kebijakan sumber daya yang dikecualikan dari komitmen pengurangan harus memenuhi kriteria pokok, yaitu kebijakan tersebut tidak memiliki atau paling tidak dalam tingkatan minimal, mendistorsi perdagangan atau memiliki dampak minimal terhadap produksi. Dengan demikian, semua kebijakan yang diajukan untuk mendapatkan pengecualian harus memenuhi kriteria pokok berikut:

- a. Subsidi disalurkan melalui program pemerintah dengan menggunakan dana publik yang tidak melibatkan transfer dari konsumen;
- b. Subsidi tidak mempunyai dampak pada pemberian bantuan harga kepada produsen.

Dengan lebih rinci, kotak hijau meliputi :

(1) Program Jasa Pemerintah

Kotak hijau meliputi banyak program jasa pemerintah termasuk jasa umum yang disediakan pemerintah, sepanjang ketentuan umum dan ketentuan khusus telah dipenuhi oleh kebijakan-kebijakan dimaksud. Program jasa pemerintah meliputi: (i) penelitian; (ii) program pengendalian hama dan penyakit; (iii) jasa pelatihan dan penyuluhan pertanian; (iv) jasa inspeksi (umum dan inspeksi yang berhubungan dengan fungsi kesehatan, keamanan atau standardisasi dari produk tertentu); (v) jasa pemasaran dan promosi; (vi) jasa infrastruktur termasuk jaringan listrik, jalan dan moda transportasi lainnya; (vii) pasar dan fasilitas pelabuhan; (viii) fasilitas penyediaan air dan lain-lain; (ix) pengeluaran yang berkaitan dengan akumulasi dan penyediaan stok masyarakat untuk ketahanan pangan; dan (x) pengeluaran yang berhubungan dengan bantuan pangan domestik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

(2) Pembayaran Langsung kepada Produsen

Di dalam Perjanjian Pertanian, provisi kotak hijau juga mengizinkan kebijakan pembayaran langsung kepada produsen yang tidak mempengaruhi keputusan produksi, yaitu meskipun petani menerima pembayaran langsung dari pemerintah, pembayaran ini tidak mempengaruhi jenis dan volume produksi pertanian. Di samping itu juga terdapat kriteria tambahan yang harus dipenuhi dimana penerapannya tergantung pada jenis kebijakan yang dimaksud, antara lain: kebijakan subsidi pendapatan yang tidak mempengaruhi produksi, asuransi pendapatan dan program jaring pengaman sosial, bantuan bencana alam; program bantuan penyesuaian struktural, dan pembayaran tertentu yang terkait dengan program lingkungan dan program bantuan regional.

(3) Kebijakan Pengecualian Lainnya

Terdapat tiga jenis subsidi lainnya yang dikecualikan dari komitmen penurunan subsidi yaitu kebijakan pembangunan tertentu di negara berkembang, pembayaran langsung pada program pembatasan produksi (KB), dan tingkat subsidi yang disebut *de minimis*.

Perkembangan Negosiasi dan Disiplin Pelaksanaan

- a. Mandat Doha : tidak ada hasil khusus tentang KH,
- b. KTM V WTO di Cancun: negara berkembang yang tergabung dalam G-20 menginginkan penurunan bantuan domestik di negara maju sesuai dengan mandat Doha. Kegagalan KTM V Cancun: negara maju tetap memberi bantuan kepada petani mereka yang jumlahnya sedikit dan kaya dengan cara pemindahan subsidi domestik dari kotak biru dan kotak jingga ke kotak hijau,
- c. Paket Juli 2004: Telah disepakati bahwa negara maju harus memotong bantuan domestiknya sebesar 20% pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian sesuai dengan yang terdapat dalam Annex A: *Framework* Paket Juli 2004.
- d. Sesaat sebelum KTM VI Hongkong:

Posisi KN-20

- Memastikan pembayaran langsung (*direct payment*) pada kotak hijau dapat memenuhi tuntutan Annex 2 AoA, yaitu: (i) penerimaan *direct payments* dengan kondisi sedemikian rupa sehingga *the wealth effectnya* diperkecil; (ii) bantuan haruslah diberikan melalui program yang didanai dari publik dan bukan termasuk transfer dari konsumen dan tidak memerlukan produksi; (iii) kebijakan yang dapat dipercaya dan konsisten dengan tidak ada perubahan

dalam *eligibility rules, base periods or eligible products or farmers*; (iv) *coupled programmes providing support to products receiving direct payments*; dan (v) *review of benchmarks and conditions for other direct payments*.

- Beberapa provisi kotak hijau hanya dapat dipakai oleh negara maju. Oleh karena itu diperlukan adanya modifikasi untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus negara berkembang.
- Seperti disepakati dalam para 48, mekanisme pemantauan dan pengawasan akan mendukung klarifikasi dan kaji ulang kriteria kotak hijau sehingga G-20 mengajukan usulan penyempurnaan para 48 Perjanjian Pertanian tersebut.

Posisi Amerika Serikat dan Uni Eropa: tidak ada perubahan

Posisi Indonesia: mendukung posisi G-20 untuk memperketat disiplin subsidi kotak hijau dan memperketat sistem notifikasi dan pemantauan.

- e. Hasil Deklarasi Menteri KTM VI Hongkong : kriteria kotak hijau akan ditinjau agar sejalan dengan para 16 Kerangka Kerja, untuk memastikan program-program negara berkembang yang memberikan hanya distorsi perdagangan kecil tercakup secara efektif di dalamnya.

Hasil studi empat LSM yaitu *Auctionaid, Caritas, CIDSE*, dan *Oxfam* pada akhir tahun 2005 menyimpulkan bahwa negara Uni Eropa/UE dan AS masih memberikan bantuan kepada petaninya dalam jumlah sangat besar yang telah mendistorsi pasar dan membahayakan bagi petani di negara berkembang. Paling sedikit sebesar 40 milyar dolar AS anggaran tahunan kotak hijau telah mendistorsi pasar dan telah menyimpang dari aturan WTO. Sebagai gambaran, UE diperkirakan menganggarkan sebesar 30 milyar euro pada tahun 2007 untuk kotak hijau, yang terdiri dari 25 milyar euro untuk pembayaran langsung dan 5 milyar euro untuk bantuan investasi. Sementara AS juga diperkirakan akan melanjutkan pemberian *direct payments* (pembayaran langsung) sebesar 40 milyar dolar AS (*Actionaid, Caritas, CIDSE* dan *Oxfam*, 2005). Saat ini UE adalah pemakai kotak hijau terbesar, sedangkan AS ingin untuk memperluas kriteria dari kotak biru. Sementara perkembangan nilai kotak hijau untuk Indonesia pada tahun 2001 hanya berjumlah 626 juta dolar AS, meningkat menjadi 821 juta dolar AS tahun 2002, dan pada tahun 2003 hanya sebesar 1 milyar dolar AS dan tidak berubah jumlahnya pada tahun 2004 (Hutabarat *et al.*, 2005). Dari penulis lain (Sawit *et al.*, 2003), kotak hijau Indonesia pada tahun 2001 diperkirakan hanyalah 373 juta dolar AS, sementara pada saat yang sama UE membelanjakan sekitar 19 milyar euro dan AS membelanjakan hampir 50 milyar dolar AS (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Perkembangan Kotak Hijau Uni Eropa, Amerika Serikat dan Indonesia, 1995-2001

Negara	1995	1998	1999	2000	2001
Uni Eropa (Juta Euro)*	18.779	19.168	19.931	19.930	19.160
Amerika Serikat (Juta \$ AS)*	46.033	49.820	49.749	49.745	49.740
Indonesia (juta \$ AS) **	178	133	207	168	373

Sumber : * NCTAD/DITC/COM/2003/6

** : Sawit *et al.* : Jurnal EKI 2003

Bila subsidi yang diberikan ditemukan mendistorsi pasar, maka ia harus dikeluarkan dari kotak hijau dan dimasukkan ke dalam kotak biru atau kotak jingga dan harus mengalami proses pemotongan. Hanya subsidi yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, berpengaruh besar kepada lingkungan atau pembangunan perdesaan yang harus diklasifikasikan sebagai kotak hijau, dan dikecualikan dari komitmen pengurangan. Oleh karena itu, WTO perlu membuat kriteria yang tegas untuk penentuan jenis-jenis bantuan yang sesuai dengan kotak hijau agar tidak disalahgunakan.

Mandat Doha secara jelas menyatakan bahwa bantuan domestik yang memungkinkan petani untuk menjual hasil produksinya pada tingkat harga yang rendah di bawah ongkos produksi seharusnya dikurangi. Karena kotak hijau adalah setiap pembayaran yang tidak menyebabkan distorsi pasar atau yang menyebabkan distorsi sangat kecil, maka ia dikeluarkan dari komitmen pengurangan. Namun, negara-negara UE dan AS, seakan-akan dikecualikan dari komitmen di WTO, dengan melakukan pergeseran bantuan dari kotak jingga dan kotak biru serta menyembunyikannya di dalam kotak hijau. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur bahkan meningkatkan tingkat bantuan yang diberikan yang sangat besar kepada sektor agribisnis.

Para anggota WTO telah menyetujui perlunya kaji ulang kriteria kotak hijau, untuk membuktikan bahwa subsidi yang diberikan tidak mendistorsi perdagangan sebagaimana yang telah disepakati pada Paket Juli 2004. Lagi pula di dalam proposal G-20 juga sudah dikemukakan perlunya tinjauan ulang terhadap kriteria tersebut. Namun, negara maju terutama AS dan UE sudah menyalahgunakan pemakaian kotak hijau. Seperti yang disebutkan oleh empat LSM di atas, bahwa begitu banyak subsidi yang dialihkan ke kotak hijau. LSM ini menghitung bahwa UE memberikan 50 milyar euro per tahun untuk kotak hijau, bila reformasi *Common Agricultural Policy* (CAP) diberlakukan pada tahun 2006-2007. Sementara AS melaporkan 50,7 milyar dolar AS pembayaran setiap tahun di dalam kotak hijau.

Pada kasus UE ini, lebih dari 50 milyar euro yang telah diberikan kepada petani berupa dana (yang secara sederhana adalah pergeseran dari kotak hijau dan kotak biru) pada tahun 2003 sesuai dengan CAP. Sementara pemerintah AS mengalokasikan sebagian besar (sekitar 33 milyar dolar AS) dari kotak hijau untuk program bantuan pangan lokal (*local foodstamp*) yang secara murni ditargetkan pada penduduk yang memerlukan dan diharapkan tidak berdampak kepada produksi.

Pada kenyataannya bantuan yang telah diberikan dalam kotak hijau menyebabkan kelebihan produksi. Hal ini memicu timbulnya praktek *dumping*, yang menjual kelebihan produksi ke pasar dunia dengan tingkat harga yang lebih murah daripada biaya produksi. *Dumping* merugikan petani di negara berkembang karena produk mereka tidak dapat bersaing dengan harga yang lebih murah di pasar dunia. Ratusan dari ribuan petani Afrika telah meninggalkan kegiatan agribisnis karena hal tersebut. Sebuah studi dari pemerintah Australia dalam Oxfam International (2005), mengutip bahwa bila volume subsidi UE dan AS atas produk susu ditingkatkan setengah dari biaya produksinya, maka harga susu dunia meningkat tajam sebesar 34%. Contoh lain adalah subsidi kapas AS telah menyebabkan Burkina Faso kehilangan 1% (ekuivalen) dari GDP mereka.

Beberapa Proposal Perundingan

Akibat adanya penyimpangan dalam penggunaan kotak hijau khususnya yang telah dilakukan oleh negara maju, banyak kritik dan protes yang muncul dari negara berkembang. Selama proses perundingan di WTO topik kotak hijau juga terus dibicarakan, tetapi belum diperoleh suatu kesepakatan yang tegas terhadap kriteria kotak hijau. Beberapa negara berkembang berpendapat bahwa negara maju telah mengecoh mereka dengan memindahkan bantuan domestik mereka dari kotak hijau ke kotak biru dan selanjutnya dengan membuat modifikasi tertentu akhirnya dapat masuk ke kotak hijau. Menyikapi ketidakadilan ini kelompok-kelompok negara mengeluarkan pendapat dalam bentuk proposal, di antaranya adalah sebagai berikut:

(1) Proposal G-20

Berdasarkan Annex A Paragraf 16 Paket Juli 2004, G-20 menyatakan bantuan *income decouple* seharusnya hanya diberikan kepada petani yang berpendapatan rendah bukan sebagai subsidi silang kepada petani yang mempunyai lahan luas. Dasar periode seharusnya dinotifikasi dan tetap (tidak berubah). Suatu kriteria yang khusus ditujukan kepada pembangunan harus ada. Hal ini termasuk program reformasi lahan dan pembelian atau pengadaan pangan dari petani yang berpendapatan rendah dan petani yang miskin akan sumber daya untuk bantuan pangan domestik dan program stok.

G-20 juga memprotes negara UE dan G-10 atas tindakan mereka yang kurang serius mengadakan kaji ulang atas kriteria kotak hijau seperti yang diinginkan pada paragraf 16 tersebut. Mereka menekankan perlunya mempertahankan kotak hijau sebagai alat perpindahan dari bantuan lain yang mendistorsi pasar (kotak jingga dan kotak biru). Program pembayaran langsung kepada produsen (*Annex 2*: paragraf 5-13 Perjanjian Pertanian) yang secara khusus didanai sudah menyebabkan terdistorsinya perdagangan yang juga telah berdampak terhadap produksi. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa sebutan “penggandengan program” di dalam pembayaran langsung jelas-jelas telah mendistorsi perdagangan dan produksi karena: (1) memberikan dampak kekayaan; (2) memberikan harapan petani tentang kebijakan yang akan datang; dan (3) penggandengan yang tidak lengkap.

Khusus dampak kekayaan, G-20 menyatakan bahwa dana yang diberikan kepada petani di negara maju lebih jauh telah berubah menjadi subsidi silang yang pada akhirnya subsidi yang diberikan mampu menutupi biaya produksinya. Kondisi ini berdampak terhadap bertambahnya kekayaan petani tersebut apalagi bila terjadi kenaikan harga produk mereka. G-20 juga memprotes bahwa bantuan yang diberikan bukan bersifat sementara, namun secara permanen, sehingga sangat mempengaruhi kemudahan dalam memperoleh bantuan kredit melalui program *Farmer Assistance Program*.

Menanggapi hal tersebut, G-20 mengusulkan bahwa provisi kotak hijau harus dikaji ulang dan diklarifikasi untuk menjamin bahwa pembayaran langsung memang merupakan suatu kebutuhan dasar, dan tidak ataupun kecil sekali distorsinya terhadap perdagangan dan produksi. Menurut G-20, kaji ulang dan klarifikasi langsung itu harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembayaran langsung harus berdampak terhadap kekayaan, dan tidak bersifat permanen.
- b. Bantuan akan terus disediakan kepada masyarakat dengan dana pemerintah dan bukan merupakan bentuk transfer dana dari konsumen.
- c. Kebijakan yang dapat dipercaya dan konsisten setiap waktu.
- d. Ketidakberlanjutan dari bantuan penggandengan program lain untuk yang penerimaan pembayaran langsung atas suatu produk; dan
- e. Kaji ulang persyaratan untuk pembayaran langsung lainnya.

(2) Proposal Bersama Kanada dan G-20

Proposal bersama ini secara khusus menekankan pencarian kriteria yang ketat untuk kotak hijau yang dikemukakan pada pertemuan Komisi Pertanian 3 Juni 2005 yang lalu. Pada negosiasi tersebut, Kanada

dan G-20 menyatakan bahwa beberapa program yang ada saat ini di dalam kotak hijau bertolak belakang terhadap tujuan kotak hijau sendiri, karena ia telah mendistorsi perdagangan. Di dalam naskah yang telah dipresentasikan di forum informal pada 31 Mei 2005, Kanada menyarankan aturan tambahan yang dapat menjamin bahwa bantuan yang diberikan oleh suatu negara tidak menyebabkan terdistorsinya perdagangan. Ketentuan waktu yang ditetapkan telah berlawanan terhadap pembayaran itu sendiri. Kanada menyarankan untuk membuat penghitungan sederhana, dan memastikan bahwa waktu yang disepakati adalah tetap (tidak berubah-ubah) dan proses penentuannya ditetapkan secara terbuka.

(3) Tanggapan Negara Maju

G-10 (dengan koordinator Swiss) dan UE menyatakan bahwa kotak hijau mereka sudah sangat kecil distorsinya terhadap perdagangan. Juga kelompok *Cairns Group* (Australia, Kanada, Argentina, Kostarika, Cile, Brazil, Thailand, Malaysia dan AS) menekankan bahwa sesuai Paket Juli 2004, kotak hijau harus benar-benar “hijau” dan benar-benar tidak mendistorsi perdagangan. Beberapa negara mengeluarkan pernyataan bahwa bila petani menerima bantuan kotak hijau diatas kotak jingga dan kotak biru, hal ini dapat meningkatkan produksi, sebagai dampak kumulatif dari bantuan kotak hijau. Australia menyatakan bahwa perlu diberikan batasan waktu bagi pelaksanaan pembayaran langsung petani untuk menghindari peningkatan produksi mereka karena adanya harapan bantuan di masa yang akan datang. Secara teknis, pemantauan dan pengawasan ukuran kotak hijau harus diutamakan. Negara lain yang mendukung G-10 adalah Jepang, China-Taipei dan Mauritius.

(4) Saran untuk Dicermati Pihak Indonesia

Sejak provisi kotak hijau dinotifikasi, telah banyak terjadi penyimpangan dalam penggolongan bantuan yang masuk ke dalam kotak hijau, yang pada hakekatnya disebabkan oleh ketidaktegasan dalam penentuan kriteria bantuan kotak hijau. Terdapat delapan bentuk-bentuk bantuan domestik yang diperbolehkan masuk ke dalam kotak hijau, yaitu (i) pelayanan umum (*general services*) seperti *research, pest and disease control, extention and marketing services*, dan *infrastructure*; (ii) stok penyangga pangan (*stockholding for food security*); (iii) bantuan pangan dalam negeri untuk masyarakat yang memerlukan (*domestics food aid for the needy*); (iv) pembayaran langsung terhadap produsen (*direct payment to producers that are “decoupled” from production*); (v) asuransi pendapatan dan program jaring pengaman social (*income insurance and safety net programmes*); (vi) bantuan darurat (*disaster relief*); (vii) Program penyesuaian struktural (*structural adjustment programmes*); dan (viii) program bantuan lingkungan hidup dan bantuan daerah (*environment and regional assistance programmes*). Namun, tidak semua negara anggota WTO memiliki ke delapan bentuk bantuan domestik tersebut. Oleh karena itu,

dalam perhitungan bantuan domestik sektor pertanian Indonesia yang masuk dalam kotak hijau adalah untuk empat komponen saja. Keempat komponen kotak hijau yang dimiliki oleh Indonesia adalah:

- (i) Pelayanan Umum (*general services*);
- (ii) Stok penyangga pangan (*stockholding for food security*);
- (iii) Bantuan pangan dalam negeri untuk masyarakat yang memerlukan (*domestics food aid for the needy*); dan
- (iv) Bantuan darurat (*disaster relief*).

Jumlah nilai kotak hijau pertanian Indonesia tahun 2001 hingga 2003 menunjukkan peningkatan (Indonesia mendaftarkan kotak hijau baru sejak tahun 2001), tetapi pada tahun 2004 mengalami penurunan. Sementara itu, Indonesia mendukung proposal G-20 untuk melakukan kaji ulang terhadap kriteria bantuan di dalam kotak hijau. Kotak hijau harus ditinjau kembali untuk menjamin bahwa bantuan domestik kotak hijau tersebut harus seminimal mungkin, dengan tetap memperhatikan prinsip *non-trade concern*. Tidak hanya peninjauan dan perhitungan ulang kotak hijau yang sangat diperlukan, pemantauan berkala terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebagai kotak hijau juga sangat penting, sehingga tidak terjebak dalam segala strategi yang dibuat negara maju. Demikian juga dengan aspek penyesuaian dalam kotak hijau sangat diperlukan untuk memastikan bahwa provisi tersebut benar-benar bertujuan untuk tidak mendistorsi pasar.

Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa bantuan (subsidi) dengan jumlah dan waktu tanpa batas yang diberikan negara maju kepada petaninya telah menghambat negara berkembang dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, melawan kerawanan pangan, dan menghambat laju pembangunan perdesaan. Sebenarnya kondisi ini telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam Deklarasi Doha. Di dalam deklarasi tersebut disepakati bahwa perlunya reformasi modalitas untuk mengurangi secara drastis/menghilangkan komitmen yang terkait dengan bantuan domestik. Memang ada pengurangan, tetapi kotak hijau tetap dipertahankan. Kotak biru telah dihapus, tetapi isinya dipindahkan ke kotak hijau yang baru. Pada umumnya negara berkembang hampir tidak menggunakan instrumen kotak hijau untuk membantu petaninya.

Dalam sidang pekan pertanian (*Agriculture Week*) awal Februari 2005 dengan agenda melanjutkan penetapan modalitas sebagai operasionalisasi Kerangka Kesepakatan Juli 2004, juga masih ditekankan perlunya kaji ulang dan klarifikasi terhadap kotak hijau. Berdasarkan laporan Tim Teknis Nasional Perundingan WTO dari Departemen Pertanian yang mengikuti sidang pekan pertanian tersebut, dikatakan bahwa pembahasan tentang kaji ulang dan klarifikasi kriteria kotak hijau berlangsung sulit dan tidak fokus terutama dengan kalimat "akan dikaji" (*will be reviewed*) pada paragraf 16 Kerangka Kesepakatan Juli 2004. Pada sidang tersebut terdapat dua pandangan yang berbeda antara negara maju dan

negara berkembang. Negara maju beranggapan bahwa paragraf 16 tersebut hanya mengamanatkan penyusunan kriteria baru yang lebih sesuai dengan azas: tidak ada atau amat kecil dampak distorsi perdagangannya terhadap produksi serta lebih mudah dipantau dan diawasi, sama sekali tidak mengubah provisi perjanjian pertanian yang berlaku saat ini. Di pihak lain, negara berkembang menyatakan bahwa kata *review* pada paragraf 16 mengandung arti pentingnya kaji ulang sebagai upaya penyempurnaan, termasuk perubahan provisi perjanjian pertanian, antara lain untuk mengakomodasi kondisi khusus yang ada di negara berkembang.

Akhirnya sidang sepakat tentang arti provisi kotak hijau dalam *Annex 2* Perjanjian Pertanian yang masih sangat kabur dan tidak berimbang, sehingga pimpinan sidang meminta agar kelompok negara atau negara yang mempunyai peranan penting dalam perundingan (*prominen*) membuat usulan konkrit tentang kaji ulang dan klarifikasi kotak hijau. Usulan harus sesuai dengan amanat paragraf 16 Kerangka Kesepakatan Juli 2004, dengan menggunakan artikel 16 teks Harbinson sebagai salah satu referensi. Untuk itu, Indonesia sebagai koordinator G-33 sudah sepatutnya mengambil inisiatif untuk menyusun proposal yang memperjuangkan kepentingan negara berkembang secara umum dan Indonesia khususnya terutama dalam rangka mengakomodasikan sebanyak mungkin program dukungan domestik khas di negara berkembang dalam kategori kotak hijau.

Dalam hal kotak hijau, berbagai pandangan juga muncul dari pihak yang menginginkan subsidi ini diizinkan tanpa batas sepanjang memenuhi kriteria penerapannya dan pihak yang menginginkan penghapusannya, meskipun tujuannya tidak berkaitan dengan tingkat produksi dan harga saat ini, tetapi sesungguhnya mengganggu perdagangan dengan mendorong peningkatan produksi dan menurunkan harga dunia. Oleh karena itu, Pihak ini menghendaki adanya alat kuantitatif untuk mengukur apakah suatu kebijakan tidak mengganggu perdagangan atau produksi dan mematok pengeluaran kotak hijau. Negara berkembang memandang bahwa meskipun suatu program kotak hijau mungkin saja tidak mengganggu, pengaruh kumulatif dari sejumlah besar dana yang dikeluarkan sesungguhnya dapat mengganggu pasar (Hutabarat *et al.*, 2005).

3.2.4. Kebijakan Penentuan dan Pendisiplinan Modalitas Persaingan Ekspor (*Export Competition*) atau Subsidi Eskpor (*Export Subsidy*)

Perkembangan Pelaksanaan

Pilar persaingan ekspor merupakan satu dari tiga pilar dalam perjanjian pertanian WTO, pilar ini tidak saja mencakup subsidi ekspor

secara langsung (bersifat mendistorsi perdagangan), tetapi juga mencakup hubungan kelembagaan yang merujuk kepada pemberian subsidi ekspor secara implisit. Beberapa kebijakan terkait dengan hal tersebut adalah *food aid* (bantuan pangan), kredit ekspor dan *state trading exporting enterprises*. Pajak ekspor, kegiatan promosi ekspor dan kegiatan lainnya dapat pula dikategorikan sebagai subsidi ekspor.

Kerangka perjanjian pertanian dalam Putaran Uruguay membatasi penggunaan subsidi ekspor dengan menentukan jumlah maksimum pengeluaran dan volume ekspor untuk komoditas pertanian. Pengeluaran untuk subsidi ekspor dikurangi hingga 36% untuk tahun dasar 1986 – 1990, dan volume komoditas yang disubsidi dikurangi hingga 21% selama 6 tahun pelaksanaan yang seharusnya berakhir pada tahun 2001, sementara negara berkembang diberi kelonggaran waktu selama 10 tahun sejak dikeluarkannya kebijakan ini tahun 1995.

Isu utama di dalam modalitas persaingan ekspor lebih ke arah isu satu negara atau satu kawasan di dalam menentukan sikapnya menghadapi pendisiplinan modalitas ini. Jenis penggunaan kebijakan promosi ekspor antara negara maju dan negara berkembang sangat beragam, hanya UE yang memanfaatkan kebijakan subsidi ekspor saat ini, AS lebih menekankan penggunaan kredit ekspor, perusahaan dagang negara (*state trading enterprises*) umumnya dimanfaatkan oleh AS, Kanada, Australia, dan China, sementara isu bantuan pangan (*food aid*) banyak dituduhkan ke AS, sementara pajak ekspor lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara UE dalam menjalankan kegiatan ekspor komoditas pertaniannya.

Kebijakan penghapusan subsidi ekspor secara bertahap menjadi komitmen yang harus ditaati negara-negara anggota WTO, tetapi di dalam perundingan Doha, negara-negara UE memprotes keras permohonan berbagai negara untuk menghapuskan subsidi ekspornya. Kondisi terakhir (hingga tahun 2003) dari perdebatan mengenai subsidi ekspor adalah sebagai berikut (Abbot dan Young, 2003):

- a. Negara-negara UE menawarkan penghapusan SE untuk komoditas-komoditas pertaniannya yang sebelumnya merupakan pengguna terbesar, yakni gandum, minyak dari biji-bijian, minyak zaitun dan tembakau. Namun demikian UE menolak penghapusan subsidi ekspor untuk komoditas yang sensitif secara politis seperti susu dan gula.
- b. Negara-negara berkembang secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap penghapusan subsidi ekspor.
- c. AS bersikukuh mempertahankan instrumen kebijakan domestik perdagangannya yang dinamakan pinjaman untuk kegiatan pemasaran atau "*marketing loans*". Namun, kebijakan ini mendapat protes cukup keras dari anggota WTO lainnya karena secara terselubung merusak komitmen persaingan ekspor dan secara tidak langsung

menunjukkan ketidakkonsistenan sikap AS untuk mengurangi bantuan langsung di sektor pertanian.

Beragam Proposal Pendisiplinan Persaingan Ekspor

Berkaitan dengan pendisiplinan pilar promosi ekspor yang lebih banyak dimanfaatkan oleh negara maju, kebijakan yang diambil oleh negara berkembang lebih bersifat mempelajari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan subsidi ekspor terhadap kemampuan masing-masing negara berkembang memanfaatkan akses pasar di negara maju. Hal ini mengingat 63 dari 148 negara berkembang yang menjadi anggota WTO adalah negara pengekspor komoditas pertanian (Valdes dan Mc. Calla, (1999) dalam Abbot dan Young (2003)).

Proposal pendisiplinan yang ditawarkan oleh masing-masing anggota selain bersifat individual juga mewakili kelompok-kelompok dalam WTO. Beberapa proposal yang ditawarkan dan berkaitan dengan isu subsidi ekspor di antaranya: (1) UE sebagai pengguna subsidi ekspor menawarkan pengurangan pengeluaran pemerintah untuk subsidi ekspor hingga 45% dengan tetap mempertahankan fleksibilitas antar negara-negara lingkup UE. Selain itu UE juga setuju untuk menghapuskan subsidi ekspor untuk komoditas gandum, minyak dari biji-bijian, minyak zaitun dan tembakau sepanjang negara lain juga menerapkan kondisi yang sama. Namun, UE sangat prihatin dengan subsidi terselubung yang diberlakukan oleh AS melalui penggunaan penjaminan kredit ekspor dan bantuan pangan bagi negara berkembang; (2) Polandia dan Jepang mengurangi subsidi ekspor mereka, tetapi tidak penghapusan secara total; (3) AS, India dan Kelompok Cairns setuju dengan penghapusan subsidi ekspor secara total untuk produk pertanian; (4) Negara berkembang pada umumnya setuju untuk penghapusan subsidi ekspor, kondisi ini dikuatkan dengan pendapat anggota *West African Monetary Union State* mengatakan bahwa penerima manfaat dari adanya subsidi ekspor adalah penduduk perkotaan yang memiliki akses untuk membeli produk makanan dengan harga yang murah. Dengan kata lain penerima manfaat adalah para produsen di negara berkembang dari adanya subsidi ekspor yang juga menjadi sumber pendapatan bagi para produsen; (5) Negara berkembang lainnya seperti Namibia, Maroko, India dan Mali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pemberian subsidi ekspor, sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk bersaing dengan negara maju yang memberikan subsidi ekspor kepada para produsennya. Mali menawarkan usulan penghapusan subsidi ekspor untuk beras yang merupakan komoditas ekspor terpenting bagi negara berkembang.

Sementara untuk isu kredit ekspor, proposal yang ditawarkan umumnya ditujukan untuk memprotes kebijakan AS yang menerapkan subsidi ekspor terselubung yang pada prakteknya cenderung bertolak-

belakang dengan proposal pengurangan subsidi ekspor. Beberapa proposal yang berkaitan dengan pendisiplinan kredit ekspor di antaranya : (1) UE menawarkan penurunan secara bertahap dan berjenjang untuk penggunaan kredit ekspor, sejalan dengan rancangan penurunan subsidi ekspor. UE juga menawarkan untuk memberlakukan penetapan dan pengurangan ekspor kredit secara berkala; (2) AS mencoba untuk mendisiplinkan kebijakan penjaminan kredit ekspor, tetapi tidak secara tegas menyebutkan jenis kredit ekspor yang akan dihapusnya; (3) Negara-negara anggota MERCOSUR (Bolivia, Chili, Costa Rica, Guatemala), serta negara-negara berkembang lain seperti India dan Malaysia mempertahankan argumen mereka bahwa WTO adalah ajang yang tepat untuk menegosiasikan besaran kredit ekspor. Proposal mereka ini juga meminta perkembangan definisi resmi dari kredit ekspor dan kriteria untuk mengidentifikasi program yang relevan untuk kredit ekspor dan meminta daftar kredit yang akan didisiplinkan. Proposal ini secara rinci juga menyampaikan tingkat bunga minimum yang dibutuhkan untuk kredit ekspor.

Masing-masing negara WTO juga membahas isu perusahaan dagang negara/PDN (*state trading enterprises/STE*) dengan menawarkan sejumlah proposal seperti: (1) UE menginginkan pendisiplinan dengan menghapuskan perilaku PDN yang menyangkut subsidi silang, dan penyesuaian harga. UE juga mengajukan usulan notifikasi mengenai biaya pengakuisisian dan harga ekspor (*export pricing*); (2) AS, Korea, dan Jepang mengajukan pengumpulan data tentang tingkat transaksi perdagangan PDN. Di pihak lain AS mengajukan penghapusan PDN yang sudah mengarah ke monopoli ekspor. Jepang mengajukan usul bahwa PDN yang tergolong sebagai pengeksport harus tetap mengalokasikan stok guna menstabilkan perdagangan internasional.

Isu ketahanan pangan lebih dominan diperbincangkan dibandingkan bantuan pangan yang menjadi salah satu indikator persaingan ekspor. Beberapa proposal yang ditawarkan di antaranya UE mengajukan pendisiplinan bantuan pangan dengan hanya memberikan bantuan pangan kepada negara-negara yang benar-benar miskin dan berkaitan dengan kondisi darurat (*emergencies*).

Data pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa UE merupakan pengguna terbesar subsidi ekspor dengan besaran yang cenderung meningkat. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1999. Negara-negara di UE merupakan negara terbesar pengguna subsidi ekspor, terutama ditujukan untuk komoditas gandum, biji-bijian, gula, daging, mentega dan produk susu (Tabel 3.4). Sementara untuk AS, komoditas yang banyak memperoleh SE adalah susu dan produk susu.

Data pada Tabel 3.3 juga menunjukkan kecenderungan penggunaan subsidi ekspor oleh masing-masing anggota WTO semakin menurun dengan perkembangan waktu, bahkan cenderung dihindari. Kondisi ini

terlihat di tahun 2000, di mana negara yang masih menerapkan kebijakan subsidi ekspor hanya Republik Cehcen, Republik Polandia, Republik Slovakia, Afrika Selatan dan Turki. Namun, seperti halnya pada pilar bantuan domestik, apakah penurunan ini menunjukkan kenyataan yang sebenarnya, yakni negara yang bersangkutan dalam kenyataan yang sebenarnya telah menurun-kannya. Tidak ada satupun yang dapat menjamin kecuali *Trade Policy Review Mechanism/TPRM* WTO membuktikannya dan mengumumkannya.

Tabel 3.3. Penggunaan Subsidi Ekspor (juta dolar AS)

Anggota WTO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total
Anggota dengan komitmen penurunan subsidi ekspor							
Australia	0	0	0	1	2	0	3
Kanada	38	4	0	0	-	-	42
Kolombia	18	22	25	23	0	0	88
Kosta Rika	0	0	105	123	20	-	248
Cyprus	3	3	2	4	0	-	12
Republic Ceko	40	42	40	42	35	24	223
Uni Eropa	6292	6684	4915	5835	5588	-	29314
Hongaria	41	18	10	12	13	-	94
Eslandia	6	1	0	0	0	-	7
Israel	19	13	6	1	1	0	40
Meksiko	0	0	36	4	-	-	40
Norwegia	83	78	102	77	128	-	468
Polandia	0	16	9	14	55	36	130
Rumania	0	0	0	2	7	-	9
Republik Slovakia	8	8	13	12	12	12	65
Afrika Selatan	40	42	18	3	5	3	111
Swiss	447	369	295	292	-	-	1403
Turki	30	17	39	29	28	27	170
Amerika Serikat	26	122	112	147	80		487
Venezuela	3	20	2	5	-	-	30
Total	7094	7459	5729	6626	5974	102	32984
Anggota tanpa komitmen penurunan subsidi ekspor							
India	-	2	4	2	2	1	11
Korea	2	3	3	3	12	-	23
Maroko	1	-	1	1	0,4	-	3,4
Pakistan	0	2	2	3	0,4	-	7,4
Thailand	15	6	5	0	0	0	26
Tunisia	0	2	5	6	6	6	25
Total	18	13	16	13	18,8	6	84,8

Sumber: Abbott and Young (2003).

3.3. Tindak Lanjut Pasar Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong

Setelah KTM VI di Hongkong lalu, yang tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti dan penutupan sidang informal tingkat menteri WTO (*informal ministerial meeting*) tanggal 29 Juni – 2 Juli 2006 lalu di Jenewa, beberapa kelompok negara anggota mulai mengadakan pertemuan khusus dengan tujuan supaya perundingan Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda/DDA*) dilanjutkan kembali. *Pertama*, Pertemuan Tingkat Menteri G-20 diadakan pada tanggal 9-10 September 2006 di Rio de Janeiro, Brazil, dan *Kedua*, pertemuan para Menteri Cairns Group di Australia pada tanggal 20-22 September 2006. Di dalam kedua pertemuan tersebut, Indonesia berperan aktif baik sebagai anggota G-20 maupun sebagai anggota kelompok Cairns sekaligus sebagai Koordinator G-33. Dari pertemuan tersebut lagi-lagi negara maju masih belum menunjukkan sikap untuk dapat membuat suatu kesepakatan dalam perundingan dunia terutama untuk komoditas pertanian. AS secara mandiri maupun secara kelompok (G-6 terdiri dari AS, UE, Brazil, India, Jepang dan Australia) terang-terangan menolak pengurangan bantuan domestik. AS mengatakan pengurangan tarif dalam pilar akses pasar lebih memberikan manfaat bagi negara berkembang daripada pengurangan bantuan domestik terhadap petani mereka. Ini menunjukkan bahwa AS belum menunjukkan kemauan politis (*political will*) untuk menurunkan bantuan domestik di bawah 20 miliar dolar AS per tahun sesuai dengan permintaan negara berkembang.

Selain itu AS mengutip hasil studi Ivanic dan Martin (2006) yang menyatakan bahwa perdagangan bebas yang dikombinasikan dengan pembukaan pasar seluas-luasnya serta reformasi domestik dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi negara berkembang. Untuk perdagangan komoditas pertanian, 93% kesejahteraan akan diperoleh dari penurunan tarif impor, 2% dari penurunan subsidi ekspor dan hanya 5% dari penurunan bantuan domestik. Selanjutnya AS juga menolak pernyataan bersama dari kelompok G-20 dengan tidak bersedia memotong bantuan domestik untuk komoditas pertanian. AS tetap pada pendiriannya yang menghendaki adanya *level of ambition* yang sangat tinggi pada akses pasar baik di negara maju maupun negara berkembang sebelum menawarkan alternatif baru pada pilar bantuan domestik.

Pada pertengahan Oktober 2006 lalu, Komisi Eropa mengadakan pertemuan diskusi tertutup dengan delapan negara anggota ASEAN yang tujuan utamanya untuk membuka pasar Eropa terhadap komoditas pertanian dari ASEAN. Dikatakan bahwa ASEAN memiliki peluang besar terhadap pasar UE (27 negara). Namun bukan berarti perdagangan itu akan berjalan mulus, karena sampai saat ini Eropa masih tetap mendukung penuh pertaniannya dengan memberikan bantuan domestik. Janji UE dan AS untuk mencabut bantuan tersebut tidak pernah ditepati,

malah mereka saling menuduh bahwa masing-masing pihak tidak bersedia mengurangi subsidi pertanian mereka (*Kompas* 2006).

Perkembangan masing-masing aspek/pilar pascaKTM VI Hongkong adalah sebagai berikut :

- (1) Di pilar Bantuan Domestik, dibagi menjadi 3 jenjang untuk pengurangan dalam *Final Bound Total AMS* dan pemotongan *trade-distorting domestic support* secara keseluruhan, dengan cara semakin tinggi jenjang maka pemotongannya semakin besar secara linear. Dalam dua kasus tersebut anggota yang memberikan bantuan domestik besar akan berada di jenjang teratas, semua negara berkembang akan berada di jenjang paling bawah. Selain itu diusulkan juga pengetatan penggunaan kotak biru dan peninjauan kembali serta klarifikasi kriteria penggunaan kotak biru.
- (2) Di pilar Subsidi Ekspor, dihasilkan keputusan politik untuk menghapus subsidi ekspor dengan cara *parallelism* dan *end date*. Tindak lanjut KTM Hongkong menyetujui untuk melakukan penghapusan terhadap semua bentuk subsidi ekspor dan ketentuan yang terkait dengannya hingga tahun 2013.
- (3) Di pilar Akses Pasar, beberapa negara maju sangat agresif untuk memotong tarif karena menginginkan akses pasar yang seluas-luasnya. Indonesia sebagai anggota G-20 tampil melalui konsep pertengahan. Masalah yang paling mendasar pada bidang ini adalah: (i) jumlah jenjang, (ii) besaran ambang batas atau rentang (*threshold*), (iii) bentuk formula yang akan digunakan, (iv) perlakuan terhadap produk-produk peka (*sensitive product*) dalam hal bentuk dan besaran keeluasaan. Posisi optimum hasil perundingan KTM VI Hongkong, Indonesia mengusulkan kombinasi dalam pemotongan tarif, rumus ACP untuk jenjang dan G-20 untuk pemotongannya.

Menindaklanjuti perkembangan tiga pilar tersebut, Indonesia harus segera menentukan posisinya dalam mengantisipasi perkembangan ke tiga pilar tersebut. Antisipasi yang dapat dilakukan diantaranya merancang kebijakan perdagangan dan mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan tersebut. Pada bab berikut ini akan dikaji dampak yang timbul sebagai akibat diputuskannya beragam kebijakan perdagangan yang terkait dengan modalitas ke tiga pilar dalam perjanjian perdagangan pertanian di dalam WTO.

Tabel 3.4. Notifikasi Subsidi Ekspor per Komoditas

Produk Pertanian	seluruh anggota WTO				Uni Eropa				Amerika Serikat				2000			
	1999		2000		1999		2000		1999		2000					
	volume	% *)	volume	% *)	Volume	% *)	nilai	% *)	volume	% *)	nilai	% *)				
Gandum dan tepung gandum	15606	44	1020	4	62	15606	100	509	34	4	71	108	8	0	0	0
Palawija	19226	96	737	6	18379	161	730	63	7080	65	192	18	0	0	0	0
Beras	140	25	132	31	140	101	26	65	132	99	32	88	0	0		
<i>Oilseeds</i>	0		27	6	0		0		0		0					
Minyak sayur	50	5	10	3	0		0		0		0					
Gaplek (<i>oilcakes</i>)	0		0													
Gula entega dan minyak mentega	1107	42	1001	43	971	73	470	86	882	69	373	75				
Susu skim bubuk	206	40	197	45	194	46	333	32	197	49	338	36	5,3	21	7,3	22
Keju	644	105	205	44	417	146	338	112	128	47	26	9	101,4	133	45	3
Produk susu lainnya	349	78	305	82	305	89	236	60	305	95	238	70	3,9	121	5,6	140
Daging sapi	1263	101	920	83	1104	110	905	119	873	91	410	59	17	711	20,	3
Daging babi	775	63	495	5	766	87	726	52	475	58	383	31	0	0	0	0
Daging unggas	715	122	130	28	694	150	243	115	129	29	34	18	0	0	0	0
Daging domba	336	50	263	78	318	101	75	75	261	91	57	63	2,5	9	1,6	0,1
Binatang hidup lainnya	0	1	0													0
Telur	9	6											0	0		0
<i>Wine</i>	102	94	84	83	101	97	14	30	84	85	8	19	0	0		0
Sayur dan buah-buahan	1	0	0		2	99	26	61	2	99	24	60				
Tembakau	1103	18	1145	21	981	105	43	64	815	91	31	51				
Kapas	0		0		0		0		0		0					
Alkohol	0		0													
Produk turunan lainnya					1998	167	219	208	891	78	96	99				
							720	151			414	100				

Sumber : Abbott and Young (2003).

Keterangan :

Volume = volume yang dinotifikasi sebagai volume subsidi ekspor dalam satuan ribu metric ton.

Nilai = nilai subsidi dalam juta Euro untuk UE dan juta US \$ untuk AS.

*) = persen dari komitmen yang dilaporkan setelah perhitungan volume dan nilai.

0 = hanya menunjukkan adanya komitmen terhadap penurunan subsidi ekspor namun tidak menotifikasi besaran penurunan.

IV. ANALISIS SKENARIO PROPOSAL PERUNDINGAN

4.1. Metode Analisis

Sebagai anggota WTO, Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO berdasarkan UU No. 7 tahun 1994 dan telah menerima Perjanjian Pertanian/PP serta meratifikasi beberapa produk pertanian dalam *the national schedules of commitments*. Sejak tahun 1995 sampai sekarang Indonesia juga telah menotifikasi produk pertanian ke WTO dengan data yang berasal dari berbagai sektor, khususnya sektor pertanian (Sawit, 2005).

Perundingan pertanian di WTO hampir tidak mengalami kemajuan sejak dihasilkannya kerangka kerja Paket Juli (*July Package*) pada tahun 2004. Perundingan sektor pertanian tetap berjalan sulit, bahkan sampai saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI di Hongkong yang telah berlangsung pada Desember 2005 yang lalu. Di dalam paragraf 41 disebutkan bahwa kepada negara berkembang diberikan suatu keluwesan untuk menentukan produk khusus (Sawit *et al.*, 2005).

Pertanian memang menjadi isu panas sejak pertemuan di Doha pada 2001. Meski perdagangan pertanian tidak kurang dari 10 % dari total perdagangan dunia, tetapi sektor ini peka bagi semua negara, termasuk negara berkembang. Perundingan pertanian adalah perundingan yang paling kompleks dan sulit. Muatan isu pertanian tidak hanya menyentuh bidang ekonomi tetapi juga sarat dengan muatan politis dan sosial. Kuatnya masalah sosial dan politis disebabkan sebagian besar penduduk dunia terlibat di dalam beragam masalah sosial dan kemiskinan. Di sisi lain negara berkembang yang tergabung dalam OECD memberikan subsidi yang terbesar, yakni mencapai 320 milyar dolar AS per tahun sehingga kondisi ini menyebabkan distorsi perdagangan (*trade distorting*) di bidang produk pertanian.

Semua negara ingin memproteksi pertaniannya dengan berbagai cara dengan bantuan domestik, subsidi ekspor, atau menaikkan tarif. Itu sebabnya agenda Doha mengeluarkan mandat, yakni pertama, peningkatan akses pasar (*market access*); kedua, mengurangi atau menghapus segala bentuk subsidi ekspor; ketiga, mengurangi subsidi atau bantuan domestik; keempat, disepakatinya pemberian perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang. Dari keempat aspek yang diuraikan di atas, analisis berikut lebih memfokuskan pada 3 aspek utama (mandat) yakni peningkatan akses pasar, mengurangi atau menghapus segala bentuk subsidi ekspor dan mengurangi bantuan domestik. Ketiga aspek tersebut merupakan bentuk-bentuk kebijakan distorsi perdagangan yang memberikan dampak pada perdagangan komoditas pertanian.

Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik analisis, kombinasi metoda dan alat-alat deskriptif untuk menjelaskan masalah-masalah penelitian dengan Model Proyek Analisis Perdagangan Global (*Global Trade Analysis Project/GTAP Modeling*). Pemilihan metoda atau alat analisis didasarkan pada kerelevanan masalah dan ketersediaan data dan informasi untuk menjawab masalah. Model GTAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah GTAP versi 6 yang merupakan versi terakhir yang menggunakan data-data tahun 2001 oleh *Center for Global Trade Analysis*, Purdue University, Indiana, AS. Analisis GTAP merupakan salah satu dari paket model CGE yang dapat dipergunakan untuk melihat dampak perdagangan (tarif, subsidi ekspor, dll) dalam kerangka: (1) satu negara (*single country*) dan (2) *multi market, multi country* (banyak pasar atau negara).

Untuk penyederhanaan penggabungan dilakukan menggunakan agregasi 8 negara/kelompok negara dan 16 komoditas. Adapun negara/agregasi negara adalah sebagai berikut :

- (1) Jepang,
- (2) Korea,
- (3) Amerika Serikat/AS,
- (4) Uni Eropa/UE,
- (5) Negara Maju Lainnya,
- (6) Indonesia,
- (7) G-33 (sesuai dengan ketersediaan negara di program GTAP),
- (8) Sisa dari dunia.

Sedangkan dari 16 komoditas tersebut yang dimasukkan ke dalam sektor pertanian berjumlah 13 komoditas, yang dilambangkan dalam nama peubah yang terdapat dalam tanda kurung, yaitu :

- (1) Padi dan olahannya, untuk **padi** (Padi_Olah)
- (2) Gandum, untuk **gandum** (Gandum)
- (3) Sereal lainya, untuk **jagung** (Jagung)
- (4) Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan, **untuk sayuran dan kelapa (segar/kering)** (Horti)
- (5) Biji-bijian mengandung minyak, untuk **kedelai** (Kedelai)
- (6) Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit), untuk **gula/tebu** (Gula_Tebu)
- (7) Tanaman jenis *fibers*, untuk **kapas atau rami** (Kapas_Rami)
- (8) Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda, untuk **ruminansia/sapi** (Spi_Dmb_Dag)
- (9) Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas, untuk **unggas** (Ayam_Telur)
- (10) Susu dan produk olahannya, untuk **susu dan produk olahannya** (Susu_Olahan)
- (11) Pertanian lainnya, untuk **pala, dan vanili** (Pertan_Lain)

- (12) Produk minyak nabati, untuk **kelapa (kopra), dan kedelai (minyak)** (MinyakNabati)
 (13) Produk makanan olahan, untuk **kakao** (OlahMakanan).

Dalam melakukan simulasi model GTAP, menurut Rae dan Strutt (2003) instrumen dalam penyesuaian tiga pilar WTO yaitu kotak biru, kotak hijau, dan kotak jingga adalah sebagai berikut :

- Kotak Jingga (KJ)/ *Amber Box* (AB) diproksi dengan subsidi output (*Osubsidi eksporP*) dan subsidi input antara (*Isubsidi eksporP*)
- Kotak Biru (KB)/ *Blue Box* (BB) dan Kotak Hijau (KH)/ *Green Box* (GB) diproksi dengan subsidi input lahan (*land-based*) dan modal (*capital-based*) yang terdapat dalam subsidi faktor input (*FBED*)

Menurut paket program yang tersedia dalam GTAP Versi 6.0 *shock* yang dapat dilakukan hanya pada tingkat subsidi keluaran (*rTO*). Oleh karena itu dalam simulasi ini, pengertian pemotongan subsidi domestik adalah pemotongan untuk kotak jingga saja. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan subsidi domestik dalam model GTAP 6.0 adalah subsidi untuk kotak jingga. Skenario simulasi yang dilakukan adalah seperti pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Skenario Pemotongan Bantuan Domestik

Jenjang/tingkat bound	Usulan G-20	Usulan USA	Usulan UE	KTM Hongkong	
1. > 60 milyar dolar AS	80%	75%	70%	70-80%	UE
2. 10-60 milyar dolar AS	75%	53%	60%	53-75%	AS dan Jepang
3. 0-10 milyar dolar AS	70%	31%	50%	31-70%	Negara maju lainnya

Skenario pemotongan bantuan domestik yang disimulasikan dalam penelitian ini mengacu pada besaran yang mendekati rekomendasi AMS pada sidang di Vevey tanggal 27 – 30 November 2006 yang lalu. Pemotongan AMS yang direkomendasikan berdasarkan proposal yang ditawarkan saat sidang oleh UE, AS masing-masing mengajukan 3 skenario:

Skenario A: UE (70%), AS (60%) dan negara lainnya (50%)

Skenario B: UE (70%), AS (60%) dan negara lainnya (55%)

Skenario C: UE (80%), AS (> 60%) dan negara lainnya (60%).

Dengan demikian beberapa skenario pada penelitian ini berdasarkan Tabel 3.1 di atas adalah:

- Skenario A: Usulan K-20 : > 60 milyar dolar AS (80% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (75% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (80% untuk negara maju lainnya)
- Skenario B: Usulan UE : > 60 milyar dolar AS (75% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (53% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (50% untuk negara maju lainnya)
- Skenario C: Usulan USA : > 60 milyar dolar AS (70% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (60% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (50% untuk negara maju lainnya)
- Skenario D: Hasil KTM Hongkong (minimal) : > 60 milyar dolar AS (70% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (53% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (31% untuk negara maju lainnya)
- Skenario E: Hasil KTM Hongkong (maksimal): > 60 milyar dolar AS (80% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (75% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (70% untuk negara maju lainnya)

Skenario pemotongan subsidi ekspor didasarkan pada perkembangan posisi perundingan di Hongkong tahun 2005 dimana ada kesepakatan untuk melakukan penghapusan terhadap semua bentuk subsidi ekspor dan ketentuan yang terkait dengannya pada tahun 2013. Oleh karena itu disusun simulasi bertahap dengan pemotongan 50, 80 dan 100%.

Kegiatan ini lebih memusatkan perhatian pada analisis data agregat nasional dan internasional berupa data sekunder, baik dari hasil-hasil studi terkait WTO dan Perjanjian Pertanian (PP) maupun data statistik, serta bahan-bahan perundingan perjanjian pertanian pada periode sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui wawancara dan penelusuran pustaka, laporan-laporan dan publikasi data dari instansi-instansi terkait, seperti: Kantor Statistik Provinsi; Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, atau Dinas Perdagangan Provinsi; Departemen Perdagangan; Departemen Keuangan; Departemen Luar Negeri; Forum WTO Nasional; Bank Dunia; Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Perternakan, atau Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; Asosiasi Pengekspor dan Pengimpor Komoditas Pertanian; Asosiasi Petani atau Produsen Komoditas Pertanian; WTO; Basis data GTAP versi 6; lembaga komoditas dan penelitian milik pemerintah dan lembaga internasional, swasta nasional dan internasional, dan lain-lain. Paket data GTAP versi 6 ini memuat : [1] peubah kuantitatif (*Quantity variables*), [2] peubah harga

(*Price Variables*), [3] peubah kebijakan (*Policy Variables*), [4] peubah perubahan teknologi (*Technical Change Variables*), [5] peubah boneka (*Dummy Variables*), [6] peubah cadangan (*Slack Variables*), [7] peubah nilai dan pendapatan (*Value and Income Variables*), [8] peubah kepuasan/utilitas (*Utility Variables*), [9] peubah kesejahteraan (*Welfare Variables*), dan [10] peubah neraca perdagangan (*Trade Balance Variables*).

Data dan informasi dari sumber sekunder yang diperlukan meliputi struktur tarif, produk domestik bruto, keragaan penduduk, dan keragaan ekspor dan impor tiap anggota G-33. Walaupun pendekatan ini bukan yang utama, namun dalam mencari dampak dari berbagai kebijakan yang dihasilkan perundingan WTO tentunya dalam penelitian ini diperlukan informasi dari berbagai pengambil/pemberi kebijakan di tingkat daerah. Dalam hal ini lokasi contoh dipilih berdasarkan sentra produksi. Komoditas yang dipilih dalam penelitian ini sangat beragam mencakup komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Aspek perdagangan yang diteliti tergantung pada fokus pembicaraan dalam perundingan WTO atau persetujuan internasional, terutama tentang perwujudan modalitas penurunan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan.

Berdasarkan ruang lingkup masalah, komoditas yang menjadi perhatian dan data yang dibutuhkan dalam analisis adalah tingkat nasional dan internasional yang meliputi 44 anggota G-33, termasuk Indonesia. Khusus di Indonesia pengamatan dan pengumpulan fakta dan diskusi juga dilakukan di beberapa provinsi contoh yang menjadi sentra produksi. Informasi dan keterangan di lokasi contoh sentra-sentra produksi ini diharapkan dapat mempertajam analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dipilih enam provinsi yang mempunyai komoditas unggulan ekspor di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Secara rinci daerah penelitian dan komoditas terpilih dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Provinsi Tujuan Penelitian dan Komoditas

Provinsi	Komoditas
Sulawesi Utara	Pala, Kelapa, Vanili
Sulawesi Selatan	Kakao
Riau	Sayuran berdaun lebar
Nusa Tenggara Barat	Ternak sapi
Bali	Perkebunan (Vanilla)
Jawa Timur	Tanaman Pangan (Padi/Kedelai)

4.2. Basis Data Matriks Aliran Perdagangan

Arus perdagangan dunia berjalan sangat pesat seiring dengan teknologi yang berkembang saat ini dimana fasilitas transportasi dan informasi semakin lancar dan efisien, sehingga globalisasi perdagangan akan berjalan semakin dipercepat. Globalisasi ditandai dengan semakin menyatunya praktek-praktek perdagangan, seolah-olah batas-batas negara tidak ada lagi. Walaupun demikian, pencatatan antarnegara perlu dilakukan sebagai wujud dari keberadaan negara yang bersangkutan. Basis data GTAP merekam arus perdagangan antar negara ini, sehingga perdagangan komoditas pertanian dari dan ke Indonesia menurut kelompok yang telah disusun dapat dianalisis.

Dari data pada Tabel 4.3 terlihat aliran perdagangan untuk komoditas beras (padi dan olahannya termasuk beras). Beras merupakan komoditas pangan utama di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Besarnya impor komoditas beras Indonesia mencapai 152 juta dolar AS atau mencapai 1,98% dari total nilai perdagangan beras yang ada di pasar dunia. Negara-negara mitra dagang beras Indonesia dalam kelompok, seperti G-33 (pengekspor beras ke Indonesia) sebesar 26,7 juta dolar AS atau 17,57% dari total impor beras Indonesia. Sementara, arus ekspor komoditas beras dari Indonesia ke luar negeri sebagian besar ditujukan ke negara-negara UE dengan nilai sekitar 10,1 juta dolar AS atau sekitar 41,06% dari nilai ekspor beras total Indonesia yang mencapai 24,6 juta dolar AS. Selain itu, ekspor beras Indonesia yang cukup menonjol ke negara maju lainnya adalah ke AS dan Jepang, masing-masing sebesar 4,3 juta dolar AS (17,48% dari nilai ekspor beras total Indonesia pada tahun 2001) dan 1,5 milyar dolar AS (6,10%).

Tabel 4.3. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Beras (Juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	0,1	1,1	2,5	0,8	0,1	5,2	939,2	948,9
Korea	1,2	0	4,1	8,3	1,5	0,1	1,2	3,6	20,1
AS	98,2	4,3	0	81,6	75,1	5,4	60,1	436,7	761,4
UE	0,9	0,2	6,7	530,4	11,6	0,2	7,2	88,1	645,3
Dari Negara maju lainnya	35,5	0	9,7	10,7	9,5	0,3	26	74,9	166,5
Indonesia	1,5	0,4	4,3	10,1	1,7	0	1,5	5,1	24,6
G-33	48,7	22,9	92,1	249,8	33,6	26,7	117,4	892,4	1483,6
ROW	42,6	6,8	170	259,7	75,8	119,3	516,3	2445	3635,5
Total	228,5	34,8	287,9	1153	209,7	152	734,8	4885	7685,9

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Untuk komoditas biji-bijian yang mengandung minyak seperti kedelai, posisi Indonesia adalah sebagai pengimpor murni (Tabel 4.4). Dari tabel ini terlihat aliran impor ke Indonesia dari komoditas ini mencapai 330 juta dolar AS, sedangkan ekspornya hanya 15 juta dolar AS. Sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Besarnya impor komoditas telah mencapai 2,1% dari total nilai perdagangan yang ada di pasar dunia. Negara utama mitra dagang Indonesia adalah AS (pengekspor kedelai ke Indonesia) yang mengekspor sebesar 275,8 juta dolar AS atau 57,94% dari total impor kedelai Indonesia. Sementara arus ekspor komoditas kedelai dari Indonesia ke luar negeri sebagian besar ditujukan ke negara-negara UE dengan nilai 3,42 juta dolar AS atau sekitar 22,67% dari nilai ekspor beras total Indonesia yang mencapai 15 juta dolar AS.

Tabel 4.4. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Biji-bijian Mengandung Minyak (Kedelai) (juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	0,1	0,6	1,1	0,5	0	0,4	1,6	4,3
Korea	0	0	0,2	0,3	0,1	0	0	0,1	0,8
AS	753,4	227,2	0	1168,9	275,8	244,3	1338,3	1802,5	5810,3
UE	5,7	0	1,6	753,7	12,7	0,3	26,5	140,5	941,1
Dari Negara maju lainnya	575,1	15,5	155,4	205,2	7	2,4	334,1	305,1	1599,7
Indonesia	0,3	0,6	0,4	3,4	0,3	0	0,8	9,2	15
G-33	122,3	62	36,2	200,9	21	45,3	51,9	302,6	842,3
ROW	254,9	50,6	70,3	2655,7	158,6	37,9	1881,9	1263,6	6373,6
Total	1711,8	356	264,7	4989,2	476	330,2	3634	3825,2	15587,2

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Komoditas jenis hortikultura juga menunjukkan gambaran yang tidak terlalu berbeda, dimana posisi Indonesia juga adalah sebagai pengimpor murni (Tabel 4.5). Nilai impor Indonesia untuk komoditas ini mencapai 216,3 juta dolar AS, sedangkan ekspornya hanya 169,1 juta dolar AS. Sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Besarnya impor komoditas ini telah mencapai 0,46% dari total nilai perdagangan yang ada di pasar dunia. Negara mitra dagang utama Indonesia adalah AS dan G-33 yaitu sebesar 35,3 juta dolar AS dan 88,1 juta dolar AS, atau 16,32% dan

40,73% dari impor total hortikultura Indonesia. Sementara arus ekspor utama komoditas keluarga sayuran dari Indonesia ke luar negeri sebagian besar ditujukan ke G-33 sebesar 20 juta dolar AS atau sekitar 11,82% dari nilai ekspor total sayuran Indonesia yang mencapai 169,1 juta dolar AS.

Tabel 4.5. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan(Sayuran dan Kelapa (Segar/Kering)) (juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indon esia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	0,5	3,5	2,9	4,2	0,4	11,2	12	34,6
Korea	182,5	0	22,7	11,4	6	4,9	11,5	14,4	253,3
AS	722,1	88,1	0	914,4	1708,3	35,3	497,9	1124,9	5091
UE	38,2	3,8	257,2	13300,1	640,8	5,4	97,9	1594,6	15938,1
Dari Negara maju lainnya	225,4	15,7	716,8	598,1	88,3	21,4	544	624,6	2834,4
Indonesia	2,7	0,4	11,6	19,7	3	0	20	111,7	169,1
G-33	787	101,5	659,3	1614,1	232,5	88,1	561,9	1356,5	5400,8
ROW	369,8	22,8	4874,5	6113,1	644,2	60,8	1343,3	3774,6	17203
Total	2327,6	232,8	6545,5	22573,9	3327,4	216,3	3087,6	8613,4	46924,3

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Komoditas jenis ternak ruminansia, termasuk di dalamnya sapi, juga menunjukkan gambaran yang tidak terlalu berbeda dengan komoditas sebelumnya dimana posisi Indonesia juga sebagai pengimpor murni. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia mencapai 124,9 juta dolar AS, sedangkan ekspornya hanya 28,9 juta dolar AS. Sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Besarnya impor komoditas ini telah mencapai 0,45% dari total nilai perdagangan yang ada di pasar dunia. Negara mitra dagang utama Indonesia adalah negara-negara maju seperti AS, UE dan negara maju lainnya yaitu masing-masing sebesar 10,1 juta dolar AS, 5,2 juta dolar AS, dan 101,9 juta dolar AS atau sebesar 8,09%, 4,16%, dan 81,59% dari nilai impor daging sapi ke Indonesia. Negara maju yang dominan dalam melakukan ekspor sapi ke Indonesia adalah Australia.

Komoditas pala dan vanili yang masuk ke dalam kelompok pertanian lainnya menunjukkan Indonesia sebagai pengeksportur murni

(Tabel 4.7). Untuk komoditas ini nilai impor Indonesia mencapai 263,6 juta dolar AS, sedangkan eksportnya 2.076,3 juta dolar AS. Dengan demikian, saat ini posisi Indonesia sudah mencapai surplus untuk kedua komoditas tersebut. Namun, Indonesia juga masih melakukan impor atas kedua komoditas tersebut sebesar 0,61% dari total nilai perdagangan yang ada di pasar dunia. Negara mitra dagang utama Indonesia adalah G-33 yaitu sebesar 141,3 juta dolar AS atau sebesar 53,60% dari total impor Pala dan Vanili Indonesia. Sementara arus ekspor pala dan vanili ini dapat mencapai 4,8% dari nilai total perdagangan, sebagian besar ditujukan ke AS dan UE yang mencapai 524,8 dan 466,5 juta dolar AS atau sekitar 25,28 dan 22,47% total ekspor pala dan vanili Indonesia.

Tabel 4.6. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Ternak Hidup dan Dagingnya (dari Sapi, Kambing, Domba dan Kuda atau ruminansia/sapi) (juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	6,7	17,4	23	1	0,2	3,6	3,7	55,6
Korea	2,3	0	2	2,1	0,4	0,2	2,1	1,6	10,6
AS	1940,5	420,5	0	310,1	527,1	10,1	152,3	1336,7	4697,4
UE	55,9	8,2	345,9	7314,2	113,6	5,2	66,1	1032,9	8941,9
Dari Negara maju lainnya	1314,8	207,3	4023,5	924,9	422,3	101,9	450,4	1505,2	8950,3
Indonesia	0,6	0,1	1,1	3,2	0,4	0	0,7	22,8	28,9
G-33	26	1,6	10,1	110,9	52	3,3	88,3	348	640,2
ROW	60,3	13,9	818,1	1594,6	134	4	139,2	1709,4	4473,5
Total	3400,4	658,3	5218,1	10283	1250,8	124,9	902,8	5960,2	27798,4

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Dari subsektor perkebunan Indonesia yang memiliki nilai ekspor dominan dapat dicerminkan oleh kelompok perdagangan minyak nabati, utamanya dari kelapa sawit dan kelapa. Bagi komoditas minyak kelapa dan kedelai yang masuk ke dalam kelompok ini, Indonesia adalah pengeksport murni (Tabel 4.8) dan yang paling dominan cenderung kelapa. Nilai impor Indonesia mencapai 36,4 juta dolar AS, sedangkan nilai eksportnya 1377,5 juta dolar AS. Sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Besarnya impor komoditas ini telah mencapai 0,23% dari total nilai perdagangan yang ada di pasar dunia. Negara utama mitra dagang Indonesia adalah negara-negara G-33, di mana impor Indonesia mencapai

15,2 juta dolar AS. Sementara arus ekspor minyak kelapa ini dapat mencapai 8,69% dari total perdagangan, sebagian besar ditujukan ke UE yang mencapai 345,5 juta dolar AS atau sekitar 25,08%.

Tabel 4.7. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Pertanian lainnya (Pala dan Vanili) (Juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	22,2	35,4	29,2	8,9	2,3	28,8	41,5	168,3
Korea	144,6	0	20,3	13,5	4	2,3	48,6	32,2	265,5
AS	518	132,2	0	1055,5	371	16,5	193,3	808,2	3094,6
UE	305,4	50,3	635,3	6728,3	687	28,5	186,9	1480,5	10102,1
Dari Negara maju lainnya	315,8	136,2	596,1	897,5	60,8	4	993,3	456,1	3459,7
Indonesia	166,7	42	524,8	466,5	113	0	183	580,4	2076,3
G-33	642,5	155	734,5	1719,1	187,4	141,3	530,8	2173,4	6284,2
ROW	1381	292,7	3466,7	6509,7	615,1	68,7	1232,8	3875,2	17441,9
Total	3474,2	830,6	6013,1	17419,2	2047	263,6	3397,4	9447,3	42892,6

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.8. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Minyak Nabati (kelapa (kopra), dan kedelai (minyak)) (juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	2,2	13,8	1,7	1,8	0,3	3,9	10	33,7
Korea	0,5	0	0,5	0,7	0,2	0	2,1	2	5,9
AS	27,9	31,7	0	81,9	99,2	0,8	146,4	479,7	867,5
UE	112,1	12,6	428,7	3268	205,1	3,1	115,9	994,7	5140,2
Dari Negara maju lainnya	19,9	8,9	223,8	16,3	15,5	0,2	58,5	52,1	395,2
Indonesia	3,1	4,9	10,4	345,5	5	0	600,3	408,3	1377,5
G-33	39,2	19,6	181,2	253,5	19,6	15,2	95,7	203,5	827,5
ROW	162,7	101,1	165,6	890,2	130,7	16,8	2190,1	3541,2	7198,4
Total	365,3	180,9	1024	4857,7	477,2	36,4	3212,9	5691,4	15846

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Kelompok lain yang dominan dari subsektor perkebunan adalah yang berwujud makanan olahan. Kakao yang masuk ke dalam kelompok makanan olahan ini menunjukkan Indonesia sebagai pengeksportur murni (Tabel 4.9). Nilai impor Indonesia mencapai 887,5 juta dolar AS, sedangkan nilai eksportnya 2611,2 juta dolar AS. Sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Besarnya impor komoditas ini telah mencapai 0,48% dari total nilai perdagangan yang ada di pasar dunia. Negara utama mitra dagang Indonesia adalah AS yang mengimpor senilai 244,8 juta dolar AS. Sementara arus ekspor kelompok kakao ini dapat mencapai 1,40% dari nilai perdagangan total, sebagian besar ditujukan ke seluruh negara maju yang mencapai total 345,5 juta dolar AS atau sekitar 68,33%.

Tabel 4.9. Peta Aliran Perdagangan Komoditas Makanan Olahan (kakao) (juta dolar AS)

Negara	Tujuan								
	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW	Total
Jepang	0	197,3	343,3	106,2	98,6	13,7	467,4	859,1	2085,7
Korea	926,9	0	209,7	112,6	82,2	14,5	179	310,3	1835,1
AS	3711,4	577,8	0	2655	3997,9	244,8	1428,7	5658,2	18273,7
UE	2136,5	551,8	6622,2	52619,6	4304,8	94,8	2080,1	12573,2	80983,1
Dari Negara maju lainnya	1731,3	145,9	5914,5	3877,8	1009,9	77,5	770,5	2279,9	15807,4
Indonesia	841,6	66,3	466,7	347,9	61,7	0	251	576,1	2611,2
G-33	3685,2	916,6	1713,7	2753,8	476,9	210,2	1530,2	2966,2	14252,8
ROW	5576,4	779	9626,6	13124,7	1855,8	231,9	3331,5	15777,1	50303
Total	18609,3	3234,6	24896,6	75597,6	11887,7	887,5	10038,5	41000,1	186152

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

4.3. Bantuan Domestik

Analisis dampak penurunan bantuan domestik dalam penelitian ini dilakukan melalui simulasi dengan bantuan program komputer GTAP Version 6, seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab metodologi. Komoditas pertanian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pala, kelapa, vanili, kakao, sayuran, ternak sapi, dan tanaman pangan, sejalan dengan pengamatan di lapangan. Namun demikian, model GTAP yang digunakan tidak dapat secara rinci mengarahkan analisis terhadap komoditas tersebut satu per satu, karena fasilitas yang tersedia hanya memungkinkan analisis agregat komoditas. Berkenaan dengan keterba-

atasan yang ada, pendekatan yang digunakan untuk mengarah pada tujuh komoditas di atas adalah dengan mengidentifikasi kelompok komoditas di mana masing-masing komoditas tersebut berada dalam cakupan peubah di basis data GTAP. Kalau dirinci per komoditas maka ke tujuh komoditas di atas terdapat di dalam kelompok komoditas sebagai berikut :

- Pala: Pertanian lainnya;
- Kelapa: Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan, produk minyak nabati;
- Vanili : Pertanian lainnya;
- Kakao : Produk makanan olahan;
- Sayuran Berdaun Lebar : Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan;
- Ternak Sapi : Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba, dan kuda;
- Tanaman Pangan : Padi dan olahannya, biji-bijian mengandung minyak, produk minyak nabati;

Berdasarkan uraian di atas maka untuk memudahkan pemahaman pembaca, di dalam pembahasan penyebutan peubah langsung mengacu pada komoditasnya saja. Dampak penghapusan bantuan domestik diamati pengaruhnya terhadap: (i) perubahan harga, (ii) impor, (iii) permintaan rumah tangga Indonesia, (iv) permintaan rumah tangga Indonesia untuk barang domestic, (v) permintaan rumah tangga Indonesia untuk barang impor, (vi) keluaran, (vii) sumber daya, (viii) neraca perdagangan, (ix) GDP, dan (x) kesejahteraan. Selain itu kalau dilihat dari cakupan skenario hasil KTM Hongkong sudah mencakup seluruh keinginan usulan skenario masing-masing kelompok negara. Oleh karena itu, hasil perhitungan dampak menurut KTM Hongkong ini (minimal-maksimal) akan menampung aspirasi dari masing-masing kelompok negara.

4.3.1. Dampak terhadap Harga Komoditas Pertanian

Terdapat perbedaan hasil simulasi antara di negara maju dan negara berkembang, yaitu dengan adanya penurunan bantuan ini maka harga sumberdaya di negara maju akan menurun dan hal sebaliknya terjadi di negara berkembang (Tabel 4.10). Dari Tabel 4.10, terlihat bahwa ternyata negara maju seperti AS dirugikan dengan adanya usulan G-20 dan KTM Hongkong (maksimal), di mana harga lahan, tenaga kerja (terampil dan tidak terampil), modal dan sumberdaya alam mengalami penurunan. Penurunan yang terbesar terjadi pada harga lahan yang besarnya mencapai 10%, walaupun demikian kalau mengikuti KTM Hongkong (minimal) upah tenaga kerja terampil akan naik relatif kecil hingga 0,0016%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil penurunan bantuan domestik di negara maju akan meningkatkan upah tenaga kerja (terampil).

Disamping itu, penurunan bantuan domestik juga berpengaruh pada harga komoditas pertanian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan harga pertanian di negara maju umumnya lebih besar dibandingkan dengan peningkatan di negara berkembang. Sebagai contoh, dalam skenario KTM Hongkong, negara maju yang banyak memberikan subsidi pangan seperti padi, memperlihatkan harga padi (AS) naik sebesar 9,5-13,5% dibandingkan dengan harga padi (Indonesia) yang hanya meningkat sebesar 0,32-0,43%. Begitu pula dengan Jepang menunjukkan peningkatan harganya 1,7-2,4%.

Untuk komoditas pala, kelapa, vanili, dan kakao di Indonesia, hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan bantuan domestik negara maju menunjukkan terjadinya peningkatan harga masing-masing komoditas tersebut pada semua usulan/skenario. Khusus untuk skenario KTM Hongkong, harga pala dan vanili akan naik 0,48-0,63%, harga kelapa naik 0,39-0,52%, dan harga kakao 0,16-0,21%. Sedangkan untuk komoditas ternak sapi naik dengan kisaran 0,16-0,22%, sayuran 0,39-0,52%, dan tanaman pangan seperti padi dan kedelai naik masing-masing 0,32-0,43% dan 2,03-2,71%. Dengan demikian terlihat bahwa komoditas kedelai sangat peka terhadap penurunan bantuan domestik negara maju yang ditunjukkan oleh nilai peningkatan harga yang terbesar (2,03-2,71%) dibandingkan dengan komoditas lainnya. Contohnya negara AS, peningkatan harga kedelai lebih besar dari di Indonesia yaitu 9,42-13,21% dan di UE mencapai 17,49-20,10%.

4.3.2. Dampak terhadap Impor

Penurunan bantuan domestik di satu negara maju tertentu cenderung meningkatkan impor negara itu sendiri, seperti terlihat khususnya bagi AS pada komoditas-komoditas yang memiliki subsidi yang tinggi yaitu padi, kedelai, dan produk minyak nabati (Tabel 4.11). Dari skenario KTM Hongkong, didapatkan bahwa peningkatan impor bagi AS berkisar antara 28,71-40,64%, 16,09-22,62%, dan 4,79-7,20%, sedangkan bagi UE, peningkatan impor hanya pada komoditas kedelai, sebesar 8,85-9,71%. Ketiga usulan G-20, AS dan UE masuk ke dalam cakupan kisaran besaran peningkatan impor tersebut.

Sebaliknya bagi Indonesia, penurunan bantuan domestik menurunkan impornya untuk sebahagian besar komoditas pada semua usulan maupun hasil KTM Hongkong, kecuali bagi kelompok hortikultura, ternak lainnya termasuk unggas dan pertanian lainnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa yang mengalami penurunan tertinggi adalah komoditas kedelai, dengan laju 6,78-9,58%. Dengan kata lain, penghapusan bantuan domestik di negara maju menyebabkan harga komoditas kedelai meningkat di negara produsen dan mengakibatkan penurunan impor yang tajam di negara pengimpor, seperti Indonesia. Penurunan impor untuk ko-

moditas lainnya relatif rendah, di bawah 1% kecuali pada skenario KTM Hongkong di mana penurunan maksimum terjadi untuk komoditas padi dan olahannya (padi), sereal lainya (jagung), dan produk minyak nabati (minyak kelapa, minyak kedelai, CPO dll). Kondisi ini hampir sama dengan apa yang terjadi pada negara berkembang, khususnya negara-negara yang tergabung dalam G-33. Terlihat bahwa dampak penurunan bantuan domestik di negara maju mengakibatkan penurunan impor di negara berkembang akibat dari naiknya harga-harga komoditas di negara-negara yang memberikan bantuan domestik, yakni negara maju.

Untuk komoditas perkebunan seperti pala, kelapa, vanili, dan kakao dampak penurunan bantuan domestik di negara maju bagi impor Indonesia adalah terjadinya peningkatan impor komoditas pala, kelapa, dan vanili, sedangkan impor kakao mengalami penurunan. Adapun peningkatan impor dari hasil simulasi KTM Hongkong adalah untuk pala dan vanili sebesar 0,18-0,25%; dan Kelapa 0,05%, sedangkan Kakao mengalami penurunan impor sebesar 0,04-0,05%. Impor Indonesia akan ternak Sapi mengalami penurunan dengan kisaran 0,20-0,40%; sayuran naik 0,05%; tanaman pangan, seperti padi dan kedelai akan turun masing-masing antara 0,73-1,06 dan 6,78-9,58%. Kembali terlihat bahwa komoditas kedelai sangat peka terhadap penurunan bantuan domestik di negara maju, seperti AS dan UE.

4.3.3. Dampak terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia

Seiring dengan peningkatan harga komoditas pertanian di negara maju, Indonesia serta negara berkembang lainnya (G-33) dan meningkatnya harga di pasar internasional, maka berakibat terhadap menurunnya impor Indonesia, kecuali bagi kelompok hortikultura, ternak lainnya termasuk unggas dan pertanian lainnya. Menurunnya impor Indonesia diakibatkan karena permintaan rumah tangga yang menurun, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.12. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa permintaan rumah tangga untuk seluruh komoditas pada semua usulan dan rekomendasi KTM Hongkong mengalami penurunan. Komoditas yang memiliki penurunan tertinggi adalah kedelai, dengan laju antara 0,41-0,57%, kemudian padi menurun dengan laju antara 0,04-0,06%, pala dan vanili menurun antara 0,06-0,09%, kelapa dan kakao masing-masing menurun sebesar 0,05-0,06%, dan 0,04-0,05%. Dengan demikian penurunan bantuan domestik negara maju pada komoditas tertentu, seperti kedelai yang memiliki subsidi yang besar di negara maju juga akan menurunkan permintaan rumah tangga masyarakat Indonesia.

Meskipun permintaan rumah tangga Indonesia mengalami penurunan di semua komoditas akibat penurunan bantuan domestik di negara maju, tetapi permintaan terhadap komoditas pertanian domestik dan impor relatif beragam (Tabel 4.13 dan 4.14). Permintaan rumah tangga

atas gandum, jagung (serelia lainnya), kedelai (biji-bijian yang mengandung minyak), tanaman serat (seperti kapas dan rami), serta susu dan produk olahannya semuanya meningkat. Sebaliknya, permintaan rumah tangga atas padi, hortikultura, gula, ternak ruminansia dan unggas, pertanian lainnya, minyak nabati, dan produk makanan olahan semuanya menurun.

Tabel 4.12. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Permintaan Rumah tangga Indonesia (%)

Peubah	Usulan G-20	Usulan AS	Usulan UE	KTM Hongkong	
				Minimal	Maksimal
Padi_Olah	-0,0579	-0,0425	-0,0468	-0,0419	-0,0579
Gandum	-0,0698	-0,0474	-0,0551	-0,047	-0,0698
Jagung	-0,0989	-0,0715	-0,0797	-0,0707	-0,0989
Horti	-0,0646	-0,0477	-0,0524	-0,0469	-0,0646
Kedelai	-0,5675	-0,41	-0,4571	-0,4073	-0,5675
Gula_Tebu	-0,0526	-0,038	-0,0424	-0,0376	-0,0526
Kapas_Rami	-0,2215	-0,1762	-0,1835	-0,1713	-0,2215
Spi_Dmb_Dag	-0,0717	-0,0508	-0,0575	-0,0503	-0,0717
Ayam_Telur	-0,0892	-0,0648	-0,0719	-0,0639	-0,0892
Susu_Olahan	-0,1938	-0,1042	-0,144	-0,1041	-0,1938
Pertan_Lain	-0,0748	-0,0568	-0,0612	-0,0555	-0,0748
MinyakNabati	-0,0817	-0,0592	-0,0658	-0,0586	-0,0817
OlahMakanan	-0,0542	-0,0389	-0,0436	-0,0385	-0,0542
SekPrimLain	-0,0247	-0,0155	-0,0191	-0,0158	-0,0247
Industri	-0,0372	-0,0254	-0,0295	-0,0254	-0,0372
Jasa	-0,0381	-0,0263	-0,0303	-0,0263	-0,0381

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang permintaannya mengalami peningkatan adalah produk-produk yang memiliki daya saing terhadap produk luar negeri, seperti komoditas kedelai yang mengalami peningkatan permintaan domestik sebesar 5,1-7,2% (simulasi KTM Hongkong). Komoditas andalan seperti kelapa, vanili, pala, kakao, padi, sayuran, dan ternak sapi mengalami penurunan permintaan domestik. vanili dan pala mengalami penurunan permintaan sebesar 0,14-0,19%, kelapa dan sayuran antara 0,05-0,07%, padi dan ternak sapi antara 0,02 dan 0,05-0,07%.

Tabel 4.13. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia untuk Produk Pertanian Domestik (%)

Peubah	Usulan G-20	Usulan AS	Usulan UE	KTM Hongkong	
				Minimal	Maksimal
Padi_Olah	-0,019	-0,016	-0,0161	-0,0151	-0,019
Gandum	0,2639	0,0744	0,172	0,0793	0,2639
Jagung	0,2358	0,1553	0,1852	0,1574	0,2358
Horti	-0,0721	-0,0543	-0,0588	-0,0531	-0,0721
Kedelai	7,2055	5,1041	5,7711	5,1003	7,2055
Gula_Tebu	-0,0566	-0,0414	-0,0457	-0,0407	-0,0566
Kapas_Rami	0,3938	0,3487	0,3371	0,335	0,3938
Spi_Dmb_Dag	-0,0682	-0,0494	-0,055	-0,0488	-0,0682
Ayam_Telur	-0,0927	-0,0678	-0,0749	-0,0669	-0,0927
Susu_Olahan	1,8621	0,8044	1,3172	0,8116	1,8621
Pertan_Lain	-0,1936	-0,1461	-0,1579	-0,1431	-0,1936
MinyakNabati	-0,0431	-0,0285	-0,0339	-0,0289	-0,0431
OlahMakanan	-0,0546	-0,0394	-0,0439	-0,0389	-0,0546
SekPrimLain	-0,0246	-0,0154	-0,019	-0,0157	-0,0246
Industri	-0,0649	-0,0482	-0,0527	-0,0473	-0,0649
Jasa	-0,0449	-0,032	-0,036	-0,0317	-0,0449

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan bantuan domestik di negara maju berdampak pada peningkatan harga komoditas impor. Akibat harga komoditas impor meningkat, maka permintaan rumah tangga masyarakat Indonesia akan komoditas impor tersebut mengalami penurunan kecuali bagi kelompok hortikultura, ternak lainnya termasuk unggas dan pertanian lainnya. Besaran penurunan untuk masing-masing komoditas pertanian cenderung beragam (Tabel 4.14). Komoditas-komoditas yang menunjukkan penurunan permintaan impor adalah padi, gandum, jagung, kedelai, gula, tanaman serat, ternak ruminansia, susu dan produk olahannya, minyak nabati, serta produk makanan olahan. Namun, sebaliknya, penurunan bantuan domestik di negara maju menunjukkan peningkatan permintaan rumah tangga Indonesia akan komoditas hortikultura, unggas, dan pertanian lainnya.

Tabel 4.14. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia untuk Produk Pertanian Impor (%)

Variabel	Usulan G-20	Usulan USA	Usulan UE	KTM Hongkong	
				Minimal	Maksimal
Padi_Olah	-1,0647	-0,7273	-0,8424	-0,7346	-1,0647
Gandum	-0,0712	-0,0479	-0,0561	-0,0475	-0,0712
Jagung	-0,9559	-0,652	-0,7578	-0,6547	-0,9559
Horti	0,0555	0,059	0,0516	0,0528	0,0555
Kedelai	-9,3272	-6,6241	-7,4759	-6,6141	-9,3272
Gula_Tebu	-0,0226	-0,0118	-0,0165	-0,0136	-0,0226
Kapas_Rami	-0,2413	-0,1932	-0,2003	-0,1876	-0,2413
Spi_Dmb_Dag	-0,5525	-0,2543	-0,4004	-0,2556	-0,5525
Ayam_Telur	0,1477	0,1389	0,1288	0,133	0,1477
Susu_Olahan	-0,6827	-0,3203	-0,4915	-0,3219	-0,6827
Pertan_Lain	0,2379	0,1783	0,1936	0,1753	0,2379
MinyakNabati	-1,7883	-1,4136	-1,4797	-1,3716	-1,7883
OlahMakanan	-0,048	-0,0287	-0,0367	-0,0301	-0,048
SekPrimLain	-0,0743	-0,054	-0,0599	-0,0535	-0,0743
Industri	0,0302	0,0301	0,0271	0,0278	0,0302
Jasa	0,0437	0,042	0,0386	0,0389	0,0437

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Dari uraian di atas terlihat bahwa pemotongan bantuan domestik meningkatkan harga komoditas internasional yang selanjutnya menyebabkan terjadinya penurunan permintaan impor, seperti pada kedelai yang mendapatkan subsidi domestik yang tinggi di negara maju, yang permintaan impornya menurun hingga 6,61-9,32%. Vanila dan pala mengalami peningkatan permintaan impor sebesar 0,17-0,24%, kelapa dan sayuran sebesar 0,05-0,06%, sedangkan padi, sapi, dan kakao mengalami penurunan permintaan rumah tangga impor berturut-turut sebesar 0,73-1,06%, 0,26-0,55%, dan 0,03-0,05%. Tentang adanya peningkatan permintaan rumah tangga terhadap kelompok Hortikultura, Ternak Lainnya termasuk Unggas dan Pertanian Lainnya meskipun harga-harga internasional meningkat perlu dikaji lebih lanjut.

4.3.4. Dampak terhadap Keluaran/Produksi

Dengan melakukan simulasi pada beberapa skenario yang telah disebutkan sebelumnya, hasil yang diperoleh berbeda antarkomoditas dan ini terjadi di semua usulan dan KTM Hongkong. Bagi negara maju seperti AS akan sangat terpuak dengan skenario penurunan subsidi ini, karena produksi hampir semua komoditas pertaniannya mengalami penurunan, kecuali ternak (ruminansia/unggas). Penurunan produksi yang paling menonjol adalah padi dan kedelai. Berbeda dengan kondisi di EU, dimana pemotongan bantuan domestik tidak menyebabkan produksi pertanian menurun secara keseluruhan, kecuali untuk kedelai dan tanaman serat, seperti kapas. Sedangkan di Jepang, yang menonjol hanya penurunan produksi kedelai. Dengan demikian dari ketiga negara maju tersebut, produksi kedelailah yang paling terkena pengaruh akibat penurunan bantuan domestik di negara maju.

Bagi Indonesia, komoditas yang mengalami penurunan produksi akibat penurunan bantuan domestik di negara maju adalah gandum, hortikultura, ruminansia, unggas, dan produk makanan olahan, sedangkan yang mengalami peningkatan produksi adalah padi, jagung, kedelai, tanaman serat, susu dan olahannya, pertanian lainnya, dan produk minyak nabati. Dengan demikian, dampak penurunan bantuan domestik di negara maju terhadap produksi pertanian di Indonesia sangat berbeda dibandingkan di negara maju.

Komoditas yang paling menonjol peningkatannya di Indonesia adalah kedelai, dengan laju sebesar 4,27-5,27% (simulasi skenario KTM Hongkong), minyak nabati sebesar 1,74-2,06%, lainnya cenderung di bawah 1%. Produksi kelapa dan sayuran mengalami penurunan sebesar 0,06-0,08%, kakao sebesar 0,04-0,05%, dan sapi dengan dagingnya sebesar 0,02%. Sebaliknya, produksi padi mengalami peningkatan sebesar 0,02-0,03%, pala dan vanili sebesar 0,14-0,16%. Dengan demikian, komoditas yang potensi produksinya lebih menonjol adalah kedelai, yakni 4,27-5,27%. Untuk itu Indonesia tertantang untuk di masa depan mampu berperan dalam produksi kedelai. Dapatkah ahli-ahli agronomi Indonesia mengatasi berbagai hambatan iklim dan penyakit kedelai?

4.3.5. Dampak terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia

Simulasi yang dilakukan berdasarkan skenario-skenario pemotongan bantuan domestik di negara maju menunjukkan bahwa dampak terhadap penggunaan sumberdaya (lahan, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terampil, modal, serta sumberdaya alam) di Indonesia berbeda antar komoditas. Beberapa komoditas yang penggunaan sumberdayanya meningkat adalah jagung, kedelai, tanaman serat, pertanian lainnya, dan minyak nabati, sedangkan yang mengalami penurunan penggunaan sumberdaya adalah gandum. Padi, hortikultura, dan tebu mengalami penurunan penggunaan jenis sumberdaya tertentu.

Hasil simulasi yang paling menonjol terjadi pada kedelai dimana penggunaan sumberdaya lahan meningkat antara 3,35-4,6%, tenaga kerja tidak terampil 4,36-5,97%, tenaga kerja terampil 4,38-6,00%, modal 4,37-6,00%, dan sumberdaya alam 0,02-0,03% (Tabel 4.16). Artinya, dengan meningkatnya harga di pasar dunia dan di dalam negeri, maka penggunaan sumberdaya untuk kedelai juga meningkat. Walaupun demikian, pengembangannya juga akan mengalami kesulitan antara lain dari segi iklim yang tidak menunjang dan persaingan penggunaan sumberdaya (lahan) dengan komoditas lain, seperti padi atau jagung.

Sedangkan bagi gandum, penggunaan sumberdaya akan menurun sebagai berikut: lahan menurun sekitar 0,32-0,39%, tenaga kerja tidak terampil 0,19-0,20%, tenaga kerja terampil 0,17-0,18%, dan modal 0,18-0,19%. Memang, kenyataannya komoditas Gandum ini kurang cocok pada iklim tropis basah, kecuali ada upaya sungguh-sungguh dalam penelitian untuk mengembangkan varietas-varietas yang cocok dengan kondisi agroklimat ini.

4.3.6. Dampak terhadap Neraca Perdagangan dan PDB

Penurunan bantuan domestik di negara maju diperkirakan akan mempengaruhi keragaan ekonomi makro suatu negara. Hal ini misalnya terlihat pada indikator neraca perdagangan. Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa pemotongan bantuan domestik di negara maju menyebabkan neraca perdagangan negara maju khususnya UE, Jepang dan negara maju lainnya bernilai negatif. Artinya, nilai impor negara-negara tersebut jauh lebih besar dari pada nilai ekspornya. Penurunan neraca perdagangan yang paling besar dirasakan oleh UE dan Jepang. Skenario KTM Hongkong memberi gambaran bahwa UE mengalami penurunan neraca perdagangan sebesar 71 - 211 juta dolar AS, dan Jepang 129 - 170 juta dolar AS, sementara AS memperoleh neraca perdagangan positif sebesar 140 - 234 juta dolar AS. Maka itu tidaklah mengherankan apabila negara maju terutama UE berusaha keras pada setiap perundingan untuk tidak menurunkan bantuan domestiknya.

Bagi negara berkembang, terutama Indonesia seluruh skenario pemotongan bantuan domestik di negara maju memberikan neraca perdagangan positif. Artinya, nilai ekspornya masih jauh lebih besar dibanding nilai impornya. Demikian pula negara berkembang lainnya seperti G-33 juga menghasilkan neraca perdagangan positif (Tabel 4.17).

Selain indikator neraca perdagangan, PDB juga merupakan suatu indikator ekonomi makro. Dalam hal ini perubahan terhadap PDB digambarkan sebagai persentase perubahan PDB antara kondisi awal dan kondisi yang dihasilkan skenario. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan bantuan domestik di negara maju tidak memberikan kesimpu-

Tabel 4.17. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Neraca Perdagangan (Juta dolar AS)

Negara/ Agregasi Negara	Usulan G-20	Usulan AS	Usulan Uni Eropa/UE	KTM Hongkong	
				Pemotongan Minimal	Pemotongan Maksimal
Jepang	-170,138	-135,495	-140,558	-129,763	-170,138
Korea	10,0181	7,1093	8,0271	7,1597	10,0181
AS	234,4735	124,1751	173,3147	140,4957	234,4735
UE	-210,5004	-50,454	-135,7559	-70,7167	-210,5
Negara Maju Lainnya	25,4766	-39,0375	1,4708	-36,95	25,4766
Indonesia	24,3063	18,7177	19,9532	18,2607	24,3063
G-33	202,8552	155,9644	166,4236	151,8677	202,8552
ROW	-116,4914	-80,9799	-92,8755	-80,354	-116,491

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

lan yang sama, yakni ada negara maju yang PDB nya semakin menurun sebagai akibatnya, tetapi ada negara maju juga yang PDB-nya semakin meningkat meskipun tidak begitu besar. Sementara itu, hasil simulasi seluruh skenario menunjukkan bahwa negara berkembang mengalami penurunan PDB, tetapi dengan persentase yang kecil sekali (Tabel 4.12). Dari Tabel 4.18 terlihat bahwa dengan pemotongan bantuan domestik, semua usulan (G-20, AS dan UE dan KTM Hongkong), nilai PDB Jepang dan Korea menurun masing-masing 0,0041 dan 0,0217% dan di AS, UE dan negara maju lainnya masing-masing 0,0089, 0,0093 dan 0,0045%, sementara di negara berkembang seperti Indonesia dan G-33 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,0033 dan 0,0186%. Tingkat penurunan PDB Indonesia ini relatif sangat kecil.

Dengan demikian, kekhawatiran negara maju akan dampak pemotongan bantuan domestik nya terhadap sektor pertanian mereka dan terhadap perekonomian negara berkembang tidak perlu ada, karena ternyata pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan nasional negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia dan G-33. Oleh karena itu, mereka seharusnya memelopori upaya ini untuk menghidupkan kembali Putaran Doha yang buntu saat ini, akibat desakan negara berkembang yang menginginkan pemotongan bantuan domestik di negara maju ini.

Tabel 4.18. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap PDB di Masing-Masing Negara/Agregasi Negara (%)

Negara/ Agregasi Negara	Usulan G-20	Usulan AS	Usulan Uni Eropa	KTM Hongkong	
				Pemotongan Minimal	Pemotongan Maksimal
Jepang	-0,0041	-0,0029	-0,0033	-0,0029	-0,0041
Korea	-0,0217	-0,0154	-0,0174	-0,0153	-0,0217
AS	0,0089	0,0061	0,0071	0,0062	0,0089
UE	0,0093	0,0099	0,0085	0,0091	0,0093
Negara maju Lainnya	0,0045	0,0013	0,003	0,0013	0,0045
Indonesia	-0,0033	-0,0027	-0,0028	-0,0026	-0,0033
G-33	-0,0186	-0,0134	-0,0149	-0,0132	-0,0186
ROW	-0,0057	-0,0042	-0,0046	-0,0041	-0,0057

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

4.3.7. Dampak Terhadap Kesejahteraan

Dampak pemotongan bantuan domestik di negara maju terhadap kesejahteraan negara-negara yang terlibat perdagangan menunjukkan hasil yang seiring dengan indikator PDB, dimana tingkat kesejahteraan di Jepang dan Korea menurun, tetapi di negara maju lain seperti AS, UE dan negara maju lainnya tetap meningkat. Ini terlihat pada seluruh skenario simulasi (usulan G-20, AS dan UE serta KTM Hongkong). Peningkatan kesejahteraan paling besar dirasakan oleh AS, yang mencapai nilai hingga lebih dari 1 000 juta dolar AS, UE hanya menikmati kesejahteraan di antara 350-475 juta dolar AS. Sementara itu di negara berkembang, terutama Indonesia dan G-33, pemotongan bantuan domestik di negara maju ini justru menyebabkan penurunan kesejahteraan, yaitu sebesar 18-28 juta dolar AS di Indonesia dan 460-646 juta dolar AS di G-33.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan kondisi dan struktur ekonomi negara maju yang sudah matang di segala sektor, terutama industri dan jasa, perubahan yang terjadi pada sektor pertanian tidak terlalu besar dampaknya terhadap sektor-sektor ini. Berbeda halnya dengan keadaan di negara berkembang, di mana sebagian besar penduduknya sangat tergantung pada sektor pertanian, sebagai sumber lapangan pekerjaan dan kehidupan. Jadi, peningkatan harga dunia dan di dalam negeri negara berkembang beberapa komoditas pertanian akan menyebabkan harga komoditas pertanian impor akan meningkat dan

permintaan rumah tangga menurun, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan. Namun, akibatnya adalah di negara berkembang akan terjadi pengalokasian sumberdaya kembali dengan beralihnya sumberdaya pada komoditas-komoditas yang harganya meningkat. Kemungkinan besar pola perdagangan komoditas juga akan berubah, kecuali ada distorsi-distorsi terselubung. Oleh karena itu meskipun dalam jangka pendek terjadi penurunan kesejahteraan, tetapi karena PDB dan harga-harga meningkat serta pola perdagangan pertanian yang berubah, pada jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat juga. Dan Model GTAP yang digunakan ini tidak dapat memprakirakan seperti apa sosok perdagangan yang akan terjadi jika seandainya penghapusan seluruh bantuan domestik di negara maju dilaksanakan. Bagi Indonesia, segala kemungkinan yang dapat terjadi ini perlu dipelajari secara hati-hati.

Tabel 4.19. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Tingkat Kesejahteraan di Masing-Masing Negara/Agregasi Negara (Juta dolar AS)

Negara/ Agregasi Negara	Usulan G-20	Usulan AS	Usulan Uni Eropa	KTM Hongkong	
				Pemotongan Minimal	Pemotongan Maksimal
Jepang	-427,59	-300,13	-341,52	-297,9	-427,59
Korea	-154,3	-110,27	-123,86	-109,49	-154,3
AS	1538,23	1091,7	1232,26	1089,05	1538,23
UE	387,88	475,61	376,02	425,86	387,88
Negara maju Lainnya	240,99	147,84	185,42	146,19	240,99
Indonesia	-28,38	-18,76	-22,27	-18,91	-28,38
G-33	-646,12	-466,93	-520,32	-460,99	-646,12
ROW	-172,43	-82,96	-125,17	-89,95	-172,43

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

4.4. Persamaan Ekspor

Sebagaimana dikemukakan, analisis yang dilakukan disini adalah memilih skenario penurunan subsidi ekspor di negara maju 50%, 80% sampai dengan 100%, sesuai dengan arah perundingan Komisi Pertanian pada saat-saat terakhir ini. Oleh karena itu, pembahasannya juga dilakukan dengan mengikuti skenario ini, yakni melihat dampak tingkat terendah 50% dan tertinggi 100% (penghapusan menyeluruh subsidi ekspor).

4.4.1. Dampak terhadap Harga Komoditas Pertanian

Hasil simulasi penurunan persaingan ekspor menunjukkan adanya perbedaan dampak pada negara maju dan negara berkembang, yaitu dengan penurunan subsidi ini maka harga sumberdaya di negara maju akan menurun, berbeda dengan keadaan di negara berkembang (Tabel 4.20). Namun, dari Tabel 4.20. terlihat bahwa ternyata hanya UE yang dirugikan dengan adanya usulan penurunan subsidi ekspor tersebut, dimana harga lahan, upah tenaga kerja (terampil dan tidak terampil), dan sewa modal mengalami penurunan. Sumberdaya lahan mengalami penurunan harga terbesar hingga mencapai 40-81%, sedangkan harga sumberdaya alam lain (selain lahan, tenaga kerja dan modal) naik hingga 1,02-2,05%. Kondisi yang sebaliknya terjadi di AS, dimana dampak penurunan subsidi ekspor negara maju akan meningkatkan harga sumberdaya alam seperti lahan, tenaga kerja, dan modal cenderung. Peningkatan terbesar terjadi pada harga lahan (5,45-10-79%).

Disamping itu, penurunan subsidi ekspor di negara maju akan memberikan pengaruh pada harga komoditas pertanian juga, baik di negara maju (kecuali UE) maupun negara berkembang. Di UE secara umum harga komoditas pertanian dan olahannya menjadi menurun, karena UE memiliki subsidi ekspor ekspor terbesar pada berbagai macam komoditas pertanian. Kalau subsidi ekspor komoditas pertanian ini diturunkan, maka dengan serta-merta harga-harganya juga akan menurun di UE. Komoditas pertanian yang menonjol penurunan harganya adalah gandum, hortikultura, jagung, kedelai, dan tanaman serat (kapas) dengan laju penurunan masing-masing sebesar 3,38-6,78%, 2,71-5,41%, 2,49-4,99%, 2,25-4,51%, dan 1,40-2,79%. Sedangkan bagi sebagian negara maju seperti AS, pemotongan subsidi ekspor meningkatkan harga produk pertaniannya karena mereka memiliki subsidi ekspor yang rendah. Peningkatan harga ini merupakan dampak dari terjadinya keseimbangan baru, dimana harga internasional yang meningkat menyebabkan terjadinya ruang persaingan perdagangan produk pertanian baru (lihat penjelasan dampak terhadap produksi).

Kalau dilihat dari Tabel 4.20 umumnya peningkatan harga di AS dan negara maju lainnya, kecuali UE lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan harga komoditas di negara berkembang, kecuali untuk gandum, gula, ruminansia, unggas, susu dan olahannya, serta produk makanan olahan. Sebaliknya, peningkatan lebih besar di AS dan negara maju lainnya dibandingkan negara berkembang, khususnya Indonesia terjadi pada komoditas padi, jagung, hortikultura, kedelai, tanaman serat, pertanian lainnya dan produk minyak nabati.

Khusus untuk komoditas yang menjadi sorotan dalam penelitian ini, yakni padi, kedelai, sayuran, pala, vanili, kelapa, kakao, dan sapi terlihat bahwa dengan pemotongan subsidi ekspor di negara maju, maka harga seluruh komoditas tersebut akan naik, tetapi persentasenya kecil

sekali. Besarnya kenaikan harga padi hanya sebesar 0,5-1,00%, kedelai 0,69-1,39%, sayuran dan kelapa 0,65-1,30%, pala dan vanili 0,43-0,87%, kakao 0,29-0,57%, dan sapi mencapai 0,52-1,03%. Dengan demikian, kenaikan harga-harga komoditas tersebut tidak begitu peka terhadap penurunan subsidi ekspor di negara maju, khususnya UE.

4.4.2. Dampak Terhadap Impor

Bagi negara-negara UE, penurunan subsidi ekspor di negara maju secara bersamaan memberikan dampak penurunan yang sangat jelas terhadap impor seluruh komoditas pertanian. Dari Tabel 4.21 terlihat bahwa penurunan impor terutama terjadi pada komoditas gandum (39,85-79,69%), jagung (24,18-48,33%), gula (28,10-56,19%), ruminansia (71,42-142,86%), unggas (22,01-44,02%), dan susu dengan olahannya (98,36-196,69%). Kalau disimak pada angka penurunan impor di atas, masing-masing besaran tersebut menunjukkan bahwa produsen pertanian UE sangat diuntungkan oleh subsidi ekspor yang besar tersebut. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika UE berkeberatan dengan keinginan negara berkembang untuk menurunkan subsidi ekspornya. Sedangkan bagi AS, Jepang, dan Korea komoditas pertanian yang mengalami penurunan impor hanyalah susu dan olahannya untuk AS turun sebesar 70,01-140,01%, Jepang 44,97-89,95% dan Korea 51,58-102,59%. Kondisi yang sama terjadi pada negara Indonesia dan negara berkembang/G-33, dimana impor susu dan olahannya bagi Indonesia menurun sebesar 11,63-23,25% dan untuk G-33 44,40-88,74%. Tingkat penurunan yang cukup besar pada susu dan olahannya ini menunjukkan betapa besarnya nilai subsidi ekspor yang diberikan negara maju kepada petaninya. Pada tabel yang sama terlihat juga bahwa untuk sebagian besar komoditas, yakni padi, sayuran, kelapa, kedelai, sapi, pala, vanili, dan gula seluruhnya menunjukkan penurunan impor. Tingkat penurunan impor terbesar terlihat untuk gula dengan laju 3,99-7,97% dan sapi 3,78-7,50%.

4.4.3. Dampak Terhadap Permintaan Rumah tangga di Indonesia

Peningkatan harga-harga produk pertanian domestik dan impor di negara berkembang, termasuk Indonesia dan G-33 menyebabkan penurunan permintaan rumah tangga Indonesia atas seluruh produk tersebut (Tabel 4.22). Komoditas yang memiliki penurunan permintaan tertinggi adalah susu dan olahannya, yaitu sebesar 2,46-4,91%, sedangkan permintaan rumah tangga atas padi dan kedelai hanya menurun sebesar 0,08-0,17% dan 0,10-0,200%. Untuk komoditas perkebunan, permintaan rumah tangga akan pala dan vanili menurun sebesar 0,08-0,14%, kelapa dan kakao masing-masing menurun sebesar 0,09-0,19% dan 0,10-0,19%. Untuk komoditas peternakan, permintaan rumah tangga atas sapi menu-

run sebesar 0,17-0,34%. Penurunan permintaan rumah tangga ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat Indonesia masih rentan terhadap gejolak yang berasal dari pasar internasional bagi komoditas susu dan olahannya. Masalahnya, apakah kerentanan terhadap pasokan impor ini dapat dikurangi dengan pengembangan industri persusuan dalam negeri yang mampu bersaing? Pertanyaan ini tak mudah dijawab, karena memang sudah sejak lama pemerintah berupaya mengembangkannya dengan melibatkan perusahaan swasta, koperasi dan petani, tetapi sampai saat ini hasilnya belum memuaskan. Masih adakah harapan pengembangannya di masa depan? Ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dari berbagai sudut pandang.

Tabel 4.22. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Permintaan Rumah Tangga Indonesia (%)

Peubah	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50 %	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80 %	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100 %
Padi_Olah	-0,0786	-0,1254	-0,1567
Gandum	-0,2027	-0,3206	-0,4008
Jagung	-0,1154	-0,1807	-0,2259
Horti	-0,0939	-0,149	-0,1863
Kedelai	-0,101	-0,1607	-0,2008
Gula_Tebu	-0,135	-0,2154	-0,2693
Kapas_Rami	-0,2104	-0,3359	-0,4199
Spi_Dmb_Dag	-0,1729	-0,2756	-0,3445
Ayam_Telur	-0,2041	-0,3259	-0,4074
Susu_Olahan	-2,455	-3,9242	-4,9058
Pertan_Lain	-0,0718	-0,1146	-0,1433
MinyakNabati	-0,0763	-0,1216	-0,152
OlahMakanan	-0,098	-0,1559	-0,1949
SekPrimLain	-0,0504	-0,0799	-0,0999
Industri	-0,0764	-0,1216	-0,1521
Jasa	-0,0791	-0,1259	-0,1575

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Meskipun permintaan rumah tangga Indonesia atas komoditas pertanian menurun, tetapi permintaan terhadap komoditas pertanian do-

mestik ada yang menurun dan ada yang meningkat (Tabel 4.23). Permintaan atas kedelai (biji-bijian yang mengandung minyak), gula, tanaman serat (seperti kapas dan rami), serta susu dan produk olahannya mengalami peningkatan. Komoditas Susu meningkat permintaannya sebesar 34-68%, akibat peningkatan harga di pasar internasional. Sebaliknya, permintaan atas komoditas pertanian domestik, yakni padi, gandum, jagung, hortikutura, ternak ruminansia dan unggas, pertanian lainnya, minyak nabati, dan produk makanan olahan mengalami penurunan.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa produk-produk yang memiliki peningkatan permintaan rumah tangga adalah produk-produk yang umumnya dapat diproduksi di dalam negeri, kecuali gandum. Ini mungkin terjadi karena basis produksi gandum yang masih rendah, dan dengan kenaikan sedikit saja dari basis produksi ini akan terlihat dengan jelas. Komoditas Kedelai mengalami peningkatan permintaan domestik sebesar 0,04-0,8%, sedangkan kelapa, vanili, pala, kakao, padi, sayuran dan ternak sapi mengalami penurunan permintaan. Permintaan vanili dan pala turun sebesar 0,18-0,35%, sedangkan kelapa dan sayuran turun 0,05-0,12% dan padi dan ternak sapi turun sebesar 0,05-0,1 dan 0,12-0,26%.

Tabel 4.23. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Permintaan Rumah Tangga Atas Barang Domestik (%)

Peubah	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100%
Padi_Olah	-0,0529	-0,0834	-0,1043
Gandum	-2,386	-3,9338	-4,9194
Jagung	-0,0726	-0,1499	-0,1874
Horti	-0,0502	-0,0963	-0,1204
Kedelai	0,0443	0,0642	0,0804
Gula_Tebu	0,4301	0,6878	0,8597
Kapas_Rami	0,2403	0,3846	0,4805
Spi_Dmb_Dag	-0,1289	-0,2058	-0,2572
Ayam_Telur	-0,1515	-0,2409	-0,3012
Susu_Olahan	33,8787	54,1606	67,7092
Pertan_Lain	-0,1766	-0,2778	-0,3473
MinyakNabati	-0,0623	-0,0993	-0,1241
OlahMakanan	-0,0263	-0,0413	-0,0516
SekPrimLain	-0,0504	-0,0798	-0,0998
Industri	-0,112	-0,1781	-0,2226
Jasa	-0,1022	-0,163	-0,2038

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Sejalan dengan penurunan permintaan rumah tangga masyarakat Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hasil simulasi juga menunjukkan penurunan permintaan impor di semua komoditas pertanian, kecuali yang termasuk dalam kelompok pertanian lainnya (Tabel 4.24). Dengan demikian, meningkatnya harga komoditas internasional menyebabkan permintaan impor menurun. Beberapa komoditas yang permintaan impor rumah tangganya menurun adalah gula sebesar 4,46-8,91%; sapi 6,20-12,32%; serta susu dan olahannya 11,10-22,17%. Hasil ini memberi petunjuk adanya pengalihan permintaan rumah tangga dari impor ke domestik seperti pada kedelai, gula, tanaman serat, dan susu. Dari keempatnya, peningkatan permintaan domestik terbesar adalah pada susu, dengan laju 34-68% (Tabel 4.23).

Tabel 4.24. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Permintaan Rumah Tangga Atas Barang Impor (%)

Peubah	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100 %
Padi_Olah	-0,7439	-1,2123	-1,5155
Gandum	-0,1939	-0,3061	-0,3826
Jagung	-0,2251	-0,2594	-0,3244
Horti	-0,796	-0,997	-1,2464
Kedelai	-0,2646	-0,4141	-0,5178
Gula_Tebu	-4,4615	-7,1301	-8,9129
Kapas_Rami	-0,225	-0,3592	-0,449
Spi_Dmb_Dag	-6,2053	-9,8595	-12,3246
Ayam_Telur	-3,7425	-6,037	-7,549
Susu_Olahan	-11,0954	-17,7373	-22,1743
Pertan_Lain	0,2044	0,3155	0,3942
MinyakNabati	-0,6968	-1,1111	-1,3889
OlahMakanan	-1,487	-2,3805	-2,9748
SekPrimLain	-0,0713	-0,1139	-0,1425
Industri	0,0102	0,0159	0,0198
Jasa	0,1988	0,3188	0,3984

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

4.4.4. Dampak terhadap Keluaran/Produksi

Selanjutnya, simulasi pemotongan subsidi ekspor terhadap produksi menunjukkan bahwa produksi pertanian negara-negara UE menurun. Oleh karena itu, negara lain memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan produksinya (Tabel 4.25). Bagi UE sendiri, penurunan subsidi ini akan merupakan suatu pukulan, karena hampir seluruh komoditas

pertanian mengalami penurunan produksi, kecuali kedelai, tanaman serat dan pertanian lainnya. Adapun komoditas yang mengalami penurunan paling menonjol adalah padi, gandum, jagung, tebu, ruminansia serta susu dan olahannya. Sebaliknya, negara maju lainnya seperti AS, Jepang, Korea mengalami peningkatan produksi. Komoditas yang diminati dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produksi di suatu negara maju adalah gandum serta susu dan olahannya. Hasil yang sama juga berlaku bagi Indonesia, yaitu hampir seluruhnya mengalami peningkatan produksi dengan laju 0,2-35%, kecuali kelompok Pertanian lainnya. Peningkatan produksi terbesar terjadi pada susu dan olahannya, dengan laju antara 17-35%. Dengan demikian, pemotongan subsidi ekspor di negara maju memberi dampak positif bagi peningkatan kapasitas produksi domestik Indonesia.

Komoditas yang peningkatan produksinya paling menonjol di Indonesia adalah susu dan olahannya, mencapai 17,33- 34,61% dan gandum 3,68-7,34%. Ini mungkin terjadi karena basis produksi gandum yang masih rendah, dan dengan kenaikan sedikit saja dari basis produksi ini akan terlihat dengan jelas. Untuk komoditas jagung, gula, dan sapi pada tingkat penurunan subsidi ekspor sebesar 50% cenderung menyebabkan peningkatan produksi masing-masing komoditas di bawah 1%, sedangkan penghapusan subsidi ekspor sebesar 100% menyebabkan peningkatan produksi di atas 1%. Dengan demikian, Indonesia tertantang apakah di masa depan dapat berperan dalam meningkatkan produksi komoditas di atas, dengan kendala pada kesesuaian lahan dan iklim. Pemotongan subsidi ekspor tampaknya merupakan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi usaha taninya.

Secara umum, penurunan subsidi ekspor sebesar 50 - 100% (dihapuskan) oleh negara-negara maju, memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena akan menyebabkan peningkatan nilai keluaran seluruh komoditas pertanian di Indonesia, kecuali bagi kelompok pertanian lainnya.

4.4.5. Dampak terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia

Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan pemotongan subsidi ekspor penggunaan sumberdaya (lahan, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terampil, modal, serta sumberdaya alam) cenderung meningkat untuk seluruh komoditas, kecuali untuk komoditas padi (Tabel 4.26). Dampak paling menonjol terlihat pada gandum pada simulasi penurunan subsidi ekspor sebesar 100%, dimana penggunaan sumberdaya Lahannya meningkat sebesar 6,34%, tenaga kerja tidak terampil 8,38%, tenaga kerja terampil 8,44%, modal 8,42%; dan sumberdaya alam 0,04%. Ini tentu saja terkait dengan terjadinya peningkatan produksi karena pemotongan subsidi ekspor, di mana diawali oleh basis produksi gandum yang masih rendah, dan dengan kenaikan sedikit saja dari basis produksi ini akan terlihat dengan jelas.

Pada gilirannya permintaan turunan terhadap faktor produksi juga akan meningkat. Artinya, akibat peningkatan harga terjadilah keseimbangan baru, dimana harga internasional yang meningkat menyebabkan terjadinya ruang persaingan perdagangan produk pertanian baru (lihat penjelasan dampak terhadap produksi).

Dengan meningkatnya harga di pasar dunia dan di dalam negeri, maka penggunaan sumberdaya untuk gandum juga meningkat. Meskipun demikian, pengembangan gandum di dalam negeri akan mengalami kesulitan antara lain dari segi iklim yang tidak menunjang dan persaingan penggunaan sumberdaya (lahan) dengan komoditas lain, seperti padi atau jagung. Namun, mengingat gandum telah menjadi komoditas substitusi dari beras dan palawija dalam menu masyarakat Indonesia, seperti yang ditunjukkan impor yang semakin meningkat, ada baiknya juga Indonesia mengembangkan varietas yang cocok dengan iklim tropika basah. Adapun untuk komoditas padi, penggunaan sumberdaya lahannya cenderung menurun, sementara sumberdaya lainnya meningkat, meskipun harga padi cenderung meningkat dengan pemotongan subsidi ekspor.

4.4.6. Dampak terhadap Neraca Perdagangan

Dampak pemotongan subsidi ekspor di negara maju terhadap neraca perdagangan di berbagai negara atau kelompok negara tidaklah searah. Bagi UE, pemotongan ini menyebabkan neraca perdagangannya meningkat, meskipun produksi dan harga beberapa komoditas menurun, seperti dibahas pada uraian sebelumnya. Artinya, negara ini masih mempertahankan kapasitas eksportnya pada komoditas tertentu pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga volume ekspor masih lebih besar dari impornya (Tabel 4.27). Hal yang sama dirasakan negara berkembang, terutama Indonesia. Dengan skenario penurunan 50, 80 dan 100% subsidi ekspor, neraca perdagangannya menjadi positif. Sementara bagi negara maju lainnya seperti AS, kebijakan ini menyebabkan neraca perdagangannya menurun, sebesar 2 676 – 5 368 juta dolar AS.

Pemotongan subsidi ekspor di negara maju terhadap Produk Domestik Bruto di berbagai negara atau kelompok negara memberi dampak yang juga tidak seragam. Bagi UE pemotongan subsidi ekspor (dengan ke tiga skenario) menyebabkan peningkatan PDB, sementara bagi negara maju lainnya serta negara berkembang seperti Indonesia dan G-33, pemotongan ini menyebabkan penurunan PDB (Tabel 4.28), walaupun tingkat penurunan PDB Indonesia relatif sangat kecil, sekitar 0,0097%.

Dengan demikian, sebenarnya bagi negara berkembang dan negara maju pemotongan subsidi ekspor di negara maju tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, karena ternyata dari hasil simulasi pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan nasional masing-masing.

Tabel 4.27. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor terhadap Neraca Perdagangan Negara/Agregasi Negara (juta dolar AS)

Negara/ Agregasi Negara	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100%
Jepang	-1187,226	-1913,6207	-2391,9038
Korea	-78,6133	-89,3948	-111,738
AS	-2675,6406	-4294,9639	-5368,4771
UE	5829,7642	9315,1973	11641,7959
Negara maju lainnya	-705,0699	-1122,838	-1402,3416
Indonesia	16,3794	25,9685	32,4629
G-33	223,8215	357,5401	447,0876
ROW	-1423,4159	-2277,8894	-2846,8879

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.28. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Domestik Ekspor terhadap PDB di Masing-Masing Negara/Agregasi Negara (%)

Negara/Agregasi Negara	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100%
Jepang	-0,0144	-0,0228	-0,0285
Korea	-0,0118	-0,0209	-0,0262
AS	-0,0041	-0,0065	-0,0081
UE	0,1488	0,2381	0,2976
Negara maju lainnya	-0,0676	-0,1079	-0,1349
Indonesia	-0,0049	-0,0078	-0,0097
G-33	-0,0227	-0,0361	-0,0451
ROW	-0,0451	-0,0721	-0,0902

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

4.4.7. Dampak terhadap Kesejahteraan

Sejalan dengan dampak terhadap PDB di atas, pemotongan subsidi ekspor di negara maju menyebabkan kesejahteraan negara-negara UE meningkat sangat menyolok, sebesar antara 13 milyar (skenario 50%) dan 25 milyar (skenario penghapusan subsidi ekspor) dolar AS, sedangkan negara maju lainnya seperti AS, Jepang, dan Korea mengalami penurunan kesejahteraan, masing-masing sebesar 705; 2.208; dan 377 juta dolar AS. Hal yang sama terlihat bagi negara berkembang, terutama Indonesia dan G-33, dimana penghapusan subsidi ekspor di negara maju menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing menurun sebesar 135 juta dolar AS dan 1.748 juta dolar AS. Untuk Indonesia sendiri penghapusan (pemotongan 100%) subsidi ekspor di negara maju menurunkan tingkat kesejahteraan sebesar sekitar 135 juta dolar AS atau setara Rp 1,2 triliun (pada nilai tukar Rp 9.000 per satu dolar AS). Ini berarti, kesejahteraan rata-rata penduduk Indonesia menurun sekitar hanya Rp 5.100 per orang atau kurang dari satu dolar AS, sementara harga, produksi domestik, penggunaan sumberdaya alam dan neraca perdagangan, serta permintaan rumah tangga atas produk pertanian domestik meningkat dalam jangka pendek. Ini menandakan bahwa ekonomi pertanian Indonesia mengalami proses yang dapat meningkatkan pengaruh berganda (*multiplier effect*), terutama di pedesaan.

Tabel 4.29. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Tingkat Kesejahteraan di Masing-Masing Negara/Agregasi Negara (Juta dolar AS)

Negara/Agregasi Negara	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100%
Jepang	-1139,2271	-1766,1593	-2207,8433
Korea	-151,9956	-301,2397	-376,545
AS	-348,878	-564,5135	-705,3458
UE	12550,9209	20075,9629	25093,6895
Negara maju lainnya	209,1364	366,3181	459,2491
Indonesia	-67,9737	-108,181	-135,2476
G-33	-875,4106	-1398,4717	-1748,1643
ROW	-3129,0146	-5000,9922	-6250,7656

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Sebagaimana dijelaskan pada kasus penurunan bantuan domestik, pada kondisi dan struktur ekonomi negara maju yang sudah matang di

segala sektor, terutama industri dan jasa, perubahan yang terjadi pada sektor pertanian tidaklah terlalu besar dampaknya terhadap sektor-sektor ini. Berbeda halnya dengan keadaan di negara berkembang yang sebagian besar penduduknya sangat tergantung pada sektor pertanian, baik sebagai sumber lapangan pekerjaan dan kehidupan. Peningkatan harga dunia dan di dalam negeri negara berkembang beberapa komoditas pertanian akan menyebabkan harga komoditas pertanian impor akan meningkat dan permintaan rumah tangga menurun, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan. Di negara berkembang akan terjadi pengalokasian sumberdaya kembali dengan beralihnya sumberdaya pada komoditas-komoditas yang harganya meningkat. Kemungkinan besar pola perdagangan komoditas juga akan berubah, kecuali ada distorsi-distorsi terselubung. Oleh karena itu, meskipun dalam jangka pendek terjadi penurunan kesejahteraan, tetapi karena PDB dan harga-harga meningkat serta pola perdagangan pertanian yang berubah, pada jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat juga. Model GTAP yang digunakan ini tidak dapat memprakirakan seperti apa sosok perdagangan yang akan terjadi jika seandainya penghapusan sama sekali subsidi ekspor di negara maju dilaksanakan. Bagi Indonesia, segala kemungkinan yang dapat terjadi ini perlu dipelajari secara hati-hati.

4.5. Penurunan Tarif

4.5.1. Usulan Penurunan Tarif

Sampai kini telah banyak usulan modalitas penurunan tarif terikat (*bound tariff*) yang menjadi implementasi kesepakatan dalam pilar akses pasar dan sampai saat tercapainya kesepakatan di bulan Juli 2004 yang tertuang dalam paket Juli 2004 tercatat ada tiga macam usulan, yaitu: 1) Metoda Harbinson/Rumus Uruguay, 2) Rumus Swiss (*Swiss Formula*), dan 3) Rumus Berjenjang (*Tiered Formula*). Sementara itu, sejak Juli 2004 rumus-rumus tersebut mulai diimplementasikan melalui usulan-usulan yang dikenal dengan: (1) usulan G-20, (2) usulan Australia, (3) usulan Amerika Serikat, (4) usulan Uni Eropa/UE, (5) usulan negara-negara ACP, dan (6) usulan Selandia Baru yang disampaikan di Vevey, Swiss bulan November 2006. Seperti dikemukakan sebelumnya, KN-20 mengusulkan 4 jenjang (*threshold* atau *band*) untuk seluruh pos tarif untuk negara berkembang dengan kisaran sebagai berikut: Jenjang 1, $T \leq 30\%$; Jenjang 2, $30\% < T \leq 80\%$; Jenjang 3, $80\% < T \leq 130\%$; dan Jenjang 4, $T > 130\%$, sedangkan penurunan tarifnya diusulkan secara garis lurus (*linear cut*) dan dilakukan melalui dua skenario, sebagai berikut:

1. Skenario a: Jenjang 1 diturunkan 25%
Jenjang 2 diturunkan 30%
Jenjang 3 diturunkan 35%
Jenjang 4 diturunkan 40%

2. Skenario b: Jenjang 1 diturunkan 45%
Jenjang 2 diturunkan 55%
Jenjang 3 diturunkan 65%
Jenjang 4 diturunkan 75%

Di dalam buku ini yang diolah lebih lanjut dan dianalisis adalah skenario a G-20 di atas. Untuk negara maju G-20 mengajukan usulan penurunan tarif yang berbeda menurut jenjang (5 buah) dan tingkat penurunannya sebagai berikut: Jenjang 1, $T \leq 20\%$; Jenjang 2, $20\% < T \leq 40\%$; Jenjang 3, $40\% < T \leq 60\%$; Jenjang 4, $60\% < T \leq 80\%$; dan Jenjang 5, $T > 80\%$. Tingkat penurunannya dilakukan secara garis lurus dan tingkat penurunan tarif bagi tarif yang tinggi lebih besar dari pada tingkat penurunan tarif bagi tarif yang rendah. Sampai saat ini G-20 belum mencapai usulan yang nyata untuk penurunan tarif itu.

Usulan pengurangan tarif dari Australia dan Amerika Serikat menetapkan jenjang pos tarif yang sama dan berjumlah 4 dan untuk negara berkembang dan negara maju juga sama, yaitu: Jenjang 1, $T \leq 20\%$; Jenjang 2, $20\% < T \leq 40\%$; Jenjang 3, $40\% < T \leq 60\%$; dan Jenjang 4, $T > 60\%$. Namun, tingkat pengurangan tarif di setiap jenjang dari usulan Australia dan Amerika Serikat berbeda:

1. Usulan Australia :
Jenjang 1 diturunkan 55%
Jenjang 2 diturunkan 65%
Jenjang 3 diturunkan 75%
Jenjang 4 diturunkan 85%
2. Usulan Amerika Serikat:
Jenjang 1 diturunkan antara 55 – 65%
Jenjang 2 diturunkan antara 65 – 75%
Jenjang 3 diturunkan antara 75 – 85%
Jenjang 4 diturunkan antara 85 – 90%

UE juga telah mengajukan usul penurunan dan jenjang tarif yang berbeda antara negara berkembang dan negara maju. Jenjang pos tarif usulan UE untuk negara berkembang sama seperti yang diusulkan G-20, yaitu: Jenjang 1, $T \leq 30\%$; Jenjang 2, $30\% < T \leq 80\%$; Jenjang 3, $80\% < T \leq 130\%$; dan Jenjang 4, $T > 130\%$, tetapi tingkat penurunannya adalah:

- Jenjang 1 diturunkan 20%
- Jenjang 2 diturunkan 30%
- Jenjang 3 diturunkan 40%
- Jenjang 4 diturunkan 50%

Untuk negara maju, UE mengajukan usul sebagai berikut: Jenjang 1, $T \leq 30\%$; Jenjang 2, $30\% < T \leq 60\%$; Jenjang 3, $60\% < T \leq 90\%$; dan Jenjang 4, $T > 90\%$ dengan tingkat penurunan tarifnya adalah:

Jenjang 1 diturunkan 20%

Jenjang 2 diturunkan 45%

Jenjang 3 diturunkan 50%

Jenjang 4 diturunkan 60%

Sementara itu, negara-negara ACP mengusulkan jenjang tarif sebagai berikut: Jenjang 1, $T \leq 50\%$; Jenjang 2, $50\% < T \leq 100\%$; Jenjang 3, $100\% < T \leq 150\%$; dan Jenjang 4, $T > 150\%$, dan tingkat penurunannya adalah:

Jenjang 1 diturunkan 10%

Jenjang 2 diturunkan 20%

Jenjang 3 diturunkan 25%

Jenjang 4 diturunkan 30%

Dalam pertemuan di Swiss, Selandia Baru mengajukan satu alternatif modalitas penurunan tarif dengan penjenjangan pos tarif sebagai berikut: Jenjang 1, $T \leq 20\%$; Jenjang 2, $20 < T \leq 50\%$; Jenjang 3, $50 < T \leq 75\%$; dan Jenjang 4, $T > 75\%$. Selanjutnya Selandia Baru mengusulkan tiga alternatif skenario penurunan tarif, yakni:

- Pertama, Jenjang 1 mengalami penurunan tarif sebesar 45%,
Jenjang 2 turun sebesar 50%,
Jenjang 3 turun 55% dan
Jenjang 4 turun 60%;
- Kedua, Jenjang 1 diturunkan sebesar 47%,
Jenjang 2 turun 52%,
Jenjang 3 turun 57% dan
Jenjang 4 turun 62%; dan
- Ketiga, Jenjang 1 turun 50%,
Jenjang 2 turun 55%,
Jenjang 3 turun 69%, dan
Jenjang 4 turun 65%.

Di dalam laporan ini akan di analisis dampak penurunan tarif skenario pertama (Selandia Baru1) dan ketiga (Selandia Baru2), karena skenario kedua adalah nilai antara skenario pertama dan kedua.

Dengan memperbandingkan pengelompokan jenjang tarif dari keenam usulan di atas terlihat bahwa bagi negara-negara G-33: (1) usulan G-20 atau UE memberikan konfigurasi pengelompokan pos tarif yang hampir merata di setiap jenjang kecuali di Jenjang 4; usulan ACP menyebabkan pos-pos tarif mengerucut ke atas, dengan sebagian besar mengelompok di Jenjang 1 dan sebagian kecil ada di Jenjang 4; (3) usulan

penjenjangan Australia, AS dan Selandia Baru hampir sama, yakni ingin mengelompokkan sebanyak mungkin tarif di Jenjang 2 dan 4 dan sesedikit mungkin di Jenjang 3 dan 1.

Bagi Indonesia, perbandingan hasil pengelompokan tarif dari usulan-usulan ini adalah: (1) usulan G-20, UE dan Australia serta UE mengelompokkan sebagian besar pos tarif berada di Jenjang 2, hanya sedikit yang berada di Jenjang 4 dan sedikit sekali berada di Jenjang 1 dan Jenjang 3; (2) usulan negara-negara ACP memberikan konfigurasi hampir 90% dari pos tarifnya berada di Jenjang 1, semakin menurun %tasenya ke jenjang berikutnya; (3) usulan Selandia Baru mengelompokkan pos tarif sebahagian besar di Jenjang 2 (hampir 87% dari pos tarifnya), kemudian mengerucut kembali ke tingkat tarif yang lebih tinggi.

4.5.2. Konfigurasi Tarif Baru Menurut Skenario

Usulan KN-20

Dengan penurunan tarif sebesar 25% pada Jenjang 1, secara umum rata-rata tarif berubah dari 18,99% menjadi 14,24% dengan selang 0-22,5%. Sedangkan penurunan tarif pada Jenjang 2 sebesar 30% menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 45,16% menjadi 31,61% dengan kisaran 21,56-56%. Penurunan 35% pada Jenjang 3 menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 103,92% menjadi 67,55% yang berkisar antara 52,65-84,5%. Penurunan tarif sebesar 40% pada Jenjang 4 menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 186,91% menjadi 112,14% yang berkisar dari 78,24-532,44% (Tabel 4.30).

China dengan jumlah pos tarif terbanyak di Jenjang 1 mengalami penurunan tarif dari rata-rata 15,30% menjadi 11,48% yang berkisar dari 0-22,5%. Korea Selatan pada urutan nomor 2 dalam jumlah pos tarif mengalami penurunan tarif dari rata-rata 17,03% menjadi 12,77% dengan kisaran 1,35-22,5%. Turki mengalami penurunan tarif dari 14,60% menjadi 10,95%, yang berkisar 0-22,5%. Panama mendapatkan penurunan tarif dari 12,01% menjadi 9,01% dalam selang 0,75-22,5% dan Filipina mendapatkan penurunan tarif dari 20,30% menjadi 15,23% dalam selang 2,25-22,5%. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 29,19% menjadi 18,10%, yang berkisar antara 6,75-20,25%.

Di Jenjang 2, Indonesia yang memiliki pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 42,78% menjadi 29,95% pada kisaran 29,5-49%; diikuti masing-masing oleh Guatemala yang mendapatkan penurunan tarif dari 40,51% menjadi 28,36% dalam kisaran 24,5-52,5%. El Salvador dengan penurunan tarif dari 43,12% menjadi 30,18% dalam selang 24,5-55,3%. Filipina dengan penurunan tarif dari 41,03% menjadi 28,72% pada kisaran 24,5-42%. Korea Selatan mendapatkan penurunan tarif dari 47,68% menjadi 33,38% dalam selang dari 22,05-50,4%.

Pakistan dengan jumlah pos tarif terbanyak di Jenjang 3 mengalami penurunan tarif dari 100% menjadi 65%, diikuti masing-masing oleh India yang mendapatkan penurunan tarif dari 99,54% menjadi 64,70% dalam selang 55,25–65%. St Lucia dengan penurunan tarif dari 106,28% menjadi 69,08% dalam selang 65–84,5%. St Vincent mengalami penurunan tarif dari 105,29% menjadi 68,44% dalam kisaran dari 65–84,5%. Belize dengan penurunan tarif dari 101,80% menjadi 66,17% yang berada dalam kisaran 65–71,5%. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 95,0% menjadi 61,75% untuk semua pos tarif sebanyak 14 di jenjang itu.

Pada kelompok 4, India yang memiliki jumlah pos tarif yang tertinggi mendapatkan penurunan tarif dari 165,66% menjadi 99,40% dalam selang dari 150–300%. Diikuti Nigeria dengan penurunannya dari 150% menjadi 90%. Zimbabwe dengan tarif yang menurun dari 150% menjadi 90%. Korea Selatan dengan tarifnya yang menurun dari 463,22% menjadi 277,93% yang ada pada kisaran dari 86,4–532,44%. Indonesia yang menurunkan tarifnya dari 169,55% menjadi 98,73%, yang ada pada selang dari 150–210%.

Usulan Australia dan Amerika Serikat (tingkat minimal)

Penurunan tarif sebesar 55% di Jenjang 1 secara umum menyebabkan penurunan rata-rata tarif dari 12,54% menjadi 5,64% dengan kisaran dari 0–9%, sedangkan penurunan tarif sebesar 65% di Jenjang 2 menyebabkan penurunan rata-rata tarif dari 35,42% menjadi 12,40% dengan kisaran dari 7,07–14%. Penurunan tarif sebesar 75% di Jenjang 3 menyebabkan rata-rata tarif menurun dari 52,62% menjadi 13,15% dalam rentang tarif dari 10,1–15%. Penurunan tarif sebesar 85% di Jenjang 4 menyebabkan rata-rata tarif menurun dari 116,17% menjadi 17,43% dalam rentang tarif dari 9,05–133,11% (Lihat Tabel 4.30).

China yang memiliki pos tarif terbanyak di Jenjang 1 mendapatkan penurunan tarif dari 10,81% menjadi 4,87% dalam selang 0–9%, diikuti oleh Korea Selatan dengan penurunan tarif dari 12,74% menjadi 5,72% dalam kisaran 8,81–9%. Turki mengalami penurunan tarif dari 12,32% menjadi 5,59%, pada kisaran 0–9%. Panama dari 10,79% menjadi 4,83% dalam selang 0,45–9% dan Pantai Gading dari 14,07% menjadi 6,33% dalam selang 1,8–6,75%. Indonesia mengalami penurunan tarif dari 12,4% menjadi 4,1% dengan nilai yang sama untuk sebanyak 4 pos tarif.

Pada Jenjang 2, Indonesia dengan tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 39,76% menjadi 13,92% dalam selang 9,45–14% disusul oleh El Salvador dari 35,70% menjadi 12,50% dalam selang 8,75–14%. Filipina dari 37,25% menjadi 13,04%, yang ada pada kisaran dari 8,75–14%. Korea Selatan dari 28,84% menjadi 10,10% pada kisaran 7,35–14%; dan China dari 26,84% sampai 9,39% dalam selang 7,07–14%.

Tabel 4.30. Perbandingan Hasil Skenario Penurunan Tarif menurut Beberapa Usulan Penjenjangan Tarif, Desember 2006

Jenjang	KN-33			Indonesia		
	Selang tarif baru (%)	Rataan tarif (%)		Selang tarif baru (%)	Rataan tarif (%)	
		Lama	Baru		Lama	Baru
Jenjang 1						
KN-20	0,0-22,5	19,0	14,2	6,8-20,3	24,1	18,1
UE	0,0-24,0	19,0	15,2	7,2-24,0	24,1	19,3
Australia/AS1	0,0-9,0	12,5	5,64	4,1-4,1	12,4	4,1
AS2	0,0-7,0	12,5	4,4	3,2-3,2	12,4	3,2
Negara ACP	0,0-42,5	29,62	25,18	7,65-42,5	40,69	34,59
SB1	0,0-11,0	12,54	6,90	4,95-4,95	9,0	4,95
SB2	0,0-10,0	12,54	6,27	4,5-4,5	9,0	4,5
Jenjang 2						
KN-20	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
UE	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
Australia/AS1	7,1-14,0	35,4	12,4	9,5-14,0	39,8	13,9
AS2	5,1-10,0	35,4	8,9	6,8-10,0	39,8	9,9
Negara ACP	40,48-80,0	92,14	73,72	48,0-76	64,41	51,53
SB1	10,1-25,0	36,92	18,46	13,5-25,0	40,80	20,40
SB2	9,09-22,5	36,92	16,61	12,15-22,5	40,80	18,36
Jenjang 3						
KN-20	52,7-84,5	103,9	67,6	61,8-61,8	95,0	61,8
UE	48,6-78,0	103,9	62,8	57,0-57,0	95,0	57,0
Australia/AS1	10,1-15,0	52,6	13,2	11,3-15,0	57,7	13,7
AS2	6,1-9,0	52,6	7,9	6,8-9,0	57,7	8,2
Negara ACP	75,38-112,5	133,15	99,86	112,5-112,5	150,0	112,5
SB1	22,77-33,75	61,77	27,79	27,0-31,5	60,62	27,28
SB2	20,24-30,0	61,77	24,71	24,0-28,0	60,62	24,25
Jenjang 4						
KN-20	78,2-532,4	186,9	112,1	150,0-210,0	164,6	98,7
UE	65,2-443,7	186,9	93,5	75,0-105,0	164,6	82,3
Australia/AS1	9,1-133,1	116,2	17,4	10,5-31,5	143,0	21,5
AS2	6,0-88,7	116,2	11,6	7,0-21,0	143,0	14,3
Negara ACP	109,2-621,18	280,08	196,06	112,0-147,0	190,0	133,0
SB1	30,5-354,96	118,10	47,24	38,0-84,0	150,43	60,17
SB2	26,78-310,90	118,10	41,33	33,25-73,50	150,43	52,65

Keterangan: AS1 adalah usulan Amerika Serikat yang sama dengan usulan Australia dengan pemotongan tingkat rendah di: Jenjang 1, 55%; Jenjang 2, 65%; Jenjang 3, 75% dan Jenjang 4, 85%;

AS2 adalah usulan Amerika Serikat dengan pemotongan tingkat tinggi di: Jenjang 1, 65%; Jenjang 2, 75%; Jenjang 3, 85% dan Jenjang 4, 90%.

SB1 adalah usulan Selandia Baru dengan pemotongan di: Jenjang 1, 45%; Jenjang 2, 50%; Jenjang 3, 55% dan Jenjang 4, 60%;

SB2 adalah usulan Selandia Baru dengan penurunan di: Jenjang 1, 50%; Jenjang 2, 55%; Jenjang 3, 60% dan Jenjang 4, 65%.

Dalam Jenjang 3, Indonesia dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 54,71% menjadi 13,68% dalam selang 11,25–15%. Disusul Benin dari 60% menjadi 15% yang semuanya sama bagi 201 pos tarif. Korea dari 49,85% menjadi 12,46%, yang berkisar dari 10,13–13,5%. Turki dari 51,12% menjadi 12,78% dan berkisar dari 10,13–15%, dan Filipina dari 49,07% menjadi 12,27% pada kisaran 1,25–15%.

Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak di Jenjang 4 mengalami penurunan tarif dari 101,09% menjadi 10,11% dalam selang 10–15%. Diikuti India dari 128,14–12,81% dalam kisaran 7,5–30%. St Lucia dari 111,91% menjadi 11,19% yang ada pada kisaran 10–25%. St Vincent dari 110,97% menjadi 11,10% dalam selang 10–25%. Sementara itu St Kitts dan Nevis dari 108,56% menjadi 10,86% dalam rentang 9,3–25%. Bagi Indonesia terjadi penurunan tarif dari 143,0% menjadi 21,5% dalam rentang nilai tarif dari 10,5–31,5%.

Selain itu AS juga mengusulkan penurunan tarif secara radikal dimana pos tarif di Jenjang 1 dengan penurunan 65%; di Jenjang 2 dengan penurunan 75%; di Jenjang 3 dengan penurunan 85%; dan di Jenjang 4 dengan penurunan 90% (lihat penjelasan pada subbab sebelumnya). Dengan menerapkan skenario ini maka di Jenjang 1 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 12,53% menjadi 4,39% dengan selang antara 0–7%. Di Jenjang 2 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 35,42% menjadi 8,86% dengan selang antara 5,05–10%. Di Jenjang 3 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 52,62% menjadi 7,89% dengan selang dari 6,075–9%. Di Jenjang 4 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 116,17% menjadi 11,62% dalam rentang tarif dari 6,03–88,74%.

Dengan penurunan yang radikal ini, China dengan pos tarif terbanyak di Jenjang 1, mengalami penurunan tarif dari 10,81% menjadi 3,78% dengan kisaran dari 0–7% disusul Turki dari 12,74% menjadi 4,46% pada selang 0,63–7%. Panama dari 10,74% menjadi 3,76% yang ada pada kisaran 0,35–7%. Pantai Gading dari 14,07% menjadi 4,93% dalam kisaran 1,4–5,25%. Untuk Indonesia terjadi penurunan tarif dari 12,4% menjadi 3,15% untuk semua pos tarif.

Indonesia dengan pos tarif terbanyak di Jenjang 2 mendapatkan penurunan tarif dari 39,76% menjadi 9,94% dalam kisaran 6,75–10%. Diikuti El Salvador dari 35,70% menjadi 8,93% yang ada pada kisaran 6,25–10%. Filipina dari 37,25% menjadi 9,31% dalam selang 6,25–10%. Korea dari 28,84% menjadi 7,12% dalam kisaran 5,25–10%. Sedangkan China dari 26,84% menjadi 6,71% yang ada pada kisaran 5,05–10%.

Indonesia yang pada Jenjang 3 juga mempunyai pos tarif terbanyak dalam skenario radikal ini mengalami penurunan tarif dari 54,71% menjadi 8,21%, yang berada dalam kisaran 6,75–9%. Diikuti Benin dari 60% menjadi 9% untuk semua pos tarif; Korea dari 49,85% menjadi 7,48% dengan kisaran 6,08–8,1%. Turki dari 51,12% menjadi 7,67% pada

kisaran 6,08–9,0%. Filipina dari 49,07% menjadi 7,36% pada kisaran 6,75–9,0%.

Dalam Jenjang 4 dimana Pakistan mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 101,09% menjadi 15,16% yang ada dalam kisaran 15–30%. Disusul India dari 128,14% menjadi 19,22% dalam kisaran 11,25–45%. St Lucia dari 111,91% menjadi 16,79% dalam selang 15–37,5%. St Vincent dari 110,97% menjadi 11,94% yang ada pada selang dari 10,5–12%. St Kitts dan Nevis dari 108,56% menjadi 16,28% dalam kisaran 13,95–37,5%. Bagi Indonesia terjadi penurunan tarif dari 143,0% menjadi 14,30% dalam kisaran 7–21%.

Usulan Uni Eropa/UE

Penurunan tarif sesuai dengan usulan UE menyebabkan pos tarif di Jenjang 1 berubah dari 18,99% menjadi 15,19% yang berada dalam kisaran 0–24%. Di Jenjang 2 berubah dari 45,16% menjadi 31,61% dengan kisaran 21,56–56%. Di Jenjang 3 berubah dari 103,92% menjadi 62,35% dalam kisaran 48,6–78%. Di Jenjang 4 berubah dari 186,91% menjadi 93,45%, yang ada dalam kisaran 65,2–443,7% (Tabel 4.40).

Pada Jenjang 1, China mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 15,30% menjadi 12,24% dalam kisaran 0–24%. Diikuti oleh Korea Selatan dari 17,03% menjadi 13,62% dengan kisaran 1,44–24,0%. Turki dari 14,60% menjadi 11,68% dalam bentang tarif dari 0–24,0%. Panama dari 12,01% menjadi 9,61% dalam bentangan tarif 0,8–24,0%. Filipina dari 20,30% menjadi 16,24% dalam rentang tarif dari 2,4–24,0%. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 24,14% menjadi 19,31% dalam rentangan 7,2–24,0%.

Selanjutnya, di Jenjang 2 yang menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 42,8% menjadi 29,9% dalam rentang tarif dari 24,5–49,0%. Disusul masing-masing oleh Guatemala dari 40,5% menjadi 28,4% dalam rentang tarif 24,5–52,5%. El Salvador dari 43,1% menjadi 30,2% dalam rentang tarif dari 24,5–55,3%. Filipina dari 41,0% menjadi 28,7% dalam selang antara 24,5–42,0%. Korea Selatan dari 47,7% menjadi 33,4% dalam rentang tarif 22,1–50,4%.

Di Jenjang 3 yang menempatkan Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 100% menjadi 60% untuk semua pos tarif yang ada sebanyak 671. Diikuti India dari 99,54% menjadi 59,72% dalam rentang tarif 51–60%. St Lucia dari 106,28% menjadi 63,77% dengan rentang tarif dari 60–78%. Selanjutnya St Vincent dari 105,29% menjadi 63,18% dalam selang antara 60–78%. Belize dari 101,80% menjadi 61,08% dalam selang 60–66%. Adapun Indonesia mengalami penurunan tarif dari 95,0% menjadi 57% untuk semua pos tarif (sebanyak 14) di jenjang ini.

India dengan jumlah pos tarif terbanyak, 249 pos di Jenjang 4 mendapatkan penurunan tarif dari 165,66% menjadi 82,83% dalam rentang dari 75–150%. Disusul oleh Nigeria dari 150% menjadi 75% yang sama untuk semua pos tarif sebanyak 217. Zimbabwe dari 150% menjadi 75% juga untuk seluruh pos tarif sebanyak 215. Korea Selatan dari 463,22% menjadi 231,61% dalam rentangan 72–443,7%. Indonesia dari 164,55% menjadi 82,27% dalam rentang 75–105%.

Usulan Negara-negara ACP

Penurunan tarif sesuai dengan usulan negara-negara ACP menyebabkan tarif di Jenjang 1 berubah dari 29,62% menjadi 25,18% yang sebelumnya berada dalam kisaran 0–50% menjadi 0–42,5%. Di Jenjang 2 berubah dari 92,15% menjadi 73,72% yang sebelumnya berada dalam kisaran 50,6–100% menjadi kisaran 40,48–80%. Di Jenjang 3 berubah dari 133,19% menjadi 99,86% yang sebelumnya berada dalam kisaran 100,5–150% menjadi 75,38–112,5%. Sementara itu di Jenjang 4 berubah dari 280,08% menjadi 196,06%, yang sebelumnya berada dalam kisaran 156–887,4% menjadi 109,2–621,18% (Tabel 4.40).

Pada Jenjang 1 dimana Indonesia mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 40,69% menjadi 34,59% dalam kisaran 7,65–42,5%. Diikuti oleh Korea Selatan dari 20,97% menjadi 17,82% yang terbentang dari 1,53–42,5%. China dari 17,36% menjadi 14,67% dalam bentang tarif dari 0–42,5%. Filipina dari 34,05% menjadi 28,94% dalam bentangan tarif dari 2,55–42,5%. Guatemala dari 38,77% menjadi 32,96% dalam rentang tarif 8,5–34,0%.

Selanjutnya, di Jenjang 2 yang menunjukkan Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 100,0% menjadi 80,0% dengan nilai tarif yang sama 80,0. Disusul masing-masing oleh India dari 96,13% menjadi 76,90% dalam rentang tarif antara 44,0–80,0%. St Kitts dan Nevis dari 99,94% menjadi 79,95% dengan rentang tarif 74,4–80,0%. Uganda dari 78,11% menjadi 62,49% dalam selang antara 48,0–64,0%. Benin dari 63,29% menjadi 50,63% dalam selang 48,0–80,0%. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 64,1% menjadi 51,53% untuk semua pos tarif (sebanyak 127) di jenjang ini.

Di Jenjang 3 yang menempatkan India sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 150% menjadi 112,5% untuk semua pos tarif yang ada sebanyak 223. Diikuti India dari 96,13% menjadi 76,90% dalam rentang tarif dari 44,0–80,0%. Diikuti sebanyak 3 negara yang memiliki jumlah pos tarif sama 217 pos, Nigeria, Tanzania, dan Zambia mengalami penurunan tarif dari tingkat yang sama juga seperti India, 150,0% menjadi 112,5% dengan nilai tarif yang sama 112,5%. Kemudian disusul Mauritius dari 122,0% menjadi 91,5% untuk

semua pos sebanyak 216. Zimbabwe dari 150,0% menjadi 112,5% untuk semua pos sebanyak 215. St Lucia dari 127,6% menjadi 95,7% dengan rentang tarif dari 80,25–99,75%. Di jenjang ini Indonesia mengalami penurunan tarif dari tingkat yang sama untuk semua pos tarif (sebanyak 35), yaitu 150,0% menjadi 112,5%.

Korea Selatan dengan jumlah pos tarif terbanyak, 88 pos di Jenjang 4 mendapatkan penurunan tarif dari 474,10% menjadi 331,97% dalam rentang dari 114,03–621,18%. Disusul oleh Barbados dari 166,23% menjadi 116,36% dalam kisaran 110,6–156,1%. Turki dari 187,3% menjadi 131,11% dengan kisaran 109,2–157,5%. India 300,0% menjadi 210,0% yang sama bagi semua pos tarif sebanyak 26. Indonesia mengalami penurunan tarif dari tingkat yang sama untuk semua pos tarif (sebanyak 35), yaitu 190,0% menjadi 133,0% pada selang tarif 112,0–147,0% di jenjang ini.

Dengan menerapkan jenjang dan rentang tarif serta skenario penurunan tarif yang diusulkan berbagai kelompok negara di atas, dapat disimpulkan bahwa usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi G-20 dan kelompok ACP di setiap jenjang baik bagi Indonesia maupun G-33. Hal ini disebabkan oleh sifat pengelompokan tarif dari usulan masing-masing. Usulan G-20 atau UE menyebabkan pos tarif menyebar merata ke Jenjang 1, 2, dan 3, sedangkan usulan Australia dan AS membuat pos tarif mengelompok di lapis 2 dan 4 dan paling banyak di lapis 4. Sementara itu, usulan kelompok negara-negara ACP memberikan pengelompokan tarif mengikuti piramida. Akibat dari perbedaan ini adalah usulan Australia dan AS memberikan penurunan tarif yang drastis dibandingkan usulan G-20 dan bahkan kelompok negara-negara ACP, dan usulan terakhir ini lebih lambat dibandingkan dari usulan G-20 dan UE.

Selain itu, usulan Australia dan AS memberikan arah penurunan tarif yang berbeda antara Jenjang 1 dan jenjang yang lain dimana pada Jenjang 1 usulan Australia dan AS ini menyebabkan rata-rata tarif setelah penurunan di Indonesia lebih rendah dari pada di G-33, sedangkan di Jenjang 2, Jenjang 3, dan Jenjang 4 rata-rata tarif Indonesia setelah diturunkan masih lebih tinggi daripada rata-rata tarif di G-33. Adapun usulan G-20 dan UE memberikan rata-rata tarif setelah penurunan di Jenjang 1 lebih tinggi di Indonesia dari pada di G-33 dan di Jenjang 2, Jenjang 3, dan Jenjang 4 selalu lebih rendah dari pada di G-33.

Usulan Selandia Baru

Penurunan tarif sesuai dengan usulan Selandia Baru (SB1 dan SB2) menyebabkan pos tarif di Jenjang 1 berubah dari 12,54% menjadi sekitar 6,27–6,99% yang berada dalam kisaran 0–11%. Di Jenjang 2 berubah dari 36,92% menjadi antara 16,61–18,46% dalam selang antara

9,09–25%. Di Jenjang 3 berubah dari 61,77% menjadi sekitar 24,71–27,79% dalam kisaran 20,24–33,75%. Di Jenjang 4 berubah dari 118,10% menjadi sekitar 41,33–47,24%, yang ada dalam kisaran 26,78–354,96% (Tabel 4.40). Perubahan yang terjadi di masing-masing jenjang akan dibahas dalam uraian berikut ini.

China yang mempunyai pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 10,81% menjadi 5,40–5,94% dalam kisaran 0–11,0%. Diikuti oleh Korea Selatan dari 12,74% menjadi 6,37–7,01% yang terbentang dari 0,90–11,0%. Kemudian Turki dari 12,32% menjadi 6,16–6,78% dalam bentang tarif dari 0–11,0%. Panama dari 10,70% menjadi 5,35–5,88% dalam bentangan tarif dari 0,5–11,0%. Pantai Gading dari 14,07% menjadi 7,04–7,74% dalam rentang tarif dari 2,0–8,25%. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 9,0% menjadi 4,5–4,95% dalam rentangan dari 4,5–4,95%.

Selanjutnya, di Jenjang 2 yang menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 40,8% menjadi 18,36–20,4% dalam rentang tarif dari 12,15–25,0%. Disusul masing-masing oleh Guatemala dari 39,78% menjadi 17,9–19,89% dalam rentang tarif antara 13,5–20,0%. El Salvador dari 36,77% menjadi 16,55–18,38% dalam rentang tarif dari 11,25–25,0%. Filipina dari 38,91% menjadi 17,51–19,46% dalam selang antara 11,25–25,0%. Korea Selatan dari 32,0% menjadi 14,4–16,0% dalam selang antara 9,45–24,75%.

Di Jenjang 3 yang menempatkan Benin sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 60% menjadi 24–27% dalam rentang tarif dari 24–27% untuk semua pos tarif yang ada sebanyak 671. Kemudian diikuti Korea Selatan dari 57,47% menjadi 22,99–25,86% dalam rentang tarif dari 20,24–32,4%. Indonesia dari 60,62% menjadi 25,25–27,28% dengan rentang tarif dari 24–31,5%. Turki dari 62,99% menjadi 25,2–28,35% pada rentang tarif 20,56–33,75%. Botswana dari 64,22% menjadi 25,69–28,90% dalam selang tarif dari 20,40–32,85%.

Selanjutnya di Jenjang 4 dimana Pakistan memiliki jumlah pos tarif terbanyak, 685 pos mendapatkan penurunan tarif dari 101,09% menjadi 35,38–40,44% dalam rentang dari 35–80%. Disusul oleh India dari 128,24% menjadi 44,88–51,29% dalam rentang tarif dari 28,0–120,0%. St. Lucia dari 111,9% menjadi 39,17–44,77% dalam selang tarif dari 35,0–100,0%. St. Vincent dari 110,97% menjadi 38,84–44,39% dalam rentangan 35,0–100,0%. St. Kitts and Nevis dari 108,56% menjadi 37,99–43,43% dalam rentangan tarif 32,55–100,0%. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif 150,43% menjadi 52,65–60,17% dalam rentang tarif 33,25–84,0%.

Dengan menerapkan jenjang dan rentang tarif serta skenario penurunan tarif yang diusulkan berbagai kelompok negara di atas, dapat disimpulkan bahwa usulan dari Australia dan AS memberikan hasil

penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi G-20 dan Kelompok ACP di setiap jenjang, baik bagi Indonesia maupun G-33. Usulan Selandia Baru sedikit memperlambat laju penurunan yang terjadi kalau mengikuti usulan Australia dan AS. Hal ini disebabkan oleh sifat pengelompokan tarif dari usulan masing-masing. Usulan G-20 atau UE menyebabkan pos tarif menyebar merata ke Jenjang 1, 2, dan 3, sedangkan usulan Australia dan AS serta Selandia Baru membuat pos tarif mengelompok di lapis 2 dan 4. Sementara itu, usulan kelompok negara-negara ACP memberikan pengelompokan tarif mengikuti piramida. Akibat dari perbedaan ini adalah usulan Australia dan AS memberikan penurunan tarif yang drastis, agak lambat pada usulan Selandia Baru dibandingkan usulan G-20 dan bahkan kelompok negara-negara ACP, dan usulan terakhir ini lebih lambat dibandingkan dari usulan G-20 dan UE.

Selain itu usulan Australia dan AS serta Selandia Baru memberikan arah penurunan tarif yang berbeda antara Jenjang 1 dan jenjang yang lain dimana pada Jenjang 1 usulan Australia dan AS ini menyebabkan rataan tarif setelah penurunan di Indonesia lebih rendah dari pada di G-33, sedangkan di Jenjang 2, Jenjang 3, dan Jenjang 4 rataan tarif Indonesia setelah diturunkan masih lebih tinggi daripada rataan tarif di G-33. Di Jenjang 3 sendiri rataan tarif di G-33 hampir sama dengan rataan tarif di Indonesia. Sedangkan usulan G-20 dan UE memberikan rataan tarif setelah penurunan di Jenjang 1 lebih tinggi di Indonesia daripada di G-33 dan di Jenjang 2, Jenjang 3, dan Jenjang 4 selalu lebih rendah daripada di G-33.

Usulan kelompok ACP memberikan penurunan tarif yang paling ideal dibandingkan usulan-usulan yang lain, karena sifat pengelompokan tarif yang bagai piramida, berbeda halnya dari usulan G-20 yang merata di Jenjang 1, 2 dan 3, sehingga tingkat tarif setelah penurunan masih sekitar 70-80% di atas tingkat tarif skenario G-20. Berhubung negara berkembang, terutama yang ada dalam G-33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS serta Selandia Baru ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan G-20 dan bahkan usulan kelompok ACP. Oleh karena itu, dengan memperbandingkan hasil-hasil tersebut, usulan kelompok ACP ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga G-33 untuk disetujui. Kalau tidak, G-33 perlu mengkaji usulan penurunan tarif yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan ciri dan kerawanan sektor pertanian dan komoditas-komoditas pertanian andalannya di negara-negara anggota. Jadi, penetapan penurunan tarif dan sasaran komoditasnya perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi dampaknya terhadap agribisnis komoditas, petani yang terlibat dan masyarakat secara luas.

4.5.3. Dampak Beberapa Usulan Skema Pemotongan Tarif Berlaku (*Applied Tariff*) Bagi Indonesia dan G-33

Untuk menganalisis dampak pemotongan tarif ini, gugus data yang digunakan adalah GTAP Database Versi 6.0 yang menggambarkan besaran-besaran tarif yang berlaku (*applied tariff*) pada tahun 2001 dan bukan tarif terikat (*bound tariff*) dari masing-masing negara atau wilayah yang diteliti. Hal ini dikemukakan karena adanya kesenjangan yang sangat lebar antara tarif berlaku dengan tarif terikat di suatu negara atau wilayah. Selain itu adalah tidak mungkin melakukan analisis simulasi penurunan tarif terhadap tarif terikat, sementara peubah-peubah atau indikator ekonomi yang lain, seperti produksi, harga, volume impor atau ekspor yang berlaku untuk tahun 2001. Untuk melakukan langkah seperti ini diperlukan beberapa anggapan dan data tambahan lain yang tidak tersedia pada saat analisis ini dilakukan. Simulasi yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan mengandaikan pemotongan tarif pada tarif berlaku komoditas pertanian, seperti diusulkan oleh negara atau wilayah yang disebutkan di atas. Besaran pemotongan tarif ditentukan sebagai rata-rata pemotongan tarif dari beberapa jenjang yang diusulkan negara atau wilayah tersebut, yakni: (a) skenario pemotongan tarif usulan G-20, dengan rata-rata pemotongan tarif 30%, (b) skenario Uni Eropa/UE, dengan rata-rata pemotongan tarif 35%, (c) skenario Australia atau AS, dengan rata-rata pemotongan tarif 70%, (d) skenario ACP, dengan rata-rata pemotongan tarif 21,25%, dan (e) skenario Selandia Baru, dengan rata-rata pemotongan tarif 55%.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa kalau seandainya tarif impor dipotong, maka produksi hampir semua komoditas pertanian Indonesia akan menurun, kecuali untuk komoditas Ayam_Telur (unggas), Pertan_Lain (pala dan vanili), minyak nabati dan olahan makanan (kakao). Hal ini ditunjukkan oleh semua skenario (Tabel 4.31), sementara untuk KN-33 produksi padi_olahan (padi), hortikultura (sayuran dan kelapa), gula, pertan_lain (pala dan vanili), dan olah_makanan (kakao) meningkat, tetapi produksi komoditas lain menurun, yakni jagung, kedelai, komoditas peternakan dan Minyak_Nabati. Laju penurunan atau peningkatan produksi paling kecil diperoleh dari skenario ACP, diikuti G-20, UE, Selandia Baru dan kemudian Australia/AS. Pada keadaan sama-sama terjadi peningkatan produksi, laju peningkatan bagi Indonesia lebih besar daripada laju peningkatan bagi G-33 dan pada keadaan sama-sama terjadi penurunan produksi, laju penurunan bagi Indonesia juga lebih besar daripada laju penurunan bagi G-33, kecuali kedelai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dampak pemotongan tarif impor komoditas pertanian di Indonesia tidak serta-merta menunjukkan arah yang sama dengan di G-33.

Tabel 4.31. Dampak Pemotongan Tarif terhadap Produksi Komoditas Pertanian dari Beberapa Usulan (%)

Usulan	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	ROW
Padi Olah								
Proposal G-20	-4,02	-3,53	7,28	-14,31	1,69	-3,56	0,3	-3,94
Proposal UE	-4,69	-4,12	8,49	-16,7	1,97	-4,15	0,35	-4,6
Proposal Australia/AS	-9,39	-8,24	16,99	-33,4	3,94	-8,31	0,7	-9,2
Proposal ACP	-2,85	-2,5	5,16	-10,14	1,2	-2,52	0,21	-2,79
Proposal Selandia Baru	-7,38	-6,48	13,35	-26,24	3,1	-6,53	0,55	-7,23
Jagung								
Proposal G-20	-25,4	-20,63	3,61	4,77	7	-2,23	-1,19	-3,46
Proposal UE	-29,64	-24,07	4,21	5,57	8,16	-2,6	-1,39	-4,04
Proposal Australia/AS	-59,27	-48,13	8,42	11,13	16,33	-5,19	-2,77	-8,08
Proposal ACP	-17,99	-14,61	2,56	3,38	4,96	-1,58	-0,84	-2,45
Proposal Selandia Baru	-46,57	-37,82	6,61	8,75	12,83	-4,08	-2,18	-6,35
Hortikultura								
Proposal G-20	-5,75	0,53	-4,44	-4	-3,72	-1,46	0,31	1,54
Proposal UE	-6,71	0,62	-5,18	-4,66	-4,34	-1,7	0,36	1,8
Proposal Australia/AS	-13,41	1,24	-10,36	-9,32	-8,68	-3,4	0,71	3,59
Proposal ACP	-4,07	0,38	-3,14	-2,83	-2,63	-1,03	0,22	1,09
Proposal Selandia Baru	-10,54	0,98	-8,14	-7,32	-6,82	-2,67	0,56	2,82
Kedelai								
Proposal G-20	-13,89	-23,33	8,29	-15,49	6,53	-6,4	-8,89	1,05
Proposal UE	-16,21	-27,22	9,67	-18,07	7,62	-7,47	-10,37	1,22
Proposal Australia/AS	-32,42	-54,44	19,35	-36,14	15,23	-14,93	-20,75	2,45
Proposal ACP	-9,84	-16,52	5,87	-10,97	4,62	-4,53	-6,3	0,74
Proposal Selandia Baru	-25,47	-42,77	15,2	-28,39	11,97	-11,73	-16,3	1,92
Gula Tebu								
Proposal G-20	-7,7	1,39	-2,97	-6,27	5,65	-5,34	0,9	0,53
Proposal UE	-8,99	1,62	-3,46	-7,32	6,59	-6,24	1,05	0,62
Proposal Australia/AS	-17,97	3,23	-6,92	-14,63	13,18	-12,47	2,11	1,25
Proposal ACP	-5,46	0,98	-2,1	-4,44	4	-3,79	0,64	0,38
Proposal Selandia Baru	-14,12	2,54	-5,44	-11,5	10,35	-9,8	1,65	0,98

Tabel 4.31. Lanjutan

Usulan	Jepang	Korea	AS	UE	Negara maju lainnya	Indo- nesia	G-33	ROW
Spi_Dmb								
Proposal G-20	-21,17	-11,25	-0,5	0,48	23,7	-3,3	-1,1	-1,65
Proposal UE	-24,7	-13,13	-0,58	0,56	27,65	-3,85	-1,29	-1,92
Proposal Australia/AS	-49,4	-26,26	-1,16	1,13	55,3	-7,7	-2,57	-3,85
Proposal ACP	-15	-7,97	-0,35	0,34	16,79	-2,34	-0,78	-1,17
Proposal Selandia Baru	-38,81	-20,63	-0,91	0,89	43,45	-6,05	-2,02	-3,02
Ayam_Telur								
Proposal G-20	-20,22	-5,33	3,1	3,35	6,3	3,86	-1,43	-1,56
Proposal UE	-23,59	-6,22	3,61	3,91	7,35	4,5	-1,66	-1,82
Proposal Australia/AS	-47,19	-12,43	7,22	7,83	14,69	9,01	-3,33	-3,64
Proposal ACP	-14,33	-3,77	2,19	2,38	4,46	2,73	-1,01	-1,1
Proposal Selandia Baru	-37,08	-9,77	5,68	6,15	11,54	7,08	-2,62	-2,86
Pertan_Lain								
Proposal G-20	-14,66	-3,69	-11,04	-8,91	3,58	9,91	3,72	3,37
Proposal UE	-17,1	-4,3	-12,88	-10,39	4,18	11,56	4,34	3,93
Proposal Australia/AS	-34,2	-8,61	-25,76	-20,78	8,35	23,13	8,68	7,87
Proposal ACP	-10,38	-2,61	-7,82	-6,31	2,54	7,02	2,64	2,39
Proposal Selandia Baru	-26,87	-6,76	-20,24	-16,33	6,56	18,17	6,82	6,18
MinyakNabati								
Proposal G-20	-2,84	-0,03	-4,36	1,59	6,08	20,2	-17,14	2,29
Proposal UE	-3,31	-0,04	-5,08	1,85	7,09	23,57	-19,99	2,67
Proposal Australia/AS	-6,62	-0,08	-10,17	3,71	14,18	47,13	-39,99	5,33
Proposal ACP	-2,01	-0,02	-3,09	1,12	4,31	14,31	-12,14	1,62
Proposal Selandia Baru	-5,2	-0,06	-7,99	2,91	11,14	37,03	-31,42	4,19
OlahMakanan								
Proposal G-20	-2,5	1,79	-0,65	3,54	4,96	3,77	0,67	1,15
Proposal UE	-2,92	2,09	-0,76	4,13	5,78	4,4	0,79	1,34
Proposal Australia/AS	-5,84	4,18	-1,51	8,26	11,57	8,81	1,57	2,68
Proposal ACP	-1,77	1,27	-0,46	2,51	3,51	2,67	0,48	0,81
Proposal Selandia Baru	-4,59	3,28	-1,19	6,49	9,09	6,92	1,23	2,11

Pemotongan tarif impor menyebabkan penurunan produksi semua komoditas pertanian bagi Jepang; penurunan produksi semua komoditas pertanian kecuali Hortikultura (sayuran dan kelapa), Gula_Tebu (gula) dan OlahMakanan (kakao) bagi Korea; sebaliknya, peningkatan produksi komoditas pertanian kecuali Hortikultura (sayuran dan kelapa), Gula_Tebu (gula), Spi_Dmb (ruminansia), Pertan_lain (pala dan vanili), Minyak_Nabati (minyak nabati) dan OlahMakanan (kakao) bagi AS; sedangkan bagi UE hampir seimbang antara komoditas yang mengalami peningkatan produksi dan yang menderita penurunan produksi.

Berhubung produksi beberapa komoditas pertanian Indonesia di atas menurun, maka semua skenario penurunan tarif juga menunjukkan bahwa permintaan atau penggunaan masukan, terutama lahan, tenaga kerja tak terdidik, dan modal akan menurun pula bagi komoditas-komoditas ini, tetapi bagi komoditas yang produksinya meningkat, permintaan akan masukannya juga meningkat (Tabel 4.32). Ini menunjukkan adanya peralihan penggunaan sumberdaya pertanian di Indonesia. Besarnya penurunan atau peningkatan penggunaan masukan sejalan dengan besaran penurunan tarif dari masing-masing proposal. Dengan kata lain, skenario proposal ACP memberikan laju penurunan atau peningkatan yang terkecil dan skenario proposal Australia/AS memberikan laju penurunan atau peningkatan yang terbesar. Selanjutnya, laju penurunan penggunaan masukan untuk tanaman Kedelai selalu lebih cepat dibanding komoditas lain, diikuti oleh Gula_Tebu (gula), Padi_Olah (padi) dan Spi_Dmb (ruminansia), tetapi laju peningkatan penggunaan masukan tidak selalu terjadi hanya pada satu komoditas saja. Pada komoditas Pertan_Lain (pala dan vanili), penggunaan masukan lahan meningkat lebih cepat dari pada masukan lain, sedangkan pada komoditas MinyakNabati (minyak nabati) permintaan tenaga kerja tak terdidik dan modal meningkat lebih cepat daripada masukan lahan. Sementara itu, pada komoditas OlahMakanan (kakao) diperoleh pula bahwa penggunaan masukan lahan cenderung menurun, tetapi penggunaan masukan tenaga kerja tak terdidik dan modal bahkan meningkat.

Dengan menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian di Indonesia, maka defisit neraca perdagangan (selisih ekspor dengan impor) akan terjadi untuk komoditas-komoditas tersebut, kecuali bagi komoditas yang laju produksinya positif seperti komoditas yang disebutkan di atas, yakni komoditas Ayam_Telur (unggas), Pertan_Lain (pala dan vanili), Minyak_Nabati (minyak nabati) dan OlahMakanan (kakao). Sementara itu, untuk G-33 terjadi surplus perdagangan untuk Padi_Olahan (padi), Hortikultura (sayuran dan kelapa), Gula_Tebu (gula), Pertan_Lain (pala dan vanili) dan Olah_Makanan (kakao), tetapi defisit bagi komoditas lain, yakni jagung, kedelai, komoditas Peternakan, dan Minyak_Nabati (Tabel 4.33). Pada keadaan sama-sama terjadi defisit perdagangan, nilai defisit perdagangan Indonesia jauh lebih kecil dari pada G-33 dan pada keadaan sama-sama terjadi surplus perdagangan, nilai surplus Indonesia juga lebih kecil dari pada G-33.

Tabel 4.32. Dampak Pemotongan Tarif terhadap Permintaan Masukan Produksi Komoditas Pertanian Indonesia (%)

Komoditas/ Kelompok komoditas	Lahan				
	Proposal G-20	Proposal UE	Proposal Australia /AS	Proposal ACP	Proposal Selandia Baru
Padi_Olah	-3,69	-4,31	-8,62	-2,62	-6,77
Jagung	-2,43	-2,83	-5,66	-1,72	-4,45
Horti	-1,74	-2,03	-4,06	-1,23	-3,19
Kedelai	-6,16	-7,19	-14,38	-4,36	-11,3
Gula_Tebu	-4,92	-5,74	-11,48	-3,49	-9,02
Spi_Dmb_Dag	-3,61	-4,21	-8,43	-2,56	-6,62
Ayam_Telur	1,71	1,99	3,99	1,21	3,13
Pertan_Lain	8,44	9,84	19,69	5,98	15,47
MinyakNabati	7,28	8,5	17	5,16	13,35
OlahMakanan	-0,46	-0,54	-1,08	-0,33	-0,85
Padi_Olah	-3,49	-4,07	-8,14	-2,47	-6,39
Jagung	-2,02	-2,36	-4,72	-1,43	-3,71
Horti	-1,17	-1,37	-2,74	-0,83	-2,15
Kedelai	-6,65	-7,76	-15,52	-4,71	-12,2
Gula_Tebu	-5,55	-6,48	-12,95	-3,93	-10,18
Spi_Dmb_Dag	-3,27	-3,82	-7,64	-2,32	-6
Ayam_Telur	5,05	5,89	11,79	3,58	9,26
Pertan_Lain	11,44	13,34	26,69	8,1	20,97
MinyakNabati	20,05	23,39	46,78	14,2	36,75
OlahMakanan	3,62	4,23	8,45	2,57	6,64
Padi_Olah	-3,41	-3,97	-7,95	-2,41	-6,24
Jagung	-1,98	-2,31	-4,63	-1,4	-3,64
Horti	-1,13	-1,32	-2,64	-0,8	-2,08
Kedelai	-6,61	-7,71	-15,43	-4,68	-12,12
Gula_Tebu	-5,42	-6,33	-12,65	-3,84	-9,94
Spi_Dmb_Dag	-3,16	-3,69	-7,38	-2,24	-5,79
Ayam_Telur	5,15	6	12,01	3,65	9,44
Pertan_Lain	11,48	13,39	26,78	8,13	21,04
MinyakNabati	20,23	23,61	47,21	14,33	37,09
OlahMakanan	3,81	4,44	8,89	2,7	6,98

Tabel 4.33. Dampak Pemotongan Tarif dari Beberapa Usulan terhadap Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia dan G-33 (dalam juta dolar AS)

Usulan	Padi_Olah		Spi_Dmb	
	Indonesia	KN-33	Indonesia	KN-33
Proposal G-20	-190,26	273,16	-63,49	-225,79
Proposal UE	-221,97	318,69	-74,07	-263,42
Proposal Australia/AS	-443,94	637,38	-148,15	-526,83
Proposal ACP	-134,77	193,49	-44,97	-159,93
Proposal Selandia Baru	-348,81	500,8	-116,4	-413,94
	Jagung		Ayam_Telur	
Proposal G-20	-45,23	-126,59	147,57	-2052,89
Proposal UE	-52,77	-147,69	172,17	-2395,03
Proposal Australia/AS	-105,54	-295,38	344,33	-4790,07
Proposal ACP	-32,04	-89,67	104,53	-1454,13
Proposal Selandia Baru	-82,93	-232,09	270,55	-3763,63
	Hortikultura		Pertan_Lain	
Proposal G-20	-81,82	401,09	548,15	1727,14
Proposal UE	-95,46	467,93	639,51	2015
Proposal Australia/AS	-190,92	935,87	1279,03	4029,99
Proposal ACP	-57,96	284,1	388,28	1223,39
Proposal Selandia Baru	-150,01	735,33	1004,95	3166,42
	Kedelai		MinyakNabati	
Proposal G-20	-138,65	-665,3	697,96	-1719,56
Proposal UE	-161,76	-776,19	814,29	-2006,15
Proposal Australia/AS	-323,52	-1552,37	1628,58	-4012,3
Proposal ACP	-98,21	-471,26	494,39	-1218,02
Proposal Selandia Baru	-254,19	-1219,72	1279,6	-3152,52
	Gula_Tebu		OlahMakanan	
Proposal G-20	-121,75	244,33	503,06	843,69
Proposal UE	-142,04	285,06	586,9	984,31
Proposal Australia/AS	-284,09	570,11	1173,8	1968,61
Proposal ACP	-86,24	173,07	356,33	597,61
Proposal Selandia Baru	-223,21	447,95	922,27	1546,77

Selanjutnya, pemotongan tarif dengan beberapa skenario di atas menyebabkan pendapatan rumah tangga di Indonesia dan kelompok Negara Maju Lain akan meningkat, sementara di wilayah yang lain, termasuk kelompok G-33 akan menurun (Tabel 4.34). Laju peningkatan

pendapatan rumah tangga di Indonesia lebih rendah daripada di Negara Maju Lain. Peningkatan pendapatan rumah tangga di Indonesia dan Negara Maju Lain ini juga diikuti oleh peningkatan PDB di Indonesia dan Negara Maju Lain tersebut dan laju persentase peningkatan pendapatan dan PDB hampir sama, sekitar 0,19 – 0,67% di Indonesia dan 0,40 – 1,32% di Negara Maju Lain. Yang menarik juga dilihat dalam tabel ini adalah bahwa pemotongan tarif secara bersamaan di seluruh dunia menyebabkan kesejahteraan di semua negara atau wilayah yang dianalisis meningkat, kecuali bagi AS. Jadi, meskipun pendapatan rumah tangga atau PDB menurun di negara atau wilayah yang dikaji, apabila tarif diturunkan secara bersamaan dengan nilai yang sama, maka kesejahteraan negara atau wilayah yang dianalisis meningkat, kecuali bagi AS.

Ini seharusnya menjadi pendorong bagi semua negara untuk melakukan pemotongan tarif impornya, termasuk Indonesia. Namun, sebelum memutuskan langkah ini dan langkah yang lebih jauh, Indonesia perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap produksi, neraca perdagangan, dan penggunaan sumberdaya pertaniannya, terutama tenaga kerja tak terdidik, mengingat besarnya surplus tenaga kerja tak terdidik di sektor pertanian di Indonesia. Untuk itu masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia.

Selain itu, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap AS, maukah AS melakukannya atau akankah AS mengkompensasikan dampak negatif ini dengan memberi BN kepada petaninya? Apakah ini pertanda bahwa tarif komoditas pertanian di AS telah sangat rendah, sehingga penurunan berikutnya menjadi pemicu turunnya gairah berproduksi dan investasi di bidang produksi pertanian masih perlu dikaji lebih lanjut. Namun, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati, mengingat betapa rumitnya agregasi-agregasi yang harus dilakukan dalam membangun pangkalan data GTAP dan dalam menganalisisnya.

Tabel 4.34. Dampak Pemotongan Tarif dari Beberapa Usulan terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara/Kelompok Negara dan Wilayah

	Pendapatan RT	Nilai PDB	Tingkat Kesejahteraan (EV)
	Perubahan (%)		(dalam juta dolar AS)
Usulan	Indonesia		
Proposal G-20	0,27	0,29	365,36
Proposal UE	0,32	0,34	426,25
Proposal Australia/AS	0,63	0,67	852,51
Proposal ACP	0,19	0,2	258,8
Proposal Selandia Baru	0,5	0,53	669,83

Tabel 4.34. Lanjutan

	Pendapatan RT	Nilai PDB	Tingkat Kesejahteraan (EV)
	Perubahan (%)		(dalam juta dolar AS)
G-33			
Proposal G-20	-0,47	-0,44	5.391,52
Proposal UE	-0,55	-0,51	6.290,1
Proposal Australia/AS	-1,09	-1,02	12.580,2
Proposal ACP	-0,33	-0,31	3.818,99
Proposal Selandia Baru	-0,86	-0,8	9.884,44
Jepang			
Proposal G-20	-0,88	-0,83	4.717,04
Proposal UE	-1,02	-0,97	5.503,22
Proposal Australia/AS	-2,04	-1,94	11.006,44
Proposal ACP	-0,62	-0,59	3.341,24
Proposal Selandia Baru	-1,61	-1,53	8.647,91
Korea			
Proposal G-20	-0,81	-0,71	1.542,87
Proposal UE	-0,94	-0,83	1.800,01
Proposal Australia/AS	-1,89	-1,67	3.600,03
Proposal ACP	-0,57	-0,51	1.092,87
Proposal Selandia Baru	-1,48	-1,31	2.828,6
Amerika Serikat			
Proposal G-20	-0,43	-0,41	-2.028,39
Proposal UE	-0,5	-0,48	-2.366,46
Proposal Australia/AS	-1	-0,96	-4.732,92
Proposal ACP	-0,3	-0,29	-1.436,78
Proposal Selandia Baru	-0,79	-0,76	-3.718,72
Uni Eropa			
Proposal G-20	-0,68	-0,61	1.795,74
Proposal UE	-0,8	-0,71	2.095,03
Proposal Australia/AS	-1,59	-1,41	4.190,06
Proposal ACP	-0,48	-0,43	1.271,98
Proposal Selandia Baru	-1,25	-1,11	3.292,2
Negara Maju Lain			
Proposal G-20	0,57	0,56	5.824,36
Proposal UE	0,66	0,66	6.795,09
Proposal Australia/AS	1,32	1,31	13.590,17
Proposal ACP	0,4	0,4	4.125,59
Proposal Selandia Baru	1,04	1,03	10.677,99
Negara-negara Lain			
Proposal G-20	-0,67	-0,61	12.552,94
Proposal UE	-0,79	-0,71	14.645,11
Proposal Australia/AS	-1,57	-1,42	29.290,21
Proposal ACP	-0,48	-0,43	8.891,67
Proposal Selandia Baru	-1,24	-1,12	23.013,73

Tabel 4.10. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik Negara Maju terhadap Harga Pasar Komoditas (%)

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/ UE	Negara maju lainnya	Indonesia	Negara G-33	Sisa negara lainnya
A. Usulan KN-20										
1.	Lahan	Land	-0,2739	0,8152	-10,0485	-6,1539	1,8931	1,2646	1,0894	2,4402
2.	TK tidak terampil	UnSkLab	0,0215	0,0087	-0,0224	-0,0064	0,02	0,1148	0,0496	0,1069
3.	TK terampil	SkLab	0,022	-0,0038	-0,0009	0,0184	0,0259	0,0212	-0,0035	0,0542
4.	Modal	Capital	0,0217	0,0002	-0,0239	0,0112	0,0199	0,0483	0,0067	0,0664
5.	Sumber daya alam	NatRes	-0,1268	-0,1327	0,1461	-0,0468	-0,0513	-0,2115	-0,2142	-0,2771
6.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	2,4354	0,3923	13,4954	0,1588	0,4783	0,43	0,2437	0,4549
7.	Gandum	Gandum	0,129	0,2878	0,7294	-0,0059	0,6257	0,4948	0,247	0,3864
8.	Sereal lainya	Jagung	1,2227	0,4443	3,2584	-0,1002	2,5461	0,6265	0,29	0,4078
9.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0808	0,2801	1,543	-0,0009	0,4534	0,518	0,2528	0,4607
10.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	22,3287	3,7478	13,2072	20,1044	1,816	2,7711	0,9907	1,72
11.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,0608	0,1004	0,0957	0,0069	0,1482	0,2027	0,183	0,244
12.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,1157	0,7545	1,7653	16,658	0,6969	0,8046	0,374	0,6393
13.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,0686	0,4526	0,0438	0,2286	0,5091	0,2189	0,2506	0,2666
14.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,2777	0,4359	-0,0371	0,0688	0,5138	0,303	0,2902	0,3078
15.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,8945	0,2825	0,775	0,0987	1,4038	0,2294	0,2793	0,3006
16.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1031	0,3798	1,0855	1,0368	0,7222	0,6256	0,3891	0,4792
17.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,7791	5,5549	3,8847	1,9932	1,2969	0,372	0,6105	0,9414
18.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,19	0,4794	0,2407	0,1551	0,1713	0,2113	0,2587	0,2142
19.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0087	-0,0038	0,0187	0,0151	0,0133	-0,0011	0,0026	0,007
20.	Produk industri	Industri	0,0283	0,0248	-0,0032	0,0204	0,0253	0,0672	0,0511	0,0719
21.	Produk jasa	Jasa	0,029	0,0242	-0,0084	0,0182	0,03	0,0738	0,0368	0,079
22.	Barang modal	CGDS	0,0298	0,0264	-0,0008	0,0212	0,0289	0,0654	0,0441	0,0679

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.10. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	Negara G-33	Sisa negara lainnya
B.	Usulan AS									
1.	Lahan	Land	-0,1714	0,5938	-6,9266	-6,4565	2,2257	0,9644	0,8203	1,8893
2.	TK tidak terampil	UnSkLab	0,0178	0,0078	-0,0122	-0,0161	0,0324	0,0901	0,0377	0,0822
3.	TK terampil	SkLab	0,0181	-0,0012	0,0026	0,0095	0,0305	0,0184	-0,0021	0,0419
4.	Modal	Capital	0,0178	0,0016	-0,0133	0,0014	0,0322	0,0403	0,0056	0,0512
5.	Sumber daya alam	NatRes	-0,0961	-0,0991	0,0904	-0,0144	-0,0913	-0,1726	-0,1611	-0,2128
6.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	1,7276	0,2837	9,5496	0,0984	0,3688	0,3283	0,1811	0,344
7.	Gandum	Gandum	0,094	0,2081	0,5285	-0,0614	0,4182	0,3617	0,1842	0,2934
8.	Sereal lainya	Jagung	0,8615	0,3198	2,3242	-0,1464	1,3006	0,4742	0,2118	0,3094
9.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0627	0,2055	1,1219	-0,054	0,3553	0,3955	0,1904	0,3542
10.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	15,792	2,7004	9,4611	18,6757	1,3239	2,0534	0,7413	1,3507
11.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,0477	0,0782	0,08	-0,0108	0,1262	0,1569	0,1389	0,1862
12.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,0881	0,6015	1,3165	15,5663	0,6069	0,6457	0,3067	0,5301
13.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	0,7502	0,3262	0,0377	0,1904	0,3069	0,1647	0,187	0,204
14.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,1981	0,3145	-0,0183	0,0409	0,2971	0,2318	0,2167	0,2353
15.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,6237	0,1999	0,5579	0,0616	0,6938	0,1665	0,2039	0,2282
16.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,0797	0,2866	0,8136	0,924	0,508	0,4915	0,2999	0,3739
17.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,0103	3,996	2,7894	1,8026	0,9657	0,2793	0,4511	0,7161
18.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,1374	0,3451	0,1769	0,1245	0,1261	0,1614	0,192	0,1627
19.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0073	-0,002	0,014	0,0116	0,01	-0,001	0,002	0,0054
20.	Produk industri	Industri	0,0225	0,0195	0,0012	0,0104	0,0282	0,0532	0,0391	0,0553
21.	Produk jasa	Jasa	0,023	0,0189	-0,0024	0,0078	0,0349	0,0585	0,0281	0,0607
22.	Barang modal	CGDS	0,0236	0,0206	0,0029	0,0112	0,0304	0,0516	0,0335	0,052

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.10. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/ UE	Negara maju lainnya	Indonesia	Negara G-33	Sisa negara lainnya
C. Usulan Uni Eropa/UE										
1.	Lahan	Land	-0,216	0,6579	-7,9727	-5,6143	1,8059	1,0352	0,8882	2,0061
2.	TK tidak terampil	UnSkLab	0,018	0,0074	-0,0167	-0,009	0,022	0,0948	0,0405	0,0877
3.	TK terampil	SkLab	0,0184	-0,0026	0,0004	0,0135	0,0247	0,0181	-0,0027	0,0445
4.	Modal	Capital	0,0181	0,0006	-0,0179	0,0068	0,0219	0,0407	0,0056	0,0545
5.	Sumber daya alam	NatRes	-0,1035	-0,108	0,1125	-0,0313	-0,0593	-0,1768	-0,1746	-0,2273
6.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	1,9465	0,3159	10,7937	0,1224	0,3925	0,3521	0,1979	0,3712
7.	Gandum	Gandum	0,1037	0,2315	0,5847	-0,0222	0,492	0,3994	0,2007	0,3157
8.	Serealia lainnya	Jagung	0,9805	0,3575	2,6163	-0,1051	1,8724	0,5117	0,2343	0,3332
9.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0699	0,2266	1,2422	-0,0185	0,3751	0,4241	0,2061	0,3779
10.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	17,8745	3,0164	10,6122	17,5378	1,468	2,2487	0,8062	1,4204
11.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,0501	0,0827	0,0788	0,0003	0,1256	0,1666	0,1495	0,1997
12.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,0981	0,6258	1,4322	14,5605	0,595	0,6686	0,313	0,5369
13.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	0,8568	0,3643	0,0376	0,1922	0,3915	0,1785	0,2038	0,2184
14.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,227	0,351	-0,0268	0,0525	0,3911	0,2483	0,236	0,2521
15.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,7146	0,2261	0,6227	0,0784	1,0217	0,1849	0,2255	0,2456
16.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,0879	0,3098	0,8818	0,8946	0,5766	0,5169	0,3195	0,395
17.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,2395	4,4688	3,1234	1,7229	1,054	0,303	0,495	0,7699
18.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,153	0,3857	0,1948	0,1291	0,1387	0,173	0,21	0,175
19.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0073	-0,0028	0,0152	0,0123	0,0108	-0,001	0,0021	0,0057
20.	Produk industri	Industri	0,0234	0,0205	-0,0014	0,015	0,0236	0,0556	0,0418	0,0589
21.	Produk jasa	Jasa	0,0239	0,0199	-0,0056	0,0129	0,0285	0,0611	0,0301	0,0648
22.	Barang modal	CGDS	0,0246	0,0217	0,0005	0,0157	0,0264	0,0541	0,036	0,0556

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.10. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/ UE	Negara maju lainnya	Indonesia	Negara G-33	Sisa negara lainnya
D. KTM Hongkong (Minimal)										
1.	Lahan	Land	-0,1817	0,5863	-6,988	-5,9104	2,1601	0,9425	0,8023	1,8385
2.	TK tidak terampil	UnSkLab	0,017	0,0074	-0,0133	-0,0132	0,0312	0,0874	0,0368	0,0801
3.	TK terampil	SkLab	0,0174	-0,0015	0,0016	0,0103	0,0296	0,0174	-0,0021	0,0409
4.	Modal	Capital	0,0171	0,0012	-0,0144	-0,0029	0,0311	0,0386	0,0054	0,0499
5.	Sumber daya alam	NatRes	-0,0937	-0,0973	0,0948	-0,0184	-0,0879	-0,1657	-0,1574	-0,2072
6.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	1,7262	0,281	9,5448	0,1017	0,3659	0,3208	0,1781	0,337
7.	Gandum	Gandum	0,0913	0,2052	0,521	-0,0442	0,4122	0,3553	0,1804	0,2864
8.	Serealia lainnya	Jagung	0,8593	0,3165	2,3154	-0,1278	1,2937	0,4641	0,2078	0,3023
9.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0608	0,2026	1,113	-0,0412	0,3484	0,3864	0,1863	0,3453
10.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	15,7877	2,6849	9,424	17,4683	1,302	2,0262	0,7287	1,3129
11.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,0464	0,0764	0,078	-0,007	0,1233	0,1527	0,1356	0,1819
12.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,0863	0,5797	1,2978	14,5412	0,5842	0,6257	0,2946	0,5083
13.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	0,7485	0,3234	0,0346	0,182	0,3028	0,1606	0,1832	0,1989
14.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,1966	0,3117	-0,0214	0,0425	0,2936	0,2262	0,2125	0,2296
15.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,6225	0,1982	0,5552	0,0679	0,6907	0,1628	0,1999	0,2226
16.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,0773	0,2802	0,7997	0,8707	0,4972	0,4764	0,2917	0,3629
17.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	1,9954	3,9752	2,7765	1,6959	0,9513	0,2746	0,445	0,7016
18.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,136	0,342	0,1748	0,1202	0,1237	0,1574	0,1889	0,1591
19.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,007	-0,0021	0,0138	0,0113	0,0099	-0,0009	0,0021	0,0053
20.	Produk industri	Industri	0,0218	0,019	0,0001	0,0114	0,0274	0,0516	0,0382	0,0539
21.	Produk jasa	Jasa	0,0222	0,0184	-0,0035	0,009	0,0338	0,0566	0,0275	0,0592
22.	Barang modal	CGDS	0,0228	0,02	0,0019	0,0121	0,0295	0,0501	0,0328	0,0508

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.10. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/ UE	Negara maju lainnya	Indonesia	Negara G-33	Sisa negara lainnya
E. KTM Hongkong (Maksimal)										
1.	Lahan	Land	-0,2739	0,8152	-10,0485	-6,1539	1,8931	1,2646	1,0894	2,4402
2.	TK tidak terampil	UnSkLab	0,0215	0,0087	-0,0224	-0,0064	0,02	0,1148	0,0496	0,1069
3.	TK terampil	SkLab	0,022	-0,0038	-0,0009	0,0184	0,0259	0,0212	-0,0035	0,0542
4.	Modal	Capital	0,0217	0,0002	-0,0239	0,0112	0,0199	0,0483	0,0067	0,0664
5.	Sumber daya alam	NatRes	-0,1268	-0,1327	0,1461	-0,0468	-0,0513	-0,2115	-0,2142	-0,2771
6.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	2,4354	0,3923	13,4954	0,1588	0,4783	0,43	0,2437	0,4549
7.	Gandum	Gandum	0,129	0,2878	0,7294	-0,0059	0,6257	0,4948	0,247	0,3864
8.	Serealia lainnya	Jagung	1,2227	0,4443	3,2584	-0,1002	2,5461	0,6265	0,29	0,4078
9.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0808	0,2801	1,543	-0,0009	0,4534	0,518	0,2528	0,4607
10.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	22,3287	3,7478	13,2072	20,1044	1,816	2,7711	0,9907	1,72
11.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,0608	0,1004	0,0957	0,0069	0,1482	0,2027	0,183	0,244
12.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,1157	0,7545	1,7653	16,658	0,6969	0,8046	0,374	0,6393
13.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,0686	0,4526	0,0438	0,2286	0,5091	0,2189	0,2506	0,2666
14.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,2777	0,4359	-0,0371	0,0688	0,5138	0,303	0,2902	0,3078
15.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,8945	0,2825	0,775	0,0987	1,4038	0,2294	0,2793	0,3006
16.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1031	0,3798	1,0855	1,0368	0,7222	0,6256	0,3891	0,4792
17.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,7791	5,5549	3,8847	1,9932	1,2969	0,372	0,6105	0,9414
18.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,19	0,4794	0,2407	0,1551	0,1713	0,2113	0,2587	0,2142
19.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0087	-0,0038	0,0187	0,0151	0,0133	-0,0011	0,0026	0,007
20.	Produk industri	Industri	0,0283	0,0248	-0,0032	0,0204	0,0253	0,0672	0,0511	0,0719
21.	Produk jasa	Jasa	0,029	0,0242	-0,0084	0,0182	0,03	0,0738	0,0368	0,079
22.	Barang modal	CGDS	0,0298	0,0264	-0,0008	0,0212	0,0289	0,0654	0,0441	0,0679

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.11. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik Negara Maju terhadap Impor (%)

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
A. Usulan G-20										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	8,4102	4,9269	40,639	-1,7042	-7,2758	-1,0627	-4,2713	-3,8919
2.	Gandum	Gandum	0,4439	0,6776	-0,5103	-0,3277	0,8089	-0,0499	-1,0245	-0,1882
3.	Serealia lainnya	Jagung	0,5023	0,3558	2,1337	-0,1357	0,1281	-1,0104	-1,8757	-1,4032
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,8056	0,9221	1,4869	-0,1932	-0,3535	0,0523	-0,4548	0,1513
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,8972	2,3615	22,6109	9,711	-4,0477	-9,5811	-5,6594	10,2049
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,2299	0,1251	-0,3114	-0,3197	-0,0296	-0,0218	-0,0423	0,0927
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,3752	0,0136	0,8832	-1,1674	-1,2666	-0,2227	-5,4451	-1,9173
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,6778	0,4013	-1,0166	-0,0954	0,3851	-0,3994	-0,2421	0,0179
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,0922	0,3818	-1,0321	-0,1172	0,769	0,1254	0,1821	0,3705
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,1123	1,8267	0,6805	-0,2686	2,2462	-0,7149	-1,8676	-0,6925
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,8521	0,3635	1,4828	0,6714	-0,0951	0,245	-0,4962	-0,2785
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	3,775	8,5836	7,1974	0,9761	-1,4928	-1,7359	-0,7293	-0,8095
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,1091	0,2179	0,0105	-0,0476	-0,1021	-0,0496	0,0263	0,0065
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SektPrimLain	0,0064	0,0147	0,0932	0,0371	0,015	-0,2065	-0,0891	-0,1302
15.	Produk industri	Industri	0,0223	0,0035	-0,1047	0,0013	0,0296	-0,0487	-0,0081	0,023
16.	Produk jasa	Jasa	0,0014	0,0169	-0,0699	-0,0004	0,0186	0,0166	-0,0195	0,0741

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.11. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
B. Usulan AS										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	5,9671	3,4983	28,7082	-1,2542	-5,0969	-0,726	-3,0465	-2,7241
2.	Gandum	Gandum	0,3081	0,4721	-0,2379	-0,2813	0,5609	-0,0395	-0,6802	-0,0484
3.	Serealia lainnya	Jagung	0,3571	0,2535	1,871	-0,1218	-0,3074	-0,6892	-1,0514	-0,9564
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,5881	0,6676	1,0631	-0,1711	-0,2197	0,0556	-0,339	0,1327
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,6436	1,6914	16,1181	9,5818	-2,914	-6,789	-4,1039	-7,4033
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,1779	-0,093	-0,2249	-0,281	0,0069	-0,0151	-0,0333	0,07
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,3143	-0,0129	0,3071	-1,1192	-1,0742	-0,1828	-4,8804	-1,6703
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,21	0,3131	-0,6049	-0,0482	0,2148	-0,197	-0,0871	0,06
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,0715	0,2809	-0,6249	-0,0918	0,4268	0,1061	0,1647	0,297
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,4725	-0,8502	0,8267	-0,1434	1,0204	-0,3346	-0,8028	-0,2189
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,6485	-0,2805	1,054	0,6775	-0,2	0,1834	-0,3667	-0,2483
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,386	6,0751	4,6757	1,0053	-1,3776	-1,3738	-0,5843	-0,6928
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0859	0,1482	0,0003	-0,0384	-0,0611	-0,0364	0,0159	0,0046
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0049	0,0107	0,0642	0,0398	-0,0211	-0,1658	-0,0668	-0,1003
15.	Produk industri	Industri	-0,0158	-0,0033	-0,0736	-0,0001	0,0273	-0,0376	-0,005	0,0187
16.	Produk jasa	Jasa	0,0047	-0,0102	-0,0437	-0,0064	0,0332	0,0172	-0,0126	0,0585

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.11. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
C. Usulan Uni Eropa/UE										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	-6,7404	-3,9445	32,487	-1,3791	-5,8024	-0,8408	-3,4239	-3,1015
2.	Gandum	Gandum	-0,3526	-0,5382	-0,3771	-0,277	0,6418	-0,0413	-0,8013	-0,1206
3.	Serealia lainnya	Jagung	-0,4038	-0,2855	1,83	-0,1172	-0,0308	-0,801	-1,4107	-1,1121
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	-0,6445	-0,7422	1,1902	-0,166	-0,2709	0,0486	-0,3693	0,1298
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,7208	-1,8974	18,1411	8,6527	-3,2559	-7,6744	-4,5636	-8,2301
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,1891	-0,1016	-0,2548	-0,274	-0,0137	-0,0171	-0,0348	0,0757
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,3151	-0,0119	0,5985	-1,0298	-1,0704	-0,1864	-4,6903	-1,6354
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,355	0,3297	-0,7782	-0,0704	0,2907	-0,2936	-0,1684	0,0287
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,0808	0,3087	-0,7932	-0,0968	0,5795	0,1055	0,1565	0,3075
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,227	-1,3131	0,6557	-0,1988	1,6011	-0,5144	-1,3203	-0,4649
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,6923	-0,2983	1,1825	0,607	-0,1212	0,1994	-0,402	-0,2402
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,9307	6,8732	5,6276	0,8834	-1,299	-1,4369	-0,6061	-0,687
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0902	0,1726	0,006	-0,0397	-0,078	-0,0401	0,0201	0,0051
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0053	0,0119	0,0739	0,0342	0,0015	-0,1717	-0,0726	-0,1069
15.	Produk industri	Industri	-0,018	-0,003	-0,0835	0,0007	0,0258	-0,04	-0,0063	0,0192
16.	Produk jasa	Jasa	0,0022	-0,0129	-0,0539	-0,0024	0,0215	0,0151	-0,0152	0,0613

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.11. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
D. KTM Hongkong (Minimal)										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	-5,9594	-3,4952	28,7081	-1,2416	-5,0949	-0,7332	-3,039	-2,7325
2.	Gandum	Gandum	-0,3054	-0,467	-0,2437	-0,2645	0,5453	-0,0383	-0,6761	-0,0621
3.	Sereal lainya	Jagung	-0,3571	-0,2526	1,8638	-0,1151	-0,3123	-0,6921	-1,0505	-0,9594
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	-0,583	-0,6636	1,06	-0,1625	-0,223	0,0496	-0,3353	0,125
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,6422	-1,685	16,0885	8,8477	-2,8991	-6,783	-4,0747	-7,3496
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,1752	-0,0923	-0,2212	-0,2674	0,0056	-0,0165	-0,0337	0,068
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,3021	-0,0123	0,3902	-1,0408	-1,0249	-0,1762	-4,6033	-1,5867
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,2141	0,3141	-0,6011	-0,0498	0,2152	-0,1966	-0,0861	0,0587
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,0732	0,281	-0,6243	-0,0884	0,4243	0,1021	0,1626	0,2896
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,4712	-0,8534	0,813	-0,141	1,0056	-0,3363	-0,812	-0,2353
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,6336	-0,2725	1,0546	0,6228	-0,1758	0,1804	-0,3558	-0,234
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	2,4574	6,0707	4,7852	0,92	-1,2882	-1,3331	-0,5659	-0,6606
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0833	0,1488	0,0025	-0,0374	-0,0603	-0,037	0,0164	0,0044
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0049	0,0107	0,0649	0,0365	-0,0201	-0,1602	-0,0653	-0,0976
15.	Produk industri	Industri	-0,0158	-0,003	-0,0747	0,0001	0,0267	-0,0367	-0,0051	0,0181
16.	Produk jasa	Jasa	0,0035	-0,0107	-0,0457	-0,0051	0,0317	0,0157	-0,0129	0,0566

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.11. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
E. KTM Hongkong (Maksimal)										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	-8,4102	-4,9269	40,639	-1,7042	-7,2758	-1,0627	-4,2713	-3,8919
2.	Gandum	Gandum	-0,4439	-0,6776	-0,5103	-0,3277	0,8089	-0,0499	-1,0245	-0,1882
3.	Serealia lainnya	Jagung	-0,5023	-0,3558	2,1337	-0,1357	0,1281	-1,0104	-1,8757	-1,4032
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	-0,8056	-0,9221	1,4869	-0,1932	-0,3535	0,0523	-0,4548	0,1513
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,8972	-2,3615	22,6109	9,711	-4,0477	-9,5811	-5,6594	-10,2049
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,2299	-0,1251	-0,3114	-0,3197	-0,0296	-0,0218	-0,0423	0,0927
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,3752	-0,0136	0,8832	-1,1674	-1,2666	-0,2227	-5,4451	-1,9173
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,6778	0,4013	-1,0166	-0,0954	0,3851	-0,3994	-0,2421	0,0179
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,0922	0,3818	-1,0321	-0,1172	0,769	0,1254	0,1821	0,3705
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,1123	-1,8267	0,6805	-0,2686	2,2462	-0,7149	-1,8676	-0,6925
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,8521	-0,3635	1,4828	0,6714	-0,0951	0,245	-0,4962	-0,2785
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	3,775	8,5836	7,1974	0,9761	-1,4928	-1,7359	-0,7293	-0,8095
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,1091	0,2179	0,0105	-0,0476	-0,1021	-0,0496	0,0263	0,0065
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0064	0,0147	0,0932	0,0371	0,015	-0,2065	-0,0891	-0,1302
15.	Produk industri	Industri	-0,0223	-0,0035	-0,1047	0,0013	0,0296	-0,0487	-0,0081	0,023
16.	Produk jasa	Jasa	0,0014	-0,0169	-0,0699	-0,0004	0,0186	0,0166	-0,0195	0,0741

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.15. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Produksi Komoditas (%)

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
A. Usulan G-20										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,3139	0,1917	-22,0068	3,3843	7,4567	0,0299	0,2324	0,8494
2.	Gandum	Gandum	1,2747	0,102	-1,9962	0,9174	-1,1638	-0,2947	0,0773	0,0545
3.	Serealia lainnya	Jagung	1,0935	0,6452	-1,1882	0,5961	-0,9075	0,1591	0,2204	0,4396
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0756	-0,0384	-1,2076	0,3959	0,0593	-0,077	-0,0141	-0,0325
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	-13,7594	8,3376	-15,75	-21,5217	16,9033	5,2747	2,5814	9,5431
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,0273	-0,087	-0,028	0,1103	-0,0523	-0,0525	-0,044	-0,0512
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,2889	0,843	-0,5564	-54,3162	3,458	0,6039	0,8555	2,4464
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-1,0128	-0,2979	0,2359	-0,0221	-0,7148	-0,019	0,061	0,0097
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-0,4633	-0,2754	0,2101	0,1027	-0,8096	-0,1413	-0,1188	-0,0767
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-0,3526	0,0581	-0,3158	0,2543	-2,0258	0,58	0,008	0,1024
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1808	0,1826	-0,7208	-0,7151	-0,3119	0,1602	0,3391	0,3683
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,9364	-2,8029	-1,697	-0,7669	0,4212	2,062	0,4852	0,4928
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0823	-0,2777	-0,0854	-0,0043	-0,0773	-0,0496	-0,0874	-0,0273
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,0214	-0,0205	0,0232	-0,0075	-0,0094	-0,0396	-0,0347	-0,0462
15.	Produk industri	Industri	0,0112	0,0301	0,0758	0,045	0,016	-0,168	-0,0753	-0,1607
16.	Produk jasa	Jasa	0,0008	-0,0148	0,0186	0,0141	0,015	-0,0469	-0,0266	-0,0206
17.	Barang modal	CGDS	0,0172	-0,0107	-0,0039	0,0195	0,0197	0,0101	-0,0208	0,0355

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

Tabel 4.15. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
B. Usulan AS										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,2263	0,1336	-15,5463	2,4386	5,2352	0,0177	0,1646	0,595
2.	Gandum	Gandum	0,8802	0,0667	-1,4927	0,7543	-0,6521	-0,2627	0,0469	-0,002
3.	Serealia lainnya	Jagung	0,7414	0,454	-0,8873	0,4348	-0,1054	0,1088	0,1304	0,2907
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,056	-0,0269	-0,8727	0,3405	0,0366	-0,061	-0,0116	-0,0375
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	-9,6356	5,9994	-10,4919	-21,3097	12,8897	3,8931	1,9264	7,5464
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,0182	-0,0636	-0,0236	0,0846	-0,0325	-0,0411	-0,0327	-0,0398
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,2499	0,7913	-0,1063	-51,1089	2,9447	0,5371	0,7801	2,2196
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-0,7223	-0,2223	0,1509	-0,0442	-0,3452	-0,0235	0,0414	0,0021
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-0,3316	-0,2009	0,1384	0,0793	-0,4232	-0,1123	-0,0912	-0,063
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-0,2754	0,0014	-0,2378	0,1417	-0,9019	0,2637	-0,0281	0,0305
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1453	0,1592	-0,4954	-0,7357	0,0293	0,1556	0,2874	0,3166
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,6397	-1,9919	-1,155	-0,7896	0,3914	1,7283	0,4102	0,4416
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0576	-0,1977	-0,0614	-0,0113	-0,0315	-0,0394	-0,0639	-0,0204
14.	ektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,0164	-0,0155	0,0141	-0,0016	-0,0163	-0,0324	-0,0262	-0,0355
15.	Produk industri	Industri	0,0072	0,0215	0,051	0,0509	-0,0278	-0,1361	-0,0569	-0,1246
16.	Produk jasa	Jasa	0,0007	-0,0105	0,0131	0,0147	0,0065	-0,0363	-0,0197	-0,0155
17.	Barang modal	CGDS	0,0138	-0,0071	-0,0013	0,0093	0,0329	0,0099	-0,0157	0,0269

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

Tabel 4.15. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
C. Usulan Uni Eropa/UE										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,2538	0,1526	-17,5928	2,7212	5,9496	0,0227	0,1859	0,6771
2.	Gandum	Gandum	1,0091	0,0789	-1,6107	0,7648	-0,876	-0,2548	0,059	0,0296
3.	Serealia lainnya	Jagung	0,8625	0,5161	-0,9673	0,4815	-0,5485	0,1263	0,1681	0,3455
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0602	-0,0306	-0,9698	0,3367	0,0436	-0,0639	-0,0118	-0,031
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	-10,9832	6,7082	-12,3991	-19,2006	13,8309	4,2754	2,0993	7,8981
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,0216	-0,0703	-0,0226	0,0903	-0,0408	-0,0434	-0,0358	-0,0422
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,2426	0,7371	-0,3485	-47,593	2,926	0,518	0,7412	2,1159
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-0,8161	-0,2419	0,1838	-0,0267	-0,5222	-0,0183	0,0484	0,0064
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-0,3768	-0,2223	0,1649	0,0845	-0,6018	-0,117	-0,0973	-0,0641
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-0,2921	0,0332	-0,2571	0,1889	-1,4395	0,4152	-0,0049	0,0682
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1478	0,1562	-0,5689	-0,6513	-0,1657	0,1423	0,2873	0,3138
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,7425	-2,247	-1,3438	-0,6941	0,3675	1,7382	0,4101	0,4247
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0658	-0,2227	-0,0686	-0,0063	-0,0543	-0,0411	-0,0706	-0,0221
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,0175	-0,0167	0,0178	-0,0047	-0,0107	-0,0331	-0,0283	-0,0379
15.	Produk industri	Industri	0,0088	0,0242	0,0597	0,0423	-0,0001	-0,1401	-0,0614	-0,1322
16.	Produk jasa	Jasa	0,0007	-0,0119	0,0149	0,0129	0,0107	-0,0386	-0,0216	-0,0168
17.	Barang modal	CGDS	0,0142	-0,0084	-0,0026	0,0141	0,0221	0,009	-0,017	0,029

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

Tabel 4.15. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
D. KTM Hongkong (Minimal)										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,2538	0,1526	-17,5928	2,7212	5,9496	0,0227	0,1859	0,6771
2.	Gandum	Gandum	1,0091	0,0789	-1,6107	0,7648	-0,876	-0,2548	0,059	0,0296
3.	Serealia lainnya	Jagung	0,8625	0,5161	-0,9673	0,4815	-0,5485	0,1263	0,1681	0,3455
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0602	-0,0306	-0,9698	0,3367	0,0436	-0,0639	-0,0118	-0,031
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	-10,9832	6,7082	-12,3991	-19,2006	13,8309	4,2754	2,0993	7,8981
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,0216	-0,0703	-0,0226	0,0903	-0,0408	-0,0434	-0,0358	-0,0422
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,2426	0,7371	-0,3485	-47,593	2,926	0,518	0,7412	2,1159
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-0,8161	-0,2419	0,1838	-0,0267	-0,5222	-0,0183	0,0484	0,0064
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-0,3768	-0,2223	0,1649	0,0845	-0,6018	-0,117	-0,0973	-0,0641
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-0,2921	0,0332	-0,2571	0,1889	-1,4395	0,4152	-0,0049	0,0682
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1478	0,1562	-0,5689	-0,6513	-0,1657	0,1423	0,2873	0,3138
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,7425	-2,247	-1,3438	-0,6941	0,3675	1,7382	0,4101	0,4247
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0658	-0,2227	-0,0686	-0,0063	-0,0543	-0,0411	-0,0706	-0,0221
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,0175	-0,0167	0,0178	-0,0047	-0,0107	-0,0331	-0,0283	-0,0379
15.	Produk industri	Industri	0,0088	0,0242	0,0597	0,0423	-0,0001	-0,1401	-0,0614	-0,1322
16.	Produk jasa	Jasa	0,0007	-0,0119	0,0149	0,0129	0,0107	-0,0386	-0,0216	-0,0168
17.	Barang modal	CGDS	0,0142	-0,0084	-0,0026	0,0141	0,0221	0,009	-0,017	0,029

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

Tabel 4.15. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa/UE	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
E. KTM Hongkong (Maksimal)										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,3139	0,1917	-22,0068	3,3843	7,4567	0,0299	0,2324	0,8494
2.	Gandum	Gandum	1,2747	0,102	-1,9962	0,9174	-1,1638	-0,2947	0,0773	0,0545
3.	Serealia lainnya	Jagung	1,0935	0,6452	-1,1882	0,5961	-0,9075	0,1591	0,2204	0,4396
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,0756	-0,0384	-1,2076	0,3959	0,0593	-0,077	-0,0141	-0,0325
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	-13,7594	8,3376	-15,75	-21,5217	16,9033	5,2747	2,5814	9,5431
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-0,0273	-0,087	-0,028	0,1103	-0,0523	-0,0525	-0,044	-0,0512
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,2889	0,843	-0,5564	-54,3162	3,458	0,6039	0,8555	2,4464
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-1,0128	-0,2979	0,2359	-0,0221	-0,7148	-0,019	0,061	0,0097
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-0,4633	-0,2754	0,2101	0,1027	-0,8096	-0,1413	-0,1188	-0,0767
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-0,3526	0,0581	-0,3158	0,2543	-2,0258	0,58	0,008	0,1024
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,1808	0,1826	-0,7208	-0,7151	-0,3119	0,1602	0,3391	0,3683
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,9364	-2,8029	-1,697	-0,7669	0,4212	2,062	0,4852	0,4928
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-0,0823	-0,2777	-0,0854	-0,0043	-0,0773	-0,0496	-0,0874	-0,0273
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,0214	-0,0205	0,0232	-0,0075	-0,0094	-0,0396	-0,0347	-0,0462
15.	Produk industri	Industri	0,0112	0,0301	0,0758	0,045	0,016	-0,168	-0,0753	-0,1607
16.	Produk jasa	Jasa	0,0008	-0,0148	0,0186	0,0141	0,015	-0,0469	-0,0266	-0,0206
17.	Barang modal	CGDS	0,0172	-0,0107	-0,0039	0,0195	0,0197	0,0101	-0,0208	0,0355

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

Tabel 4.16. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia (%)

Usulan/Sumberdaya	Variabel	Padi_Olah	Gandum	Jagung	Horti	Kedelai	Gula_Tebu	Kapas_Rami	Spi_Dmb_Da	Ayam_Telur	Susu_Olahan	Pertan_Lain	Minyak_Nabati	Olah_Makanan	SekPrim_Lain	Industri	Jasa	CGDS	
A. Usulan KN-20																			
1	Lahan	Land	-0,2364	-0,3853	0,0208	-0,1906	4,5999	-0,4761	0,419	0,4174	-0,418	-0,0628	0,0218	0,3373	-0,6583	-0,246	-0,7435	-0,7164	-0,5914
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,2158	-0,2026	0,3008	0,0388	5,9747	0,0493	0,7941	0,0773	0,0021	0,6952	0,3019	2,003	-0,1078	-0,0653	-0,2317	-0,1188	-0,033
3	TK Terampil	SkLab	0,2622	-0,1802	0,3231	0,0612	5,9971	0,1223	0,8164	0,1405	0,0558	0,7604	0,3243	2,1078	-0,003	-0,0465	-0,1137	0,0102	0,0606
4	Modal	Capital	0,2488	-0,1867	0,3167	0,0547	5,9906	0,1012	0,81	0,1222	0,0403	0,7415	0,3178	2,0775	-0,0333	-0,052	-0,1479	-0,0271	0,0336
5	Sumber Daya Alam	NatRes	0,0008	-0,0005	0,0016	0,0005	0,0252	0,0004	0,0036	0,0004	0,0003	0,0013	0,0016	0,0021	0,0002	0	0,0001	0,0002	0,0003
B. Usulan AS																			
1	Lahan	Land	-0,1836	-0,3276	0,005	-0,1471	3,3924	-0,3626	0,3884	0,3232	-0,3213	-0,1605	0,0469	0,3325	-0,501	-0,1895	-0,5688	-0,5448	-0,4484
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,1583	-0,1969	0,2152	0,0268	4,4126	0,0365	0,6903	0,0491	-0,0039	0,3373	0,2671	1,6841	-0,0829	-0,0525	-0,1839	-0,0903	-0,0226
3	TK Terampil	SkLab	0,1938	-0,1797	0,2324	0,044	4,4298	0,0924	0,7074	0,0975	0,0373	0,3873	0,2843	1,7644	-0,0026	-0,0382	-0,0936	0,0086	0,0491
4	Modal	Capital	0,1829	-0,185	0,2271	0,0387	4,4245	0,0752	0,7022	0,0826	0,0247	0,3719	0,279	1,7398	-0,0272	-0,0426	-0,1213	-0,0218	0,0272
5	Sumber Daya Alam	NatRes	0,0006	-0,0006	0,0012	0,0004	0,0186	0,0003	0,0031	0,0003	0,0003	0,0007	0,0014	0,0018	0,0002	0	0,0001	0,0002	0,0002
C. Usulan UE																			
1	Lahan	Land	-0,1947	-0,3276	0,0136	-0,1566	3,7275	-0,3896	0,3643	0,3432	-0,3429	-0,089	0,0279	0,3004	-0,5386	-0,202	-0,6093	-0,586	-0,4833
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,1745	-0,181	0,2417	0,0308	4,8437	0,04	0,6762	0,0603	0,0001	0,5046	0,2594	1,69	-0,0884	-0,0543	-0,192	-0,0972	-0,0261
3	TK Terampil	SkLab	0,2125	-0,1627	0,26	0,0491	4,862	0,0998	0,6946	0,1121	0,0441	0,5581	0,2778	1,776	-0,0025	-0,039	-0,0953	0,0086	0,0506
4	Modal	Capital	0,2013	-0,1681	0,2546	0,0437	4,8566	0,0822	0,6892	0,0968	0,0312	0,5424	0,2724	1,7507	-0,0278	-0,0435	-0,1238	-0,0225	0,028
5	Sumber Daya Alam	NatRes	0,0006	-0,0005	0,0013	0,0004	0,0204	0,0003	0,0031	0,0004	0,0003	0,001	0,0014	0,0018	0,0002	0	0,0001	0,0002	0,0002
D. KTM Hongkong (Minimal)																			
1	Lahan	Land	-0,1785	-0,3159	0,0071	-0,1432	3,3536	-0,3546	0,3684	0,3161	-0,314	-0,1512	0,0375	0,308	-0,4899	-0,1847	-0,5555	-0,5328	-0,4389
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,1566	-0,187	0,2132	0,027	4,36	0,0358	0,661	0,048	-0,0034	0,3397	0,2509	1,6107	-0,0809	-0,0506	-0,1779	-0,0883	-0,0228
3	TK Terampil	SkLab	0,1912	-0,1702	0,2299	0,0437	4,3767	0,0903	0,6777	0,0952	0,0367	0,3885	0,2676	1,6891	-0,0026	-0,0366	-0,0898	0,0082	0,0472
4	Modal	Capital	0,1807	-0,1753	0,2249	0,0386	4,3717	0,0738	0,6726	0,0809	0,0246	0,3737	0,2626	1,6654	-0,0263	-0,0409	-0,1165	-0,021	0,026
5	Sumber Daya Alam	NatRes	0,0006	-0,0005	0,0011	0,0004	0,0184	0,0003	0,003	0,0003	0,0002	0,0007	0,0013	0,0017	0,0002	0	0,0001	0,0002	0,0002
E. KTM Hongkong (Maksimal)																			
1	Lahan	Land	-0,2364	-0,3853	0,0208	-0,1906	4,5999	-0,4761	0,419	0,4174	-0,418	-0,0628	0,0218	0,3373	-0,6583	-0,246	-0,7435	-0,7164	-0,5914
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,2158	-0,2026	0,3008	0,0388	5,9747	0,0493	0,7941	0,0773	0,0021	0,6952	0,3019	2,003	-0,1078	-0,0653	-0,2317	-0,1188	-0,033
3	TK Terampil	SkLab	0,2622	-0,1802	0,3231	0,0612	5,9971	0,1223	0,8164	0,1405	0,0558	0,7604	0,3243	2,1078	-0,003	-0,0465	-0,1137	0,0102	0,0606
4	Modal	Capital	0,2488	-0,1867	0,3167	0,0547	5,9906	0,1012	0,81	0,1222	0,0403	0,7415	0,3178	2,0775	-0,0333	-0,052	-0,1479	-0,0271	0,0336
5	Sumber Daya Alam	NatRes	0,0008	-0,0005	0,0016	0,0005	0,0252	0,0004	0,0036	0,0004	0,0003	0,0013	0,0016	0,0021	0,0002	0	0,0001	0,0002	0,0003

Tabel 4.20. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Harga Pasar Komoditas (%)

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya	
A. Penurunan subsidi ekspor negara maju 50%											
1.	Lahan	Land	2,1917	-0,6282	5,4582	40,5786	-	9,7436	1,2873	2,1128	5,1393
2.	TK tidak terampil	UnSkLab	0,0723	-0,0022	0,1192	-0,3838	0,2903	0,1995	0,1416	0,3254	
3.	TK terampil	SkLab	0,0624	-0,0064	0,1045	-0,2169	0,2067	0,0636	0,0084	0,1534	
4.	Modal	Capital	0,0714	0,0064	0,1218	-0,4027	0,2779	0,1044	0,0395	0,217	
5.	Sumber daya alam	NatRes	-0,367	-0,0357	-0,68	1,0282	-1,1675	-0,5985	0,7015	-	-1,097
6.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,2204	-0,0698	0,6264	0,1189	0,7413	0,5017	0,3665	0,8928	
7.	Gandum	Gandum	0,5849	0,1776	1,7922	-3,3764	1,768	2,3396	0,672	1,342	
8.	Serealia lainnya	Jagung	0,4538	0,2508	1,1377	-2,4902	1,308	0,874	0,6826	1,1147	
9.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,3369	-0,5636	0,9154	-2,705	1,2416	0,6507	0,5476	1,0854	
10.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,3247	0,2403	0,8939	-2,2539	0,9565	0,6912	0,7145	0,8982	
11.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,3621	0,4431	0,2339	-0,2014	0,6341	0,3526	0,4009	0,6905	
12.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,1905	0,0581	0,7564	-1,395	1,1128	0,6515	0,4	0,7565	
13.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	0,3549	0,2053	0,487	0,3596	1,1497	0,5169	0,5904	0,929	
14.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,3172	0,2316	0,413	-0,0089	0,8055	0,6589	0,5652	0,8913	
15.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	0,8408	0,6613	0,3791	-0,0331	0,8717	1,2813	0,9956	1,1679	
16.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,3734	0,0642	0,9749	-2,5525	1,0854	0,433	0,5308	0,9739	
17.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	0,4507	0,6507	0,386	-0,1089	0,5953	0,1883	0,374	0,5564	
18.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,2379	0,3761	0,2072	0,2379	0,4671	0,2861	0,3344	0,5821	
19.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0087	0,0109	-0,023	-0,0463	-0,0296	-0,0449	0,0409	-	-0,0434
20.	Produk industri	Industri	0,0673	0,0265	0,104	-0,2371	0,1704	0,0913	0,0893	0,1748	
21.	Produk jasa	Jasa	0,0756	0,0164	0,1173	-0,2868	0,2462	0,123	0,0836	0,2283	
22.	Barang modal	CGDS	0,0742	0,0278	0,1065	-0,2325	0,1808	0,1045	0,0901	0,1672	

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.20. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
B.	Penurunan subsidi ekspor negara maju 80%									
1	Lahan	Land	3,1565	1,8876	8,633	64,9861	14,8686	2,0575	3,3851	8,2541
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,1153	0,0187	0,1903	-0,6137	0,4533	0,3192	0,2267	0,5214
3	TK Terampil	SkLab	0,1006	-0,0224	0,1668	-0,3471	0,3276	0,102	0,013	0,2452
4	Modal	Capital	0,1143	0,0036	0,1944	-0,6445	0,4382	0,1671	0,0628	0,347
5	Sumber Daya Alam	NatRes	-0,583	-0,0813	-1,089	1,6417	-1,8425	-0,9615	1,1259	-1,7602
6	Padi dan Olahannya	Padi_Olah	0,3335	0,7455	0,9967	0,1905	1,1643	0,8024	0,5877	1,4367
7	Gandum	Gandum	0,9021	0,8934	2,8534	-5,4056	2,7781	3,7339	1,0746	2,1486
8	Serealia lainnya	Jagung	0,6634	0,9916	1,7797	-3,9939	2,2739	1,3874	1,0578	1,7777
9	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	Horti	0,4758	0,6891	1,4619	-4,322	1,5851	1,0408	0,8819	1,7528
10	Biji-bijian Mengandung Minyak	Kedelai	0,4863	1,0189	1,4166	-3,6098	1,4834	1,103	1,1435	1,4395
11	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	Gula_Tebu	0,5733	0,7206	0,3718	-0,3228	0,9931	0,5638	0,6386	1,104
12	Tanaman Jenis Fibers	Kapas_Rami	0,2875	-3,8729	1,1992	-2,233	1,7143	1,0413	0,6419	1,2134
13	Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi, Kambing, Domba dan Kuda	Spi_Dmb_Dag	0,5312	0,6257	0,7703	0,5747	1,8046	0,825	0,9435	1,4876
14	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,4929	0,6195	0,6556	-0,015	1,262	1,0536	0,9043	1,4266
15	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	1,3296	1,2016	0,5989	-0,0537	1,3647	2,0486	1,593	1,8696
16	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,5645	0,7725	1,5442	-4,0877	1,6727	0,6921	0,8499	1,5613
17	Produk Minyak Nabati	MinyakNabati	0,7132	1,0741	0,6124	-0,1747	0,9414	0,3008	0,597	0,8886
18	Produk Makanan Olahan	OlahMakanan	0,3715	0,6715	0,3303	0,381	0,7344	0,4555	0,5344	0,931
19	Sektor Primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0141	0,021	-0,037	-0,0748	-0,0479	-0,0727	0,0662	-0,0703
20	Produk Industri	Industri	0,1076	0,0472	0,1658	-0,3794	0,2677	0,1459	0,1428	0,2797
21	Produk Jasa	Jasa	0,1206	0,0408	0,1872	-0,4589	0,387	0,1966	0,1337	0,3654
22	Barang Modal	CGDS	0,1184	0,0543	0,1699	-0,3721	0,284	0,1671	0,144	0,2676

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.20. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
C. Penurunan subsidi ekspor negara maju 100%										
1	Lahan	Land	3,9459	2,3596	10,792	-81,239	18,5832	2,5719	4,2317	10,3182
2	TK Tidak Terampil	UnSkLab	0,1441	0,0234	0,2378	-0,767	0,5663	0,3989	0,2834	0,6517
3	TK Terampil	SkLab	0,1258	-0,028	0,2084	-0,4338	0,4093	0,1274	0,0163	0,3065
4	Modal	Capital	0,1429	0,0045	0,2429	-0,8054	0,5473	0,2088	0,0785	0,4337
5	Sumber Daya Alam	NatRes	-0,729	-0,1019	-1,361	2,0519	-2,302	-1,2019	1,4075	-2,2003
6	Padi dan Olahannya	Padi_Olah	0,4169	0,9319	1,2459	0,2381	1,455	1,003	0,7347	1,7959
7	Gandum	Gandum	1,1277	1,1168	3,5673	-6,7578	3,4726	4,6681	1,3433	2,686
8	Serealia lainnya	Jagung	0,8292	1,2394	2,2246	-4,9926	2,8416	1,7341	1,3222	2,2222
9	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	Horti	0,5947	0,8614	1,8275	-5,4028	1,9809	1,301	1,1024	2,1911
10	Biji-bijian Mengandung Minyak	Kedelai	0,6079	1,2736	1,7708	-4,5124	1,8538	1,3788	1,4294	1,7994
11	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	Gula_Tebu	0,7166	0,9007	0,4648	-0,4035	1,2411	0,7047	0,7983	1,3799
12	Tanaman Jenis Fibers	Kapas_Rami	0,3594	-4,8403	1,4991	-2,7914	2,1425	1,3016	0,8024	1,5167
13	Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi, Kambing, Domba dan Kuda	Spi_Dmb_Dag	0,6641	0,7821	0,9629	0,7185	2,2554	1,0313	1,1795	1,8595
14	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	0,6161	0,7744	0,8196	-0,0188	1,5771	1,3171	1,1305	1,7833
15	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	1,6621	1,5021	0,7486	-0,0672	1,7052	2,5608	1,9913	2,3371
16	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,7057	0,9656	1,9303	-5,1099	2,0903	0,8651	1,0624	1,9517
17	Produk Minyak Nabati	MinyakNabati	0,8915	1,3427	0,7655	-0,2183	1,1763	0,376	0,7462	1,1108
18	Produk Makanan Olahan	OlahMakanan	0,4644	0,8394	0,4129	0,4761	0,9177	0,5694	0,668	1,1637
19	Sektor Primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0176	0,0262	-0,046	-0,0935	-0,0599	-0,0909	0,0828	-0,0879
20	Produk Industri	Industri	0,1345	0,059	0,2073	-0,4741	0,3344	0,1823	0,1785	0,3496
21	Produk Jasa	Jasa	0,1507	0,0509	0,234	-0,5736	0,4834	0,2457	0,1671	0,4567
22	Barang Modal	CGDS	0,148	0,0679	0,2123	-0,4651	0,3548	0,2088	0,18	0,3345

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.21. Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Impor (%)

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
A. Penurunan eubsidi ekspor negara maju 50%										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	-1,1266	-1,4325	-2,208	-25,222	-2,8075	-0,7383	-1,9906	-0,6111
2.	Gandum	Gandum	-0,6076	-1,2724	1,1134	-39,8524	-7,4087	0,9104	-4,8542	-5,7694
3.	Serealia lainnya	Jagung	0,7851	0,5822	-7,0551	-24,1826	-1,3345	0,0321	-5,0755	-2,1853
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	-2,1117	-1,6357	-0,097	-5,923	-0,229	-0,7335	-0,7105	-0,0149
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	-0,0021	-0,0505	0,6072	-3,4316	0,395	-0,1995	0,1151	0,7981
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-1,5716	0,3726	-2,8485	-28,0973	-8,5563	-3,9881	-4,8701	-2,9822
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,2379	0,0062	0,3032	-2,2802	0,021	-0,2541	-0,1546	0,1499
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-2,3114	-1,5547	-8,3896	-71,4247	-9,4871	-3,7777	-8,6669	-18,2122
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-3,6554	-2,0666	-5,507	-22,0104	-5,5372	-1,777	-5,0351	-6,0219
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-44,972	51,5823	70,0133	-98,3605	-70,5158	-11,6341	-44,396	-47,6245
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,0127	-0,4837	1,5437	-5,8929	3,0707	0,2326	-0,1868	2,8498
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	0,4791	1,0328	0,8503	-2,082	1,0812	-0,3571	-0,0909	0,7346
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-1,4886	-1,4535	-3,4512	-7,2423	-2,869	-0,5839	-2,1525	-2,3526
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0083	0,0597	-0,0866	0,5039	-0,5188	-0,3132	-0,207	-0,4965
15.	Produk industri	Industri	0,0315	-0,0334	0,1271	-0,0286	0,132	-0,102	0,0173	0,1247
16.	ProdukJasa	Jasa	0,1972	0,0666	0,3126	-0,3353	0,4877	0,1886	0,0996	0,3619

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.21. Lanjutan

No	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
B. Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80 %										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	-1,8612	0,3103	-3,5977	-40,3673	-4,5304	-1,2034	-3,1978	-0,956
2.	Gandum	Gandum	-0,9683	-1,2314	1,9027	-63,743	-11,957	1,458	-7,6904	-9,17
3.	Serealia lainnya	Jagung	1,3007	0,8752	-8,598	-38,6712	-1,7787	0,1591	-5,9657	-3,305
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	-1,5192	-0,648	-0,563	-9,5487	-0,8206	-0,8975	-2,0522	-0,3037
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,0023	-0,0322	0,9987	-5,491	0,6256	-0,3097	0,1914	1,2965
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-2,507	0,5524	-4,5508	-44,9494	-13,7048	-6,3732	-7,7908	-4,7677
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,375	-0,2119	0,4776	-3,647	0,0152	-0,4064	-0,3195	0,2481
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-3,7309	-1,9929	-13,3741	-114,277	-15,2076	-5,999	-13,8209	-29,1109
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-5,8573	-3,0248	-8,7778	-35,2083	-8,8899	-2,8832	-8,0473	-9,6251
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-71,9525	-82,0635	-112,013	-157,361	-112,8773	-18,5983	-70,9825	-76,1694
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,0927	0,2565	2,4345	-9,4289	4,8179	0,3603	-0,2772	4,5703
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	0,7534	1,6555	1,3549	-3,3307	1,7191	-0,5678	-0,1454	1,1757
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-2,3923	-2,268	-5,5171	-11,5866	-4,597	-0,9359	-3,4439	-3,7634
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0148	0,0726	-0,138	0,8056	-0,8102	-0,5017	-0,3317	-0,7963
15.	Produk industri	Industri	0,0508	-0,065	0,204	-0,0456	0,2106	-0,1638	0,0268	0,1991
16.	ProdukJasa	Jasa	0,3167	0,115	0,5	-0,5359	0,7724	0,3023	0,1597	0,5795

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.21. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	Variabel	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
C. Penurunan subsidi ekspor negara maju 100%										
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	-2,3264	0,3878	-4,4969	-50,4567	-5,6669	-1,5044	-3,9972	-1,1949
2.	Gandum	Gandum	-1,2106	-1,54	2,3801	-79,6942	-14,9598	1,8217	-9,6152	-11,467
3.	Serealia lainnya	Jagung	1,626	1,0935	-10,7455	-48,332	-2,2287	0,1985	-7,4561	-4,131
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	-1,8991	-0,8102	-0,7038	-11,9366	-1,0272	-1,122	-2,5653	-0,3803
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,0029	-0,0403	1,2489	-6,8628	0,7795	-0,3873	0,2392	1,6205
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	-3,1336	0,6904	-5,6886	-56,1861	-17,1342	-7,9667	-9,7386	-5,9601
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	-0,4686	-0,2648	0,5971	-4,5586	0,0183	-0,5079	-0,3993	0,31
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	-4,6635	-2,4911	-16,718	-142,859	-19,0122	-7,4988	-17,2771	-36,3919
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	-7,324	-3,7826	-10,9805	-44,0201	-11,1188	-3,606	-10,0631	-12,0353
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	-89,9457	-102,585	-140,014	-196,688	141,0987	-23,2508	-88,7352	-95,2109
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	-0,1158	0,3205	3,0435	-11,7851	6,0166	0,4502	-0,3462	5,7127
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	0,9417	2,0691	1,6938	-4,1622	2,1464	-0,7098	-0,1818	1,4695
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	-2,9896	-2,8332	-6,8948	-14,4742	-5,7442	-1,169	-4,3025	-4,7007
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	0,0185	0,0908	-0,1725	1,0069	-1,0123	-0,627	-0,4146	-0,9953
15.	Produk industri	Industri	0,0635	-0,0812	0,255	-0,057	0,263	-0,2047	0,0335	0,2489
16.	ProdukJasa	Jasa	0,3959	0,1437	0,6249	-0,6697	0,9649	0,3778	0,1996	0,7244

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.25. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Produksi Menurut Agregat Komoditas (%)

No.	Nama kelompok komoditas	qo *)	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
A.	Penurunan subsidi ekspor negara maju 50 %									
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,2946	0,34	2,3063	-38,457	3,4004	0,088	0,3391	0,5412
2.	Gandum	Gandum	3,2378	1,1482	5,3219	-23,2159	6,9285	3,6823	1,1498	4,1964
3.	Serealia lainnya	Jagung	1,8387	1,4327	2,4218	-14,9218	2,3384	0,6405	0,9776	2,6292
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,3015	-1,1751	0,3719	-1,1123	0,604	0,1499	0,1863	0,2195
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,359	1,1963	-0,3169	3,0725	0,1247	0,248	0,2869	-0,4372
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,5575	0,546	0,4769	-10,2462	3,4865	0,8045	0,681	1,6651
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,0852	0,7608	-0,3577	5,7987	-1,5264	0,0926	-0,1803	-0,7098
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	1,2758	0,8266	2,0428	-16,612	9,2115	0,8728	1,3482	3,6705
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	1,9223	0,802	1,4581	-5,6915	2,7301	1,2749	0,5814	1,8488
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	3,2386	4,6797	0,5745	-12,3609	5,5764	17,3116	2,7313	7,7743
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	0,659	0,769	-0,9525	3,4754	-1,6632	-0,4558	-0,3242	-0,1722
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,0104	0,1277	0,4039	-0,7512	-0,0282	0,3017	0,0996	0,0324
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,154	0,6307	0,4574	-2,8975	0,715	0,911	0,4973	1,1022
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,0631	-0,0059	-0,111	0,1982	-0,1902	-0,1057	-0,1135	-0,1752
15.	Produk industri	Industri	-0,0693	0,0395	-0,145	0,8341	-0,69	-0,3066	-0,237	-0,6559
16.	Produk jasa	Jasa	-0,0067	-0,038	-0,0016	0,1889	-0,0419	-0,075	-0,0756	-0,0985

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.25. Lanjutan

No.	Nama kelompok komoditas	go *)	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
B.	Penurunan subsidi ekspor negara maju 80 %									
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,4847	0,3159	3,7134	-61,5149	5,5071	0,1421	0,5441	0,8611
2.	Gandum	Gandum	5,1961	1,2633	8,5284	-37,1526	11,334	5,8729	1,8326	6,6876
3.	Serealia lainnya	Jagung	2,6091	1,4513	3,6713	-23,9799	6,6203	0,9995	1,3794	4,1217
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,2326	0,0819	0,6785	-1,6553	-2,4486	0,2416	0,3224	0,4149
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,5912	0,597	-0,4919	4,9137	0,3355	0,392	0,4551	-0,7153
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	0,896	0,8263	0,763	-16,3931	5,6099	1,2868	1,0898	2,6614
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,1466	-11,4675	-0,5544	9,3062	-2,2588	0,148	-0,2825	-1,1418
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	2,0696	1,0431	3,2682	-26,5848	14,8064	1,3923	2,1522	5,8666
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	3,0953	1,0818	2,3363	-9,1059	4,4259	2,0404	0,929	2,9528
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	5,1894	7,3866	0,9218	-19,7798	8,9674	27,6859	4,3669	12,4315
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	1,0672	0,2089	-1,5022	5,5603	-2,4744	-0,7285	-0,5206	-0,2854
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,0097	0,1368	0,6485	-1,2031	-0,0257	0,4805	0,1592	0,0511
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,2528	0,9218	0,7319	-4,6373	1,165	1,459	0,7957	1,7625
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,1005	-0,0134	-0,1777	0,3167	-0,3	-0,1696	-0,1821	-0,2809
15.	Produk industri	Industri	-0,1109	0,037	-0,2317	1,3336	-1,0821	-0,4904	-0,3797	-1,0512
16.	Produk jasa	Jasa	-0,0097	-0,0795	-0,0026	0,3021	-0,0634	-0,1197	-0,1211	-0,158

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.25. Lanjutan

No.	Nama Kelompok Komoditas	qo *)	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara maju lainnya	Indonesia	G-33	Sisa negara lainnya
C.	Penurunan Subsidi ekspor negara maju 100 %									
1.	Padi dan olahannya	Padi_Olah	0,6059	0,3949	4,6414	-76,8904	6,8835	0,1777	0,6801	1,0761
2.	Gandum	Gandum	6,4956	1,5792	10,6631	-46,4524	14,173	7,3428	2,2912	8,3612
3.	Sereal lainya	Jagung	3,2614	1,8139	4,5886	-29,9716	8,2723	1,249	1,724	5,1517
4.	Sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan	Horti	0,2907	0,1024	0,8481	-2,0695	-3,0609	0,3019	0,4029	0,5187
5.	Biji-bijian mengandung minyak	Kedelai	0,7389	0,7463	-0,6151	6,1431	0,4198	0,49	0,5689	-0,8942
6.	Gula dari berbagai tanaman (tebu, bit)	Gula_Tebu	1,12	1,0328	0,9538	-20,4905	7,0109	1,6084	1,3622	3,3265
7.	Tanaman jenis <i>fibers</i>	Kapas_Rami	0,1831	-14,3324	-0,6933	11,6332	-2,8222	0,1848	-0,3532	-1,4273
8.	Ternak hidup dan dagingnya dari sapi, kambing, domba dan kuda	Spi_Dmb_Dag	2,5872	1,304	4,0857	-33,2341	18,5103	1,7405	2,6904	7,3339
9.	Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas	Ayam_Telur	3,8701	1,3525	2,9213	-11,3846	5,5276	2,5513	1,1617	3,692
10.	Susu dan produk olahannya	Susu_Olahan	6,4871	9,2336	1,1522	-24,7215	11,1973	34,6087	5,459	15,5393
11.	Pertanian lainnya	Pertan_Lain	1,334	0,261	-1,878	6,9519	-3,093	-0,9108	-0,6509	-0,357
12.	Produk minyak nabati	MinyakNabati	-0,0121	0,1709	0,8105	-1,5034	-0,034	0,6007	0,1989	0,0638
13.	Produk makanan olahan	OlahMakanan	0,3159	1,1517	0,9145	-5,7929	1,4481	1,823	0,9941	2,2019
14.	Sektor primer lainnya (migas dan pertambangan)	SekPrimLain	-0,1256	-0,0168	-0,2221	0,3958	-0,3748	-0,212	-0,2276	-0,3512
15.	Produk industri	Industri	-0,1386	0,0462	-0,2896	1,6668	-1,3517	-0,613	-0,4746	-1,314
16.	Produk jasa	Jasa	-0,0121	-0,0994	-0,0032	0,3776	-0,0791	-0,1496	-0,1514	-0,1975

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Tabel 4.26. Hasil Simulasi Dampak Penurunan Domestik terhadap Penggunaan Sumberdaya di Indonesia (%)

Usulan/Sumberdaya	qfe*)	Padi_Olah	Gandum	Jagung	Horti	Kedelai	Gula_Tebu	Kapas_Rami	Spi_Dmb_Dag	Ayam_Telur	Susu_Olahan	Pertan_Lain	Minyak Nabati	Olah-Makanan	SekPrim-Lain	Industri	Jasa	CGDS	
A. Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50 %																			
1. Lahan	Land	-0,1795	3,1805	0,4578	0,0186	0,1065	0,0781	-0,0326	0,1861	0,6331	10,6031	-0,5236	-0,4723	-0,1842	-0,3143	-0,7825	-0,7054	0,5221	
2. TK tidak terampil	UnSKLab	0,2702	4,2012	0,8273	0,2832	0,3921	0,9874	0,2197	1,0466	1,6209	18,7551	-0,3886	0,2172	0,8279	-0,1596	-0,3978	-0,1781	0,0437	
3. TK terampil	SkLab	0,3374	4,2336	0,8598	0,3157	0,4245	1,0934	0,2522	1,1384	1,6989	18,8498	-0,3561	0,3693	0,98	-0,1324	-0,2266	0,0092	0,1795	
4. Modal	Capital	0,3172	4,2239	0,8501	0,306	0,4148	1,0616	0,2424	1,1108	1,6755	18,8214	-0,3659	0,3236	0,9344	-0,1406	-0,278	-0,047	0,1388	
5. Sumber daya alam	NatRes	0,0013	0,0183	0,0042	0,002	0,0024	0,0021	0,0017	0,0023	0,0036	0,0277	-0,0008	0,001	0,0015	0	0,0005	0,0007	0,0008	
B. Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80 %																			
1. Lahan	Land	-0,2857	5,0724	0,7101	0,0316	0,1662	0,1256	-0,0522	0,2958	1,014	16,9577	-0,8367	-0,7555	-0,2929	-0,5032	-1,2508	-1,1273	0,8338	
2. TK tidak terampil	UnSKLab	0,4336	6,7009	1,2955	0,4548	0,6217	1,5792	0,351	1,6698	2,5938	29,9943	-0,6211	0,3453	1,3259	-0,2561	-0,6364	-0,2846	0,0708	
3. TK terampil	SkLab	0,5411	6,7528	1,3474	0,5068	0,6736	1,7486	0,403	1,8165	2,7185	30,1457	-0,5692	0,5885	1,5692	-0,2127	-0,3627	0,0149	0,288	
4. Modal	Capital	0,5089	6,7372	1,3319	0,4912	0,658	1,6978	0,3874	1,7725	2,6811	30,1004	-0,5848	0,5156	1,4963	-0,2257	-0,4447	-0,0749	0,2229	
5. Sumber daya alam	NatRes	0,0022	0,0292	0,0067	0,0032	0,0039	0,0033	0,0027	0,0037	0,0058	0,0442	-0,0013	0,0016	0,0025	0	0,0008	0,0011	0,0014	
C. Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100 %																			
1. Lahan	Land	-0,3571	6,3419	0,8872	0,0395	0,2078	0,1568	-0,0653	0,3698	1,2681	21,198	-1,0461	-0,9444	-0,3666	-0,629	-1,5634	-1,4091	1,0423	
2. TK tidak terampil	UnSKLab	0,5419	8,3779	1,6189	0,5685	0,7771	1,9739	0,4387	2,0873	3,2432	37,4943	-0,7766	0,4317	1,6566	-0,3202	-0,7954	-0,3558	0,0885	
3. TK terampil	SkLab	0,6764	8,4428	1,6838	0,6334	0,842	2,1856	0,5036	2,2707	3,399	37,6836	-0,7117	0,7357	1,9607	-0,2659	-0,4533	0,0186	0,3599	
4. Modal	Capital	0,6361	8,4234	1,6644	0,614	0,8225	2,1221	0,4841	2,2157	3,3523	37,6268	-0,7312	0,6446	1,8696	-0,2821	-0,5558	-0,0936	0,2786	
5. Sumber daya alam	NatRes	0,0027	0,0365	0,0083	0,004	0,0048	0,0041	0,0034	0,0047	0,0072	0,0553	-0,0016	0,002	0,0031	0	0,001	0,0013	0,0017	

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

V. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Rangkuman

Dari perkembangan tingkat bantuan domestik yang dianalisis, negara maju memiliki tingkat bantuan domestik lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang terutama AS, UE dan Jepang, dimana AS dan Jepang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Komoditas yang banyak di subsidi oleh tiga negara tersebut adalah biji-bijian mengandung minyak (kedelai), serta padi dan olahannya banyak disubsidi oleh AS sedangkan UE melakukan subsidi pada tanaman jenis *fibers* (serat dan kapas). Sedangkan Indonesia dan negara-negara G-33 cenderung tidak menunjukkan tingkat subsidi yang tinggi. Tingkat subsidi yang dilakukan oleh negara G-33 hanya pada komoditas padi, gandum, biji-bijian mengandung minyak, tanaman jenis serat, dan pertanian lainnya.

Sejauh ini, pemerintah daerah belum menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bantuan dana untuk peremajaan tanaman, pemasaran, penyuluhan, perbaikan saluran irigasi, merupakan bentuk-bentuk bantuan domestik. Hasil pengamatan di provinsi yang dikunjungi menunjukkan tiga jenis bantuan domestik (AMS, kotak hijau, dan kotak biru) yang dikenal dalam kesepakatan WTO, hanya kotak hijau yang banyak dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kinerja sektor pertanian. Dana bantuan domestik yang dimanfaatkan di daerah sebagian besar bersumber dari dana dekonsentrasi yang berasal dari pusat. Ketergantungan daerah akan dana ini masih sangat tinggi mengingat sumber dana APBD I dan APBD II sangat terbatas. Posisi Indonesia yang dapat diusulkan dalam menyikapi notifikasi bantuan domestik yang berkaitan dengan AMS dan kotak hijau adalah: (1) memanfaatkan indikator acuan *de minimis* yang telah disepakati, dan (2) tetap meningkatkan bantuan domestik yang termasuk dalam kotak hijau di dalam APBN yang diberikan ke daerah melalui dana dekonsentrasi.

Hasil simulasi penurunan bantuan domestik di negara maju berdasarkan usulan yang diajukan G-20, AS dan UE serta KTM Hongkong, menunjukkan dampak peningkatan harga-harga seluruh komoditas (masuk dan keluaran pertanian) di Indonesia. Peningkatan harga terbesar terjadi pada harga lahan dan produk biji-bijian mengandung minyak (kedelai), dengan kenaikan masing-masing mencapai lebih dari 1 dan 2%.

Seluruh skenario juga menunjukkan volume impor Indonesia di seluruh jenis komoditas mengalami penurunan, kecuali bagi kelompok hortikultura, ternak lainnya termasuk unggas dan pertanian lainnya. Komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah komoditas biji-bijian mengandung minyak (kedelai), dengan laju berkisar antara 6-9%.

Komoditas lainnya relatif lebih rendah di bawah 1%, kecuali pada skenario KTM Hongkong (maksimum), pada padi dan olahannya (padi), sereal lainya (jagung), dan produk minyak nabati (minyak kelapa, minyak kedelai, CPO, dan lain-lain). Penurunan impor ini selanjutnya berdampak pada penurunan permintaan rumah tangga masyarakat Indonesia atas jenis komoditas di atas. Penurunan tertinggi terjadi pada jenis biji-bijian mengandung minyak (kedelai), dengan laju sekitar 0,4-0,5%. Akibatnya, permintaan rumah tangga cenderung beralih ke produksi domestik, terutama untuk komoditas gandum, jagung, kedelai, tanaman serat dan susu olahan. Namun, permintaan impor rumah tangga meningkat pada kelompok hortikultura, ternak lainnya termasuk unggas dan pertanian lainnya.

Peningkatan harga dan penurunan impor berdampak terhadap peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan tanaman serat di Indonesia, dengan laju antara 0,02 – 5,0% kecuali gandum, hortikultura, gula dan ternak. Selanjutnya ini berdampak terhadap peningkatan penggunaan sumberdaya di Indonesia atas lahan, tenaga kerja (terampil/tidak), modal, dan sumberdaya alam lainnya. Penggunaan sumberdaya untuk kedelai menempati urutan paling tinggi, dengan laju berkisar lebih dari 3-5%, sedangkan penggunaan sumberdaya bagi gandum menurun dan penggunaan lahan untuk padi, tebu, dan ternak besar (sapi) juga menurun.

Hasil simulasi juga memprakirakan bahwa pemotongan bantuan domestik berdampak terhadap peningkatan PDB AS, UE, dan kelompok negara maju lainnya, tetapi penurunan PDB Jepang dan Korea serta negara berkembang/G-33 termasuk Indonesia. Namun demikian, tingkat penurunan PDB Indonesia relatif sangat kecil. Akibat penurunan PDB ini, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga menurun antara 18-22 juta dolar AS.

Perkembangan tingkat subsidi ekspor/subsidi ekspor di negara maju lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang dan di antara kelompok negara maju, UE memiliki tingkat yang lebih tinggi. Komoditas yang banyak di subsidi UE adalah padi dan olahannya, gandum, sereal lainya (jagung), gula, serta ternak besar dan produknya. Sedangkan Indonesia dan negara-negara G-33 cenderung mempunyai tingkat subsidi yang sangat rendah yang dialokasikan umumnya pada komoditas gula, produk minyak nabati, dan makanan olahan.

Hasil simulasi penurunan subsidi ekspor di negara maju berdasarkan usulan yang diajukan G-20, AS, dan UE serta KTM Hongkong menunjukkan bahwa harga-harga seluruh komoditas (masukan dan keluaran) di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan harga terbesar terjadi pada Lahan (3%) dan produk gandum (5%), padi (1%), jagung (2%), kedelai (1%), tanaman serat (1%) dan ternak besar (1%).

Peningkatan harga-harga produk pertanian domestik dan impor di negara berkembang, termasuk Indonesia dan G-33 menyebabkan penurunan permintaan rumah tangga Indonesia atas seluruh produk tersebut. Komoditas yang memiliki penurunan permintaan tertinggi adalah susu dan olahannya, yaitu sebesar 3-5%, sedangkan permintaan rumah tangga atas padi dan kedelai hanya menurun di bawah 1%. Akibat penurunan permintaan, volume impor Indonesia pada hampir seluruh jenis komoditas, kecuali gandum, sereal lainya (jagung), dan pertanian lainya juga mengalami penurunan. Komoditas yang mengalami penurunan impor terbesar adalah gula, ternak dan susu, dengan laju di atas 7-23% (skenario pemotongan bantuan domestik 100% atau penghapusan bantuan domestik). Akibatnya, permintaan rumah tangga masyarakat cenderung beralih pada produksi domestik, seperti pada kedelai, gula, tanaman serat, dan susu. Dari keempatnya, peningkatan permintaan domestik terbesar adalah pada susu, dengan laju 34-68%.

Pemotongan subsidi ekspor juga berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Indonesia, dengan laju antara 0,2 – 35% (skenario pemotongan subsidi ekspor 100 %). Untuk meningkatkan produksi ini, penggunaan sumberdaya Indonesia baik lahan, tenaga kerja (terampil/tidak), modal, dan sumberdaya alam lainya meningkat khususnya untuk kebutuhan produksi susu dengan laju antara 0.03-38%, gandum antara 0,02-8%, dan jagung antara 0.004-2%. Hal yang sama berlaku pula bagi hortikultura, kedelai, gula, dan ternak ruminansia dan unggas, sementara untuk kelompok pertanian lainya, penggunaan semua sumberdaya menurun, sedangkan pada padi dan tanaman serat penggunaan sumber daya lahan saja yang menurun.

Hasil simulasi juga memprakirakan bahwa pemotongan subsidi ekspor berdampak terhadap peningkatan PDB hanya bagi UE, tetapi penurunan PDB bagi negara atau agregasi negara lainya, seperti negara berkembang/G-33 termasuk Indonesia. Namun demikian, tingkat penurunan PDB Indonesia relatif sangat kecil. Akibat penurunan PDB ini, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga menurun antara 68-135 juta dolar AS.

Penghapusan (pemotongan 100%) subsidi ekspor di negara maju menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sebesar 135 juta dolar AS atau setara Rp 1,2 triliun (pada nilai tukar Rp 9.000 per satu dolar AS). Ini sama dengan Rp 5.100 per orang atau kurang dari satu dolar AS, sementara harga, produksi domestik, penggunaan sumberdaya alam dan neraca perdagangan serta permintaan rumah tangga atas produk pertanian domestik meningkat.

Dengan memperbandingkan pengelompokan jenjang tarif dari ke enam usulan yang ada (usulan G-20, usulan Australia, usulan Amerika Serikat, usulan Uni Eropa/UE, usulan negara-negara ACP dan usulan Selandia Baru), terlihat bahwa bagi negara-negara G-33: (1) usulan G-20

atau UE memberikan konfigurasi pengelompokan pos tarif yang hampir merata di setiap jenjang kecuali di Jenjang 4; (2) usulan ACP menyebabkan pos-pos tarif mengerucut ke atas, dengan sebagian besar mengelompok di Jenjang 1 dan sebagian kecil ada di Jenjang 4; (3) usulan penjenjangan Australia, AS dan Selandia Baru hampir sama, yakni ingin mengelompokkan sebanyak mungkin tarif di Jenjang 2 dan 4 dan sesedikit mungkin di Jenjang 3 dan 1.

Bagi Indonesia, perbandingan hasil pengelompokan tarif dari usulan-usulan ini adalah: (1) usulan G-20, UE dan Australia serta UE mengelompokkan sebagian besar pos tarif berada di Jenjang 2, hanya sedikit yang berada di Jenjang 4 dan sedikit sekali berada di Jenjang 1 dan Jenjang 3; (2) usulan negara-negara ACP memberikan konfigurasi hampir 90% dari pos tarifnya berada di Jenjang 1, semakin menurun persentasenya ke jenjang berikutnya; (3) usulan Selandia Baru mengelompokkan pos tarif sebagian besar di Jenjang 2 (hampir 87% dari pos tarifnya), kemudian mengerucut kembali ke tingkat tarif yang lebih tinggi.

Usulan pengelompokan tarif dari G-20 atau UE menyebabkan pos tarif menyebar merata ke Jenjang 1, 2, dan 3, sedangkan usulan Australia, AS, dan Selandia Baru membuat pos tarif mengelompok di lapis 2 dan 4. Usulan Australia/AS mengelompokkan tarif lebih banyak di Jenjang 4, sedangkan usulan Selandia Baru mengelompokkan tarif di Jenjang 2. Sementara itu, usulan kelompok negara-negara ACP memberikan pengelompokan tarif mengikuti piramida.

Usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi G-20 dan kelompok ACP di setiap jenjang, baik bagi Indonesia maupun G-33. Usulan Selandia Baru sedikit memperlambat laju penurunan yang terjadi dari skenario usulan Australia dan AS, usulan G-20 agak lambat penurunannya dan usulan kelompok negara-negara ACP lebih lambat lagi dari usulan G-20 dan UE.

Usulan Kelompok ACP memberikan penurunan tarif yang paling ideal dibandingkan usulan-usulan yang lain, karena sifat pengelompokan tarif yang bagai piramida, berbeda halnya dari usulan G-20 yang merata di Jenjang 1, 2, dan 3, sehingga tingkat tarif setelah penurunan masih sekitar 70 %-80% di atas tingkat tarif skenario G-20. Berhubung negara berkembang, terutama yang ada dalam G-33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS, serta Selandia Baru ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE, apalagi usulan G-20, dan bahkan usulan Kelompok ACP. Oleh karena itu, dengan memperbandingkan hasil-hasil tersebut, usulan kelompok ACP ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga G-33 untuk disetujui. Kalau tidak, G-33 perlu mengkaji usulan penurunan tarif yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan ciri dan kerawanan sektor pertanian dan komoditas-komoditas pertanian andalannya di

negara-negara anggota. Jadi, penetapan penurunan tarif dan sasaran komoditasnya perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi dampaknya terhadap agribisnis komoditas, petani yang terlibat dan masyarakat secara luas.

Akibat dari perbedaan ini adalah usulan Australia, AS, dan Selandia Baru memberikan penurunan tarif yang drastis bagi Indonesia dan G-33 dibandingkan usulan G-20 dan bahkan kelompok negara-negara ACP, dan usulan terakhir ini lebih lambat dibandingkan dari usulan G-20 dan UE. Usulan Kelompok ACP ini memberikan penurunan tarif yang paling ideal dibandingkan usulan-usulan yang lain dan rata-rata tingkat tarif setelah penurunan masih sekitar 70-80% di atas tingkat tarif skenario G-20, yakni 34,6, 51,5, 112,5, dan 133 masing-masing di Jenjang 1, 2, 3, dan 4.

Berhubung negara berkembang, terutama yang ada dalam G-33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia, AS, dan Selandia Baru ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan G-20 dan kelompok negara-negara ACP. Oleh karena itu, dengan membandingkan hasil-hasil tersebut usulan kelompok negara-negara ACP ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga G-33 untuk disetujui. Kalau tidak G-33 perlu mengkaji secara saksama modalitas ini untuk mendapatkan suatu usulan yang lebih tepat mewakili G-33.

Pemotongan tarif impor tidak serta-merta menunjukkan arah yang sama dampaknya terhadap produksi komoditas pertanian di Indonesia dan di G-33. Produksi hampir semua komoditas pertanian Indonesia (padi, jagung, kedelai, sayuran dan kelapa, Gula, dan ruminansia) akan menurun, kecuali untuk komoditas unggas, pala dan vanili, minyak nabati dan kakao, sementara untuk G-33 produksi padi, sayuran dan kelapa, gula, pala dan vanili dan kakao meningkat, tetapi produksi komoditas lain menurun, yakni jagung, kedelai, komoditas peternakan dan minyak nabati.

Semua skenario penurunan tarif juga menunjukkan bahwa permintaan atau penggunaan masukan, terutama lahan, tenaga kerja tak terdidik dan modal akan menurun pula bagi komoditas-komoditas ini, tetapi bagi komoditas yang produksinya meningkat, permintaan akan masukan juga meningkat. Besarnya penurunan atau peningkatan penggunaan masukan sejalan dengan besaran penurunan tarif dari masing-masing proposal.

Penurunan produksi beberapa komoditas pertanian di Indonesia juga menyebabkan defisit neraca perdagangan, kecuali bagi komoditas yang laju produksinya positif seperti komoditas yang disebutkan di atas, yakni komoditas unggas, pala dan vanili, minyak nabati dan kakao, sementara untuk G-33 terjadi surplus perdagangan untuk padi, sayuran

dan kelapa, gula, pala dan vanili dan kakao meningkat, tetapi defisit bagi komoditas lain, yakni jagung, kedelai, komoditas peternakan dan Minyak_Nabati.

Pada keadaan sama-sama terjadi defisit perdagangan, nilai defisit perdagangan Indonesia jauh lebih kecil daripada G-33 dan pada keadaan sama-sama terjadi surplus perdagangan, nilai surplus Indonesia juga lebih kecil daripada G-33.

Semua skenario pemotongan tarif menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di Indonesia dan negara maju lain akan meningkat, sementara di wilayah yang lain, termasuk kelompok G-33 akan menurun. Laju peningkatan pendapatan rumah tangga di Indonesia lebih rendah daripada di kelompok negara maju lain. Peningkatan pendapatan rumah tangga di Indonesia dan negara maju lain ini juga diikuti oleh peningkatan PDB di Indonesia dan negara maju lain tersebut dan laju persentase peningkatan pendapatan dan PDB hampir sama. Namun, analisis menunjukkan bahwa pemotongan tarif secara bersamaan menyebabkan kesejahteraan di semua negara atau wilayah yang dianalisis meningkat, kecuali bagi AS.

5.2. Implikasi Kebijakan

Dalam menyikapi usulan notifikasi bantuan domestik, pemerintah sebaiknya fleksibel didalam pengalokasian bantuan-bantuan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah melalui dana dekonsentrasi. Sampai saat ini Negara Maju juga sangat memanfaatkan KH untuk membantu petaninya. Kendala yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terbatasnya anggaran pemerintah sehingga alokasi dana dekonsentrasi dari pusat untuk daerah sangat terbatas jumlahnya.

Akibat dan implikasi dampak penurunan subsidi domestik/SD atau bantuan domestik/bantuan domestik serta subsidi ekspor/subsidi ekspor memiliki perbedaan yang hakiki di dalam suatu sektor dan antar-sektor. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa negara maju akan mudah melakukan tekanan-tekanan di berbagai sektor, sehingga pemerintah hendaknya waspada terhadap perubahan-perubahan usulan yang diinginkan baik yang berasal dari negara G-20 maupun negara maju.

Dalam kaitannya dengan penghapusan subsidi ekspor yang dijadwalkan pada tahun 2013, Indonesia seyogianya memaksimalkan kekuatan potensi dalam negeri saat ini untuk pengembangan komoditas pertanian dalam negeri melalui konsolidasi dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan sektor pertanian di dalam negeri dan kemampuan negosiasi di forum internasional untuk merealisasikan penghapusan subsidi ekspor seperti dijadwalkan.

Tampaknya seluruh skenario yang dianalisis bermuara pada kesimpulan bahwa produksi komoditas-komoditas yang saat ini masih

lambat perkembangannya akan mengalami peningkatan, yakni antara lain kedelai dan susu dan olahannya, sementara cakupan/spektrum komoditas yang produksinya meningkat lebih banyak ditawarkan oleh kebijakan pemotongan subsidi ekspor dari pada pemotongan bantuan domestik. Artinya, pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berupaya sedemikian rupa agar Indonesia dapat memiliki sistem pertanian kedelai dan susu yang kuat, kompetitif, dan efisien. Untuk itu diperlukan antara lain dukungan penelitian, pembangunan sarana dan prasarana pertanian di sektor hulu dan hilir komoditas ini.

Selain itu, perhatian terhadap konversi lahan pertanian tetap menjadi perhatian utama pada masa yang akan datang, karena kompetisi lahan semakin besar. Departemen Pertanian hendaknya melakukan koordinasi dengan departemen, badan pemerintahan terkait agar penggunaan lahan diarahkan pada peruntukan yang semestinya. Ini dapat dijadikan agenda utama oleh pemerintah seiring dengan program-program yang sedang berjalan.

Peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan di Indonesia dan negara maju lain akibat pemotongan tarif seharusnya menjadi pendorong bagi negara-negara di dunia untuk berusaha mengurangi tingkat tarif impornya, termasuk Indonesia. Namun, sebelum memutuskan langkah lebih jauh Indonesia perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap produksi, neraca perdagangan, dan penggunaan sumberdaya pertaniannya, terutama tenaga kerja tak terdidiknya, mengingat besarnya surplus tenaga kerja ini di sektor pertanian di Indonesia. Untuk itu, masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil simulasi GTAP, skenario penghapusan bantuan domestik dan subsidi ekspor pada umumnya tidak berdampak kepada penurunan PDB yang cukup nyata. Dampak yang ditimbulkan hanya memicu kenaikan harga komoditas pertanian yang mengalami penurunan bantuan domestik atau subsidi ekspor, sedangkan dari sisi pendapatan petani di negara maju masih tetap memperoleh pendapatan yang meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia seyogyanya bahu membahu dengan negara berkembang untuk mendesak negara maju menghapuskan bantuan domestik. Jika Indonesia masih menghendaki kebijakan bantuan domestik, hendaknya mulai sekarang harus dipikirkan %tase besaran yang akan diberikan maksimal hingga tingkat *de minimis* (kurang lebih 10% dari nilai output).

Prakiraan nilai besaran bantuan domestik di dalam negeri dalam beberapa terakhir sudah dilakukan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tetapi masih sangat kasar, padahal angka-angka ini sangat diperlukan untuk dilaporkan ke Markas WTO sebagai suatu kewajiban anggota WTO. Kendala terbesar yang dihadapi adalah belum adanya aturan dan lembaga yang secara khusus mendapat mandat

menghimpun dan menganalisis informasi dan data mengenai hal ini. Data dan informasi masih tersebar di beberapa departemen teknis, terlebih di tingkatan yang lebih mikro dan ketersediaan dan akses kepada data ini masih sangat jauh dari memuaskan. Dampak desentralisasi menjadi salah satu penyebab tidak dilaporkannya data sejenis oleh instansi teknis di daerah. Untuk menindaklanjuti perkembangan kebijakan yang terjadi dalam sidang-sidang WTO, ketersediaan informasi dan data pendukung yang berkaitan dengan alokasi dana pemerintah untuk beragam kegiatan pembangunan pertanian, yang berkaitan dengan bantuan domestik sangat dibutuhkan dan mudah diakses secara tepat waktu (*real time*). Upaya menghitung bantuan domestik secara keseluruhan hendaknya dapat dijadikan agenda penelitian setiap tahun dari kelompok Peneliti Perdagangan.

Implikasi dari hasil temuan ini adalah penggunaan model GTAP dalam menganalisis komoditas pertanian harus diterjemahkan secara lebih hati-hati dalam menginterpretasikan hasil analisis, selain itu, data tentang bantuan domestik dan subsidi ekspor yang ada pada basis data GTAP belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dilakukan oleh masing-masing negara anggota WTO. Oleh karena itu, negara berkembang harus mendesak negara maju agar data yang diberikan adalah data yang sebenarnya. Pendisiplinan terhadap bantuan domestik harus dilakukan agar negara maju tidak dengan mudah memindahkan subsidi mereka dari satu kotak ke kotak lainnya. Ini tentu harus berdasarkan data yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pihak Pemerintah Daerah masih belum memahami perkembangan kebijakan perdagangan internasional, untuk definisi-definisi yang paling mendasar pun belum mereka kuasai. Di sisi lain aparat pemerintah di daerah merupakan pelaksana kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah di Tingkat I dan II mengenai perkembangan kebijakan perdagangan internasional yang telah disepakati di tingkat nasional maupun internasional. Pemahaman yang seksama akan membuat aparat pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten dapat berperan dalam memberikan advokasi kepada pelaku sektor pertanian di daerah.

Fokus utama dalam penelitian ini, lebih memusatkan perhatian pada dampak penghapusan bantuan domestik dan subsidi ekspor di negara maju, di dalam kesempatan yang lain mungkin perlu pula dianalisis dampak yang ditimbulkan jika penghapusan bantuan domestik di negara berkembang, misalnya di Indonesia sendiri. Rekomendasi ini juga menjadi usul agenda penelitian lanjutan dari penelitian yang saat ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, Phillip and Linda M. Young. 2003. Export Competition Issues in the Doha Round. Paper Presented at the International Conference "Agricultural Policy Reform and the WTO : Where are We Heading. Capri (Italy) 23 – 26 Juni 2003.
- Actionaid, Caritas, CIDSE & Oxfam, 2005, Green But Not Clean, Why a Comprehensive Review of Green Box Subsidies is Necessary, Joint NGO Briefing Paper.
- Bustami, G. 2005. Perkembangan Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia. Makalah disampaikan pada Workshop Forum WTO "Menyusun Posisi Pembangunan Strategis pada KTM VI WTO di Hongkong, Jakarta, 5-6 September 2005. Tidak dipublikasikan.
- Bursfisher, E.M. 2001. Agricultural Policy Reform in the WTO – The Road Ahead. Market and Trade Economics Division, Economic Research Services, U.S. Department of Agriculture. Agricultural Report No. 802.
- Brulhart, Marius. 2002. Marginal Intra – Industry Trade: Towards A Measure of Non-Disruptive Trade Expansion. Ecole des HEC. University of Lausanne. Switzerland. www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers (on line). 18 Mei 2005.
- Cheng, I-Hui and H.J. Wall. 2005. Controlling for Heterogeneity in Gravity Models of Trade and Integration. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Das, B.L. 1998. WTO : The Doha Agenda. The New Negotiations on World Trade. Zed Book Ltd, London.
- FAO. 2003. WTO Agreement on Agriculture: The Implementation Experience-Developing Country Case Studies. Commodity Policy and Projections Service Commodities and Trade Division. Rome.
- FAO. 2004. Domestic Support : Trade Related Issues and Empirical Evidence. FAO Trade Policy Technical Notes on Issues Related to the WTO Negotiations on Agriculture. Rome. www.fao.org. (diakses Novembe 2006).
- Hans G. Jensen and Wusheng Yu. 2005. Reforming Agricultural Domestic Support of the EU in the Doha Round: Measurement, Feasibility, and Consequences. Institute of Food and Resource Economics. The Royal Veterinary and Agricultural University. Copenhagen. Denmark.
- Hertel, W.T. 1997. Global Trade Analysis : Modeling and Applications. Cambridge University Press.

- Hutabarat. B., M. Husein Sawit, Supriyati, Bambang Rahmanto, Adi Setyanto dan Helena J. Purba, 2005. Penyusunan bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral. Laporan Akhir. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Hutabarat, B., M.H. Sawit, A. Setiyanto, Helena J. Purba, Sri Nuryanti, dan Juni Hestina. 2006. Analisa Perubahan dan dampak Perdagangan Bebas Regional dan Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral di Sektor Pertanian. Laporan Akhir. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang. Departemen Pertanian. Bogor.
- IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy). 1987. The New Blue Box: A Step back for Fair Trade. www.IATP.org. (diakses September 2006). y
- ICTSD, Agriculture Update: G-33 Meeting in Jakarta; Proposals for Tighter Green Box, Bridges, Weekly Trade news Digest, 15 June 2005
- Khor, M. 2003. The WTO Agriculture Agreement : Features, Effects, Negotiations, and Suggested Changes. TWN. Malaysia
- Kompas. 2006. Peluang ASEAN dan Indonesia di Pasar Eropa. 28 Oktober 2006. Jakarta.
- Mogens Buch-Hansen. 2001. The WTO Agreement on Agriculture and Its Impact On Developing Countries. Roskilde University, Denmark. www.GlobAsia.dk. (diakses Oktober 2006).
- Oxfam International. 2005. Analysis of Recent Proposals in WTO Agricultural Negotiations. Media brief. November 2005.
- Oxfam International. 2005. A Round for Free. How Rich Countries Are Getting A Free Ride on Agricultural Subsidies at The WTO. June 2005.
- OECD. 2000. Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation. OECD Seretariat, Paris.
- Poonyth, Daneswar, and Ramesh Sharma, 2003. The Impact of The Doha Development Round of Trade Negotiations on Developing Countries: Results From ATPSM. Commodity Market Review 2003-2004. FAO, Rome.
- Priyono. H. 2006. Dalam Sewindu Reformasi. Hardianto, B.J.S. Indonesia di Tengah Globalisasi. Kompas-edisi Sabtu, 3 Juni 2006, halaman 8. Kompas-Gramedia, Jakarta, Indonesia
- PTRI. 2005. Laporan Pertemuan Cairns Group dan G-20 di Jenewa pada tanggal 25 – 27 September 2005. Genewa.

- Rae, A.N., and Strutt, A. 2003. The Current Round of Agricultural Trade Negotiations: Should We Bother About Domestic Support? *International Law and Trade Policy*. The Estey Centre Journal. Volume 4 Number 2, 2003/p.98-122. Canada.
- Roman Keeney and Thomas W. Hertel. 2005. *GTAP-AGR : A Framework for Assessing the Implications of Multilateral Changes in Agricultural Policies*. GTAP Technical Paper No.24.
- Sawit. M.H, 2003, Kegagalan Perundingan Pertanian WTO di Cancun: Peluang atau Ancaman Buat Ekonomi Rakyat, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol 8.
- Tay, S. S.C., J. Estanislao, and H. Soesastro. 2000. *A New ASEAN In A New Millennium*. CSIS. Jakarta.
- UNCTAD. 2003. *An Analysis of The Agricultural Domestic Support Under The Uruguay Round Agreement On Agricultural : The Blue Box*. www.unctad.org (diakses Oktober 2006)
- World Bank. 2006a. *Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda*. World Bank Policy Research Working Paper 3607, May 2005. www.worldbank.org. (diakses September 2006).
- World Bank. 2006b. *Doha Merchandise Trade Reform: What's at Stake for Developing Countries?* World Bank Policy Research Working Paper 3848, February 2006. www.worldbank.org. (diakses September 2006).
- WTO. 2003. *Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text, Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2)*, 13 September 2004.
- WTO. 2004. *WTO Agriculture Negotiations: the issues and where we are now*, updated 1 March 2004. www.wto.org. (diakses Oktober 2006).
- WTO. 2005. *Doha Work Programme: Ministerial Declaration (Draft)*. Ministerial Conference (WT/MIN (05)/W/3/Rev.2). Sixth Session Hong Kong, 13-18 December 2005.

Lampiran Tabel L1. Cakupan Produk Pertanian menurut Perjanjian Pertanian, Organisasi Perdagangan Dunia/*Agreement on Agriculture, World Trade Organization* 1994

BAB	PENJELASAN
BAGIAN I	BINATANG HIDUP; PRODUK HEWANI
Bab 01	Binatang hidup
Bab 02	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan
Bab 04	Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
Bab 05	Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
BAGIAN II	PRODUK NABATI
Bab 06	Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi akar dan sejenisnya; bunga potong dan daun ornament
Bab 07	Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan
Bab 08	Buah dan biji/kacang yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk dan melon
Bab 09	Kopi, teh, mate dan rempah-rempah
Bab 10	Serealia
Bab 11	Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum
Bab 12	Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak
Bab 13	Lac; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya
Bab 14	Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
BAGIAN III	LEMAK DAN MINYAK HEWANI ATAU NABATI SERTA PRODUK DISOSIASINYA; LEMAK OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN; MALAM HEWANI ATAU MALAM NABATI
Bab 15	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati
BAGIAN IV	BAHAN MAKAN OLAHAN; MINUMAN, ALKOHOL DAN CUKA; TEMBAKAU DAN PENGGANTI TEMBAKAU DIPABRIKASI
Bab 16	Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya
Bab 17	Gula dan kembang gula
Bab 18	Kakao dan olahan kakao
Bab 19	Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu; produk industri kue
Bab 20	Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman
Bab 21	Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan

BAB	PENJELASAN
Bab 22	Minuman , alkohol dan cuka
Bab 23	Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan
Bab 24	Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi
Bab 29	Bahan kimia organik
	2905 Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
	2905.43 Mannitol
	2905.44 D-glucitol (sorbitol)
Bab 33	Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias
	3301 Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolute; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, atau dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaina bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri
Bab 35	Zat albumina ; pati dimodifikasi ; perekat ; enzim
	3501 Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya, dan perekat kasein
	3502 Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya
	3503 Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai atau tidak) dan turunan gelatin; insinglass; perekat lain dari hewan, tidak termasuk perekat kasein dari pos 35.01
	3504 Peptone dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun
	3505 Dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi atau yang diesterifikasi); perekat yang dibuat dari pati atau dekstrin atau pati yang dimodifikasi lainnya
Bab 38	Aneka produk kimia
	3809 Bahan untuk penyempurnaan, pembawa bahan celup untuk mempercepat proses pencelupan, atau pengolahan bahan celup dan produk serta preparat lainnya (misalnya, dressing dan mordant) dari jenis yang digunakan dalam industri tekstil, kertas, kulit samak, atau industri sejenis, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
	3809.10 dengan zat dasar bersifat seperti pati

BAB	PENJELASAN
BAGIAN VIII	JANGAT DAN KULIT MENTAH, KULIT SAMAK, KULIT BERBULU DAN BARANG DARIPADANYA; SADDLERY DAN HARNESS; BARANG UNTUK BEPERGIAN TAS TANGAN DAN KEMASAN SEMACAM ITU; BARANG DARI USUS BINATANG (SELAIN BENANG ULAT SUTERA)
Bab 41	<p>Jangat dan kulit mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak</p> <p>4101 Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak</p> <p>4102 Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda (segar atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), mengandung wol atau dibelah atau tidak, selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (c) pada bab ini</p> <p>4103 Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau asin, kering dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut) dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab ini</p>
Bab 43	<p>Kulit berbulu dan bulu tiruan; barang daripadanya</p> <p>4301 Kulit berbulu, mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah dari pos 41.01, 41.02, atau 41.03</p>
BAGIAN XI	TEKSTIL DAN BARANG TEKSTIL
Bab 50	<p>Sutera</p> <p>5001 Kepompong ulat sutera cocok untuk digulung</p> <p>5002 Sutera mentah (tidak dipintal)</p> <p>5003 Sisa sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnatted Stock)</p>
Bab 51	<p>Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan</p> <p>5101 Wol, tidak digaruk atau disisir</p> <p>5102 Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir</p> <p>5103 Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnatted Stock</p>
Bab 52	<p>Kapas</p> <p>5201 Kapas, tidak digaruk atau disisir</p> <p>5202 Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnatted Stock)</p> <p>5203 Kapas, digaruk atau disisir</p>
Bab 53	Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenun dari benang

BAB	PENJELASAN
kertas	
5301	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; towlena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnatted Stock)
5302	True hemp (cannabis sativa L.) mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow; dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnatted Stock)

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161 Indonesia, Telp. 0251-333964, Faks. 0251-314496
E-mail: caser@indosat.net.id, publikasi_psekp@yahoo.co.id
Website: <http://pse.litbang.deptan.go.id>